



YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK



PENELITIAN dalam **ILMU** **HUKUM**



Dr. Agus Wibowo, M.Kom, M.Si, MM.

PENELITIAN dalam ILMU HUKUM

Dr. Agus Wibowo, M.Kom, M.Si, MM.

BIO DATA PENULIS



Penulis memiliki berbagai disiplin ilmu yang diperoleh dari Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang. dan dari Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga. Disiplin ilmu itu antara lain teknik elektro, komputer, manajemen dan ilmu sosiologi. Penulis memiliki pengalaman kerja pada industri elektronik dan sertifikasi keahlian dalam bidang Jaringan Internet, Telekomunikasi, Artificial Intelligence, Internet Of Things (IoT), Augmented Reality (AR), Technopreneurship, Internet Marketing dan bidang pengolahan dan analisa data (komputer statistik).

Penulis adalah pendiri dari Universitas Sains dan Teknologi Komputer (Universitas STEKOM) dan juga seorang dosen yang memiliki Jabatan Fungsional Akademik Lektor Kepala (Associate Professor) yang telah menghasilkan puluhan Buku Ajar ber ISBN, HAKI dari beberapa karya cipta dan Hak Paten pada produk IPTEK. Sejak tahun 2023 penulis tercatat sebagai Dosen luar biasa di Fakultas Ekonomi & Bisnis (FEB) Universitas Diponegoro Semarang. Penulis juga terlibat dalam berbagai organisasi profesi dan industri yang terkait dengan dunia usaha dan industri, khususnya dalam pengembangan sumber daya manusia yang unggul untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja secara nyata.



YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK

PENERBIT :

YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK
Jl. Majapahit No. 605 Semarang
Telp. (024) 6723456. Fax. 024-6710144
Email : penerbit_ypat@stekom.ac.id

PENELITIAN dalam ILMU HUKUM

Penulis :

Dr. Agus Wibowo, M.Kom, M.Si, MM.

ISBN :

Editor :

Dr. Joseph Teguh Santoso, S.Kom., M.Kom.

Penyunting :

Dr. Mars Caroline Wibowo. S.T., M.Mm.Tech

Desain Sampul dan Tata Letak :

Irdha Yuniato, S.Ds., M.Kom

Penebit :

Yayasan Prima Agus Teknik Bekerja sama dengan
Universitas Sains & Teknologi Komputer (Universitas STEKOM)

Anggota IKAPI No: 279 / ALB / JTE / 2023

Redaksi :

Jl. Majapahit no 605 Semarang

Telp. 08122925000

Fax. 024-6710144

Email : penerbit_ypat@stekom.ac.id

Distributor Tunggal :

Universitas STEKOM

Jl. Majapahit no 605 Semarang

Telp. 08122925000

Fax. 024-6710144

Email : info@stekom.ac.id

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara
apapun tanpa ijin dari penulis

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku berjudul *Penelitian Dalam Ilmu Hukum*. Buku ini hadir sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai metodologi penelitian dalam ranah ilmu hukum, baik dari sisi historis, teoritis, hingga aplikatif dalam menjawab berbagai persoalan hukum yang berkembang di masyarakat.

Buku ini terdiri dari sembilan bab yang disusun secara sistematis. Bab pertama membahas sejarah penelitian hukum, menelusuri perkembangan pemikiran mulai dari realisme hukum, kriminologi, hingga hubungan hukum dengan berbagai disiplin ilmu seperti antropologi, psikologi, ekonomi, politik, dan civilology. Bab kedua mengulas masalah sosial dan tipologi pertanyaan penelitian, serta membedakan antara masalah penelitian yang memadai dan kurang memadai. Bab ketiga menyoroti teori dan penelitian hukum empiris, termasuk penjelasan tentang teori penjelasan dan intervensi, serta kriteria pengujian teori.

Selanjutnya, Bab keempat membahas tinjauan dan sintesis penelitian, dari studi pustaka tradisional hingga tinjauan sistematis, serta hubungan antara teori dan kajian penelitian. Bab kelima mengupas desain penelitian, jenis-jenis desain dalam penelitian hukum empiris, dan kriteria penilaian kecukupan desain. Bab keenam memaparkan metode pengumpulan data, unit analisis, operasionalisasi, serta pentingnya triangulasi metode campuran dan kriteria mutu data.

Bab ketujuh menguraikan analisis dan visualisasi data kuantitatif dan kualitatif, termasuk teknik analisis big data dan penggabungan analisis kualitatif serta kuantitatif. Bab kedelapan membahas penyampaian temuan penelitian, transfer pengetahuan, kesenjangan nilai-fakta, dan hukum sebagai disiplin argumentatif. Terakhir, Bab kesembilan menyoroti perkembangan penelitian hukum empiris, revolusi empiris dalam hukum, pertumbuhan pengetahuan, dan pemeriksaan ulang bukti.

Penulis menyadari bahwa penyusunan buku ini tidak lepas dari dukungan, bimbingan, dan masukan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada keluarga, rekan sejawat, para akademisi, serta semua pihak yang telah memberikan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penulisan dan penyelesaian buku ini.

Penulis juga menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan dan penyempurnaan di masa mendatang. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat, memperluas wawasan, dan menjadi referensi yang berguna bagi mahasiswa, peneliti, praktisi, serta semua pihak yang berkecimpung dalam bidang ilmu hukum.

Semarang April 2025

Penulis

Dr. Agus Wibowo, M.Kom, M.Si, MM.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB 1 SEJARAH PENELITIAN HUKUM	1
1.1. Realisme Hukum Dan Realisme Hukum Baru	1
1.2. Kriminologi	4
1.3. Hukum Dan Antropologi	7
1.4. Psikologi Dan Hukum	9
1.5. Hukum Dan Ekonomi	10
1.6. Hukum Dan Politik	12
1.7. Civilology	13
BAB 2 MASALAH SOSIAL	18
2.1. Pendahuluan	18
2.2. Tipologi Pertanyaan Penelitian	20
2.3. Masalah Penelitian Yang Memadai Dari Yang Kurang Memadai?	24
BAB 3 TEORI DAN PENELITIAN HUKUM EMPIRIS	30
3.1. Pendahuluan	30
3.2. Teori Penjelasan (Huruf Kapital) Dan Teori Intervensi (Huruf Kecil)	32
3.3. Unsur-Unsur Penting Teori	33
3.4. Teori Penjelasan Dan Bagaimana Menemukannya?	35
3.5. Teori Intervensi Dan Cara Menemukannya	42
3.6. Hubungan Antara Teori Penjelasan Dan Teori Intervensi	50
3.7. Kriteria Untuk Menguji Dan Menggunakan Teori	50
BAB 4 TINJAUAN DAN SINTESIS PENELITIAN	53
4.1. Dari Studi Pustaka Tradisional Ke Tinjauan Sistematis	53
4.2. Hubungan Antara Teori Dan Kajian Penelitian	55
4.3. Intervensi Kesadaran Scared Straight, Kredit Mikro Dan Inspeksi Yang Diumumkan/Tidak Diumumkan	55
4.4. Pendekatan Lainnya	62
BAB 5 DESAIN PENELITIAN	69
5.1. Apa Itu Desain Penelitian?	69
5.2. Jenis Dan Contoh Desain Dari Penelitian Hukum Empiris	70
5.3. Kriteria Yang Menilai Kecukupan Desain Penelitian	87
BAB 6 METODE PENGUMPULAN DATA	95
6.1. Unit Analisis, Operasionalisasi Dan Kode	95
6.2. Data Jenis I	96
6.3. Data Jenis II	101
6.4. Data Jenis III	110

6.5.	Penelitian Dan Triangulasi Metode Campuran	115
6.6.	Kriteria Mutu	117
BAB 7	ANALISIS DAN VISUALISASI DATA KUANTITATIF DAN KUALITATIF	122
7.1.	Analisis Data Kuantitatif	122
7.2.	Sensus Penduduk, Pengambilan Sampel, Respons Dan Pembobotan	124
7.3.	Analisis Data Kuantitatif Dan Statistik	129
7.4.	Empat Contoh	137
7.5.	Analisis Big Data	149
7.6.	Analisis Data Kualitatif	155
7.7.	Menggabungkan Analisis Kualitatif Dan Kuantitatif	162
7.8.	Visualisasi Data	166
7.9.	Kriteria Untuk Menilai Analisis Data	168
BAB 8	PENYAMPAIAN TEMUAN PENELITIAN	172
8.1.	Transfer Pengetahuan, Definisi, Contoh, Dan Mekanisme	172
8.2.	Kesenjangan Nilai Fakta	176
8.3.	Hukum Sebagai Disiplin Argumentatif	180
BAB 9	PENELITIAN HUKUM EMPIRIS	186
9.1.	Revolusi Empiris Dalam Hukum?	186
9.2.	Pertumbuhan Pengetahuan Dalam ELR	191
9.3.	Pemeriksaan Ulang Bukti	200
Daftar Pustaka	207

BAB 1

SEJARAH PENELITIAN HUKUM

Bab ini menguraikan sejarah ELR. Karena buku teks kontemporer terkadang membuat kesalahan tentang asal usulnya, kami menganggap perlu untuk membahas item ini. Kami membuat sketsa – dengan lompatan dan lompatan – (sub)disiplin dan tradisi penelitian yang paling penting: yaitu realisme hukum, kriminologi, sosiologi, psikologi dan antropologi hukum, hukum dan ekonomi, ilmu sipil, hukum dan ilmu politik, dan studi evaluasi.

1.1 REALISME HUKUM DAN REALISME HUKUM BARU

Esai Kritzer (2009) tentang sejarah kontemporer ELR tidak hanya memperhatikan studi yang dilakukan pada tahun 1950-an dan awal 1960-an (seperti proyek juri Amerika, studi arbitrase komersial, dan studi penundaan pengadilan), tetapi juga membawa kita lebih jauh ke masa lalu:

Pada tahun 1920-an dan 1930-an, dan dalam beberapa kasus bahkan lebih awal, seseorang dapat menemukan berbagai penelitian yang berorientasi empiris tentang hukum. Topik-topik khusus dari penelitian awal ini meliputi: pengadilan banding dan pengambilan keputusan banding, kompensasi dan litigasi kecelakaan mobil, kebangkrutan, pengadilan pidana, perceraian, penempatan dan pemilihan hakim, juri dan kebutuhan hukum serta bantuan hukum. Sebagian besar karya awal dikaitkan dengan satu atau lain cara dengan gerakan realis hukum.

Realisme Hukum memang terkait dengan karya yang dijelaskan Kritzer. Aktor inti adalah Llewellyn, Underhill Moore, Pound (yang – seperti yang disebutkan – menekankan pentingnya ‘hukum dalam buku’ versus ‘hukum dalam tindakan’) dan Cardozo.

Leiter (2002) mengkarakterisasi Realisme Hukum sebagai berikut:

Para Realis adalah pengacara (ditambah beberapa ilmuwan sosial) [dan] mereka bereaksi terhadap ‘yurisprudensi mekanis’ atau ‘formalisme’ yang dominan pada zaman mereka. ‘Formalisme . . . berpendapat bahwa hakim memutuskan kasus berdasarkan aturan dan alasan hukum yang khas, yang membenarkan hasil yang unik dalam sebagian besar kasus (mungkin setiap kasus). Sebaliknya, kaum Realis berpendapat bahwa pertimbangan empiris yang cermat tentang bagaimana pengadilan benar-benar memutuskan kasus mengungkapkan bahwa mereka memutuskan bukan terutama karena hukum, tetapi berdasarkan (secara kasar) pada rasa mereka tentang apa yang akan ‘adil’ pada fakta-fakta kasus tersebut.

Guthrie, Rachlinski, dan Wistrich (2007) lebih tajam dalam kata-kata mereka.

Menurut kaum formalis, hakim menerapkan hukum yang mengatur pada fakta-fakta suatu

kasus dengan cara yang logis, mekanis, dan deliberatif. Bagi kaum realis [di sisi lain], hakim 'memutuskan dengan perasaan dan bukan dengan penilaian'; dengan 'berpikir' dan 'bukan dengan penalaran' dan kemudian menggunakan kemampuan deliberatif tidak hanya untuk membenarkan intuisi itu bagi dirinya sendiri, tetapi untuk membuatnya lulus uji.

Pengucapan ini dan yang serupa telah menyebabkan kritik serius oleh Tamanaha (2008):

Banyak dari [akun] konvensional ini menyesatkan. Realisme Hukum sebagian besar disalahpahami karena karya para realis ditafsirkan dalam serangkaian asumsi historis dan teoritis yang salah . . . Istilah realisme memiliki dua aspek yang saling terkait secara integral – aspek skeptis dan aspek terikat aturan. 'Realisme' mengacu pada kesadaran akan kelemahan, keterbatasan, dan keterbukaan hukum, kesadaran bahwa hakim terkadang harus membuat pilihan, bahwa mereka dapat memanipulasi aturan dan preseden hukum, dan bahwa mereka dapat dipengaruhi oleh pandangan politik dan moral mereka dan oleh bias pribadi mereka (aspek skeptis); tetapi 'realisme' tentang hukum dan penilaian juga mengkondisikan kesadaran yang lebih skeptis ini dengan pemahaman bahwa aturan hukum tetap dapat berfungsi, bahwa hakim dapat mematuhi dan menerapkan hukum, bahwa ada faktor-faktor yang terkait dengan praktik, sosial, dan kelembagaan yang membatasi hakim, dan bahwa hakim dapat memberikan keputusan yang secara umum dapat diprediksi dan berdasarkan hukum (aspek yang terikat pada aturan). Pandangan realistis menyatakan bahwa aspek yang terikat pada aturan dalam penilaian dapat berfungsi dengan andal meskipun ada tantangan yang dihadirkan oleh pihak yang mendorong skeptisisme, meskipun ini merupakan pencapaian yang harus diraih, tidak pernah tercapai dengan sempurna, dan tidak pernah dijamin.

KOTAK 1.1 METODE INSTITUSIONAL REALISME HUKUM

Contoh pendekatan Realis Hukum Amerika adalah apa yang disebut Underhill Moore dan Hope (1929) sebagai 'metode institusional'. Ide Underhill Moore dan Hope adalah mengidentifikasi perilaku normal untuk setiap 'lembaga' (misalnya perbankan komersial); kemudian mengidentifikasi dan membatasi penyimpangan dari norma ini secara kuantitatif, dan mencoba mengidentifikasi titik di mana penyimpangan dari norma akan menyebabkan keputusan pengadilan yang mengoreksi penyimpangan dari norma tersebut (misalnya seberapa jauh bank harus menyimpang dari praktik pencairan cek normal sebelum pengadilan memutuskan melawan bank dalam gugatan yang diajukan oleh nasabah?).

Tujuannya adalah rumus prediktif: penyimpangan derajat X dari 'perilaku institusional (yaitu perilaku yang sering, berulang kali, biasanya terjadi) akan menyebabkan pengadilan bertindak'. Studi sosiologi dan psikologi digunakan untuk memahami (dan memprediksi)

keputusan hukum, seperti yang ditunjukkan Underhill Moore dan Callahan (1943) dalam karya mereka tentang hubungan antara cara mengatur 'kontrol hukum' (sekarang dikenal sebagai penegakan hukum) dengan menggunakan wawasan dari teori pembelajaran psikologis.

Diskusi ini memberi tahu kita bahwa ada dua elemen inti dalam karya Realis Hukum. Yang pertama adalah 'metode pengujian empiris: hipotesis harus diuji terhadap pengamatan dunia. . . Realis [Amerika] sering mengklaim bahwa artikulasi "hukum" yang ada, pada kenyataannya, tidak "dikonfirmasi" oleh pengamatan aktual tentang apa yang sebenarnya dilakukan pengadilan'. Yang kedua adalah bahwa aturan formal itu sendiri sering kali tidak akan dapat menjelaskan dan memprediksi hasil perilaku (sepenuhnya), meskipun terkadang mereka akan mampu.

'Yurisprudensi sosiologis' juga merupakan bagian dari gerakan ini mengartikulasikan latar belakang yurisprudensi sosiologis, menggambarannya:

Yurisprudensi sosiologis adalah . . . suatu metode yang mencoba menggunakan berbagai ilmu sosial untuk mempelajari peran hukum sebagai kekuatan hidup dalam masyarakat dan berupaya mengendalikan kekuatan ini demi perbaikan sosial... Hukum adalah instrumen kontrol sosial, yang didukung oleh otoritas negara, dan tujuan yang ditujunya serta metode untuk mencapai tujuan ini dapat diperluas dan ditingkatkan melalui upaya yang disengaja dan sadar. Sanksi hukum terletak pada tujuan sosial yang ingin dilayani oleh hukum. Ahli hukum sosiologi tidak memiliki preferensi untuk jenis aturan tertentu, tetapi hanya untuk yang akan melakukan pekerjaan yang paling efektif.

Pada tahun 1931, Llewellyn mencoba menangkap tujuan empiris dari tradisi realis hukum dengan merujuk pada 'upaya awal untuk memanfaatkan kekayaan kasus yang kami laporkan untuk membuat studi kuantitatif skala besar tentang fakta dan hasil'. Llewellyn menekankan 'harapan bahwa ini dapat mengembangkan garis prediksi yang lebih pasti, atau setidaknya mampu menambah kepastian lebih lanjut pada prediksi yang sebelumnya didasarkan pada studi intensif dari kumpulan kasus yang lebih kecil'.

Akan tetapi, ia juga menambahkan: 'Saya tidak mengetahui hasil yang dipublikasikan' (Miles dan Sunstein, 2008). Posner (1995) juga mengkritik kontribusi Realisme Hukum: 'Proyek empiris para realis hukum, yang tidak hanya gagal tetapi juga membuat penelitian empiris mendapat nama buruk di kalangan akademisi hukum, menggambarkan kesia-siaan penyelidikan empiris yang dipisahkan dari kerangka teoritis'. Schlegel (1995) melihat kurangnya 'skema konseptual yang dapat menjelaskan hasil penelitian Realis' sebagai penyebab kehancurannya.

Beberapa dekade setelah Llewellyn pada tahun 1931 mengemukakan pendapatnya tentang kurangnya hasil, Miles dan Sunstein (2008:1–2) menerbitkan sebuah makalah tentang 'Realisme Hukum Baru', sambil juga meluncurkan situs web. Ini adalah 'upaya untuk

memahami sumber keputusan pengadilan berdasarkan hipotesis yang dapat diuji dan kumpulan data yang besar. [Para realis hukum baru] tengah berkembang pesatnya studi kuantitatif berskala besar tentang fakta dan hasil, dengan berbagai hasil. Studi-studi yang relevan telah menghasilkan 'Realisme Hukum Baru'.

Studi-studi tersebut merujuk pada meningkatnya minat terhadap karya empiris di kalangan profesor hukum Amerika, dan menegaskan bahwa karya ini di sekolah hukum 'telah menjadi sangat lazim sehingga menjadi subgenre tersendiri dalam kajian hukum'. Suchman dan Mertz (2010) membuat perbandingan dengan pendekatan lain seperti gerakan Hukum dan Masyarakat, yang berasal dari tahun 1960-an dan 'merek ELS', yang dicirikan dengan melakukan 'analisis empiris yang canggih secara hukum' dan 'menggunakan metode kuantitatif dan pengujian hipotesis'.

Miles dan Sunstein (2008: 3) melihat biaya pengumpulan data, komputasi yang sangat berkurang, dan 'rasa yang berlaku di bidang interdisipliner tertentu, khususnya analisis ekonomi hukum, bahwa pekerjaan empiris daripada teori abstrak sekarang menghadirkan peluang terbesar untuk kontribusi' sebagai salah satu alasan untuk perkembangan ini. Howarth (2013) mengambil langkah lebih jauh ketika ia, sejalan dengan Pound, menganggap terpuji untuk 'menganggap [hukum dan] yurisprudensi sebagai ilmu rekayasa sosial'. Ketika kita membahas Big Data (hukum), akan menjadi jelas bahwa ada hubungan antara konseptualisasi hukum (dan yurisprudensi) sebagai bentuk rekayasa sosial dan dunia Big Data, termasuk pembelajaran mesin, algoritma, dan eksperimen.

1.2 KRIMINOLOGI

Kriminologi juga merupakan pilar (atau akar) penting dari ELR. Kriminologi adalah studi ilmiah tentang sifat, tingkat, penyebab, dan pengendalian perilaku kriminal baik pada individu maupun masyarakat. Kriminologi adalah bidang interdisipliner, yang memanfaatkan penelitian sosiolog dan psikolog, psikiater dan ahli biologi, ekonom dan antropolog sosial, serta pengacara. Bidang penelitian meliputi kejadian, bentuk, penyebab, dan konsekuensi kejahatan, serta peraturan sosial dan pemerintah serta dampaknya terhadap penjahat, korban, dan orang lain, termasuk reaksi mereka terhadap kejahatan. Untuk mempelajari distribusi dan penyebab kejahatan, kriminologi sering kali mengandalkan metode kuantitatif dan kualitatif.

Seiring berjalannya waktu, beberapa aliran pemikiran telah muncul. Fijnaut (2014), bersama banyak lainnya, menguraikan beberapa di antaranya, mulai dari apa yang disebutnya sebagai 'aliran klasik' dengan para pendiri seperti Beccaria, Bentham, dan 'fisika sosial' Quetelet hingga pendekatan biologis, seperti Aliran Italia (dengan Lombroso, Feri, dan Garofalo) dan frenologi. Sebagai tanggapan terhadap aliran biologis dan evolusi, sosiolog Prancis seperti Tarde, Lacassagne, dan Durkheim menyajikan program alternatif di mana perilaku sosial, imitasi, dan faktor sosiologis lainnya memainkan peran penting dalam menjelaskan (tren) kejahatan.

Perang paradigmatik antara pendekatan Prancis dan Italia. Di Amerika Serikat, aliran Chicago yang diciptakan oleh sosiolog Park dan Burgess berkembang pesat antara akhir tahun

1920-an hingga akhir tahun 1940-an, tetapi – seperti yang ditunjukkan Fijnaut (2014) biokriminologi juga memainkan peran utama antara akhir abad kesembilan belas dan tahun 1950-an. Cendekiawan seperti Macdonald ('seorang misionaris lintas Atlantik dari bioantropologi kriminal'), Hooton, Gluecks, dan James Q Wilson aktif dan terkenal. Namun, mulai akhir tahun 1960-an dan berakhir sekitar pertengahan/akhir tahun 1990-an, perhatian yang diberikan pada faktor biologis untuk memahami dan membantu mengurangi perilaku kriminal (sangat) terbatas. Dewasa ini, kriminologi menawarkan contoh-contoh menarik dari pekerjaan ELR, yang membahas penyebab-penyebab perilaku nakal, tren dalam kejahatan dan biaya kejahatan, dampak pemenjaraan terhadap residivisme, bagaimana pembajakan digital dan kejahatan dunia maya lainnya dapat dicegah atau dikurangi, serta apa saja penyebab biososial dari perilaku antisosial dan tidak berperasaan yang terus-menerus.

Sosiologi Hukum

Pada tahun 1937 Timasheff menulis sebuah makalah dengan judul: 'Apa itu sosiologi hukum?' Dimulai dengan kalimat berikut:

Sejak dahulu kala, hukum telah menjadi objek ilmu yang disebut 'yurisprudensi'. Ilmu ini memiliki catatan gemilang, yang dalam catatannya terdapat banyak nama terkenal dan risalah abadi. Ilmu ini merupakan ilmu yang bercabang banyak, yang telah berkembang menjadi jaringan berbagai ilmu khusus yang disebut 'hukum perdata,' 'hukum pidana,' 'hukum tata negara,' dan seterusnya. Apakah masih ada ruang di bidang ini untuk ilmu lain lagi, yaitu 'sosiologi hukum'? Atau apakah 'sosiologi hukum' hanya nama baru untuk ilmu yang telah dikenal selama berabad-abad? Ya, masih ada ruang. Tidak, ini bukan nama baru untuk ilmu lama Perilaku manusia dalam masyarakat, sejauh hal itu terkait dengan hukum, adalah objek ilmu baru, yang disebut 'sosiologi hukum.' Investigasi kausal adalah metode utamanya.

Ia membahas batasan dengan (sub)disiplin lain seperti kriminologi dan menyarankan metode penelitian yang dapat (atau harus) digunakan oleh sosiolog hukum, sementara ia mengakhiri makalahnya sebagai berikut: 'Ada ruang untuk ilmu baru sosiologi hukum; ada cukup bahan dan metode untuk membantu kita memperoleh pengetahuan baru; dan sudah ada upaya cemerlang untuk memecahkan masalah sosiologi hukum'.

Sosiologi hukum kontemporer tidak bergerak terlalu jauh dari inti artikel Timasheff. Sosiolog hukum meneliti interaksi antara hukum, lembaga hukum dan non-hukum, dan faktor sosial. Bidang penelitian meliputi perkembangan sosial lembaga hukum, bentuk-bentuk pengendalian sosial, regulasi, interaksi antara budaya hukum, konstruksi sosial masalah hukum, profesi hukum, dan hubungan antara hukum dan perubahan sosial.

Akar sosiologi hukum dapat ditelusuri kembali ke karya-karya sosiolog dan ahli hukum pada pergantian abad kedua puluh seperti Weber, Durkheim, Petrazycki, Gurvitch, dan Ehrlich. Weber menafsirkan regulasi dan hukum dalam konteks otoritas hukum-rasional. Ia menyelidiki sejauh mana hukum yang koheren dan dapat diperhitungkan menjadi prasyarat bagi

perkembangan politik modern, negara birokrasi, dan pertumbuhan kapitalisme. Inti dari pengembangan hukum modern adalah rasionalisasi formal hukum atas dasar prosedur umum yang diterapkan secara setara dan adil bagi semua orang. Hukum modern yang dirasionalisasi juga dikodifikasi dan impersonal dalam penerapannya pada kasus-kasus tertentu, menurut Weber.

Kontribusi Durkheim terhadap pengembangan sosiologi hukum sebagian dapat dimasukkan ke dalam apa yang dikenal sebagai ilmu moral dan hak-haknya. Dia mempelajari berbagai jenis aturan (misalnya teknis dan normatif) dan sanksi apa yang digunakan masyarakat, termasuk sistem hukum.

Durkheim tidak hanya mempelajari fungsi represif sistem hukum, tetapi juga kontribusinya terhadap berbagai jenis solidaritas. Dalam 'The Division of Labour in Society' Durkheim melihat bahwa ketika masyarakat menjadi lebih kompleks, badan hukum terutama akan peduli dengan restitusi dan kompensasi (hukum perdata) dan lebih sedikit dengan hukum pidana dan sanksi pidana. Seiring berjalannya waktu, hukum telah mengalami transformasi dari hukum represif menjadi hukum restitutif, menurut Durkheim. Hukum restitutif beroperasi dalam masyarakat di mana terdapat tingkat variasi individu yang tinggi dan penekanan pada hak dan tanggung jawab pribadi. Bagi Durkheim, hukum merupakan indikator cara integrasi masyarakat, yang dapat bersifat mekanis, di antara bagian-bagian yang identik, atau organik, di antara bagian-bagian yang berbeda seperti dalam masyarakat industri.

Cendekiawan (Eropa) lainnya, beberapa di antaranya adalah ahli hukum, juga menggunakan pendekatan dan metode ilmiah sosial dalam upaya mengembangkan teori hukum sosiologi. Yang paling menonjol di antaranya adalah Petrazycki, Gurvitch, dan Ehrlich. Petrazycki membedakan antara bentuk 'hukum resmi', yang didukung oleh negara, dan 'hukum intuitif', yang terdiri dari pengalaman hukum yang, pada gilirannya, terdiri dari kompleks proses psikis dalam pikiran individu.

Bagi Petrazycki, hukum mampu membentuk kebiasaan sosial yang kuat selama berabad-abad karena ia menetapkan 'pola perilaku' yang umum bagi semua penerimanya. 'Modal kebiasaan' ini . . . disimpan selama berabad-abad, dan dijaga oleh sarana hukum-pidana dan lembaga-lembaga pengendalian hukum lainnya. [1a] lebih jauh menekankan nilai edukatif hukum, yang disebabkan oleh fakta bahwa hukum terus-menerus merangsang motif-motif tindakan tertentu, sementara menekan yang lain.

Pada periode pasca-Perang Dunia II, sosiologi hukum tumbuh menjadi spesialisasi sosiologi. Tinjauan awal periode. Deflem (2011) melihat 'hukum dan lembaga', 'profesi hukum' dan 'hukum, hukuman dan pengendalian sosial' sebagai tema-tema utama penelitian selama beberapa dekade terakhir. Bidang-bidang spesialisasi yang berkaitan erat dengan sosiologi hukum adalah penelitian sosio-hukum, hukum dan ilmu sosial, serta gerakan hukum & masyarakat (LSS):

Hukum dan ilmu sosial hanyalah satu dari beberapa pengetahuan yang saling terkait tentang hukum dan hubungannya dengan masyarakat. Yang saya maksud dengan hukum bukanlah disiplin ilmu penyelidikan, tetapi seperangkat praktik,

peran, dan gagasan yang terkandung dalam lembaga-lembaga yang khas dan tercermin dalam budaya umum . . . LSS . . . mencari penjelasan daripada pembenaran. Ia menekankan struktur dan proses sosial daripada aturan. Ia menolak gagasan hukum sebagai ranah yang otonom dan mandiri; ia menghargai dinamika hukum sebagai bagian dari pola kehidupan sosial yang lebih inklusif.

Dalam sebuah laporan tentang keadaan terkini dalam studi sosio-hukum di Inggris, Hazel Genn et al (2006) menunjukkan bahwa meskipun definisi yang jelas tentang konsep ini kurang, sosiologi hukum, 'studi hukum dan masyarakat' dan 'studi hukum empiris' adalah bagian dari 'keluarga studi sosio-hukum' yang diperluas. Banakar dan Travers (2005) berpendapat bahwa 'peneliti sosio-hukum semakin mengakui perlunya menggunakan berbagai macam metode dan bahwa ini perlu diinformasikan oleh pemahaman tentang perdebatan tentang teori dan metode dalam ilmu sosial arus utama'.

Sarjana sosio-hukum mempelajari 'berbagai topik, termasuk hukum Uni Eropa, ombudsman, hakim, pengacara, Dewan Syariah, dan industri jaminan mutu'. Namun, Travers (2001) membuat perbedaan yang menarik: 'Sosiologi hukum adalah upaya ilmiah untuk memahami tempat hukum dalam masyarakat. Sebaliknya, penelitian sosio-hukum adalah penelitian a-teoretis atau empiris yang ditugaskan oleh, atau dimaksudkan untuk memengaruhi, lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas sistem hukum'. Dan: 'penelitian sosio-hukum di Inggris terutama berkaitan dengan memengaruhi atau melayani kebijakan pemerintah dalam penyediaan layanan hukum. Penelitian ini pertama kali berkembang pada tahun 1960-an sebagai gerakan politik yang peduli dengan keadilan dan kewajaran'.

Ferrari (2015) mempelajari kebijakan editorial terkini dari tiga jurnal sosiologi hukum yang berpengaruh di Prancis, Jerman, dan Italia dan menemukan bahwa teori sosio-hukum kelas menengah telah berhasil menangani beberapa aspek relevan dari perubahan hukum dalam beberapa dekade terakhir, dalam bidang-bidang seperti peradilan pidana, migrasi, atau hukum keluarga. Namun, teori ini telah mengesampingkan aspek-aspek lain yang tidak kalah pentingnya, seperti hukum perdagangan dan properti, barang-barang umum, lingkungan, dan pertanyaan-pertanyaan krusial lainnya di zaman kita.

1.3 HUKUM DAN ANTROPOLOGI

Meskipun asal-usulnya jauh lebih tua, titik tolak Departemen Hukum dan Antropologi yang baru didirikan (2012) dari Institut Max Planck untuk antropologi sosial berfungsi dengan baik sebagai pengantar:

Titik tolaknya adalah pengamatan bahwa nilai-nilai dan norma-norma saat ini beredar semakin kuat di antara masyarakat dan budaya yang beragam. Dengan meningkatnya pertukaran dan pertemuan ini muncul permintaan yang meningkat untuk penerjemahan antara tatanan hukum yang berbeda di berbagai tingkat pengambilan keputusan di seluruh dunia. Permintaan ini melibatkan, antara lain,

disiplin ilmu antropologi sosial dan hukum.

Salah satu topik penelitian utama adalah perbandingan dan keterbandingan konsep, prosedur, lembaga, dan praktik dalam dan lintas tatanan normatif. Yang lain adalah untuk mempromosikan 'integrasi penelitian antropologi dan praktik hukum. Prioritas ini mendorong kolaborasi yang lebih besar antara antropolog dan praktisi hukum, dengan memberikan bobot yang sama pada pemahaman yang berlandaskan antropologi tentang keragaman tatanan normatif dan pada pengalaman dan perhatian praktis dari para hakim, pengacara, perwakilan layanan hukum, dan pihak lain yang, dalam praktik sehari-hari, menghadapi fenomena 'inter-normativitas' – situasi ketika tatanan dan logika normatif yang berbeda (sering kali ada berdampingan dalam satu sistem negara) bersentuhan (dan sering kali bertentangan) satu sama lain – dan kebutuhan yang dihasilkan akan sistem hukum negara untuk mengakomodasi keragaman ini'.

Argumen utama Antropologi Hukum sebagai berikut:

kita harus menganggap hukum sebagai kelas fenomena sosial, yang didefinisikan oleh bentuknya, bukan fungsinya... Antropologi memberi perhatian yang cermat pada detail contoh empiris, merangkul keragaman dan ketidakkonsistenan, mengeksplorasi batas-batas konsep yang secara rutin kita gunakan untuk memahami dunia dan mempertanyakan cara-cara yang biasanya kita gunakan untuk menyederhanakan dan mengkategorikan.

Secara umum, antropologi hukum sudah ada sejak lebih dari dua abad. Henry Maine secara umum dipandang sebagai pendiri antropologi hukum. Maine adalah mantan pejabat hukum kolonial yang menjadi dosen yurisprudensi di Cambridge dan Oxford, menerbitkan *Ancient Law* pada tahun 1861. Dalam buku ini, teori perkembangan hukum dalam kerangka evolusi dikembangkan. *Crime and the Savage Society* (1926) karya Malinowski berasal dari periode selanjutnya dan mengkritik pendekatan Maine; ia mengusulkan pendekatan etnografis untuk mempelajari isu-isu hukum, dengan menyerukan kerja lapangan yang lebih luas untuk 'mempelajari aturan-aturan adat istiadat melalui pengamatan langsung sebagaimana aturan-aturan tersebut berfungsi dalam kehidupan nyata'.

The Cheyenne Way (1941) karya Llewellyn dan Hoebel juga dianggap sebagai teks klasik dalam antropologi hukum. Para penulis mengartikulasikan 'teori investigasi' mereka ('prosedur metode kasus untuk menangani kasus-kasus bermasalah dan bagaimana kasus-kasus tersebut ditangani'. Mereka juga merujuk pada konsep 'pekerjaan hukum', yang menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kebutuhan untuk memenuhi fungsi-fungsi hukum tertentu seperti 'penyelesaian kasus-kasus bermasalah, penyaluran preventif dan reorientasi perilaku dan harapan, serta alokasi wewenang dan pengaturan prosedur yang melegitimasi tindakan sebagai tindakan yang berwenang'.

Selama tahun 1950-an dan 1960-an, antropolog hukum sebagian besar memperhatikan hukum sebagai aspek kontrol sosial melalui pengenaan sanksi, dan melihat prosedur hukum sebagai sarana untuk menegakkan aturan-aturan sosial. Sebuah perdebatan

muncul tentang hubungan antara metode hukum dan antropologi, dan khususnya mengenai pertanyaan apakah antropolog hukum harus menerapkan Kategori hukum Anglo-Amerika untuk studi masyarakat non-Barat.

Pada tahun 1970-an, perdebatan lain berpusat pada pertanyaan apakah fokus studi harus pada aturan atau proses. Semakin banyak antropolog hukum mengkritik penekanan lama pada aturan peradilan, dan sebaliknya berpendapat untuk mempelajari proses penyelesaian sengketa dan penyusunan norma. Pada tahun 1980-an, wacana dan kritik postmodernis mulai muncul yang mempertanyakan kategori tradisional antropolog hukum. Sekitar waktu yang sama, 'Clifford Geertz menyarankan pendekatan budaya terhadap hukum, dengan menyatakan bahwa hukum bukan hanya seperangkat norma, aturan, dan prinsip yang dibatasi, tetapi kerangka yang menjelaskan dunia'. Penulis yang sama memetakan beberapa 'area [dalam antropologi dan hukum] dengan pertumbuhan yang sangat cepat dan signifikan sejak tahun 1980-an'. Kami sebutkan tiga di antaranya:

Yang pertama adalah pengembangan konsep budaya hukum, kesadaran hukum, dan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Seiring berkembangnya antropologi hukum dari analisis lembaga hukum seperti pengadilan, moots, atau pusat pemrosesan sengketa ke studi tentang bagaimana orang biasa menggunakan hukum dalam kehidupan alamiah mereka, hal itu menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana orang berpikir tentang hukum di luar lembaga-lembaga ini dan mengapa mereka mematuhi atau tidak mematuhi hukum. Bidang pertumbuhan kedua adalah perluasan konsep pluralisme hukum dari konteks kolonial ke konteks global. Hak Asasi Manusia dan keadilan transisi adalah bidang ketiga yang semakin mendapat perhatian antropologis. Karya etnografi terkini mengeksplorasi bagaimana keadilan transisi bekerja dalam praktik di berbagai lokasi.

1.4 PSIKOLOGI DAN HUKUM

Pertanyaan tentang bagaimana mendefinisikan psikologi hukum, alias 'psikologi hukum' (dan terkadang bahkan sebagai 'psikologi forensik'). Meskipun tidak ada definisi yang dapat diterima secara umum, definisi yang diajukan oleh Ogloff (2000) cukup luas dan ringkas:

Psikologi hukum adalah studi ilmiah tentang dampak hukum terhadap orang-orang; dan dampak yang ditimbulkan orang terhadap hukum. Psikologi hukum juga mencakup penerapan studi dan praktik psikologi pada lembaga hukum dan orang-orang yang bersinggungan dengan hukum. Intinya, sarjana psiko-hukum menerapkan metodologi dan pengetahuan psikologi untuk mempelajari yurisprudensi, hukum substantif, proses hukum, dan pelanggaran hukum.

Topik yang dicakup oleh studi hukum dan psikologi adalah pengambilan keputusan dan penilaian juri, kesaksian saksi mata, teknik interogasi, pengakuan palsu, psikopatologi forensik, perawatan pelaku, berpura-pura sakit, perilaku ruang rapat dan perilaku badan pengawas dan inspektorat. Wells, Memon dan Penrod (2006) misalnya membahas alasan mengapa 'orang yang tidak bersalah dihukum secara salah [dan menunjuk ke] bukti saksi mata yang salah -

sekitar 75 persen individu yang dibebaskan dari tuduhan DNA telah dihukum karena saksi mata membuat identifikasi yang salah'. 'Profil pelaku' psikologis adalah aktivitas utama lain dari psikolog hukum dan khususnya, psikolog forensik. Bidang penelitian ini juga telah meneliti dimensi kognitif dan motivasi dari penilaian, yaitu heuristik, motivasi, bias, skema, sikap dan kognisi yang termotivasi. Psikolog eksperimental menyelidiki bagaimana teori implisit tentang sifat manusia dan karakter moral memengaruhi pengambilan keputusan hukum. Dweck dan rekan-rekannya memberikan transkrip ringkasan persidangan pembunuhan kepada para peserta, dan secara eksperimental memanipulasi kesan tentang kesopanan terdakwa. Teori-teori implisit ini dapat membentuk bagaimana hakim menemukan fakta dalam perselisihan tertentu, kesimpulan yang mereka buat, dan hukuman yang mereka jatuhkan.

Hukum dan psikologi memiliki tradisi panjang yang dicontohkan sejak awal abad kedua puluh oleh karya para pelopor seperti Binet, Gross, Jung, Münsterberg, dan Wertheimer. Ogloff (2000) mengingatkan kita bahwa sejumlah psikolog terkenal menyatakan minatnya untuk menerapkan temuan psikologi pada hukum sejak tahun 1890-an. Bidang psikologi hukum:

telah berkembang dengan kecepatan yang mengesankan sejak pertengahan 1960-an, terutama di Amerika Utara, sejak akhir 1970-an di Inggris, dan di Australia sejak awal 1980-an. Faktanya, di kedua sisi Atlantik, penelitian dan pengajaran dalam psikologi hukum telah berkembang pesat sejak pertengahan 1970-an... Baru-baru ini, bidang psikologi dan hukum juga telah berkembang di Eropa, terutama di Belanda, Jerman, dan Spanyol. Di negara-negara ini juga telah didirikan perkumpulan profesional.

Ilmu terbaik dalam bidang psikologi forensik telah muncul sebagai respons terhadap pertanyaan-pertanyaan spesifik yang diajukan dalam kasus-kasus hukum tertentu: apakah terdakwa kompeten? Apakah kesaksian saksi mata ini dapat diandalkan? Apakah terdakwa cenderung menimbulkan risiko di masa mendatang bagi pihak ketiga? Salah satu perkembangan paling bermanfaat dalam bidang ini adalah penciptaan alat penilaian berbasis penelitian.

Perkembangan terkini adalah neuro-hukum, tempat para ilmuwan saraf, psikolog, dan sarjana hukum berkolaborasi. Karena bukti neurosains semakin banyak ditawarkan dalam kasus pengadilan, tantangan 'baru' muncul dalam agenda. Salah satunya adalah membedakan antara fakta-fakta neuro dan mitos-mitos neuro, di mana mitos-mitos neuro didefinisikan sebagai kesalahpahaman umum tentang mekanisme otak, yang dianggap biasa dalam masyarakat saat ini (seperti 'ada jenis pembelajaran visual, auditif, dan haptik' atau 'kita hanya menggunakan 10% otak kita'). Yang lain adalah bias pengukuran neurosains.

1.5 HUKUM DAN EKONOMI

Hukum dan ekonomi, termasuk ekonomi perilaku, salah satu pendirinya adalah Adam Smith, yang mempelajari dampak ekonomi dari undang-undang (yaitu hukum merkantilis) terhadap masyarakat. Penggunaannya sendiri secara bebas pertama kali terjadi pada awal

tahun 1970-an, dan pada saat yang sama bertepatan dengan munculnya karya Richard Posner, yaitu buku teks 'Economic Analysis of Law', yang merupakan karya standar yang maju [dua esai yang dikembangkan secara independen oleh Ronald Coase dan Guido Calabresi dari tahun 1960 atau 1961.

Buku Posner membahas 'penerapan teori dan metode empiris ekonomi pada lembaga-lembaga utama sistem hukum'. Hukum dan ekonomi menawarkan teori umum hukum serta perangkat konseptual untuk klarifikasi dan peningkatan praktiknya. Teori umumnya adalah bahwa hukum paling baik dipandang sebagai alat sosial yang mendorong efisiensi ekonomi, dan analisis serta efisiensi ekonomi sebagai cita-cita yang dapat memandu praktik hukum. Di samping teori umum ini, teori-teori lain memainkan peran penting.

Salah satunya adalah teori 'asal-usul hukum' yang mengacu pada ekonomi kelembagaan dan evolusi untuk memberikan penjelasan tentang bagaimana sistem hukum telah membentuk perkembangan ekonomi pasar. Bidang studi lainnya adalah 'evolusi hukum'; hukum dipandang sebagai sistem yang kompleks dengan sifat-sifat adaptif, di mana studi teori permainan tentang perilaku strategis sama pentingnya, seperti halnya wawasan dari biologi evolusi. Dalam kombinasi, keduanya dapat membantu memahami asal-usul dan evolusi lembaga hukum.

Banyak topik dalam ekonomi berhubungan dengan hukum. Sejumlah besar karya dalam ekonomi publik, misalnya, meneliti dampak program pemerintah yang diamanatkan secara hukum seperti asuransi disabilitas dan pengangguran; penelitian tentang pasar tenaga kerja meneliti dampak dari berbagai jenis undang-undang antidiskriminasi dan penelitian tata kelola perusahaan baru-baru ini mempelajari konsekuensi hukum perusahaan dan sekuritas terhadap pengembalian dan volatilitas saham.

Jolls (2006) mengemukakan beberapa fitur khas yang membantu membatasi pekerjaan yang biasanya dianggap termasuk dalam 'keluarga' hukum dan ekonomi. Salah satunya adalah bahwa sebagian besar penelitian ini berfokus pada berbagai bidang hukum yang jarang dipelajari oleh para ekonom sebelum munculnya hukum dan ekonomi; bidang-bidang tersebut meliputi hukum perdata, hukum kontrak, hukum properti, dan aturan yang mengatur proses litigasi. Yang lainnya adalah minat berkelanjutan dalam menjelaskan dan memprediksi konten, bukan dampak, dari aturan hukum.

Perkembangan terbaru dalam bidang ini adalah:

ekonomi perilaku dan hukum, yang melibatkan pengembangan dan penggabungan wawasan perilaku yang diambil dari berbagai bidang psikologi ke dalam hukum dan ekonomi. Seperti yang telah diakui secara luas... beberapa asumsi dasar analisis ekonomi tradisional mungkin mencerminkan gambaran perilaku manusia yang tidak realistis. Tidak mengherankan, model yang didasarkan pada asumsi ini terkadang menghasilkan prediksi yang salah. Hukum perilaku dan ekonomi berupaya meningkatkan kekuatan prediktif hukum dan ekonomi dengan membangun penjelasan yang lebih realistis tentang perilaku

aktor.

Teori permainan juga dipelajari oleh para sarjana hukum dan ekonomi; teori ini menganalisis pengambilan keputusan oleh agen dalam kondisi interaksi strategis, yang berarti bahwa hasil dari pilihan (perilaku) mereka bergantung pada apa yang dilakukan agen lain. Teori permainan 'dapat digunakan untuk menghasilkan model formal tentang cara kerja pasar dan lembaga ekonomi lainnya, dan tentang peran hukum dalam membentuk perilaku ekonomi'.

Ada tiga cara berbeda yang dapat digunakan untuk melihat aktor manusia yang menyimpang dari asumsi ekonomi tradisional: aktor manusia menunjukkan rasionalitas terbatas, kemauan terbatas, dan kepentingan pribadi terbatas. Contoh studi empiris yang menggunakan pendekatan ini mudah ditemukan. Studi yang menunjukkan bahwa 'analisis perilaku hukum telah menjadi semakin populer dalam kajian hukum dalam beberapa tahun terakhir'.

1.6 HUKUM DAN POLITIK

Seluruh subbidang ilmu politik, yang dikenal sebagai hukum dan politik telah menyumbangkan literatur empiris yang besar dan mencerahkan... Beberapa kontribusi awal menunjukkan pengaruh hukum (model hukum) sebagai hipotesis yang bersaing dengan pengaruh ideologi peradilan (model sikap). Baru-baru ini, ilmuwan politik telah memberikan perhatian yang lebih besar pada konteks kelembagaan pengambilan keputusan peradilan dengan mengajukan dan menguji model perilaku strategis.

Pernyataan ini didukung oleh isi Oxford Handbook of Law and Politics. Salah satu pertanyaan pembuka menyangkut mengapa ilmu politik tertarik pada 'hukum'. Jawabannya adalah bahwa 'hukum adalah salah satu produk utama politik dan hadiah yang diperjuangkan oleh banyak perjuangan politik . . . Itu adalah instrumen utama yang digunakan pemerintah untuk menjalankan kehendaknya pada masyarakat, dan karena itu dapat dianggap terletak (setidaknya secara tidak langsung) dekat dengan inti studi politik'.

Besarnya topik yang dibahas dalam buku pegangan ini (dari 'perilaku peradilan', aturan hukum dan pengadilan dalam demokratisasi rezim dan konstitusionalisme hingga politik peradilan komparatif dan lingkungan politik dan kebijakan pengadilan) menunjukkan luasnya spesialisasi ini. Studi hukum dan politik adalah 'usaha yang bervariasi dan multidisiplin. Titik awal dalam ilmu politik adalah 'bahwa politik itu penting dan bahwa pengaruh analitis dan empiris yang cukup besar atas pemahaman kita tentang hukum dan lembaga hukum dapat diperoleh dengan menempatkan politik di latar depan'. 'Bidang ini segera menambahkan pengadilan, pengacara, dan pelaku hukum terkait ke dalam lingkungannya'.

Di Amerika Serikat, John Burgess adalah salah satu pendiri spesialisasi ini. Ia membantu mengembangkan dan mengajarkan 'ilmu yurisprudensi yang akan memberikan persiapan yang lebih baik untuk layanan sipil federal yang baru' (sekitar tahun 1880). Cendekiawan konstitusi dan publik pada abad kedua puluh seperti Charles Grove Haines, Edward Corwin, dan Robert Cushman memimpin diskusi ini. Antara tahun 1917 dan 1961, 'jurnal utama American Political Science Association (American Political Science Review) menerbitkan tinjauan tahunan

tentang keputusan konstitusional Mahkamah Agung, yang ditulis oleh Cushman’.

Secara perlahan namun pasti, studi hukum dan politik bergeser dari hukum tata negara dan menuju politik peradilan (termasuk studi statistik). Baru-baru ini, para sarjana hukum dan politik mempelajari sistem peradilan pidana, operasi pengadilan, juri, penyelesaian sengketa, perilaku pengacara, tribunal, dan aspek-aspek lain dari hukum internasional. ‘Penjelasan teori permainan tentang strategi politik telah muncul dan memberikan perspektif baru tentang perilaku peradilan dan pendekatan baru yang menghubungkan pengadilan dengan lembaga politik lainnya’.

Khususnya yang berkaitan dengan hukum administrasi dan administrasi publik, penggunaan eksperimen perlahan meningkat. Seperti yang ditunjukkan Van de Walle dan Van Ryzin (2011), bidang ini masih tertinggal dari bidang-bidang tetangga seperti psikologi atau ekonomi. Eksperimen tidak hanya menjelaskan dampak dari pengaturan dan lembaga hukum baru, tetapi juga memberikan 'jawaban yang kuat untuk pertanyaan lama yang penting secara teoritis, seperti pengujian versi yang diperluas dari model maksimisasi anggaran Niskanen' atau dampak informasi kinerja pemerintah dan transparansi pada perilaku pemilih dan kepercayaan warga negara. Alur pemikiran yang serupa dapat ditemukan dalam studi McGinnis (2012) tentang cara mempercepat demokrasi dengan melakukan eksperimen dengan pengaturan hukum, sambil menerapkan pembelajaran mesin untuk menganalisis Big Data.

1.7 CIVILOLOGY

Bidang civilology yang kurang dikenal, dengan De la Grasserie sebagai penemu (Eropa) label ini, merupakan gabungan dari hukum perdata dan studi perilaku. Van Boom, Giesen, dan Verheij (2013) mendefinisikan civilology sebagai berikut: ‘kumpulan disiplin ilmu yang mempelajari asumsi perilaku yang digunakan oleh hukum perdata, dampak hukum perdata terhadap perilaku individu dan organisasi, serta relevansi asumsi ini bagi kebijakan hukum perdata, regulasi, dan implementasi hukum perdata’. Daripada menganalisis hukum privat dari perspektif doktrinal hukum semata, civilology mencakup penggunaan gabungan wawasan dari ilmu sosial – mulai dari ekonomi hingga psikologi dan sosiologi – untuk menganalisis asumsi perilaku yang mendasari hukum privat, untuk memahami dampaknya terhadap individu, organisasi, dan bisnis, serta untuk menghargai dampak dari kedua asumsi dan dampak tersebut terhadap pembuat kebijakan, badan legislatif, dan pengadilan.

Salah satu titik awal bidang ini adalah bahwa hukum perdata dapat dianalisis dengan memunculkan dan menganalisis praduga perilaku (yaitu teori implisit) dan dampak perilaku, dengan melakukan penelitian empiris dan/atau menggunakan temuan dari penelitian perilaku yang sudah ada dalam literatur. 'Praduga' ini tidak hanya berkaitan dengan para pelaku dalam proses perdata itu sendiri, tetapi juga dengan pemerintah sebagai pembuat aturan. Praduga sangat mirip dengan apa yang disebut oleh para evaluator sebagai 'teori intervensi atau program' (yaitu serangkaian asumsi yang mendasari kebijakan, program, dan intervensi). Dampak perilaku didefinisikan sebagai konsekuensi (yang diinginkan atau tidak diinginkan) dari interaksi antara para pihak setelah aturan oleh pemerintah dan pengadilan telah dilaksanakan.

Topik yang dibahas oleh para ahli hukum perdata meliputi dampak yang ditimbulkan oleh regulasi (seperti 'Hukum Penjualan Umum Eropa'), hukum perdata termasuk ganti rugi, hukum asuransi, tata kelola perusahaan, dan hukum perusahaan dan sekuritas. Para penulis *Civilology Handbook* menyajikan contoh disiplin ilmu yang membentuk blok-blok bangunan yang menjadi dasar pengembangan *civilology* (psikologi, ekonomi, sosiologi, ilmu organisasi, ilmu pemasaran, dan administrasi publik). Secara historis, *civilology* tidak memiliki banyak akar. Seperti yang disebutkan sebelumnya, *Metaphysical Club* yang didirikan sekitar tahun 1871 di Cambridge, AS (lihat Kotak 1.1) merupakan kelompok informal yang terdiri dari para ahli hukum dan beberapa ilmuwan perilaku. Penelitian empiris mereka terkait dengan apa yang sekarang kita sebut *civilology*.

Di Belanda, beberapa profesor hukum perdata seperti Meijers, Sinzheimer, Hamaker, dan Hijmans (aktif pada dekade pertama abad kedua puluh) kurang lebih mengadopsi ide-ide ini dan melakukan penelitian hukum empiris mengenai hukum perdata. Hazel Genn, Partington, dan Wheeler (2006: 4–5) berpendapat bahwa 'tidak ada "civilology" yang setara dengan kriminologi. Luasnya dan keragaman isu keadilan sipil – yang mencakup keluarga, keadilan administratif, komersial, ketenagakerjaan, properti, kontrak, dll. – dapat menghambat terciptanya massa kritis peneliti dalam satu bidang subjek, yang pada gilirannya memperlambat perkembangannya.

Tujuan akhir dari ilmu sipil: adalah melakukan untuk hukum perdata apa yang telah dilakukan oleh kriminologi untuk hukum pidana selama beberapa dekade; yaitu, merefleksikan fungsinya berdasarkan fakta dan bukan argumen yang masuk akal. Namun, yang tidak akan kita lakukan adalah mengabaikan, tidak menghiraukan, atau mengganti sisi seni dan bahasa dengan pengajaran dan penelitian hukum. Penelitian hukum memiliki relevansi langsung bagi masyarakat dan pengacara hanya dapat terus memainkan peran sosial mereka ketika mereka menggabungkan kekuatan seni dan bahasa dengan ilmu sosial. Pengacara harus mampu menafsirkan, menginterpretasikan, dan menganalisis undang-undang dan kasus hukum, tetapi mereka juga harus mampu menghargai pertanyaan empiris dan normatif, seperti: apakah hukum benar-benar bekerja sesuai dengan rancangannya? Berapa biayanya? Bisakah hukum menjadi lebih baik? Bagaimana hukum dapat menjadi lebih baik?

Studi Evaluasi

Studi evaluasi merupakan kombinasi dari penelitian ilmu sosial, termasuk sosiologi dan psikologi dan – pada tingkat yang lebih rendah – ekonomi, ilmu kebijakan, dan ilmu administrasi dengan fokus khusus pada apa yang 'dilakukan' oleh intervensi (pemerintah) terhadap masyarakat. Scriven (1996) mencatat bahwa 'evaluasi adalah disiplin ilmu yang sangat muda – meskipun merupakan praktik yang sangat tua'. Salah satu studi evaluasi (terdaftar) paling awal (yang dilakukan pada tahun 1700-an) disebutkan oleh Rossi dkk (2003: 4). Mereka menggambarkan apa yang terjadi ketika seorang kapten angkatan laut Inggris mengamati tidak adanya penyakit kudis di antara para pelaut yang bertugas di kapal-kapal negara Mediterania yang mana buah jeruk merupakan bagian dari ransum. Setelah itu, ia menyuruh separuh awaknya mengonsumsi jeruk nipis sementara separuh lainnya melanjutkan diet rutin mereka.

Kapten yang baik itu mungkin tidak tahu bahwa ia sedang mengevaluasi proyek demonstrasi dan ia mungkin juga tidak memiliki 'teori program' yang eksplisit, yaitu, bahwa penyakit kudis merupakan konsekuensi dari kekurangan vitamin C dan bahwa jeruk nipis kaya akan vitamin C. Meskipun demikian, intervensi tersebut berhasil dan para pelaut Inggris akhirnya dipaksa untuk mengonsumsi buah jeruk secara teratur, sebuah praktik yang memunculkan label jeruk nipis yang masih populer. Kebetulan, butuh waktu sekitar 50 tahun sebelum 'program sosial' sang kapten diadopsi secara luas.

Pada awal abad kedua puluh, sosiolog Amerika Stuart Chapin melakukan sosiologi eksperimental. Satu evaluasi meneliti dampak relokasi perumahan pada kondisi kehidupan keluarga kumuh di Minneapolis, sementara studi kedua mengevaluasi dampak pada penyesuaian sosial dengan mendorong mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler. Selama Perang Dunia II, evaluasi sosial-psikologis dilakukan, beberapa di antaranya disebut sebagai eksperimen.

Hovland berkontribusi pada beberapa bidang psikologi, seperti efisiensi berbagai metode pembelajaran. Salah satu evaluasi eksperimental yang paling banyak dikutip adalah tentang perubahan opini, dan melibatkan pengujian dampak penyajian isu kontroversial yang sepihak versus dua sisi. Hasilnya bertentangan dengan pendapat yang menyatakan bahwa komunikasi yang hanya menyajikan satu sisi isu secara umum akan lebih berhasil daripada komunikasi yang menyebutkan sisi argumen yang berlawanan. Mark et al (2011) merangkum relevansi yang dimiliki oleh studi psikologis dan relevansinya bagi pengembangan studi evaluasi dan sebaliknya.

Proses ini tidak hanya terjadi tetapi juga di Inggris, tempat evaluasi eksperimental di bidang kejahatan dan keadilan telah dilakukan sejak akhir tahun 1950-an. Contohnya adalah studi efektivitas kerja sosial di penjara, program percobaan, dan komunitas terapeutik di sekolah asrama untuk anak-anak nakal. Studi-studi ini 'menandai awal dan akhir eksperimen alokasi acak dalam penelitian Home Office'.

Masalah yang dihadapi evaluator dalam melakukan studi ini, hasil yang beragam, dan masalah bahwa 'eksperimen mungkin dapat mengatakan apa yang terjadi tetapi [eksperimen] tidak dapat menjawab bagaimana atau mengapa' berada di balik perkembangan ini. Seperti yang ditulis Leeuw (2009a) di tempat lain, di Belanda tradisi penelitian kebijakan sosial (yang dimulai sejak tahun-tahun awal abad kedua puluh) memainkan peran dalam menjalankan evaluasi, bersama dengan kegiatan Kantor Audit Nasional Belanda dan perdebatan tentang cara mewujudkan pemerintahan yang lebih efisien dan efektif pada tahun 1970-an dan 1980-an.

Gelombang pertama tahun-tahun bisnis yang berkembang pesat untuk evaluasi dimulai pada tahun 1960-an dan akhir tahun 1970-an di Amerika Serikat. Program Great Society milik Presiden Lyndon Johnson dan Perang Melawan Kemiskinan merupakan penguasa permainan dan menyebabkan pesatnya legislasi yang merangsang dan mendesak evaluasi. Periode tersebut dikenal sebagai Tahun-Tahun Emas Evaluasi. Di Eropa, perluasan negara kesejahteraan dan kelemahan pertama yang terlihat (seperti efek samping yang tidak diinginkan dan masalah anggaran pemerintah) membuat studi evaluasi berkembang sedikit

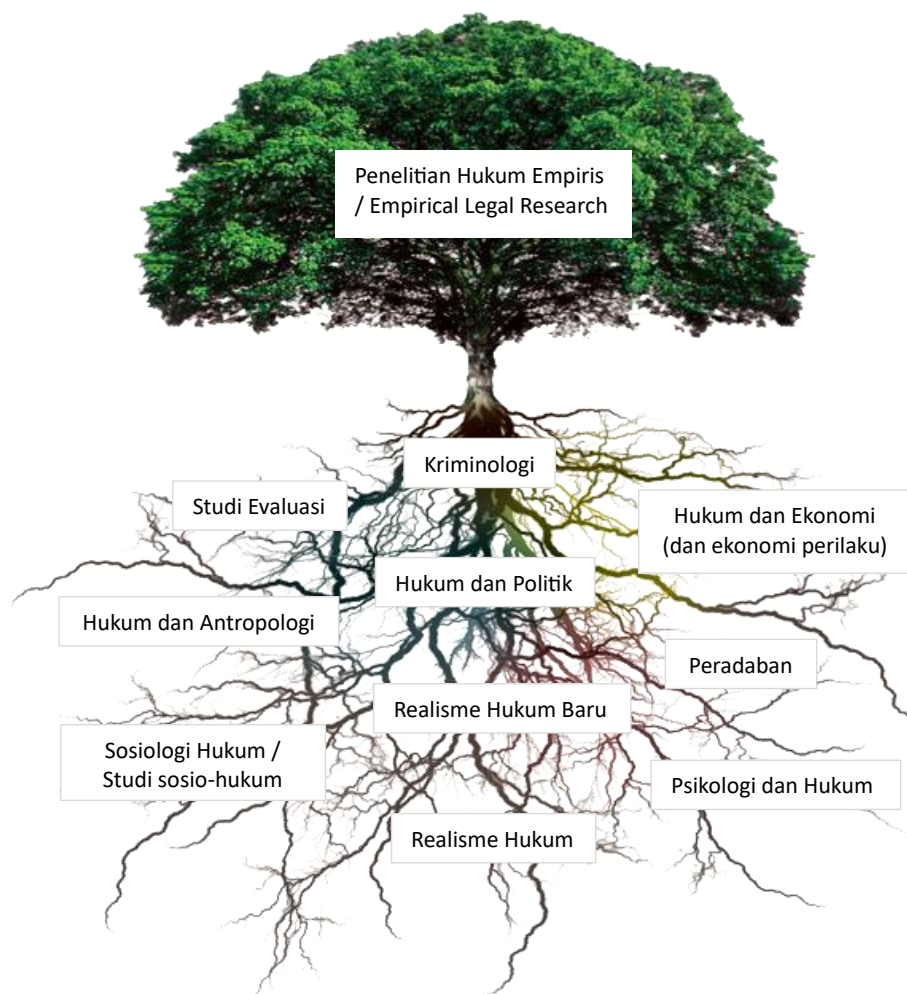
kemudian (Derlien, 1999). 'Evaluation Atlas' oleh Furubo dkk. (2002) dan pembaruan terkininya (mencakup tahun 2002–2012) oleh Jacob dkk. (2015) menjelaskan perkembangan studi evaluasi di sekitar 20 negara secara terperinci.

Kesimpulan

Penelitian hukum empiris berakar pada berbagai disiplin ilmu, subdisiplin ilmu, dan spesialisasi, beberapa di antaranya sudah ada sejak berabad-abad lalu. Kotak peralatannya berupa pendekatan penelitian, metode, dan teknik cukup luas. Contohnya adalah:

- 'Yurisprudensi sosiologis' dari Realisme Hukum Amerika, tempat hukum dan sosiologi digabungkan sampai batas tertentu;
- Wawasan dari dan pengalaman dengan studi eksperimental dalam kriminologi, ekonomi, sosiologi, dan psikologi hukum digabungkan dengan penelitian hukum tentang dampak sosial sanksi pidana, penyelesaian sengketa, dan pengaturan lainnya;
- Wawasan dari metode survei dalam sosiologi untuk memenuhi kebutuhan bukti tentang 'angka gelap' dalam kriminologi dan untuk mengetahui persepsi korban kejahatan, digabungkan dengan wawancara etnografis, studi kasus, dan 'deskripsi tebal' dari antropologi hukum dan dengan data register (dari kebijakan dan jaksa penuntut umum);
- Karya peneliti psikologi dan hukum tentang 'pola pikir peradilan', yang mencakup mengartikulasikan teori implisit tentang pelaku hukum, terkait dengan 'evaluasi yang didorong oleh teori', di mana asumsi yang mendasari intervensi dan kebijakan (hukum) direkonstruksi (menjadi teori intervensi) dan diuji; dan:
- Pengalaman dari bekerja dengan repositori, tinjauan sistematis, tinjauan cepat, dan sintesis realis dari kedokteran, penelitian kesehatan masyarakat, serta penelitian perilaku dan ekonomi terkait dengan kebutuhan untuk memahami penerimaan sosial dan dampak perilaku dari pengaturan hukum.

Sebagai kesimpulan, Gambar 1.1 menyajikan gambaran grafis tentang apa yang kita lihat sebagai akar kognitif ('ilmiah') dari penelitian hukum empiris. ELR sendiri menggabungkan kombinasi (sub)disiplin dan spesialisasi yang dapat ditemukan dalam akar ini.



Gambar 1.1 Akar penelitian hukum empiris

BAB 2

MASALAH SOSIAL

2.1 PENDAHULUAN

Masalah hukum, organisasi, atau ekonomi dapat menciptakan kebutuhan untuk penelitian empiris, tetapi sering kali perlu 'diterjemahkan' menjadi masalah yang dapat diteliti. Ambil contoh masalah perbedaan antara wilayah geografis di suatu negara saat berhadapan dengan penerapan dan penerapan inovasi teknologi forensik oleh lembaga penegak hukum. Jika perbedaan ini ada, perbedaan tersebut tidak hanya dapat menyebabkan ketidaksetaraan dalam hal tingkat deteksi (atau penyelesaian) kejahatan antarwilayah, tetapi juga inefisiensi dalam kegiatan operasional lembaga penegak hukum. Hal itu, pada gilirannya, dapat berkontribusi pada perdebatan tentang seberapa inovatif wilayah tertentu, siapa yang merupakan 'pengguna awal' dan siapa yang 'tertinggal', dan mengapa demikian. Situasi seperti itu dapat mengarah pada masalah penelitian berikut:

Apa saja indikator perbedaan dalam adopsi (tingkat) inovasi teknologi-forensik seperti 'lab pada chip' dan 'pengenalan pelat nomor otomatis' (ANPR), bagaimana perbedaan wilayah di negara X dalam adopsi (tingkat), bagaimana perbedaan ini dapat dijelaskan dan apa konsekuensinya bagi penegakan hukum di negara ini?

Contoh kedua menyangkut masalah bahwa beberapa organisasi sektor publik dihadapkan pada lebih banyak penipuan dan korupsi daripada yang lain. Penipuan dan korupsi adalah masalah sosial yang memiliki konotasi moral dan hukum (yang kuat). Namun, sebelum memulai proyek penelitian, masalah seperti itu perlu diterjemahkan agar dapat diteliti. Penipuan dan korupsi terlalu luas, jadi diperlukan fokus.

Itu dapat diwujudkan dengan melihat prevalensi penipuan dan korupsi di lembaga selama beberapa tahun dan ke dalam peran departemen audit (internal) yang dimainkan (atau tidak dimainkan) dalam mendeteksi, mencegah, dan mengurangi penipuan. Fokus seperti itu akan membuat proyek penelitian lebih dapat dilakukan. Tujuannya bisa jadi untuk menghasilkan bukti bagi para pengacara yang membantu mereka merancang dan menerapkan peraturan dan operasi dalam 'perang melawan penipuan' (seperti memberdayakan departemen audit (internal)). Masalah penelitiannya bisa jadi seperti ini:

Dapatkan keberadaan (atau ketiadaan) departemen audit internal dalam lembaga menjelaskan mengapa organisasi-organisasi ini menghadapi lebih banyak risiko terkait penipuan dan korupsi daripada yang lain, sejauh mana hal ini terjadi dan bagaimana temuan-temuan tersebut dapat dijelaskan dan digunakan untuk menetapkan cara-cara (yang lebih efektif) untuk mendeteksi, mencegah, dan mengurangi penipuan dan korupsi?

Jika transformasi dari masalah masyarakat menjadi masalah penelitian dalam kedua contoh tersebut relatif sederhana, dalam contoh ketiga hal tersebut lebih rumit. Di sini, masalah

masyarakat adalah 'perampasan aturan'. Barendrecht dkk (2012: 3) menggambarkan fenomena ini sebagai berikut:

Selama sebagian besar abad ke-20, kekuatan untuk menetapkan aturan terpusat di negara-bangsa. Hal ini berubah ketika organisasi-organisasi internasional mulai muncul; hal ini berubah lebih dramatis di era globalisasi, di mana pembuatan aturan secara privat, informal, dan internasional menjadi semakin lazim.

Sekarang, yang Anda butuhkan untuk membuat aturan hanyalah sekelompok orang yang terorganisasi dengan baik dan situs web. Badan semacam itu dapat menetapkan aturan bagi pihak lain dan mencoba memperoleh legitimasi, sering kali dengan kontrol yang agak minim oleh pembuat undang-undang nasional... Pada titik ini, apakah tidak ada alat untuk mengevaluasi aktivitas pembuatan peraturan di seluruh dunia secara komprehensif? Apakah nilai-nilai supremasi hukum terjamin? Apakah bentuk-bentuk pembuatan peraturan baru mengurangi atau meningkatkan kemungkinan apa yang oleh para ekonom disebut kegagalan regulasi dan penangkapan regulasi? Dan apa yang dapat kita katakan tentang dampak dan keadilan hasil?

Untuk merumuskan masalah penelitian (empiris), perlu untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan konsep-konsep seperti 'organisasi internasional', 'globalisasi', 'kontrol oleh pembuat undang-undang nasional', 'pembuatan hukum swasta', 'nilai-nilai' dan 'kegagalan dan penangkapan regulasi'. Tantangan lainnya adalah untuk memeriksa apakah latar belakang yang menjadi dasar perumusan masalah ini ('pada masa lalu sebagian besar hanya negara-negara bangsa yang membuat peraturan') sudah benar.

Dan itu harus diartikulasikan ketika jumlah (dan kompleksitas) aturan dalam masyarakat dapat diberi label sebagai 'rimba'. Akhirnya, tidak hanya spesifikasi konsep yang dibutuhkan, tetapi juga negara/negara bangsa mana yang terlibat, selama tahun berapa – kriteria inklusi. Mengubah masalah pelanggaran aturan menjadi masalah penelitian hampir merupakan proyek penelitian kecil dengan sendirinya.

Dalam bab ini, kami membedakan antara berbagai jenis masalah penelitian, cara merumuskannya, dan mencegah kegagalan saat menyusunnya. Pertama, kami menanyakan dari mana masalah penelitian biasanya berasal.

Surat kabar, majalah, program TV, dan penelitian sebelumnya (yang mengarah pada temuan yang bertentangan atau hanya jawaban sebagian untuk pertanyaan penelitian sebelumnya) mengenai masalah (sosio-)hukum, blog, berbicara dengan kolega, monolog internal, dan situs web adalah sumber. Melihat, belajar, dan menjelajah adalah rute yang harus diikuti.

Karena jumlah topik yang bersifat hukum atau semi-hukum di masyarakat sangat banyak, gagasan Graziano dan Raulin (2004) bahwa 'pertanyaan ada di mana-mana; yang harus Anda lakukan hanyalah mengamati dan ingin tahu', adalah setengah jalan menuju kebenaran. Adalah bijaksana untuk membuat 'aturan penghentian' atau 'pilihan keluar'. Jika tidak, monolog internal, penjelajahan, pembicaraan, dan pembelajaran dapat berlangsung

begitu lama sehingga Anda bahkan tidak akan pernah memulai penelitian itu sendiri.

Setelah topik tertentu diidentifikasi, proses spesifikasi dimulai. Misalkan topiknya adalah 'gender dan kejahatan'. Ini terlalu luas untuk memungkinkan penyelidikan empiris yang serius. Spesifikasi dan fokus diperlukan. Yang membantu adalah, sekali lagi, penjelajahan, pengamatan, pembelajaran, dan penggabungan. Penting juga untuk memikirkan tujuan penelitian. Tujuan 'mengidentifikasi hasil (atau "sasaran") yang diinginkan dan menunjukkan jenis pertanyaan yang perlu diajukan untuk mencapai hasil ini'. Dia memberikan contoh berikut:

- Tujuan: Untuk mengetahui mengapa individu dan kelompok tertentu mengadopsi teknologi baru 'xyz' sebelum yang lain.
- Pertanyaan penelitian: Apa saja pola konsumsi teknologi baru di antara berbagai kelompok orang dewasa di Inggris? Apa saja alasan yang dikemukakan individu yang berbeda untuk mengadopsi atau tidak mengadopsi teknologi baru?

Bunge (1997) menyarankan beberapa perintah tentang cara menemukan topik dan masalah penelitian:

- Mengkritik solusi yang diketahui untuk masalah (yang sudah ada), yaitu mencari kekurangannya;
- Menerapkan solusi yang diketahui pada situasi baru dan melihat apakah solusi tersebut masih berlaku;
- Menggeneralisasi masalah lama: mencoba variabel baru dan/atau domain baru;
- Melihat ke luar: mencari hubungan dengan masalah yang termasuk dalam bidang yang berbeda.

2.2 TIPOLOGI PERTANYAAN PENELITIAN

Sampai saat ini kita mungkin memiliki kesan bahwa ada jenis masalah penelitian yang cocok untuk semua orang. Kenyataannya tidak demikian: beberapa jenis masalah memang ada. Dan masalah-masalah tersebut harus dibedakan. Mengapa demikian? Karena cara Anda merancang proyek penelitian empiris sebagian bergantung pada jenis masalah penelitian yang sedang Anda garap. Masalah bukanlah satu-satunya penentu terpenting dari pekerjaan empiris, tetapi perannya tidak boleh diremehkan. Trochim dan Donnelly (2007) membedakan antara masalah deskriptif dan masalah eksplanatif.

Pertanyaan deskriptif: Di sini fokusnya adalah untuk mendeskripsikan apa yang sedang terjadi di bidang, masyarakat, atau organisasi tertentu (selama periode tertentu). Jajak pendapat publik yang menjawab pertanyaan, berapa proporsi orang yang memiliki pendapat tertentu tentang topik hukum?, adalah contohnya. Mempertanyakan hubungan antara variabel sering kali menjadi bagian dari masalah tersebut. Jajak pendapat publik yang membandingkan berapa proporsi pria dan wanita yang mendukung undang-undang eutanasia (baru) di negara mereka, dan apa karakteristik sosial mereka, membahas pertanyaan deskriptif. Terkadang, masalah penelitian komparatif menjadi bagian dari 'keluarga masalah' ini. Pertanyaan penelitian deskriptif juga dapat bersifat eksploratif, mencoba memahami topik (baru, tidak

dikenal). Lakhani (2013) meneliti konsekuensi dari 'infiltrasi' iPhone, Blackberry, dan Android ke dalam profesi hukum dan penyelesaian sengketa dan melihat bagaimana tren ini memengaruhi hukum dan profesi hukum, isu apa yang ditimbulkannya bagi pengacara dan hakim, apakah hukum baru diperlukan untuk memperhitungkan dampak situs jejaring sosial (pada profesi hukum) dan apa manfaat teknologi tersebut dalam mendorong akses ke keadilan.

Pertanyaan penjelasan (kausal): Jika kita melakukan jajak pendapat publik untuk menentukan apakah kampanye kesadaran di Belgia tentang undang-undang (i)migrasi baru mengubah preferensi masyarakat terhadap jumlah pencari suaka yang dianggap dapat diterima oleh negara tersebut, kita akan mempelajari apakah kampanye (penyebab) mengubah proporsi orang yang positif atau negatif tentang imigrasi. Pertanyaan kausal juga dikenal sebagai pertanyaan 'penjelasan' atau 'mengapa'. Jenis pertanyaan ini dapat dilihat sebagai kumulatif. Seseorang tidak dapat menjawab pertanyaan penjelasan jika pertanyaan deskriptif belum dijawab dengan benar terlebih dahulu. Diformulasikan dalam istilah yang lebih epistemologis: explanandum harus diketahui sebelum explanans dapat dikembangkan.

KOTAK 2.1 PERTANYAAN PENELITIAN W DAN H

Pertanyaan W deskriptif: apa, siapa, kapan, di mana? Apa yang terjadi di bidang hukum keluarga terkait perceraian? Siapa yang terlibat? Periode waktu mana yang akan diteliti dan di negara mana?

Pertanyaan W(hy) eksplanatif: mengapa perkembangan X dan Y dalam hukum keluarga terkait perceraian terjadi di negara Q?

Pertanyaan H(ow) eksplanatif: bagaimana perkembangan X dan Y ini memengaruhi sistem hukum dan perilaku orang P dan organisasi O?

Semua pertanyaan lainnya:

Knight (2009) merujuk pada tiga pertanyaan pertama dan pada 'pertanyaan bagaimana'. Van Thiel (2010) menyebutkan masalah penelitian eksploratif dan diagnostik. Namun, masalah eksploratif sering kali merupakan masalah deskriptif sementara definisinya tentang masalah diagnostik ('apa itu hambatan, dan faktor apa yang berkontribusi terhadapnya?') juga mengarah pada deskripsi (dan sampai batas tertentu 'penjelasan').

Tipologi kedua didasarkan pada Bunge (1997) dan White (2009). Tipologi ini membedakan antara pertanyaan W deskriptif, pertanyaan W eksplanatori, dan pertanyaan lainnya.

Tipologi lain sebagian didasarkan pada Van Thiel (2010). Karena penelitian empiris mencakup lebih dari sekadar pertanyaan deskriptif dan eksplanatori, tipologi ini juga membahas pertanyaan normatif dan desain.

KOTAK 2.2 TIPOLOGI PERTANYAAN PENELITIAN VAN THIEL (2010)

Pertanyaan deskriptif: bagaimana individu dan usaha kecil dan menengah menangani konflik (hukum) mereka? Berapa banyak orang yang mengunduh musik, film, dan buku secara ilegal? Bagaimana skor sampel negara pada indikator A, B, dan C tentang supremasi hukum dan hak asasi manusia?

Pertanyaan kausal (atau penjelasan): apakah peningkatan biaya pengadilan menyebabkan lebih sedikit konflik hukum yang dibawa ke pengadilan dan mengapa? Apakah kampanye informasi berbasis web mencoba mengurangi pembajakan digital, mengubah perilaku pilihan konsumen (yaitu mencegah dan/atau mengurangi pengunduhan ilegal) dan jika demikian, bagaimana cara kerjanya? Bagaimana perbedaan di negara X dan Z antara skor pada indikator supremasi hukum dan hak asasi manusia dapat dijelaskan?

Pertanyaan normatif: Haruskah pemerintah mendorong konflik antara anggota masyarakat untuk diselesaikan di luar sistem hukum, bukan melalui pengadilan?

Pertanyaan desain: Bagaimana rezim kepemilikan bersama/sumber daya milik bersama dapat diatur sedemikian rupa sehingga berkontribusi secara efisien dan efektif terhadap keberlanjutan sumber daya alam? Bagaimana otoritas pengawasan digital dapat diatur dan dikelola dengan baik sehingga kejahatan dunia maya dan ketidakamanan dunia maya dapat dicegah atau dikurangi?

Terkadang pertanyaan penelitian yang berorientasi pada desain dapat dikaitkan dengan 'penelitian tindakan'. Penelitian tindakan adalah 'proses partisipatif dan demokratis yang berkaitan dengan pengembangan pengetahuan praktis dalam mengejar tujuan manusia yang berharga, yang didasarkan pada pandangan dunia partisipatif. Penelitian tindakan berusaha menyatukan tindakan dan refleksi, teori dan praktik, dalam partisipasi dengan orang lain, dalam mengejar solusi praktis untuk masalah yang menjadi perhatian mendesak bagi orang-orang, dan secara umum untuk kemajuan individu dan komunitas mereka'. Lihat Reason dan Bradbury (2001) untuk informasi lebih lanjut.

KOTAK 2.3 PERTANYAAN PENELITIAN TIPOLOGI DENSCOMBE (2002)

Permasalahan penelitian yang berfokus pada perkiraan dan prediksi: apakah undang-undang tentang pencegahan komersialisasi ibu pengganti akan efektif dalam hal mewujudkan tujuannya? Permasalahan penelitian yang berfokus pada penjelasan penyebab dan/atau akibat: bagaimana menjelaskan bahwa penerimaan sosial terhadap sanksi pidana Pasal 1–Pasal 3 telah meningkat di negara Y sejak tahun 2000?

Permasalahan penelitian evaluatif: apa saja dampak dan efek samping dari undang-undang

pengurangan kehamilan remaja yang diterapkan pada tahun 2015 di negara Y? Kapan pengungkapan dan 'penghinaan dan penghinaan' di dunia medis berhasil (untuk siapa dan dengan dampak apa)?

Permasalahan penelitian deskriptif: bagaimana orang dan usaha kecil dan menengah menangani konflik (hukum) mereka?

Mengembangkan permasalahan praktik yang baik: bagaimana organisasi pengawasan (seperti inspektorat) dapat dirangsang untuk mengurangi beban administratif inspeksi mereka terhadap orang yang diinspeksi tanpa membahayakan pelaksanaan tugas mereka secara independen? Permasalahan penelitian yang membahas pemberdayaan: apakah penerapan hak penarikan di seluruh Eropa memberdayakan posisi konsumen di UE?

Tipologi-tipologi ini pertama-tama memberi tahu kita bahwa meskipun labelnya berbeda, terdapat tumpang tindih antara berbagai jenis masalah. Masalah desain dan masalah yang berfokus pada pengembangan praktik yang baik saling tumpang tindih. Mendesain kebijakan (hukum) atau intervensi atau organisasi lain sama halnya dengan mencoba mengembangkan 'praktik (yang baik)', atau sebagaimana Howarth (2013) menyebutnya, perangkat hukum. Masalah deskriptif dan eksplanatori mencakup pertanyaan komparatif, sementara masalah normatif dan masalah yang membahas pemberdayaan juga tumpang tindih.

Hal yang sama berlaku sampai batas tertentu untuk masalah yang berfokus pada peramalan dan prediksi serta masalah yang membahas evaluasi, karena evaluasi eks ante sering kali mencoba memprediksi dampak intervensi terhadap perilaku manusia. Hal terkait lainnya adalah bahwa masalah kausal dalam penelitian hukum empiris menyerupai masalah yang 'berorientasi pada evaluatif/evaluasi'. 'Penelitian hukum sering kali menyangkut topik [seperti]: apakah akan berhasil? Apakah akan diimplementasikan (atau dijalankan) dengan cara yang sesuai dengan apa yang disepakati? Dan: apakah berhasil?'. Namun, perlu diperhatikan fakta bahwa tidak semua evaluasi merupakan evaluasi eks ante dan dampak (atau efektivitas). Proses implementasi juga merupakan objek evaluasi (hukum).

Namun, tipologi ini juga berbagi informasi tentang perbedaan antara (jenis) masalah penelitian. Secara khusus, perbedaan antara masalah normatif dan masalah lainnya sangat penting. White (2010) menyatakannya sebagai berikut:

Pertanyaan normatif . . . sering kali berkaitan dengan apa yang 'seharusnya' atau 'seharusnya', apa yang 'diinginkan' atau 'tidak diinginkan', apa yang 'benar' atau 'salah', atau apa yang 'baik' atau 'buruk'. Dalam filsafat, pernyataan normatif dikontraskan dengan pernyataan deskriptif, yang pada prinsipnya dapat diuji melalui pengamatan . . . Contoh sederhana dari pertanyaan normatif adalah: 'haruskah hukuman fisik diperkenalkan kembali di Inggris di sekolah menengah?' Masalah utama dengan pertanyaan ini adalah dimasukkannya istilah 'seharusnya'.

Ini bukan pertanyaan tentang dampak hukuman fisik terhadap aspek tertentu dari pendidikan siswa, melainkan pertanyaan yang mencari pendapat tentang masalah etika. Hal ini tidak dapat dipecahkan secara empiris karena tidak ada satu jawaban yang benar. Seseorang dapat menjadi pendukung atau penentang hukuman fisik, terlepas dari hasil studi empiris tentang penyebab dan akibat dari perilaku ini. Dalam Bab 7, kita akan membahas kesenjangan antara bukti empiris dan normativitas (hukum) ini secara lebih mendalam.

Dalam buku ini, kita akan membahas tipologi (terpadu) berikut dari lima jenis dan subjenis masalah penelitian. Seperti yang dikatakan sebelumnya, memahami jenis masalah penelitian sangat penting, karena hubungan antara apa yang dimaksud dengan masalah penelitian dan desain investigasi empiris. Mempelajari masalah deskriptif tentang sikap siswa sekolah menengah atas terhadap imigrasi memungkinkan lebih banyak kebebasan saat merancang penelitian daripada ketika evaluasi eks post tentang dampak undang-undang antiperkosaan terhadap kekerasan dilakukan. Dalam Bab 4, kita akan membahas aspek ELR ini secara lebih mendalam.

2.3 MASALAH PENELITIAN YANG MEMADAI DARI YANG KURANG MEMADAI?

Merupakan fakta kehidupan bahwa masalah penelitian tidak selalu dirumuskan dengan cara yang memadai. Bidang studi yang disebut ‘teori dan metodologi masalah’ membahas kekurangan dalam formulasi masalah. Salah satu kekurangannya adalah bahwa para peneliti bekerja pada masalah yang ‘dirumuskan dengan buruk’. Kekurangan lainnya adalah bahwa formulasi masalah terkadang kurang ringkas, jelas, dan tepat. Kekurangan ketiga adalah bahwa latar belakang masalah tidak tepat. Ultee (2001) menyebutnya sebagai ‘masalah yang keliru’. Penting untuk mencegah hal-hal ini dan beberapa kegagalan lainnya sebelum memulai penelitian itu sendiri.

Kegagalan 1: mempelajari masalah penelitian yang dirumuskan dengan buruk dan dirumuskan secara sub-optimal: Waddington et al (2012) memberikan contoh yang menarik. ‘Jawaban yang baik membutuhkan pertanyaan yang baik. Masalah utama dalam menetapkan pertanyaan adalah keluasan pertanyaan. Kita semua ingin mengetahui jawaban atas pertanyaan ‘bagaimana kita mengakhiri kemiskinan global dan mencapai perdamaian dunia?’, tetapi itu terlalu luas untuk sebuah proyek penelitian’.

Sejalan dengan ini, mengajukan pertanyaan ‘bagaimana situasi di Prancis terkait kejahatan dunia maya?’ adalah contoh lain dari masalah yang dirumuskan dengan buruk, karena hanya topik yang sangat luas (‘variabel objek’) yang dirumuskan. Aspek kejahatan dunia maya mana (modus operandi atau bidang yang dicakup), selama periode mana (bulan lalu, tahun lalu, dekade lalu) dan mengenai siapa (perusahaan, individu, korban, pelaku) tidak didefinisikan. Kegagalan ini dapat dicegah dengan menentukan setidaknya dua variabel lain, di samping ‘variabel objek’: variabel independen dan variabel dependen. Sebuah contoh akan membantu. Ambil ‘masalah penelitian’ ini: bagaimana situasi di Belanda terkait penyelesaian sengketa? Masalah ini tidak dirumuskan dengan baik.

KOTAK 2.4 TIPOLOGI TERPADU MASALAH PENELITIAN

Tipe 1: Masalah penelitian deskriptif:

Tipe 1.1 Masalah penelitian yang berfokus pada penjelajahan dan penggambaran keadaan fenomena (hukum): Bagaimana orang dan usaha kecil dan menengah di Skandinavia dan Belanda menangani konflik (hukum) mereka? Berapa banyak orang di Eropa yang mengunduh musik, film, dan buku secara ilegal?

Tipe 1.2 Masalah penelitian yang berfokus pada penjelajahan atau pembuatan perbandingan: Bagaimana skor sampel negara pada indikator a–k tentang supremasi hukum dan hak asasi manusia selama lima tahun terakhir?¹ Bagaimana independensi peradilan ditetapkan dan dipertahankan dalam praktik di negara-negara Y?

Tipe 2: Masalah penelitian kausal (atau penjelasan):

Ketika peningkatan biaya pengadilan di negara P menyebabkan lebih sedikit konflik hukum yang dibawa ke pengadilan, bagaimana hal ini dapat dijelaskan? Apakah kampanye informasi berbasis web yang disponsori pemerintah tentang pembajakan digital mengubah perilaku pilihan konsumen (yaitu mencegah dan/atau mengurangi pengunduhan ilegal – misalnya – buku/musik/film) di negara Z dan bagaimana hal ini dapat dijelaskan?

Tipe 3: Masalah penelitian normatif:

Haruskah pemerintah Eropa mendorong konflik antara anggota masyarakat untuk diselesaikan di luar sistem hukum, dan bukan melalui pengadilan?

Tipe 4: Pertanyaan penelitian evaluatif:

Tipe 4.1 Masalah penelitian evaluatif yang bersifat *ex ante*: Apakah undang-undang tentang pencegahan komersialisasi ibu pengganti di negara M akan efektif dalam hal mewujudkan tujuannya?

Tipe 4.2 Masalah penelitian evaluatif yang berfokus pada proses implementasi: Sejauh mana program modifikasi perilaku X, Y, dan Z diimplementasikan di penjara P dan Q sesuai rencana?

Tipe 4.3 Masalah penelitian evaluatif yang bersifat *ex post*: Apa saja dampak dan efek samping dari undang-undang pengurangan kehamilan remaja yang diimplementasikan pada tahun 2010 di negara Q? Apa saja dampak liberalisasi penggunaan ganja untuk alasan rekreasi terhadap kesehatan dan kejahatan (angka)?

Tipe 5: Pertanyaan penelitian berorientasi desain:

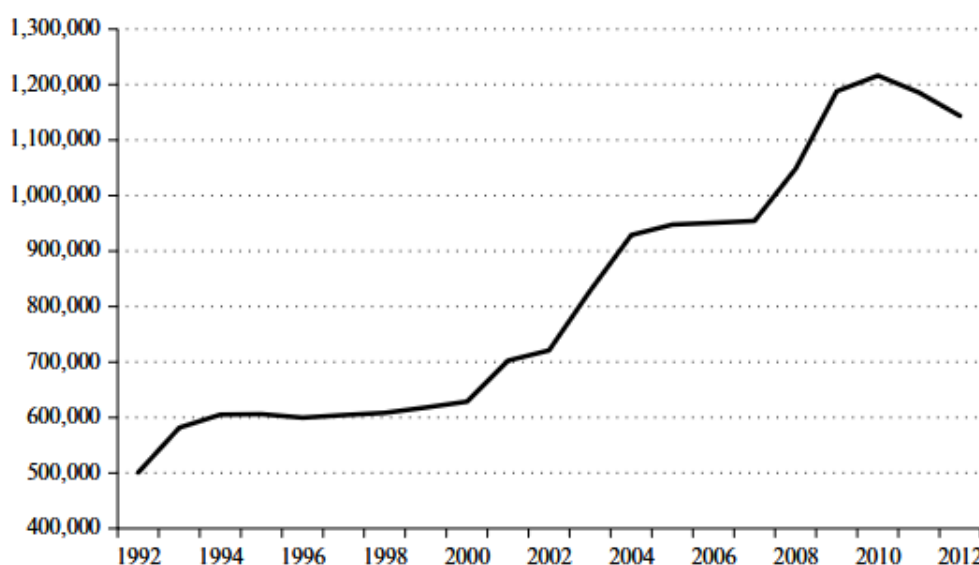
Tipe 5.1 Masalah penelitian terkait pengembangan desain: Bagaimana rezim kepemilikan bersama/sumber daya milik bersama (CPR) dapat diatur sedemikian rupa sehingga berkontribusi secara efisien dan efektif terhadap keberlanjutan sumber daya alam?

Tipe 5.2 Masalah penelitian terkait uji coba desain: Bagaimana desain CPR yang difokuskan pada pencegahan kerusakan stok ikan di Mediterania dapat diuji dan apa saja hasilnya?

Masalah yang lebih tepat adalah: apakah penerapan pengaturan tanpa-penyembuhan, tanpa-pembayaran bagi pengacara di Belanda akan memengaruhi cara warga menyelesaikan sengketa dan tingkat kepuasan mereka terkait penyelesaian sengketa? Sekarang topik utama (penyelesaian sengketa [variabel objek]), variabel 'independen' (atau asumsi kausal) (pengaturan tanpa-penyembuhan, tanpa-pembayaran) dan konsekuensi yang diasumsikan (atau variabel 'dependen') (penyelesaian sengketa dan tingkat kepuasan) diartikulasikan.⁸ Hal ini membuat masalah 'lebih kecil', tetapi itulah harga yang harus dibayar untuk mencegah penyelesaian masalah dengan kualitas rendah atau buruk.

Contoh kedua sedikit lebih rumit. Sengketa komersial kecil dalam sistem pengadilan Belanda ditangani oleh hakim kanton. Selama dekade terakhir, yurisdiksi hakim ini telah meningkat. Pada tanggal 1 Juli 2011, sengketa perdata komersial dengan nilai keuangan antara Rp. 5.000.000 dan 25.000.000 ditambahkan ke kompetensi hakim kanton. Di bawah yurisdiksi hakim kanton, kasus-kasus tersebut diharapkan ditangani dengan cara yang kurang formal. Perubahan penting bagi para pihak termasuk bahwa menyewa pengacara tidak lagi wajib (para pihak diizinkan pergi ke pengadilan tanpa diwakili, atau diwakili oleh siapa pun yang mereka pilih) dan bahwa adalah mungkin untuk menyampaikan kasus mereka secara lisan.

Bersamaan dengan penerapan perubahan ini, bagian lain dari undang-undang tersebut diubah: tugas pengadilan ditingkatkan, khususnya untuk pelaku korporat. Eshuis et al (2014) menyelidiki perubahan tersebut, mengukur apa, dalam contoh kasus, yang terjadi selama proses penerapan, seberapa puas para pihak dengan proses penanganan, dan apa hubungan antara perubahan ini (dan beberapa lainnya) dalam aturan dan jumlah kasus hukum perdata yang ditangani oleh para hakim. Informasi statistik menunjukkan bahwa setelah hampir 20 tahun jumlah perkara perdata meningkat, pada sekitar tahun 2011 terjadi penurunan mendadak. Gambar 2.1 menunjukkan data tersebut.



Gambar 2.1 Perkembangan kasus perdata di Belanda dalam jumlah total (1992–2012)

Eshuis et al (2014) mengajukan pertanyaan apakah dan sejauh mana penurunan jumlah kasus

pengadilan terkait (atau dapat dikaitkan) dengan - khususnya - dua perubahan dalam undang-undang: tugas pengadilan yang lebih tinggi dan perubahan tingkat kompetensi pengadilan. Para penulis membatasi penelitian mereka hingga 2009-2012, dan tidak mempertimbangkan 17 tahun sebelum perubahan ini (ketika ada peningkatan yang kuat dalam jumlah kasus). Meskipun ini mungkin tampak sebagai pendekatan yang memadai, para penulis bekerja pada masalah yang dirumuskan secara sub-optimal.

Pertama, karena mereka tidak memperhatikan perbedaan antara 17 tahun pertumbuhan dan dua hingga tiga tahun penurunan dalam jumlah kasus hukum perdata. Kedua, karena fokus mereka pada beberapa tahun terakhir, peran yang dimainkan oleh dua perubahan kebijakan (tugas pengadilan yang lebih tinggi dan perubahan kompetensi pengadilan) mungkin terlalu ditekankan. Perumusan masalah yang lebih luas ('faktor-faktor apa saja yang menyebabkan peningkatan jumlah perkara hukum perdata sejak tahun 1992, apakah telah terjadi perubahan faktor-faktor tersebut selama beberapa tahun terakhir, peran apa yang dimainkan oleh kedua perubahan kebijakan tersebut dalam menjelaskan perkembangan terkini, dan faktor-faktor apa saja (yang mungkin) berkontribusi terhadap perkembangan ini?') akan lebih baik.

Kegagalan 2: mempelajari masalah penelitian yang keliru: Ini adalah masalah yang dirumuskan dengan latar belakang yang terdiri dari setidaknya satu pernyataan yang salah. Latar belakang tersebut 'dibentuk oleh pengetahuan sebelumnya dan, khususnya, oleh praanggapan masalah. Praanggapan masalah adalah pernyataan yang entah bagaimana terlibat tetapi tidak dipertanyakan dalam pernyataan masalah dan dalam penyelidikan yang dipicu olehnya'.

Dua contoh akan membantu. Untuk menanyakan mengapa perempuan yang memilih partai konservatif X di negara Y selama 10 tahun terakhir memiliki tingkat kesuburan yang lebih rendah daripada perempuan yang memilih partai sosialis P (di negara yang sama selama periode yang sama), adalah masalah penelitian yang keliru, jika pernyataan yang termasuk dalam latar belakang masalah tersebut secara empiris tidak benar (yaitu perempuan yang memilih partai sosialis tidak memiliki tingkat kesuburan yang lebih rendah daripada perempuan yang memilih partai konservatif).

Contoh kedua datang dari White (2010): 'Ambil pertanyaan "Pada usia berapa anak laki-laki berhenti berprestasi buruk di sekolah?" Kelihatannya seperti pertanyaan yang "jelas" tetapi sebenarnya itu adalah pertanyaan ganda: apakah anak laki-laki berprestasi buruk di sekolah? Dan: pada usia berapa?' Asumsi bahwa anak laki-laki berprestasi buruk harus terlebih dahulu diuji (dan dikuatkan) sebelum pertanyaan usia dapat ditanyakan.

Kegagalan 3: mempelajari masalah yang kurang jelas: Mendefinisikan istilah-istilah kunci sangat penting untuk mewujudkan kejelasan pertanyaan penelitian (Nachmias dan Nachmias, 1976). Akan tetapi, kejelasan tidak hanya menyangkut definisi.

Meskipun saran Kane (1984) bahwa semua masalah penelitian harus diajukan sebagai satu kalimat merupakan pernyataan yang berlebihan, peribahasa Jerman yang mengatakan bahwa '*in der Beschränkung zeigt sich erst der Meister*' berlaku, karena struktur masalah

penelitian memang bisa jadi tidak jelas. Ketika satu masalah penelitian mencakup sekitar 20 (atau lebih) sub-pertanyaan dan sub-sub-pertanyaan, tanpa menyebutkan bagaimana mereka saling terkait, hal ini akan mengurangi arahan yang berasal dari masalah penelitian. Kegagalan seperti itu juga dapat terjadi pada arah yang berlawanan. Epstein dan Martin (2014) memberikan contoh masalah, 'apa yang membuat orang mematuhi hukum?' Masalah menyeluruh yang menarik, tetapi jika tidak dipecah menjadi satu atau lebih sub-pertanyaan spesifik (seperti, dalam kasus mereka, 'apakah undang-undang pengendalian senjata mengurangi kejahatan kekerasan?'), akan sulit untuk menjawabnya.

Kegagalan 4: mempelajari masalah yang dicirikan oleh tingkat abstraksi yang salah: Van Thiel (2010) memberikan dua contoh. Yang pertama adalah ketika seorang peneliti merumuskan masalah yang terlalu abstrak dan umum (misalnya mengenai dampak indikator kinerja utama pada efisiensi tugas publik yang dilakukan oleh kotamadya), padahal sebenarnya penelitian tersebut akan didedikasikan hanya untuk satu kotamadya tertentu. Contoh lainnya adalah memilih tingkat abstraksi yang terlalu rendah. Ini terjadi ketika masalah penelitian pada dasarnya tidak lebih dari satu atau dua pertanyaan yang sangat konkret dan langsung yang harus dijawab oleh responden dalam survei (web).

Kemudian tautan dengan masalah yang lebih umum ('menyeluruh'), di mana 'pertanyaan responden' ini berada, tidak ada. Seperti yang dikatakan Yeager (2008): masalah penelitian 'adalah pertanyaan fokus yang ingin dijawab oleh proyek penelitian. Ini bukan pertanyaan yang dikembangkan untuk survei atau protokol wawancara'.

Kegagalan 5: mempelajari masalah penelitian tautologis: Masalah tautologis bermasalah karena benar menurut definisinya dan karena mengajukan pertanyaan yang sama dua kali. Contoh pertanyaan penelitian tautologis adalah: mengapa kelas pekerja terlalu banyak terwakili dalam beberapa jenis pekerjaan? Sekilas pertanyaan ini mungkin tampak sangat masuk akal.

Kesulitannya adalah bahwa jenis pekerjaan yang dilakukan seseorang merupakan inti dari sebagian besar definisi kelas sosial atau pekerjaan. Orang-orang didefinisikan sebagai 'kelas pekerja' setidaknya sebagian karena jenis pekerjaan yang mereka lakukan. Oleh karena itu, pertanyaan tersebut berlebihan karena sudah menyediakan jawaban: kelas pekerja terlalu banyak terwakili dalam jenis pekerjaan tertentu karena bekerja dalam pekerjaan ini menyebabkan orang-orang didefinisikan sebagai kelas pekerja.

Kesimpulan

- Pahami jenis masalah penelitian; 'masalah tersebut dapat membantu Anda memikirkan jenis pertanyaan yang Anda ajukan'.
- Ketahui dan periksa pengetahuan latar belakang yang menjadi dasar Anda merumuskan masalah penelitian dan perhatikan apa yang 'sudah diketahui tentang masalah tersebut'.
- Pahami kegagalan (lainnya) dalam hal perumusan masalah.

- Jelaskan secara tepat cakupan masalah Anda; definisi konsep; kerangka waktu untuk penelitian; lokasi geografis; tingkat abstraksi masalah dan unit analisis (orang perseorangan, pelaku perusahaan, periode, tempat, dan lain-lain).
- Dan: ajukan pertanyaan berikut untuk mengevaluasi kualitas masalah penelitian Anda (dan kemudahan Anda dalam menjawabnya).
- Apakah pertanyaan tersebut membahas topik atau isu yang cukup menarik bagi Anda untuk memicu pemikiran, opini, dan 'energi' Anda sendiri?
- Apakah pertanyaan tersebut relevan bagi orang lain dan apakah jawabannya akan memiliki implikasi potensial (bagi ilmu hukum, praktik, masyarakat, dll.)?
- Apakah pertanyaan tersebut berupaya melibatkan literatur yang ada (untuk mencegah penemuan kembali roda)?
- Dapatkah pertanyaan tersebut dipahami oleh orang lain yang relevan?
- Sumber apa yang akan memiliki jenis informasi yang saya perlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian?
- Dapatkah saya mengakses sumber-sumber ini?

BAB 3

TEORI DAN PENELITIAN HUKUM EMPIRIS

Teori bukan sekadar teoritis; teori juga berguna.

3.1 PENDAHULUAN

Di kalangan pembuat kebijakan, termasuk di dunia pembuatan hukum dan keadilan, salah satu 'pendapat yang populer' adalah bahwa teori hanya untuk akademisi dan khususnya untuk Jumat sore yang hujan. Bahkan lebih populer untuk mengatakan bahwa argumen tidak perlu dianggap serius 'karena argumen tersebut hanya relevan secara teoritis'. Sayangnya, dalam publikasi serius tentang ELR, 'teori' tidak berada di urutan teratas. Dalam buku terbaru Epstein dan Martin (2014), beberapa bab dikhususkan untuk analisis data kuantitatif tetapi hampir tidak ada sepatah kata pun yang ditulis tentang 'teori'.

Kami memberikan peran yang lebih menonjol pada teori dalam buku ini. Sejalan dengan Kurt Lewin, pepatah mengatakan bahwa 'teori tanpa praktik itu mandul, tetapi praktik tanpa teori itu buta'. Hal ini juga berlaku untuk penelitian hukum empiris. Teori adalah dugaan yang memberikan jawaban yang masuk akal untuk suatu masalah (penelitian). Ketika kebijakan, pengaturan hukum, dan lembaga dikembangkan oleh pengacara, politisi, atau pihak lain, asumsi (tentang kognisi, perilaku, dan masyarakat) berperan.

Psikolog hukum menyebut asumsi ini sebagai teori implisit sementara evaluator menciptakan konsep teori intervensi. Teori intervensi biasanya melihat mekanisme (kognitif, perilaku, dan kelembagaan) yang membuat intervensi 'berhasil'. Elster (2007) menyebutnya sebagai 'roda penggerak' yang mewujudkan hubungan antara pengaturan hukum, kebijakan, dan lembaga di satu sisi dan hasil atau konsekuensi dari intervensi ini di sisi lain. Mendeteksi dan memahami teori intervensi sangat penting untuk ELR. Mengapa? Karena pengacara, regulator, legislator, dan pembuat kebijakan tidak selalu mengartikulasikan asumsi mereka (tentang mekanisme ini), apalagi mengujinya. Itulah salah satu tugas peneliti hukum empiris.

Sejalan dengan Lempert (2010), kami menyebut teori implisit atau intervensi sebagai teori-dengan-t-kecil. Teori-teori tersebut merupakan satu sisi mata uang. Sisi lainnya adalah teori-dengan-T-besar, yaitu teori ilmiah (penjelas atau menengah) yang biasanya dihasilkan dan diuji oleh peneliti (akademis) dan terdiri dari pernyataan tentang intervensi hukum, pengaturan dan lembaga, mekanisme, serta konsekuensi yang diinginkan dan tidak diinginkan.

Tidak ada jaminan bahwa teori, dengan atau tanpa huruf kapital T, adalah benar ('valid') dan menghasilkan prediksi yang tepat. Faktanya, sebuah teori adalah jawaban sementara untuk sebuah pertanyaan, yang menunggu pengujian (empiris). Popper (1963) mengacu pada dugaan dan sanggahan. Dalam rasionalisme kritis – kerangka epistemologis yang memandu buku ini – mengartikulasikan dan menguji teori adalah prinsip-prinsip utama. White (2009), yang latar belakang epistemologisnya didasarkan pada tradisi yang sama, berpendapat bahwa bagi peneliti empiris 'karakteristik terpenting dari sebuah teori adalah bahwa teori tersebut merupakan sebuah ide (atau beberapa ide) yang abstrak, bersifat menjelaskan, dan dapat diuji'.

Relevansinya untuk ELR terbatas. Itu juga berlaku untuk testabilitas dan pengujian aktualnya. Seperti yang dicatat Lempert (2010): 'sulit untuk menarik dari hipotesis [Teori Besar] ini dan yang serupa yang memungkinkan untuk melakukan pengujian empiris yang ketat. Bahkan mengoperasionalkan konsep-konsep teoritis inti pun sulit dan terbuka untuk diperdebatkan'. Orientasi teoritis seperti interaksionisme simbolik atau hermeneutika tidak akan dibahas. Mereka dapat dilihat sebagai 'heuristik' lebih dari sekadar teori (Homans, 1984). Kami juga menghindari pembahasan pendekatan seperti feminisme, Marxisme, dan apa yang disebut Reeves dkk (2008) sebagai 'keluarga teori pascamodernis'.

Bab ini membahas pertanyaan-pertanyaan berikut:

- Apakah teori penjelasan dan intervensi relevan untuk semua jenis masalah penelitian dan dengan cara apa?
- Apa yang dimaksud dengan 'mekanisme' dan mengapa itu penting?
- Apa yang dimaksud dengan teori penjelasan dan bagaimana kita dapat menemukan atau mengartikulasikannya?
- Apa yang dimaksud dengan teori intervensi dan bagaimana kita dapat menemukannya?
- Apa hubungan antara teori penjelasan dan teori intervensi?
- Bagaimana cara menguji teori?
- Kriteria apa yang digunakan untuk menilai kualitas teori?

KOTAK 3.1 TEORI HUKUM

Yang agak terkait dengan Teori Besar dan orientasi teoritis adalah 'teori hukum'. Menurut Galligan (2010) 'teori hukum mencakup lebih dari sekadar filsafat hukum: perspektifnya dapat bersifat disipliner, berdasarkan antropologi, sosiologi, atau ilmu sosial lainnya; teori hukum dapat diilhami oleh ideologi, seperti Marxisme dan turunannya studi hukum kritis, atau oleh standar normatif, seperti dalam kasus teori ras, atau teori gender; dan akhirnya, teori hukum dapat mencerminkan epistemologi, seperti yang diilustrasikan oleh postmodernisme'.

Materi pokok teori hukum, bagi Hart (1961), adalah 'kerangka umum pemikiran hukum' dan bagi Morawetz, menggemakan Hans Kelsen, praanggapan 'yang tidak dipertanyakan oleh para praktisi dan tersirat dalam aktivitas mereka'. Hukum sering kali berarti hukum negara yang dalam pembuatan, penafsiran, dan penerapannya pejabat negara memegang peranan penting. Tujuannya adalah untuk merumuskan teori yang 'berlaku untuk semua sistem hukum yang ciri-cirinya tentu saja harus umum dan abstrak'. Galligan (2012) menjelaskan hubungan antara teori hukum dan penelitian hukum empiris.

3.2 TEORI PENJELASAN (HURUF KAPITAL) DAN TEORI INTERVENSI (HURUF KECIL)

Mari kita kembali ke Bab 2, tentang masalah penelitian. Kita telah membedakan lima jenis masalah. Apa yang dapat dikatakan tentang hubungan antara (jenis) masalah dan teori?

- Saat menangani masalah penelitian deskriptif, teori memberikan panduan untuk pemilihan variabel. Ambil contoh fenomena 'akses ke keadilan'. Ada banyak variabel yang dapat berperan dalam membatasi atau membuka akses ke keadilan. Menyelidiki 'segalanya' tidaklah efisien dan secara praktis mustahil. Ketika masalah penelitian ditentukan (misalnya apakah dan sejauh mana pencari suaka perempuan di negara-negara Eropa Barat mengalami lebih banyak penolakan untuk mengakses keadilan daripada pencari suaka laki-laki), hal itu dapat dikaitkan dengan teori tentang penyelesaian sengketa dan peran gender dan akan mengarah pada serangkaian variabel relevan yang datanya harus dikumpulkan.
- Dalam penelitian tentang masalah eksploratif, fakta bahwa banyak hal yang tidak diketahui membuat sulit untuk menyimpulkan wawasan dari teori-teori yang ada yang menjelaskan apa yang belum dijelaskan. Namun, ketika eksplorasi sedang berlangsung dan peneliti memiliki 'tebakan cerdas' tentang masalah dan mekanisme yang tampaknya berperan, patut dipuji untuk menghubungkan wawasan ini dengan teori-teori yang ada. Jika, sebagai contoh, sebuah proyek penelitian mengeksplorasi hubungan keuangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga eksekutif dengan tujuan mendeteksi jenis transaksi keuangan mana yang paling rentan terhadap penipuan dan korupsi, dan ditemukan bahwa sebagian besar aliran keuangan ini adalah subsidi (misalnya hibah tunai), maka adalah cerdas untuk menyimpulkan dari teori tentang insentif, subsidi, dan dorongan, wawasan yang dapat mengarahkan penyelidikan.
- Untuk masalah penelitian penjelasan, teori sangat penting karena teori tersebut mengungkapkan informasi tentang apa yang diketahui tentang faktor kausal (mekanisme). Mengatasi kausalitas adalah fitur mencolok dari sebagian besar teori ilmiah.
- Untuk pertanyaan penelitian evaluatif, mempelajari teori intervensi sangat diperlukan. Ketika evaluasi eks ante dilakukan, biasanya satu-satunya dokumen sumber yang tersedia adalah yang membahas pertanyaan mengapa: mengapa perangkat hukum, intervensi, atau kebijakan ini dikembangkan dan mengapa diyakini bahwa hal itu akan membuat perbedaan (yang terkadang berarti mengurangi masalah tertentu)? Dari dokumen-dokumen ini, teori intervensi yang mendasarinya dapat diekstraksi (lihat di bawah untuk aturan praktis tentang cara melakukannya). Teori penjelasan juga relevan saat mengerjakan pertanyaan evaluatif karena berfungsi sebagai cermin, membandingkan dan mengontraskan asumsi pembuat kebijakan, pengacara, dan regulator dengan wawasan ilmiah.
- Untuk pertanyaan penelitian yang berorientasi pada desain, hal yang sama berlaku, dengan satu perbedaan penting. Saat merancang 'sesuatu' yang baru, seperti model tata kelola baru untuk akreditasi program pendidikan tinggi atau pedoman hukuman

baru yang menggabungkan cara 'menangani' bukti neuro-ilmiah di pengadilan, peneliti hukum empiris tidak hanya bertugas melakukan penelitian, tetapi juga membantu selama penerapan model tata kelola baru atau pedoman hukuman. Teori tentang merancang prosedur, komunikasi, persuasi, dan pembelajaran kemudian akan berperan dan hal yang sama berlaku untuk 'teori desain', yang dikembangkan di dunia sistem informasi. Karena 'usaha hukum' pada dasarnya adalah bisnis pemrosesan informasi, wawasan ini relevan.

3.3 UNSUR-UNSUR PENTING TEORI

Salah satu penggunaan eksplisit paling awal dari istilah 'mekanisme' dalam penelitian ilmu sosial dapat ditemukan dalam esai Merton (1968) 'On Sociological Theories of the Middle Range', yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1949. Ia membahas 'ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya', yang diilustrasikan melalui contoh penarikan uang secara besar-besaran dari bank. Ramalan tersebut menggambarkan 'definisi situasi yang salah yang memunculkan perilaku baru yang membuat konsepsi yang awalnya salah menjadi kenyataan' pernyataan tentang mekanisme sosial sering dianggap sebagai blok pembangun teori-teori kelas menengah'.

Apa itu Mekanisme?

Sejumlah akademisi telah menyusun 'daftar definisi mekanisme'. Daripada memberikan daftar lain, pertama-tama kami akan memberi tahu Anda apa yang bukan mekanisme. Kesalahan umum (yang dilakukan oleh praktisi dan peneliti) adalah mencampuradukkan istilah 'mekanisme' dengan intervensi atau pengaturan hukum itu sendiri. Mekanisme bukan sekadar label lain untuk intervensi atau perangkat. Jika sebuah penelitian meneliti bagaimana dan mengapa memperkenalkan 'protokol/pedoman hukuman', maka tidak tepat untuk melihat pedoman itu sendiri sebagai mekanisme. Sebagai definisi konsep mekanisme yang mencegah hal ini dan salah tafsir lainnya, usulan Mayntz (2004) sudah memadai.

Mekanisme adalah 'urutan peristiwa yang terkait secara kausal yang terjadi berulang kali dalam kenyataan jika kondisi tertentu diberikan. Secara substantif, mekanisme menyatakan bagaimana dan dengan langkah-langkah perantara apa hasil tertentu mengikuti serangkaian kondisi awal. Mekanisme menyediakan rantai kausal yang jelas'. Astbury dan Leeuw (2010) menekankan bahwa mekanisme beroperasi pada tingkat yang lebih dalam daripada intervensi itu sendiri: 'Kita harus melihat lebih jauh dari deskripsi tingkat permukaan tentang konjungsi konstan dan korelasi statistik untuk mengidentifikasi mekanisme yang mendasari yang menjelaskan keteraturan dalam kejadian bersama berbagai peristiwa'.

Apakah Ada Jenis Mekanisme?

Jawabannya adalah ya. Coleman (1990), Hedstrom (2005) dan Elster (2007) menunjukkan tiga jenis mekanisme: situasional, pembentukan tindakan, dan transformasional. Mekanisme situasional menunjukkan bagaimana situasi atau peristiwa sosial, hukum dan/atau ekonomi atau fisik tertentu (yang terjadi pada tingkat makro masyarakat) membantu membentuk keyakinan, keinginan, peluang, dan pilihan para pelaku

(individu). Mekanisme ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya yang dijelaskan oleh Merton adalah sebuah contoh. Contoh lain adalah struktur peluang yang menjadi ciri komunitas, desa, atau kota; semakin banyak peluang (untuk kejahatan, bagi pengangguran), semakin besar peluang kejahatan akan dilakukan dan pekerjaan akan ditemukan.

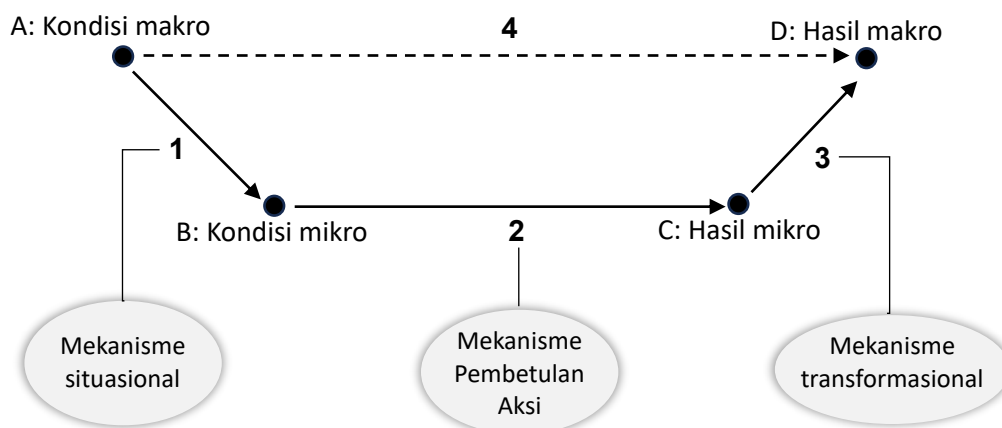
Mekanisme pembentukan tindakan beroperasi pada apa yang disebut Coleman (1990) sebagai tingkat mikro. Jenis mekanisme ini melihat bagaimana pilihan dan tindakan individu dibuat dan bagaimana pilihan ini dipengaruhi oleh (kombinasi spesifik) keinginan, keyakinan, peluang (dan semakin banyak faktor bio-sosial). Mekanisme disonansi kognitif Festinger (1957) adalah contohnya; mekanisme ini menunjukkan bagaimana individu mengurangi tekanan psikologis yang muncul ketika seseorang memiliki dua ide atau sikap yang bertentangan secara bersamaan. Perokok, misalnya, sering menggunakan teknik rasionalisasi untuk menghindari berhenti merokok meskipun ada bukti kuat bahwa merokok mengurangi harapan hidup (misalnya, 'kanker paru-paru hanya terjadi pada perokok berat').

'Mekanisme bayangan masa depan' adalah contoh lain, yang terkadang disebut sebagai dorongan perilaku untuk melakukan sesuatu secara berbeda, karena hukum (dan kekuatan penegakannya) berfungsi sebagai bayangan masa depan (yang menunjukkan apa yang dapat terjadi jika seseorang terlibat dalam, misalnya, ketidakpatuhan fiskal). Pembungkahan (bagaimana sesuatu disajikan dan memengaruhi pilihan yang dibuat orang) dan insentif adalah mekanisme pembentukan tindakan lainnya, seperti halnya dilema tahanan, mekanisme endowment (orang menganggap sesuatu lebih bernilai hanya karena mereka memilikinya) dan sekitar 20–30 (lainnya) mekanisme kognitif-perilaku seperti bias retrospektif dan kesalahan atribusi mendasar. Para peneliti juga semakin mencari proses bio-sosial yang mendasari mekanisme ini.

Mekanisme transformasional beroperasi pada tingkat mikro hingga makro dan menunjukkan bagaimana sejumlah individu, melalui tindakan dan interaksi mereka, dapat menghasilkan hasil tingkat makro. Contohnya adalah cascading, di mana orang memengaruhi satu sama lain sedemikian rupa sehingga mereka sebagian besar mengabaikan pengetahuan pribadi mereka dan sebaliknya mengandalkan penilaian orang lain yang dinyatakan secara publik. Fenomena ikut-ikutan – kecenderungan untuk melakukan (atau meyakini) sesuatu karena banyak orang lain yang melakukan (atau meyakini) – terkait dengan hal ini, seperti halnya pemikiran kelompok. Titik kritis adalah mekanisme transformasional lainnya.

Apa Hubungan antara Ketiga Mekanisme?

Dalam representasi skematis ini, 'simpul A dan D masing-masing mewakili proposisi yang menggambarkan kondisi makro dan hasil makro. Panah 4 mewakili proposisi tentang keteraturan empiris pada tingkat makro, misalnya, hubungan antara kondisi makro dan hasil makro. Simpul B mewakili (deskripsi) kondisi mikro, yaitu, variabel independen yang diasumsikan tentang keteraturan perilaku individu atau, lebih ambisius, dalam teori perilaku individu'. Panah 1 mewakili asumsi tentang bagaimana kondisi sosial melalui mekanisme situasional memengaruhi variabel-variabel ini. Misalnya, jaringan dan lembaga serta harga dapat dipahami sebagai peluang atau, sebaliknya, kendala yang memengaruhi alternatif yang layak yang dapat dipilih oleh para pelaku.



Gambar 3.1 Coleman's Boat: model yang menghubungkan kondisi dan mekanisme mikro dan makro

Oleh karena itu, 'struktur peluang' dari situasi tertentu (seperti yang disebutkan di atas) dipandang sebagai mekanisme situasional. Kondisi sosial juga membentuk insentif yang terkait dengan berbagai alternatif yang layak dan membentuk informasi para pelaku. Node C mewakili hasil mikro, yaitu deskripsi perilaku individu. Asumsi tentang keteraturan perilaku individu atau teori perilaku individu diwakili oleh panah 2 dan yang disebut 'mekanisme pembentukan tindakan'. Contohnya adalah disonansi kognitif, penilaian sosial, dan keterikatan. Terakhir, panah 3 mewakili asumsi tentang bagaimana perilaku pelaku menghasilkan hasil tingkat makro, di sini diberi label 'mekanisme transformasional' seperti titik kritis.

(Jenis) mekanisme mana yang berperan dalam penelitian hukum empiris sampai batas tertentu bergantung pada jenis pengaturan hukum, perangkat, atau lembaga yang diteliti. Sanksi pidana untuk mengurangi pengulangan tindak pidana sangat berbeda dengan program pengurangan beban kasus untuk 'usaha hukum'. Mekanismenya pun mungkin demikian. Mekanisme yang mendasari pendekatan tata kelola sedikit banyak berbeda dengan mekanisme penanggulangan yang memandu perilaku responden pertama polisi atau pemadam kebakaran, setelah serangan (teroris).

Kita menggunakan 'sedikit banyak', karena ada, di samping mekanisme khusus konteks dan situasi, juga mekanisme generik. Mekanisme-mekanisme itu 'beroperasi' dengan cara yang sama dalam situasi yang berbeda dan dapat dilihat sebagai bagian dari 'sifat manusia'. Kadang-kadang mekanisme-mekanisme itu disebut demi-regularitas. Lempert (2013) mendesak para peneliti hukum untuk meneliti mekanisme, karena 'kegagalan untuk memahami mekanisme dapat mengarah pada kesimpulan yang keliru tentang alasan perilaku, dan hasilnya dapat berupa keputusan kebijakan yang buruk'.

3.4 TEORI PENJELASAN DAN BAGAIMANA MENEMUKANNYA?

Contoh

Teori penjelasan dapat ditemukan dalam buku teks dan buku pegangan ilmu sosial dan

perilaku, termasuk ekonomi; biasanya teori tersebut 'dihasilkan' oleh peneliti akademis. Teori tersebut sering kali memiliki 'nama' atau 'label' dan telah diuji dalam berbagai situasi. Bagaimana 'tampilan' teori ini dalam praktik?

Contoh pertama adalah teori pencegahan (terkenal dalam kriminologi). Teori ini menyatakan bahwa, ketika kepastian, tingkat keparahan, dan kecepatan sanksi pidana tinggi dalam suatu populasi, perilaku kriminal akan rendah. Teori pencegahan dapat dimasukkan ke dalam teori pilihan rasional yang lebih umum, yang menyatakan bahwa orang (secara informal, yaitu tanpa menggunakan 'mesin kalkulasi') mempertimbangkan biaya dan manfaat (termasuk emosi) sebelum dan selama aktivitas mereka dan memilih hasil yang 'memuaskan'.

Teori kontrak yang dianalisis oleh Posner (2006) 'bermaksud untuk menunjukkan bahwa hukum kontrak memiliki logika internal dan bahwa logika tersebut secara normatif menarik atau didasarkan pada kontingensi historis atau perebutan kekuasaan di antara kelompok-kelompok yang bersaing. Kelompok teori pertama terbagi menjadi pendekatan kesejahteraan dan non-kesejahteraan. Pendekatan kesejahteraan hanya memahami satu teori: teori hukum dan ekonomi.

Pendekatan non-kesejahteraan hadir dalam berbagai bentuk, tetapi dapat dengan mudah dibagi menjadi teori 'liberal' atau 'janji', dan teori 'keadilan korektif' atau 'ketergantungan' (Posner, 2006). Teori hukum dan ekonomi mengasumsikan bahwa individu sesuai dengan asumsi rasionalitas teori ekonomi dan bahwa hukum kontrak mendorong efisiensi. Posner menguraikan inti dari teori-teori ini juga; teori-teori tersebut merujuk pada mekanisme situasional dan pembentukan tindakan.

Teori kognitif berfokus pada mekanisme disonansi kognitif, mekanisme kesalahan atribusi fundamental, dan mekanisme lainnya. Teori penyebaran inovasi Rogers (1995) mempelajari proses perubahan dalam populasi dan organisasi. Teori ini awalnya dikembangkan untuk menjelaskan adopsi inovasi teknologi oleh individu, tetapi kemudian, perubahan organisasi juga disertakan.

Meskipun konsep penyebaran inovasi berasal dari sosiolog Prancis Gabriel Tarde, teori itu sendiri dikembangkan oleh Rogers bersama Schoemaker pada tahun 1962, berdasarkan hasil sekitar 2000 studi penyebaran empiris. Teori ini mendefinisikan beberapa karakteristik inovasi yang memengaruhi keputusan individu dan organisasi untuk mengadopsi atau menolak inovasi (seperti 'keunggulan relatif' dari suatu inovasi, 'kesesuaiannya' dengan operasi dan pendekatan saat ini; 'kompleksitas' atau 'kesederhanaan', 'dapat dicoba' dan 'dapat diamati').

Teori kelompok kepentingan Landes dan Posner (1975) tentang peradilan independen juga mempertimbangkan karakteristik masyarakat tingkat makro. Vanberg (2008) menggunakan teori ini untuk menjelaskan pembentukan independensi peradilan dan bagaimana hal itu dipertahankan dalam praktik. Dilihat dari perspektif kelembagaan, makalahnya membahas keberadaan pengadilan konstitusi dan tinjauan konstitusional.

Landes dan Posner berpendapat bahwa daya tahan undang-undang yang diharapkan (periode waktu di mana undang-undang diharapkan berlaku) menimbulkan perhatian utama terkait interaksi antara legislator dan kelompok kepentingan. Jika kelompok kepentingan berharap bahwa undang-undang yang dapat mereka amankan untuk memajukan kepentingan

mereka mudah dibatalkan oleh tindakan legislatif atau yudisial berikutnya, nilai undang-undang bagi kelompok kepentingan menurun – dan bersamaan dengan itu 'pembayaran' yang bersedia dilakukan kelompok kepada legislator untuk mengamankannya.

Untuk meningkatkan nilai undang-undang, legislator karenanya berkepentingan untuk 'mengikat tangan mereka sendiri' dengan cara yang meningkatkan daya tahan undang-undang. Pendelegasian kepada peradilan yang independen adalah salah satu cara untuk melakukan ini, karena hal itu mengurangi pengaruh mayoritas legislatif atas penafsiran dan penegakan kesepakatan legislatif sebelumnya.

Teori pemain berulang versus pemain sekali tembak Galanter (1974) membantu untuk memahami apa 'berbagai jenis pihak (selama litigasi) dan [apa] pengaruh perbedaan ini terhadap cara kerja sistem [hukum]'. Dia membagi 'aktor menjadi penggugat yang hanya memiliki jalan keluar sesekali ke pengadilan (pemain sekali tembak [OS]) dan pemain berulang (RP) yang terlibat dalam banyak litigasi serupa dari waktu ke waktu. Pasangan dalam kasus perceraian, penggugat cedera mobil, terdakwa kriminal adalah OS; perusahaan asuransi, jaksa, perusahaan keuangan adalah RP'.

Bagi Galanter, 'RP adalah individu atau entitas yang berpartisipasi atau merenungkan untuk berpartisipasi secara aktif dalam sistem hukum, memiliki taruhan rendah dalam hasil dari satu kasus, dan . . . memiliki sumber daya untuk mengejar kepentingan jangka panjangnya'. Ia membandingkan RP dengan OS dan menguraikan keuntungan yang biasanya dimiliki RP dibandingkan OS. Kami merujuk ke Bab 9 untuk pembahasan tentang program penelitian yang, sejak artikel tahun 1974, telah mempelajari teori Galanter. Shepherd (2011) mempelajari pengaruh kepentingan pribadi hakim terhadap perilaku hakim dan menggunakan teori pilihan publik. 'Asumsi dasar teori pilihan publik adalah bahwa kepentingan pribadi mengatur perilaku dalam transaksi publik maupun privat.'

Dengan demikian, model pilihan publik dalam pengambilan keputusan hakim mengambil 'pandangan jujur terhadap motivasi hakim' dan mengasumsikan bahwa hakim dapat dipengaruhi oleh 'tekanan dan godaan sehari-hari' dari posisi mereka. Dalam Oxford Handbook of Empirical Legal Research berbagai teori penjelasan juga dapat ditemukan. Tabel 3.1 adalah cuplikan yang mencakup sebagian dari Handbook (mekanisme dicetak tebal dan miring tipis).

Tabel 3.1 Label, konten inti dan referensi teori yang dirujuk dalam Handbook of Empirical Legal Research

Label	Inti	Referensi 1
Teori perilaku kontrak	Kesenjangan antara kontrak formal dan 'kesepakatan sebenarnya'; melihat kontrak sebagai perilaku sosial yang berakar pada kerja sama dan kontrak relasional.	Wheeler (2010); Macaulay (1963)
Teori biaya transaksi	Biaya transaksi adalah biaya yang dikeluarkan dalam melakukan pertukaran. Biaya ini berperan penting dalam pengambilan keputusan. Biaya pencarian dan informasi (yang dikeluarkan	Wheeler (2010); Williamson (1966)

	dalam menentukan apakah barang atau kasus atau informasi yang dibutuhkan tersedia, yang memiliki harga terendah); biaya tawar-menawar (diperlukan untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima dengan pihak lain dalam transaksi) dan biaya penegakan hukum (biaya untuk memastikan pihak lain mematuhi ketentuan kontrak, dan mengambil tindakan yang tepat (sering kali melalui sistem hukum) jika ternyata tidak demikian).	
Hipotesis LLSV2	Tingkat perlindungan pemegang saham dan kreditor oleh sistem hukum dapat menjelaskan mengapa terdapat pola yang berbeda dalam penggunaan utang dan ekuitas (saham) untuk membiayai perusahaan di berbagai negara. Ditemukan bahwa hak pemegang saham minoritas dan pemegang saham pada umumnya terlindungi dengan lebih baik di negara-negara dengan sistem hukum yang menganut tradisi hukum umum daripada tradisi hukum perdata. 'Ditemukan juga bahwa hukum umum dikaitkan dengan formalisme prosedur peradilan yang rendah dan independensi peradilan yang lebih besar. Indikator-indikator ini pada gilirannya dikaitkan dengan penegakan kontrak yang lebih baik dan keamanan hak milik yang lebih besar. Literatur asal usul hukum mengadopsi konsepsi yang luas tentang asal usul hukum sebagai gaya kontrol sosial kehidupan ekonomi' (Swedberg, 2000).	Hitam (2010); La Porta dkk, (1998); Swedberg (2000); Ferguson (2014)
Teori tentang keadilan prosedural	Pihak yang bersengketa menganggap keadilan suatu prosedur peradilan sama pentingnya dengan hasilnya.	Meili (2009); Thibaut dan Walker (1975)
Teori piramida regulasi	Yang dibutuhkan adalah fokus pada berbagai langkah dalam regulasi, dimulai dengan terlibat dalam dialog dan mendorong 'para regulator' untuk melakukan regulasi mandiri, tetapi juga memastikan bahwa 'tongkat besar' digunakan ketika meningkatkan piramida regulasi ke intervensi dan paksaan yang lebih wajib oleh regulator.	Haller (2010); Ayres dan Braithwaite (2005)
Teori penamaan, menyalahkan dan klaim dalam penyelesaian	Menurut teori ini, 'perselisihan terjadi melalui suatu proses di mana, pertama-tama, suatu "pengalaman yang merugikan" dikenali oleh pihak yang dirugikan atau agennya ("menamai"),	Kritzer (2010: 261)

perselisihan	dan karenanya menjadi “pengalaman merugikan yang dirasakan”. Pihak yang dirugikan kemudian menyalahkan pihak lain (“menyalahkan”), sehingga menimbulkan keluhan yang, dalam kondisi tertentu, akan mengarah pada penyampaian klaim (“pengajuan klaim”).’	
Teori yang berhubungan dengan norma internasional dan sosialisasi hak asasi manusia	Teori ini berfokus pada peran sosialisasi transnasional atau internasional untuk mendorong terciptanya dan komitmen terhadap perjanjian hak asasi manusia internasional. Teori ini menekankan kekuatan transformatif wacana normatif internasional tentang hak asasi manusia dan peran aktivisme oleh para aktor transnasional.	Perkemahan Keith (2010)

Teori penjelasan ini dan lainnya berfokus pada orang perseorangan (penjahat, orang yang terlibat dalam sengketa, pengusaha, pengungsi, dll.), pelaku korporat seperti organisasi dan lembaga, dan tentang bagaimana sistem sosial, termasuk sistem peradilan beroperasi.

Bagaimana Menemukan Teori yang Menjelaskan?

Mengetahui bahwa teori-teori ini penting saat melakukan penelitian adalah satu hal. Mengetahui di mana menemukannya adalah langkah kedua. Ada beberapa cara untuk mengatasi tantangan ini. Yang pertama sederhana. Cari teori yang (sering kali dalam judulnya) merujuk langsung ke topik masalah penelitian. Jika pertanyaan penelitian adalah untuk mengukur dampak penyelesaian sengketa alternatif (ADR) pada penyelesaian konflik antara para pihak, peran tugas pengadilan yang lebih tinggi dalam keputusan yang dibuat oleh warga sipil apakah akan pergi ke pengadilan atau tidak, atau bagaimana pengambilan keputusan pencari suaka untuk tinggal di suatu negara secara ilegal atau tidak dipertaruhkan, maka menemukan teori yang relevan dapat dilakukan.

Teori tentang ADR ada dan telah diuji; ada teori (ekonomi) tentang efek harga dari perubahan tugas pengadilan, dan ada karya teoritis tentang 'kapan dan mengapa harus pergi secara ilegal'. Dari teori-teori ini, wawasan dapat disimpulkan yang membantu memandu penyelidikan empiris (variabel mana yang harus dipelajari, apa peran konteks, dll.). Van Erp (2010) mempelajari dampak pengungkapan perusahaan yang melanggar (oleh Otoritas Manajemen Keuangan Belanda) di pasar keuangan Belanda terhadap perilaku perusahaan-perusahaan ini (dan perusahaan lainnya), dan terhadap tingkat kepercayaan di pasar.

Ia menggunakan teori pilihan rasional untuk memprediksi apa konsekuensi dari penamaan dan penghinaan. Dalam contoh ini, teori penjelasan yang dikembangkan dengan baik, yang telah diuji sebelumnya dalam situasi yang berbeda, bersama dengan spesifikasi teori ini ke dalam mekanisme 'penamaan & penghinaan' mengenai sektor keuangan di Belanda, digunakan dan diuji.

Teori penjelasan (tingkat menengah) tidak selalu mudah ditemukan, jadi kita memerlukan rencana B. Kemudian, seseorang pertama-tama mencari mekanisme yang

mendasari pengaturan khusus yang sedang diselidiki dan menggunakan konsep-konsep ini kemudian untuk menemukan teori penjelasan yang relevan. Beberapa contoh akan membantu.

Contoh 1: menjelaskan mengapa ada keputusan hukum yang salah. Sarjana psikologi hukum menunjukkan mekanisme kognitif yang berperan dalam pengambilan keputusan hukum, seperti 'pandangan terowongan' dan 'kesalahan atribusi mendasar'. Mereka juga memperhitungkan apa yang terjadi dengan jaksa dan hakim dalam proses pengambilan keputusan di bawah tekanan (disebabkan oleh paparan media atau bahaya merusak reputasi sendiri).

Teori yang menguraikan konsekuensi stres pada pengambilan keputusan juga dapat digunakan dan hal yang sama berlaku untuk 'teori proses ganda otak' Kahneman, dengan dua cara berpikirnya yang berbeda secara mendasar: Sistem 1 dan Sistem 2: 'Sistem 1 cepat; intuitif, asosiatif, metaforis, otomatis, impresionistis, dan tidak dapat dimatikan. Sistem 2 lambat, disengaja, dan penuh usaha. Operasinya membutuhkan perhatian. Sistem 2 malas, dan mudah lelah (proses yang disebut "depleksi ego")'.

Contoh 2: mengevaluasi dampak perang melawan pengunduhan ilegal ('pembajakan digital'). Jika pertanyaan penelitian adalah cara efektif apa yang ada untuk mengurangi pembajakan digital, pemindaian literatur akan memberi tahu Anda bahwa ada beberapa mekanisme dasar yang mendasari berbagai intervensi: hukuman, wortel, khotbah, dan pilar (HBM Leeuw, sedang dalam proses).

Hukum mengacu pada penegakan hukum (seperti 'intervensi respons bertahap'), wortel untuk menawarkan opsi unduhan non-ilegal dengan harga yang lebih rendah kepada konsumen, dan khotbah adalah aktivitas dan kampanye informasi dan persuasi, yang dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau pelaku korporat, yang mencoba meyakinkan konsumen bahwa mengunduh secara ilegal adalah 'buruk' bagi artis dan industri. Pilar (mekanisme penamaan dan memermalukan) memengaruhi reputasi orang dan organisasi yang akan memberi insentif kepada mereka untuk mengubah perilaku mengunduh mereka. Langkah selanjutnya adalah menerapkan teori tentang mekanisme ini dan, melalui proses ini, memperkaya studi empiris.

Contoh 3: cara mempelajari dampak hukum terhadap perilaku yang berhubungan dengan kesehatan. Apakah undang-undang sabuk pengaman wajib memengaruhi kesehatan (perilaku terkait) antara tahun 1990 dan 2010? Peneliti mempelajari pertanyaan ini:

Perubahan dalam penggunaan sabuk pengaman setelah disahkannya sebuah undang-undang dapat dikonseptualisasikan sebagai hasil dari pencegahan: diagram kausal dimulai dengan undang-undang, berlanjut melalui pilihan rasional oleh pengemudi, hingga kepatuhan atau ketidakpatuhan berdasarkan kemungkinan dan biaya deteksi. Teori ini akan mengarahkan peneliti menuju penyelidikan terhadap penghindaran risiko pengemudi, atau persepsi mereka tentang kemungkinan dan biaya deteksi. Namun, masuk akal juga bahwa undang-undang tersebut bekerja dengan menandakan adopsi resmi norma sosial yang ada tentang penggunaan sabuk pengaman. . . . Teori ini akan menyoroti variabel yang terkait dengan keyakinan pengemudi tentang legitimasi otoritas pemerintah atau keyakinan mereka tentang

apa yang orang-orang yang mereka hargai harapkan dari mereka lakukan. Seorang peneliti kemudian dapat menguji beberapa teori, dengan, misalnya, mensurvei pengemudi tentang persepsi mereka tentang risiko hukuman dan keyakinan mereka. Atau peneliti dapat membuat pilihan yang beralasan tentang teori mana yang akan diselidiki lebih lanjut. Misalnya, jika peneliti menyadari bahwa hukum memiliki denda yang tidak seberapa dan tidak ditegakkan, ia dapat memilih untuk tidak memprioritaskan pencegahan sebagai subjek penyelidikan. Dengan cara ini, teori memungkinkan untuk secara sistematis menghasilkan dan menguji penjelasan tentang cara kerja hukum.

Contoh 4: apakah pedoman penuntutan tentang mengemudi dalam keadaan mabuk berkontribusi pada konsistensi yang lebih besar dalam menjatuhkan hukuman layanan masyarakat di seluruh distrik pengadilan Belanda? Untuk mengatasi masalah ini, adalah bijaksana untuk menemukan teori tentang pedoman dan protokol di mana perhatian diberikan pada konsekuensi (perilaku) bekerja dengan mereka (protokol). Diketahui bahwa pedoman dan protokol terkadang menanggung risiko mengembangkan 'perilaku centang dan jentikan', 'mengajar untuk ujian' dan 'mengusir'.

Teori efisiensi organisasi menunjukkan bahwa hakim dan aktor ruang sidang lainnya, seperti jaksa penuntut umum, memiliki keinginan untuk berbagi tujuan mewujudkan manajemen kasus yang efektif dan disposisi kasus yang efektif. Namun, ini juga dapat mengarah pada pengembangan norma-norma informal dan keinginan untuk membuang kasus dengan upaya minimal.

Dari teori ini (dan teori pilihan publik) dapat disimpulkan bahwa hakim dan jaksa penuntut umum mengikuti pedoman dengan lebih mudah, karena akan menghabiskan lebih sedikit upaya dan waktu. Jika semuanya beroperasi dengan cara ini, hal itu akan mengarah pada penerapan pedoman yang konsisten dan pada konsistensi (yang lebih besar) dalam menjatuhkan hukuman layanan masyarakat di seluruh distrik pengadilan. Apakah perilaku ini juga menyebabkan efek samping (yang tidak diinginkan) atau tidak dibahas oleh teori tersebut.

Dalam contoh-contoh ini, peneliti hukum empiris menghubungkan intervensi atau pengaturan hukum dengan mekanisme yang lebih umum yang diyakini 'berfungsi'. Alih-alih (hanya) mencari teori tentang intervensi atau pengaturan itu sendiri, ia memulai perjalanan untuk menemukan teori tentang mekanisme ini. Teori-teori tersebut adalah masukan untuk penyelidikan empiris, yang memungkinkan penyajian penjelasan dan prediksi. Secara epistemologis, prosedur ini disebut subsumasi.

Di Mana Menemukan Teori Penjelasan?

Jawaban **pertama** adalah: gunakan Web of Science (<http://www.webofknowledge.com>) dan basis data (meta) lainnya, termasuk ProQuest (<http://www.pro-quest.com/>), JSTOR (<http://www.jstor.org>) dan mesin pencari umum (misalnya Google Scholar (<http://scholar.google.nl/>)). Web of Science menghubungkan publikasi dan peneliti melalui kutipan dan pengindeksan terkontrol dalam basis data yang dikurasi, yang mencakup hampir semua disiplin ilmu. Ini adalah alat penting untuk melacak penelitian sebelumnya dan memantau perkembangan terkini. Sebagian besar perpustakaan

universitas memiliki mesin pencari ini dan lainnya.

Jawaban **kedua** adalah menggunakan perpustakaan bukti atau repositori bukti tempat tinjauan sistematis dan studi sintesis dapat ditemukan. Banyak yang relevan secara langsung untuk ELR. Dalam Bab 5 kita akan membahasnya secara lebih mendalam.

Ketiga, cari jurnal khusus dan telusuri jurnal tersebut pada topik yang sedang diselidiki atau pada mekanisme yang diyakini berhasil.

Terakhir (meskipun dengan ragu-ragu), ada situs web khusus yang memuat teori sosial dan perilaku. Alasan keraguan adalah bahwa situs-situs ini dapat bermanfaat bagi peneliti terlatih, tetapi bagi orang yang baru dalam suatu bidang, situs-situs ini dapat dengan mudah mengarah pada 'memilih dan memilih' teori-teori yang tidak relevan yang belum diuji atau telah dipalsukan.

3.5 TEORI INTERVENSI DAN CARA MENEMUKANNYA

Sementara teori penjelasan biasanya berasal dari akademisi (baik dari studi fundamental maupun terapan), teori intervensi adalah asumsi (seringkali implisit) dari para pembuat kebijakan, praktisi, pengacara, dan legislator. Asumsi-asumsi ini mendasari undang-undang dan regulasi, kontrak, program modifikasi perilaku, sistem penyelesaian sengketa alternatif, harmonisasi hukum, inspeksi, dan aktivitas pengawasan.

Setiap kali pengaturan atau perangkat semacam itu disusun dan diimplementasikan, asumsi tentang mengapa perangkat itu akan melakukan apa yang seharusnya dilakukan (yaitu mewujudkan tujuan yang ditetapkan), untuk siapa dan untuk berapa lama, memainkan peran penting. Quintanilla (2012) melabeli asumsi-asumsi ini sebagai 'teori implisit'. Karakterisasi Oliver Holmes ('premis utama yang tidak disebutkan') juga berlaku (Homans, 1984).

Ketika (rangkaiannya) asumsi disatukan secara terstruktur, mereka disebut teori intervensi. Teori intervensi mencakup ekspektasi bahwa pengenalan suatu program, intervensi (hukum) atau perangkat akan membantu mewujudkan 'sesuatu' (memperbaiki suatu masalah, mencegah perkembangan suatu masalah, memperkuat perilaku yang ada, menyalurkan tindakan, dll.). Teori tersebut juga memuat asumsi tentang mekanisme yang akan membawa perubahan menjadi lebih baik. Farnsworth (2007) memberikan contoh mekanisme yang berada di balik pengaturan hukum.

Terkadang mekanisme tersebut berupa insentif, terkadang berupa riam atau jalan yang licin, terkadang berupa proses kognitif dan terkadang kepercayaan. Teori intervensi menetapkan peran mekanisme ini (dan lainnya), hasil apa yang mungkin dihasilkan oleh intervensi atau pengaturan tersebut dalam kondisi apa dan dalam konteks apa. Namun, karena pelaku kebijakan, legislator, regulator, dan praktisi (hukum) lainnya tidak selalu membuat asumsi mereka eksplisit, para peneliti harus melakukan pekerjaan ini.

Contoh: Teori Intervensi yang Mendasari Hukum Megan, Program Antikorupsi Bank Dunia, dan Putusan Suaka

Mengevaluasi hukum Megan

Contoh pertama menyangkut Hukum Megan (Pawson, 2002). Hukum ini diberlakukan pada tahun 1996 di AS setelah pemerkosaan dan pembunuhan Megan Kanka. Pembunuhnya

adalah seorang pelanggar seks yang telah dibebaskan, yang tanpa sepengetahuan orang tuanya, tinggal di lingkungan mereka. Berita tentang kasus tersebut memicu kemarahan publik yang besar, yang mengakibatkan pengenalan undang-undang yang cepat yang memungkinkan sistem pemberitahuan masyarakat wajib bagi pelanggar seks yang dihukum. Di beberapa negara lain seperti Inggris, Skotlandia, Belanda, dan Australia, inisiatif 'mirip' dibahas dan terkadang diterapkan.



Gambar 3.2 Dasar-dasar teori program Hukum Megan

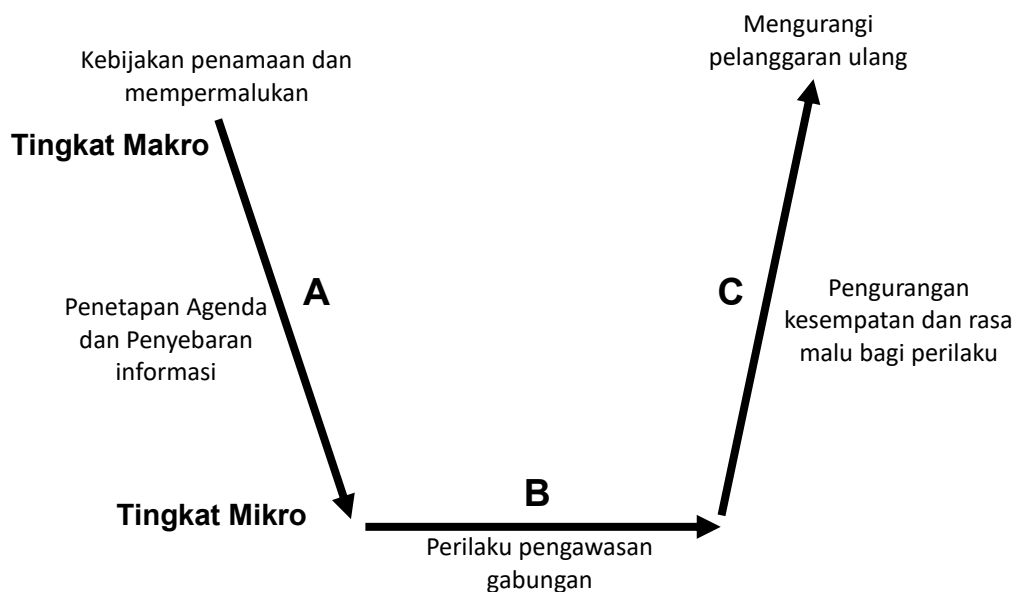
Apa asumsi (perilaku/kelembagaan) yang mendasari hukum ini? Lihat Gambar 3.2.

Dengan menggali lebih dalam dasar-darannya (dan mengikuti pendekatan Coleman's Boat), hasilnya adalah teori program yang direkonstruksi lebih lengkap (lihat Gambar 3.3). Teori ini mengidentifikasi mekanisme situasional, yang dapat memengaruhi cara kerja kebijakan penamaan dan memermalukan pelaku kejahatan seksual.

Penetapan agenda menggambarkan proses di mana liputan media yang luas dan luas dapat memengaruhi opini publik tentang cara menanggapi masalah pelaku kejahatan seksual yang dibebaskan dan tinggal di masyarakat. Saliensi dan pembingkaiannya yang lebih tinggi cenderung menentukan cara penerapan kebijakan penamaan dan memermalukan. Dalam konteks tekanan sosial yang kuat untuk 'melakukan sesuatu' tentang masalah tersebut, para pembuat kebijakan dan pejabat penegak hukum biasanya memutuskan bahwa investasi dalam sistem pendaftaran dan manajemen informasi pelaku kejahatan seksual adalah cara yang tepat untuk memberlakukan kebijakan.

Diasumsikan juga bahwa kegiatan-kegiatan ini akan mengarah pada proses penyebaran, di mana orang-orang yang tepat akan menerima informasi yang akurat dan tepat waktu tentang pelaku kejahatan seksual terdaftar yang tinggal di lingkungan sekitar mereka. Teori ini menggambarkan bagaimana informasi tentang pelaku kejahatan seksual terdaftar

menyebarkan melalui saluran komunikasi tertentu dari waktu ke waktu di antara para anggota sistem sosial. Dalam praktiknya, penyebaran informasi dapat terjadi dalam berbagai cara: misalnya, outlet media massa seperti internet serta saluran komunikasi interpersonal seperti kelompok konsultasi polisi-masyarakat dan pertemuan informal warga lokal yang peduli. Namun, ini tidak cukup untuk membuat penamaan dan memermalukan berhasil. Mata rantai berikutnya dalam rantai tersebut melibatkan aktor individu yang menanggapi dengan tepat (atau tidak) informasi setelah diterima.



Gambar 3.3 Model mekanisme yang mendasari 'penamaan dan penghinaan' terhadap pelaku kejahatan seksual. A = mekanisme situasional; B = mekanisme pembentukan tindakan dan C = mekanisme transformasional

Menurut teori intervensi dasar penamaan dan memermalukan, petugas polisi, anggota masyarakat, kepala sekolah dan guru, mentor olahraga dan lainnya akan menerima informasi tentang pelanggar seks terdaftar, menganggapnya valid, dan mulai menindaklanjutinya. 'Menindaklanjuti' menyiratkan peningkatan perilaku pengawasan yang terpadu, yang juga menyiratkan bahwa pembingkaiannya tentang apa yang merupakan perilaku mencurigakan kurang lebih sama di antara berbagai pemangku kepentingan dalam konteks yang berbeda. Ini juga menyiratkan bahwa hasil kegiatan pengawasan dimasukkan kembali ke dalam sistem manajemen informasi.

Mekanisme transformasional menggabungkan tindakan bersama (pengawasan) individu ke tingkat yang diyakini dapat membuat perbedaan pada pilihan perilaku pelaku kejahatan seksual yang terdaftar. Pengawasan yang digabungkan meningkatkan kemungkinan (yang dirasakan) untuk tertangkap, yang mengarah pada kemungkinan aktivasi mekanisme pengurangan peluang. Pengawasan ini juga berpotensi memicu mekanisme yang menimbulkan rasa malu di antara para pelaku kejahatan yang kembali. Akhirnya, penggabungan berbagai mekanisme, menurut teori tersebut, akan mengarah pada

pengurangan kejahatan yang kembali.

Apa kontribusi analisis ini terhadap evaluasi Hukum Megan dan intervensi hukum serupa? Pertama, hal ini merangsang penyelidik empiris untuk berpikir tentang cara menguji teori ini. Misalnya, mekanisme situasional, seperti proses penyebaran, diidentifikasi sebagai saluran penting untuk menyampaikan informasi kepada penduduk setempat. Salah satu cara untuk menyelidiki penyebaran secara sistematis adalah melalui survei yang mempertimbangkan sejauh mana informasi benar-benar sampai ke individu dan kelompok masyarakat secara tepat waktu. Studi kasus lokal tentang jaringan komunikasi mungkin juga berguna. Jika tidak demikian halnya, maka efek samping yang tidak diinginkan seperti main hakim sendiri dapat terjadi.

Kedua, memanfaatkan teori ilmu sosial yang ada tentang mekanisme berguna karena dapat memberikan wawasan penting tentang kemungkinan berfungsinya mekanisme ini. Sekali lagi, pertimbangkan contoh mekanisme situasional, seperti difusi, yang banyak diteliti oleh para akademisi.

Salah satu temuan penting adalah bahwa jenis struktur jaringan antarpribadi dapat sangat memengaruhi pertukaran informasi. Jaringan pribadi radial terdiri dari sekumpulan individu yang terhubung dengan individu fokus tetapi tidak berinteraksi satu sama lain, sementara jaringan pribadi yang saling terkait terdiri dari individu yang berinteraksi terutama satu sama lain. Yang pertama tampaknya jauh lebih efektif dalam memastikan bahwa informasi tentang pelaku kejahatan seksual lokal dipertukarkan dengan lingkungan yang lebih luas, sehingga meningkatkan perilaku pengawasan.

Mengevaluasi program antikorupsi Bank Dunia

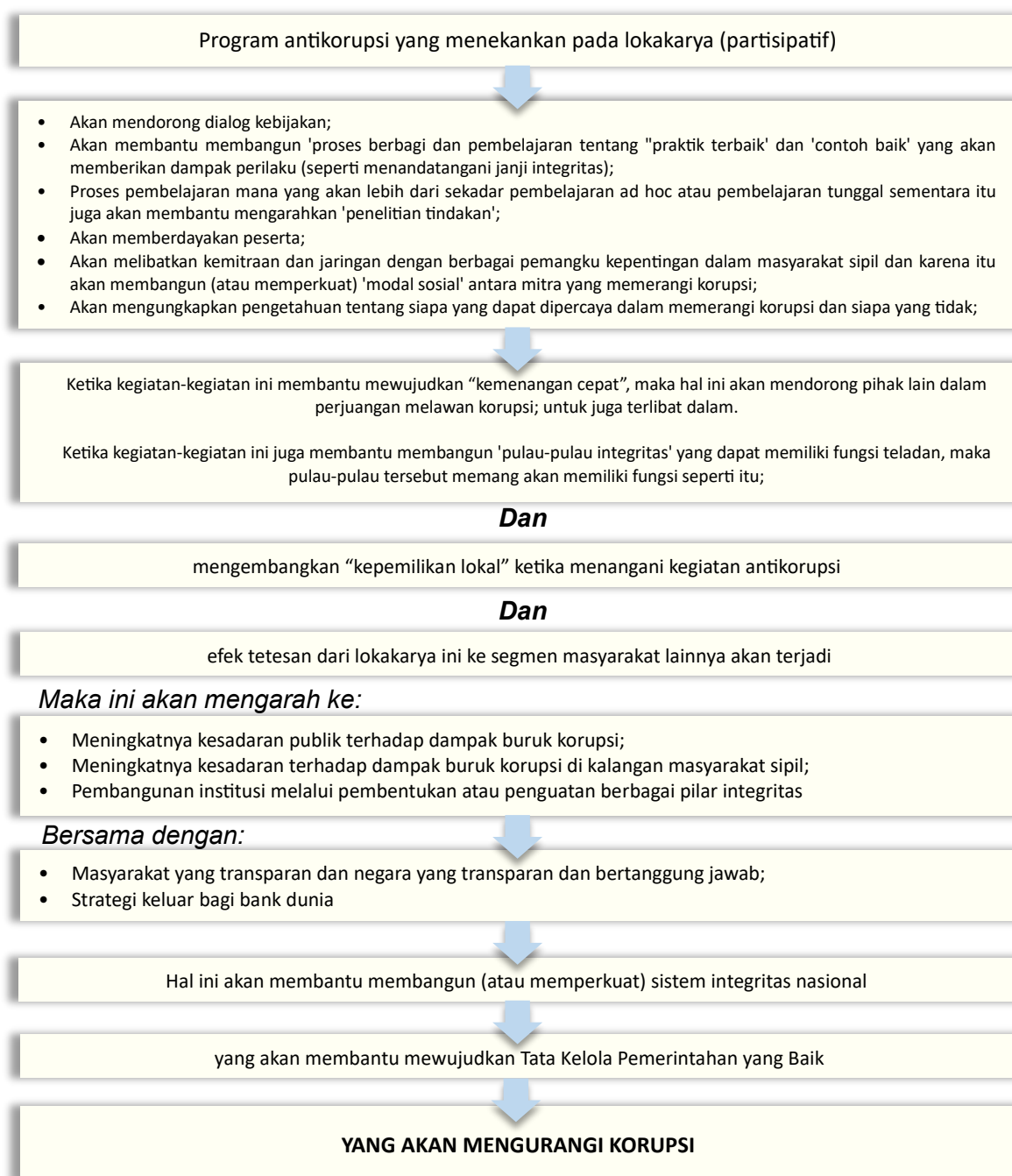
Contoh kedua berasal dari evaluasi jangka menengah atas dampak program antikorupsi yang dikembangkan oleh (pada saat itu) Lembaga Pengembangan Ekonomi (EDI) Bank Dunia. Inti dari pendekatan EDI adalah membantu mengembangkan dan/atau menyegarkan kembali Sistem Integritas Nasional (NIS) suatu negara. Pilar integritas adalah reformasi administratif, badan pengawas, parlemen, masyarakat sipil, kesadaran publik, peradilan, media bebas, dan kemauan politik.

Langseth et al (1997) telah menjelaskan pendekatan EDI/Bank Dunia, yang menekankan NIS sebagai metode komprehensif untuk memerangi korupsi. Tujuan utama EDI adalah membantu mengembangkan:

- Peningkatan kesadaran dalam masyarakat sipil;
- Pembangunan lembaga;
- Pencegahan praktik korupsi; dan
- Penuntutan pejabat yang korup.

Evaluasi difokuskan pada dua negara Afrika. Ia menggambarkan tujuan dan instrumen Bank Dunia, dan menempatkannya dalam konteks kelembagaan. Teori yang mendasarinya direkonstruksi. Program tersebut terdiri dari beberapa untaian kebijakan yang hanya kita bahas untaian lokakarya integritas dan media. Ia terdiri dari delapan praduga sosial dan perilaku yang mendasari gagasan bahwa lokakarya dapat menjadi alat yang efektif untuk membantu mengekang (dan mencegah) korupsi. Lokakarya tersebut diselenggarakan melalui organisasi

lokal bersama dengan Bank Dunia, sementara para VIP dari berbagai organisasi (parlemen, pemerintah, gereja, perusahaan, dll.) berpartisipasi. Bertukar informasi tentang apa yang harus dilakukan dalam praktik, menandatangani janji untuk membantu memerangi korupsi dan mengembangkan strategi komunikasi untuk menjangkau masyarakat luas, merupakan beberapa topik yang dibahas. Lihat Gambar 3.4 untuk representasi grafis dari teori intervensi ini. Teori intervensi ini selanjutnya dihadapkan dengan temuan dari studi literatur, analisis dokumen dan wawancara di tempat di dua negara, Uganda dan Tanzania. Evaluasi (tengah periode) diterbitkan pada akhir tahun 1990-an sedangkan pada tahun 2005 evaluasi ex post diterbitkan terhadap program lengkap.



Gambar 3.4 Rekonstruksi teori intervensi yang mendasari program antikorupsi World Bank Institute pada lokakarya

Menganalisis asumsi tentang perilaku manusia yang mendasari putusan suaka di Inggris

Herlihy dkk (2010) mempelajari asumsi dalam putusan yang dibuat oleh hakim imigrasi Inggris tentang pengambilan keputusan, mengenai siapa yang akan diakui sebagai pengungsi dan siapa yang tidak. Di Inggris, calon pengungsi harus memberikan penjelasan yang 'masuk akal' tentang penganiayaan selama proses pengambilan keputusan. Para pengambil keputusan harus memutuskan kebenaran penjelasan tersebut, dan apakah orang tersebut sesuai dengan definisi hukum pengungsi.

Para pengambil keputusan sering kali memiliki sedikit bukti yang mendukung, dan harus membuat penilaian kredibilitas yang melibatkan ketergantungan pada asumsi tentang perilaku manusia, penilaian, sikap, dan bagaimana penjelasan yang jujur disajikan. Melalui proses kualitatif, para penulis menghasilkan tema, yang mewakili masing-masing kategori asumsi dari 30 penentuan di Inggris.

Satu kategori membahas penilaian tentang perilaku yang 'mungkin'. Stereotip, akal sehat, dan 'bahaya menerapkan pertanyaan 'apa yang akan saya lakukan dalam situasi ini' untuk membuat penilaian tentang tindakan orang lain', dibahas. Kategori asumsi kedua menyangkut 'penilaian yang harus dibuat tentang kualitas bukti ahli di pengadilan'. 'Sifat dari sebuah kisah yang jujur' tampaknya dipandu oleh 'keyakinan awam yang kuat bahwa "menjaga cerita tetap lurus" adalah ciri khas dari kisah [seperti]'. Hal ini bertentangan dengan literatur empiris yang berkembang yang menekankan bahwa ingatan akan peristiwa traumatis sering kali tidak konsisten dan tidak diingat dengan baik. Beberapa kategori asumsi lainnya juga dibahas. Studi tersebut menyimpulkan bahwa:

kita menggunakan asumsi dan stereotip sebagai heuristik untuk membantu kita membuat keputusan ketika kita kekurangan waktu untuk mengumpulkan informasi yang lebih istimewa tentang situasi yang harus kita putuskan. [Namun] temuan-temuan ini tidak memberi tahu kita asumsi mana yang konsisten dengan pengetahuan terkini tentang perilaku manusia, khususnya selama dan setelah situasi bahaya, dan proses mengingat dan menyajikan cerita tentang situasi yang mungkin traumatis dalam konteks proses hukum.

Secara metodologis, studi Herlihy dkk. (2010) berbeda dari dua contoh lainnya. Menurut penulis, '[studi ini] didorong oleh data, bukan teori, [sementara] pengambilan sampel oportunistik dari penentuan dilakukan'.

Bagaimana Menemukan Teori Intervensi?

Pembuat kebijakan, politisi, pengacara, regulator, dan legislator tidak (selalu) transparan tentang asumsi mereka. Oleh karena itu, metode telah dikembangkan untuk mencari dan mendeteksi asumsi implisit dan merekonstruksinya. Di sini kami menyajikan dua di antaranya, berdasarkan inventarisasi sebelumnya dari beberapa pendekatan lain: pendekatan ilmiah kebijakan dan pendekatan penilaian strategis.

Pendekatan Ilmiah Kebijakan

'Pendekatan ilmiah kebijakan' mencakup enam langkah berikut:

Langkah 1: Mengidentifikasi mekanisme perilaku yang diharapkan untuk mengatasi suatu/masalah Mencari dokumen formal dan informal serta transkrip wawancara dapat memunculkan pernyataan yang menunjukkan mengapa diyakini perlu untuk mengatasi suatu

masalah (masyarakat atau kebijakan) dengan mengembangkan pengaturan (hukum) atau kebijakan dan apa tujuannya. Pernyataan-pernyataan ini dapat menunjukkan mekanisme.

Langkah 2: Pernyataan yang memiliki bentuk berikut ini khususnya relevan untuk mendeteksi mekanisme:

'Jelas bahwa X . . . akan berhasil'

'Menurut pendapat kami, cara terbaik untuk mengatasi masalah ini adalah dengan . . .'

'Satu-satunya cara untuk memecahkan masalah ini adalah dengan . . .'

'Pengalaman lembaga kami selama X tahun memberi tahu kami bahwa . . .'

Langkah 3: Menyusun survei pernyataan-pernyataan ini dan mengaitkan mekanisme dengan tujuan pengaturan atau kebijakan yang sedang ditinjau

Langkah 4: Merumuskan kembali pernyataan-pernyataan ini dalam proposisi 'jika-maka' bersyarat atau proposisi dengan struktur yang serupa ('semakin banyak X, semakin sedikit Y').

Langkah 5: Mencari 'alasan' untuk mengidentifikasi mata rantai yang hilang di dalam atau di antara proposisi yang berbeda melalui analisis argumentasi.

Analisis argumentasi adalah alat standar dalam logika dan filsafat. Analisis ini menggambarkan model untuk menganalisis rangkaian argumen dan membantu merekonstruksi dan melengkapi argumentasi. Konsep utamanya adalah 'garansi', bagian 'karena' dari sebuah argumen: konsep ini menyatakan bahwa B mengikuti A karena prinsip yang (umumnya) diterima. Misalnya, 'kinerja organisasi tidak akan membaik tahun depan' mengikuti 'kinerja organisasi ini tidak membaik selama lima tahun terakhir', karena prinsipnya, 'kinerja masa lalu adalah prediktor terbaik kinerja masa depan'.

Bagian 'karena' dari argumen sering kali tidak dijelaskan secara eksplisit. Akibatnya, jaminan ini harus disimpulkan oleh analis yang melakukan analisis. Perangkat lunak visualisasi (pemetaan) dapat membantu dalam pekerjaan ini.

Langkah 6: Rumuskan ulang 'garansi' ini dalam bentuk proposisi 'jika-maka' (atau yang serupa) yang bersyarat dan buat bagan hubungan (yang sebagian besar bersifat kausal).

Langkah 7: Evaluasi validitas proposisi dengan melihat:

- konsistensi logis dari serangkaian proposisi;
- konten empirisnya, yaitu, sejauh mana teori dan, khususnya, dampak yang diasumsikan dari mekanisme perilaku sesuai dengan keadaan terkini dalam ilmu sosial/perilaku/ekonomi pada mekanisme ini.

Mengevaluasi teori intervensi (yang direkonstruksi) dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan mengonfrontasi (atau menyanggah) teori tersebut dengan teori lain. Cara lainnya adalah dengan menguji teori tersebut secara empiris. Kemungkinan ketiga adalah dengan menyelenggarakan proses berulang penyempurnaan berkelanjutan

menggunakan umpan balik pemangku kepentingan dan berbagai teknik dan sumber pengumpulan data, sementara pendekatan keempat adalah dengan memanfaatkan tinjauan dan studi sintesis yang telah dipublikasikan untuk menguji teori tersebut.

Pendekatan Penilaian Strategis

Ada empat tahap utama yang menjadi inti dari Pendekatan Penilaian Strategis:

- (1) pembentukan kelompok;
- (2) munculnya asumsi;
- (3) perdebatan dialektis; dan
- (4) sintesis (Mason dan Mitrof, 1980).

Tahap 1 – Pembentukan Kelompok: Tujuannya adalah untuk menyusun kelompok sehingga operasi produktif dari tahap-tahap metodologi selanjutnya dapat difasilitasi. Sebagian besar individu yang memiliki minat terhadap pertanyaan yang relevan harus dilibatkan. Mereka dibagi ke dalam kelompok-kelompok, dengan perhatian diberikan untuk memaksimalkan konvergensi sudut pandang dalam kelompok dan untuk memaksimalkan divergensi perspektif antarkelompok.

Tahap 2 – Munculnya Asumsi: Kelompok-kelompok yang berbeda secara terpisah menggali asumsi paling signifikan yang mendukung pengaturan atau intervensi dan kebijakan. Dua teknik dianggap penting dalam membantu proses ini.

Yang pertama, analisis pemangku kepentingan, meminta setiap kelompok untuk mengidentifikasi individu atau kelompok utama yang menjadi penentu keberhasilan atau kegagalan pengaturan atau intervensi (yang mereka sukai). Ini melibatkan pertanyaan-pertanyaan seperti: Siapa yang terpengaruh oleh pengaturan tersebut? Siapa yang berkepentingan di dalamnya? Siapa yang dapat memengaruhi adopsi, pelaksanaan, atau implementasinya? Dan siapa yang peduli tentang hal itu? Untuk pemangku kepentingan yang diidentifikasi, setiap kelompok kemudian mencantumkan asumsi apa yang dibuatnya tentang masing-masing hal ini ketika meyakini bahwa strategi pilihannya akan berhasil.

Teknik kedua adalah penilaian asumsi. Awalnya, seseorang harus menemukan dan mencantumkan asumsi. Ini melibatkan pencarian pernyataan tentang gejala masalah (yang harus dipecahkan, membedakannya dari pernyataan tentang penyebab masalah). Untuk setiap asumsi yang tercantum, setiap kelompok mengajukan dua pertanyaan kepada dirinya sendiri: (1) Seberapa penting asumsi ini dalam hal pengaruhnya terhadap keberhasilan atau kegagalan intervensi/pengaturan? Dan (2) seberapa yakin kita bahwa asumsi tersebut dibenarkan? Di sini, pada kenyataannya, evaluasi asumsi yang tercantum terjadi, biasanya dengan menggunakan tinjauan penelitian dan dokumen serupa. Hasilnya dicatat. Setiap kelompok kemudian dapat mengidentifikasi sejumlah asumsi utama yang menjadi dasar keberhasilan strateginya. Teknik seperti pemetaan konsep atau wordle untuk menghasilkan 'word cloud' dapat membantu.

Tahap 3 – Debat dialektis: Kelompok-kelompok tersebut disatukan kembali dan masing-masing kelompok mengajukan argumen terbaik kepada kelompok lain untuk pengaturan atau intervensi yang disukai, sambil mengidentifikasi asumsi utamanya. Hanya poin informasi yang diizinkan dari kelompok lain saat ini. Kemudian ada debat terbuka yang berfokus pada asumsi

mana yang berbeda antara kelompok, yang dinilai berbeda, dan asumsi kelompok lain mana yang menurut masing-masing kelompok paling meresahkan. Setiap kelompok harus mengembangkan pemahaman penuh tentang intervensi atau pengaturan yang disukai kelompok lain dan asumsi utamanya.

Tahap 4 – Sintesis: Kemudian dilakukan upaya untuk melakukan sintesis. Asumsi dinegosiasikan dan modifikasi asumsi utama dibuat. Asumsi yang disetujui dicatat; asumsi tersebut dapat menjadi dasar konsensus seputar pengaturan hukum baru (jenis) yang menjembatani kesenjangan antara pengaturan 'lama' dan melampauinya. Jika tidak ada sintesis yang dapat dicapai, poin-poin ketidaksepakatan dicatat dan pertanyaan tentang penelitian apa yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan perbedaan ini didiskusikan. Pendekatan ini dapat dilihat sebagai aturan praktis saat memasuki dunia pemahaman dengan teori dasar dan pola pikir hukum. Penggunaannya meningkatkan transparansi tentang apa yang dilakukan peneliti saat mencoba mendeteksi 'pola pikir' ini.

3.6 HUBUNGAN ANTARA TEORI PENJELASAN DAN TEORI INTERVENSI

Kita mungkin mendapat kesan bahwa teori penjelasan dan teori intervensi tidak saling terkait. Kenyataannya berbeda. Pertama, mekanisme yang menjadi bagian dari teori intervensi dan teori ilmiah dapat saling terkait. Kedua, ketika merancang dan menerapkan kebijakan dan regulasi, para pelaku memanfaatkan dan belajar dari teori (penjelasan). Contohnya adalah teori modal sosial, yang menekankan pentingnya 'ikatan lemah' versus 'ikatan kuat' dalam mencari pekerjaan, mitra, atau informasi secara umum. Kekuatan ikatan pribadi biasanya diukur berdasarkan tingkat intensitas emosional, keintiman, dan layanan timbal balik. Selama bertahun-tahun, teori Granovetter telah menjadi bagian dari repertoar para pembuat kebijakan.

Ada juga kombinasi teori intervensi dan ilmiah yang saling melengkapi dengan baik. Teori Ayres dan Braithwaite (1992) tentang piramida penegakan hukum (juga dikenal sebagai 'Teori Regulasi Responsif') telah digabungkan dengan asumsi bahwa inspektorat pemerintah dan otoritas pengawasan bekerja dengan (kadang-kadang secara implisit). Inti dari teori Regulasi Responsif ini adalah piramida penegakan hukum. Sebagian besar tindakan regulasi terjadi di dasar piramida, di mana upaya awalnya dilakukan untuk membujuk kepatuhan dengan persuasi.

Tahap berikutnya dari eskalasi penegakan hukum adalah surat peringatan; jika gagal untuk mengamankan kepatuhan, pengenaan sanksi moneter perdata [ada dalam agenda]; jika gagal, penuntutan pidana; jika gagal, rencana penutupan atau penangguhan sementara lisensi untuk beroperasi; jika gagal, pencabutan lisensi secara permanen.

3.7 KRITERIA UNTUK MENGUJI DAN MENGGUNAKAN TEORI

Teori dapat digunakan dengan berbagai cara. Teori menjelaskan variabel yang akan dipelajari, menghasilkan pengetahuan latar belakang, menjelaskan temuan, dan berkontribusi pada pertumbuhan pengetahuan di suatu bidang. Namun, karena tidak ada bukti bahwa teori penjelasan atau intervensi secara apriori valid (atau benar), teori harus diuji. Teori tersebut

merupakan dugaan.

'Konten informatif' suatu teori merupakan kriteria pertama. Dalam istilah yang lebih populer, ini adalah kemampuan suatu teori untuk diuji dan dibantah. Ini adalah 'serangkaian pernyataan yang tidak sesuai dengan teori. Rumusan ini terkadang mengejutkan orang, tetapi menjadi lebih mudah dipahami ketika seseorang mengingat slogan bahwa "semakin banyak teori melarang, semakin banyak teori tersebut mengatakan"'.

Pernyataan seperti 'wenn der Hahn kraeth auf dem Mist, dann aendert sich das Wetter oder es bleibt wie es ist' ['ketika ayam berkokok di atas kotoran, maka cuaca berubah atau tetap seperti itu'] tidak memiliki atau tidak memiliki konten informatif yang berarti, karena pernyataan tersebut selalu benar. Sebaliknya adalah teori dengan 'konten berlebih' (di atas yang lain). Ketika teori A dapat menjelaskan dua fenomena tetapi tidak mampu menjelaskan fenomena ketiga dan teori B dapat menjelaskan ketiga fenomena tersebut, teori B memiliki konten berlebih atas teori A Atau, secara sederhana: teori B 'lebih baik' daripada teori A.

Konten empiris, yang juga dikenal sebagai 'kebenaran' atau 'validitas' suatu teori adalah kriteria kedua. Pengujian teori dapat dilakukan melalui proses yang terdiri dari langkah-langkah berikut:

- menyimpulkan implikasi yang dapat diamati dari teori;
- membahas dan menjawab pertanyaan tentang desain penelitian mana yang paling sesuai dengan masalah;
- mengoperasionalkan, yaitu menggambarkan bagaimana implikasi dapat diamati dalam kenyataan;
- mengembangkan (atau meminjam) instrumen pengukuran untuk melakukan pekerjaan ini;
- melakukan pengukuran dan membandingkan hasilnya dengan teori;
- mencari penjelasan tandingan;
- melaporkan (dan menyebarluaskan temuan).

Saat melakukan pekerjaan ini, terkadang referensi dibuat untuk hipotesis nol. Hipotesis semacam itu adalah pernyataan umum atau posisi default bahwa tidak ada hubungan antara fenomena tertentu (sementara teori biasanya berpendapat sebaliknya, yaitu bahwa ada hubungan antara A dan B). Menolak atau menyangkal hipotesis nol – dan dengan demikian menyimpulkan bahwa ada dasar untuk meyakini adanya hubungan antara fenomena ini (misalnya bahwa intervensi perilaku potensial memiliki efek terukur pada variabel hasil tertentu, seperti residivisme) – adalah tugas utama penelitian ilmiah.

Selain langkah pertama dalam daftar (deduksi), kita akan membahas yang lain dalam Bab 6 dan 7. Deduksi implikasi yang dapat diamati dari sebuah teori dapat dilakukan dengan cara formal, tetapi juga ketika 'peneliti hanya memikirkan teori mereka'. Ketika rute formal diikuti, logika argumentasi menjadi penting. Model Hempel-Oppenheim, juga dikenal sebagai model hukum penutup atau model Deduktif-Nomologis, sering digunakan. Penjelasan seperti itu adalah 'turunan deduktif dari terjadinya peristiwa yang akan dijelaskan dari serangkaian proposisi yang benar termasuk setidaknya satu pernyataan hukum ilmiah. Peristiwa yang akan dijelaskan disebut explanandum; rangkaian pernyataan yang menjelaskan terkadang disebut

sebagai 'explanans'. Contoh yang terkenal adalah: 'Semua manusia itu fana. Socrates adalah manusia. Jadi, Socrates itu fana'.

Konten empiris suatu teori terdiri dari hasil-hasil penelitian yang menjadi dasar pengujian teori tersebut, seberapa sering hal itu terjadi, dan seberapa kuat penelitian yang digunakan. Akan tetapi, dan sejalan dengan rasionalisme kritis, temuan bahwa suatu teori telah dikuatkan tidak menjamin 'kebenarannya', karena teori itu selalu dapat dibantah oleh pengujian empiris yang baru. Meskipun demikian, beberapa teori 'lebih kuat' (yakni lebih didukung oleh bukti) daripada yang lain, yang mengomunikasikan pesan penting. Parsimoni (kemampuan untuk menjelaskan dalam beberapa istilah dan pernyataan) adalah kriteria ketiga, sedangkan kriteria keempat adalah kegunaan (juga dikenal sebagai 'kegunaan') sebuah teori: apakah sebuah teori menyajikan saran yang relevan untuk praktik?

Kesimpulan

- Teori itu penting. Dan tidak hanya untuk sore hari Jumat yang hujan. Kami telah membedakan dua jenis, teori penjelasan dan intervensi. Teori penjelasan sering kali dapat ditemukan dalam makalah dan buku akademis, cukup banyak di antaranya yang memiliki nama atau label dan (sering) telah 'diuji' dalam penelitian empiris. Teori intervensi adalah (rangkaian) asumsi yang direkonstruksi yang mendasari kebijakan dan pengaturan hukum, seperti undang-undang, peraturan, kontrak, dan perjanjian. Politisi, pembuat kebijakan, hakim, atau legislatorlah yang 'menandatangani' teori tersebut; teori intervensi adalah jawaban mereka atas pertanyaan mengapa intervensi dan pengaturan ini, 'akan' [mungkin; mudah-mudahan] berdampak.
- Terkadang teori intervensi dan penjelasan berbeda, terkadang mereka bertemu. Elemen penting yang menghubungkan keduanya adalah fokus bersama mereka pada mekanisme (perilaku, kelembagaan, dan sosial).
- Kami juga telah membahas di mana menemukan teori penjelasan dan cara menemukannya. Aturan praktis tentang cara mendeteksi dan merekonstruksi teori intervensi disajikan.
- Terakhir, cobalah untuk tidak frustrasi atau bingung jika Anda melihat konsep yang berbeda digunakan dalam disiplin ilmu yang berbeda (ketika 'teori' dibahas). Itulah adanya: dugaan.

BAB 4

TINJAUAN DAN SINTESIS PENELITIAN

Suatu proposisi hukum tidak lebih dari sekadar objek yang masuk akal yang dapat membangkitkan dorongan dan memicu respons.

4.1 DARI STUDI PUSTAKA TRADISIONAL KE TINJAUAN SISTEMATIS

Selama ini, para ilmuwan telah melakukan studi pustaka yang merangkum bukti (empiris) yang ada di suatu bidang. Mereka ingin mengetahui dan memahami hasil penelitian sebelumnya, untuk menguji teori mereka, atau untuk alasan lain. Dan memang benar demikian. Kemajuan dalam sains sebagian besar dihasilkan melalui pembelajaran dari orang lain. Namun, selama beberapa dekade terakhir menjadi jelas bahwa cara kerja ini sering kali tidak sistematis. Gough, Oliver, dan Thomas (2011) menyatakannya sebagai berikut:

Peninjau [pustaka] tidak selalu berusaha mengidentifikasi semua penelitian yang relevan, memeriksa apakah penelitian tersebut dapat diandalkan, atau menulis hasil mereka dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan. Tinjauan pustaka tradisional biasanya menyajikan temuan penelitian yang berkaitan dengan topik yang diminati. Tinjauan pustaka tersebut merangkum apa yang diketahui tentang suatu topik. Tinjauan pustaka cenderung memberikan perincian tentang penelitian yang dipertimbangkan tanpa menjelaskan kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi dan memasukkan penelitian tersebut atau mengapa penelitian tertentu dijelaskan dan dibahas sementara yang lain tidak.

Penelitian yang berpotensi relevan mungkin tidak disertakan, karena penulis tinjauan tidak mengetahuinya atau, karena mengetahuinya, memutuskan untuk tidak memasukkannya karena alasan yang tidak disebutkan. Jika proses mengidentifikasi dan memasukkan penelitian tidak eksplisit, tidak mungkin untuk menilai kesesuaian keputusan tersebut atau apakah keputusan tersebut diterapkan secara konsisten dan ketat. Dengan demikian, tidak mungkin juga untuk menafsirkan makna temuan tinjauan.

Cochrane merupakan agen perubahan penting yang memulai gerakan yang sekarang dikenal sebagai Cochrane Library/Cochrane Collaboration. Pada tahun 1972, ia memperkenalkan konsep kedokteran berbasis bukti. Kritik Cochrane adalah bahwa kedokteran belum mengatur pengetahuannya dengan cara yang sistematis, andal, dan kumulatif. Ia mendorong praktisi kesehatan untuk mempraktikkan kedokteran berbasis bukti. Beberapa tahun kemudian, pada tahun 1975, Gene V. Glass dari Laboratorium Penelitian Pendidikan di Universitas Colorado memperkenalkan sebuah metode yang menjadi penting bagi gerakan berbasis bukti: meta-analisis. Ia menggunakan istilah ini untuk menggambarkan 'analisis dari analisis' atau analisis statistik dari kumpulan hasil analisis yang lebih besar dari studi individual untuk tujuan mengintegrasikan temuan-temuan. Pada waktu yang hampir bersamaan, meta-

evaluasi diperkenalkan, yang menggambarkan proses di mana para peneliti mengevaluasi kualitas metodologis (dan prosedural) dari evaluasi (dan studi lainnya).

Pada tahun 1990-an, Kolaborasi Campbell mulai melakukan pekerjaan yang mirip dengan Cochrane, tetapi sekarang untuk ilmu sosial dan perilaku. Mengenai kriminologi, permintaan Kongres pada tahun 1996 kepada Jaksa Agung untuk memberikan 'evaluasi komprehensif tentang efektivitas' hibah Departemen Kehakiman untuk membantu penegakan hukum negara bagian dan lokal serta masyarakat dalam mencegah kejahatan, juga merangsang pengembangan apa yang kemudian dikenal sebagai 'kajian penelitian sistematis'.

Setahun kemudian laporan Sherman, Mencegah Kejahatan: Apa yang Berhasil, Apa yang Tidak, Apa yang Menjanjikan diterbitkan. Laporan itu memiliki lampiran metodologis yang di dalamnya kriteria untuk penilaian kualitas penelitian dijelaskan, yang saat ini dikenal sebagai Skala Metode Ilmiah Maryland. Pendekatan ini secara bertahap memperoleh tempat dalam penelitian dan evaluasi ilmu sosial.

**KOTAK 4.1 SKALA METODE ILMIAH MARYLAND (MSMS) SEBAGAIMANA DITERAPKAN
DALAM KRIMINOLOGI**

Level 1: Korelasi antara program pencegahan dan ukuran kejahatan pada satu titik waktu (misalnya, area dengan CCTV [Closed Circuit TV] memiliki tingkat kejahatan yang lebih rendah daripada area tanpa CCTV)

Level 2: Ukuran kejahatan sebelum dan setelah program diterapkan, tanpa kondisi kontrol yang sebanding (misalnya, kejahatan menurun setelah CCTV dipasang)

Level 3: Ukuran kejahatan sebelum dan setelah program dalam kondisi eksperimental dan kontrol (misalnya, kejahatan menurun setelah CCTV dipasang di area eksperimental, tetapi tidak ada penurunan kejahatan di area yang sebanding)

Level 4: Ukuran kejahatan sebelum dan setelah di (beberapa) unit eksperimental dan kontrol, mengendalikan variabel yang memengaruhi kejahatan (misalnya, viktimisasi tempat di bawah pengawasan CCTV menurun dibandingkan dengan viktimisasi tempat kontrol, setelah mengendalikan fitur tempat yang memengaruhi viktimisasi mereka tion)

Level 5: Penugasan acak program dan kondisi kontrol ke unit (misalnya, viktimisasi tempat yang secara acak ditetapkan untuk mengalami penurunan pengawasan CCTV dibandingkan dengan viktimisasi tempat kontrol)

Gough, Oliver, dan Thomas (2011) mendefinisikan pendekatan 'baru' terhadap 'studi pustaka' sebelumnya sebagai 'kajian pustaka penelitian menggunakan metode yang sistematis, eksplisit, dan dapat dipertanggungjawabkan'. Ketika, setelah kajian tersebut, cukup

banyak studi empiris yang masih memenuhi syarat untuk analisis lebih lanjut, meta-analisis statistik dapat dilakukan.

Sebelum membahas lebih dalam dunia yang disebut Hansen dan Rieper (2011) sebagai lembaga produksi pengetahuan tingkat kedua, pertama-tama kita bahas hubungan antara kajian penelitian sistematis dan teori.

4.2 HUBUNGAN ANTARA TEORI DAN KAJIAN PENELITIAN

Dimensi pertama dari hubungan ini adalah bahwa teori dapat ditemukan (atau ditemukan secara tidak sengaja) ketika melakukan kajian penelitian sistematis. Misalkan Anda terlibat dalam kajian tentang penyelesaian sengketa dan perilaku konflik (dalam kasus perdata) dan tidak terlatih dengan baik dalam teori. Kemungkinan bahwa, saat melakukan peninjauan, Anda akan menemukan beberapa teori – seperti teori pilihan rasional (memberikan jawaban atas pertanyaan mengapa beberapa orang menginvestasikan waktu dan uang dalam pertarungan hukum dan yang lainnya tidak atau menahan diri di tengah jalan) atau teori pemain berulang versus pemain tunggal Galantar – cukup tinggi. Kemudian seseorang belajar tentang 'teori' dengan melakukan peninjauan.

Hubungan lain antara teori dan peninjauan berkaitan dengan proses membuka kotak hitam asumsi tentang mekanisme yang mendasari pengaturan hukum, perangkat, atau kebijakan yang sedang diselidiki. Sering kali tidak jelas secara apriori mekanisme mana (yang diasumsikan) berperan; mekanisme tersebut harus diartikulasikan. Dalam situasi tersebut, proses pencarian dan penelusuran berbasis langkah, bertahap, dan berulang, termasuk coba-coba, terhadap mekanisme berlangsung. Teori merangsang dan membantu proses ini.

Di satu sisi, teori menghasilkan wawasan tentang faktor dan variabel yang relevan untuk diperhitungkan dalam pencarian sistematis (sebagai kata kunci), sementara di sisi lain, faktor yang sudah menjadi bagian dari proses pencarian dapat diperkaya dengan menghubungkannya dengan teori yang mungkin belum dikenal oleh peneliti. Segal dkk (2012) menunjukkan cara kerja hal ini dalam sebuah makalah dengan judul yang cukup provokatif, 'Teori! Mata Rantai yang Hilang dalam Memahami Kinerja . . .'. Hubungan ketiga antara teori dan tinjauan adalah ketika teori membantu menjelaskan hasil.

4.3 INTERVENSI KESADARAN SCARED STRAIGHT, KREDIT MIKRO DAN INSPEKSI YANG DIUMUMKAN/TIDAK DIUMUMKAN

Contoh pertama dipublikasikan dalam Campbell Collaboration Series, contoh kedua dalam rangkaian International Initiative for Impact Evaluation dan The Campbell Collaboration Series, dan contoh ketiga dalam jurnal akademis Health Policy.

Intervensi Kesadaran Scared Straight

Studi ini berfokus pada apa yang diketahui tentang dampak program USA Scared Straight terhadap kejahatan, khususnya perilaku residivisme dan beberapa program Kesadaran Remaja lainnya. Scared Straight sering dievaluasi. Petrosino dkk (2003) merangkum, menganalisis, dan mensintesis hasil dari lusinan studi ini. Pertanyaan penelitiannya adalah apa saja dampak dari program yang terdiri dari kunjungan terorganisasi ke penjara oleh anak-

anak nakal (yang secara resmi diadili atau dihukum oleh pengadilan anak) atau anak-anak yang belum nakal (anak-anak yang bermasalah tetapi tidak secara resmi diadili sebagai anak nakal), yang bertujuan untuk mencegah mereka melakukan kegiatan kriminal':

Analisis menunjukkan bahwa intervensi tersebut lebih berbahaya daripada tidak melakukan apa pun. . . . Mengingat hasil ini, kami tidak dapat merekomendasikan program ini sebagai strategi pencegahan kejahatan. Namun, lembaga yang mengizinkan program semacam itu harus mengevaluasinya secara ketat, tidak hanya untuk memastikan bahwa program tersebut melakukan apa yang seharusnya dilakukan (mencegah kejahatan) – tetapi setidaknya program tersebut tidak menyebabkan lebih banyak kerugian daripada manfaat bagi warga negara yang mereka janjikan untuk dilindungi'.

Dalam Kotak 4.2, informasi lebih lanjut tentang bagaimana tinjauan penelitian ini dilakukan dirangkum.

KOTAK 4.2 TINJAUAN SISTEMATIS EVALUASI INTERVENSI KESADARAN STRAIGHT SCARED

Tujuan tinjauan ini adalah 'untuk menilai dampak program yang mencakup kunjungan terorganisasi ke penjara anak-anak nakal (yang secara resmi diadili atau dihukum oleh pengadilan anak-anak) atau anak-anak yang belum nakal (anak-anak yang bermasalah tetapi tidak secara resmi diadili sebagai anak nakal), yang bertujuan untuk mencegah mereka melakukan aktivitas kriminal'.

Kriteria yang digunakan untuk memasukkan atau mengecualikan penelitian dalam tinjauan ini sangat ketat: penelitian eksperimental dan kuasi-eksperimental diperbolehkan, asalkan penelitian tersebut memiliki kelompok kontrol tanpa perawatan (lihat Bab 5 untuk informasi tentang desain penelitian). Hanya penelitian yang melibatkan anak-anak nakal, berusia 17 tahun atau lebih muda atau sampel anak-anak nakal dan dewasa muda (usia 13–21) yang disertakan. Jenis intervensi juga ketat: hanya intervensi yang menampilkan kunjungan oleh peserta program ke fasilitas penjara sebagai komponen utamanya yang disertakan. Studi yang dipilih untuk ditinjau harus mencakup setidaknya satu hasil dari perilaku pelanggaran berikutnya, sebagaimana diukur dengan indeks seperti penangkapan, hukuman, kontak dengan polisi, atau pelanggaran yang dilaporkan sendiri.

Perhatian juga diberikan pada teori intervensi yang mendasari program-program ini. 'Teori yang mendasari program seperti "Scared Straight" adalah pencegahan. Pendukung program dan lainnya percaya bahwa penggambaran realistis kehidupan di penjara dan presentasi oleh narapidana akan mencegah pelanggar remaja (atau anak-anak yang berisiko menjadi nakal) dari keterlibatan lebih lanjut dengan kejahatan'.

Strategi pencarian untuk mengidentifikasi studi yang akan diperhitungkan adalah sebagai berikut. Beberapa kata kunci seperti 'scared straight', 'kesadaran penjara', 'penghindaran penjara' atau 'kesadaran remaja' digunakan selama tindakan pencarian. 'Untuk meminimalkan potensi bias publikasi (kemungkinan bahwa jurnal lebih cenderung menerbitkan temuan yang menolak hipotesis nol dan menemukan program yang lebih efektif daripada literatur yang tidak dipublikasikan pada umumnya), kami melakukan strategi pencarian yang dirancang untuk mengidentifikasi studi yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan.

Kami juga melakukan strategi pencarian yang komprehensif untuk meminimalkan potensi bias disiplin ilmu, misalnya evaluasi yang dilaporkan dalam jurnal kriminologi atau yang diindeks dalam basis data abstrak khusus bidang mungkin berbeda dari yang dilaporkan dalam sumber psikologis, sosiologis, layanan sosial, kesehatan masyarakat atau pendidikan.

Pertama, eksperimen acak diidentifikasi dari tinjauan yang lebih besar terhadap uji coba lapangan dalam pengurangan kejahatan yang dilakukan oleh penulis pertama pada tahun 1990-an: lebih dari 300 eksperimen acak dikumpulkan. Penelitian yang lebih baru ditelusuri dengan menggunakan metode berikut dan metode serupa:

- (1) penelusuran luas dari Campbell Collaboration Social, Psychological, Educational & Criminological Trials Register (C2-SPECTR) dan 14 basis data elektronik lainnya seperti Criminal Justice Abstracts, Current Contents, Education Resource Information Clearinghouse dan beberapa basis data ilmu sosial;
- (2) pemeriksaan kutipan dari tinjauan sistematis atau tradisional yang lebih baru untuk menyediakan cakupan penelitian yang lebih baru dan pemeriksaan kutipan dokumen yang relevan dengan program 'Scared Straight' dan program serupa;
- (3) kontak email dengan peneliti.

Analisis penelitian dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif ('naratif').

Kredit Mikro/Pembiayaan Mikro

Contoh kedua mempelajari dampak kredit mikro/pembiayaan mikro di negara berkembang. Selama dua dekade terakhir, kegiatan kredit mikro dan keuangan mikro telah menyebar ke seluruh dunia, menjangkau puluhan juta rumah tangga miskin dengan layanan keuangan yang disesuaikan.

Keuangan mikro dapat digambarkan sebagai bidang intervensi dan bukan instrumen tertentu. Awalnya, keuangan mikro biasanya berarti kredit mikro untuk modal kerja dan investasi yang sangat kecil, tetapi semakin diperluas untuk mencakup tabungan/deposito, (berbagai jenis terbatas) asuransi mikro dan layanan pembayaran (termasuk sewa mikro) serta berbagai produk kredit yang agak lebih luas. Vaessen dkk (2014) melakukan tinjauan sistematis atas evaluasi dampak kredit mikro/pembiayaan mikro terhadap pemberdayaan perempuan

atas pengeluaran rumah tangga:

Sejalan dengan tiga tinjauan terkini lainnya tentang pembiayaan mikro, kami menemukan bahwa basis bukti kredit mikro sangat luas, namun sebagian besar studi lemah secara metodologis. Dari studi-studi yang dianggap sebanding dan memiliki kualitas minimum yang dapat diterima, kami menyimpulkan bahwa secara keseluruhan tidak ada bukti adanya dampak kredit mikro terhadap kendali perempuan atas pengeluaran rumah tangga. Kendali perempuan atas sumber daya rumah tangga merupakan dimensi perantara yang penting dalam proses pemberdayaan perempuan.

Mengingat kurangnya bukti secara keseluruhan mengenai dampak kredit mikro terhadap kendali perempuan atas sumber daya rumah tangga, maka sangat tidak mungkin bahwa, secara keseluruhan, kredit mikro memiliki dampak yang berarti dan substansial terhadap proses pemberdayaan dalam arti yang lebih luas. Meskipun dampak pada pemberdayaan tampaknya telah terjadi dalam studi tertentu, risiko bias yang tinggi dari studi yang memberikan penilaian positif menunjukkan bahwa temuan tersebut memiliki validitas yang terbatas.

Kesimpulan kami tentang dampak kredit mikro pada pemberdayaan juga sejalan dengan tinjauan sistematis sebelumnya oleh Duvendack dkk. (2011) dan Stewart dkk. (2010) yang melaporkan dampak pemberdayaan secara terbatas. Akibatnya, tampaknya ada kesenjangan antara keyakinan masyarakat yang sering optimis terhadap kapasitas kredit mikro untuk memperbaiki posisi perempuan dalam proses pengambilan keputusan dalam rumah tangga di satu sisi, dan basis bukti empiris di sisi lain. Kotak 4.3 menyajikan informasi lebih lanjut.

KOTAK 4.3 TINJAUAN SISTEMATIS EVALUASI DAMPAK KREDIT MIKRO/PEMBIAYAAN MIKRO TERHADAP PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (TERHADAP BELANJA RUMAH TANGGA)

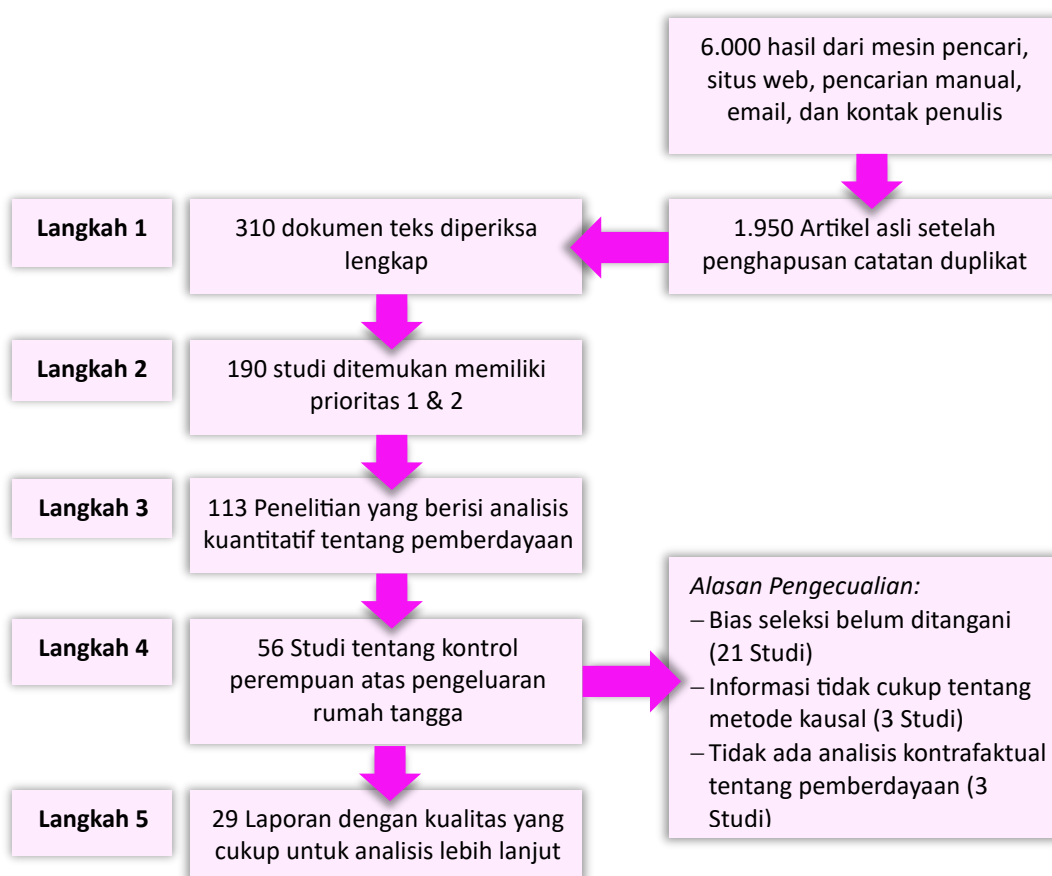
Tujuan dari tinjauan ini adalah 'untuk memberikan tinjauan sistematis atas bukti tentang dampak kredit mikro terhadap kendali perempuan atas belanja rumah tangga di negara-negara berkembang. Lebih khusus lagi, kami bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan penelitian terkait: 1) apa yang dikatakan bukti evaluatif tentang hubungan kausal antara kredit mikro dan dimensi-dimensi tertentu dari pemberdayaan perempuan dan 2) apa saja mekanisme yang memediasi hubungan ini?'

Kriteria inklusi: Kami hanya menyertakan studi yang menganalisis dampak skema kredit mikro yang menargetkan perempuan miskin di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, sebagaimana didefinisikan oleh Bank Dunia. Studi yang tidak menyertakan analisis tentang kredit mikro dan dampak pada satu atau lebih dimensi kendali perempuan atas belanja rumah tangga dikecualikan. Akhirnya, studi yang tersisa disaring untuk desain

metodologis. Studi yang memberikan bukti penanganan masalah atribusi baik melalui desain acak, pencocokan kuasi-eksperimental, atau analisis regresi, disertakan.

Kami menyertakan studi yang memperkirakan dampak intervensi kredit mikro pada pemberdayaan perempuan menggunakan ukuran-ukuran berikut yang berkaitan dengan kendali perempuan atas pengeluaran rumah tangga: kekuatan pengambilan keputusan perempuan, daya tawar, kendali atas pengeluaran berkenaan dengan pembelian kecil, pembelian besar, atau pengeluaran mengenai jenis barang konsumsi apa pun, investasi produktif atau perolehan aset (misalnya pakaian, pendidikan, kesehatan, makanan, perbaikan rumah, ternak kecil, ternak besar, tanah).

Perhatian juga diberikan pada teori intervensi yang mendasari keuangan kredit mikro. Teori ini direkonstruksi; tiga jenis mekanisme yang dibahas sebelumnya (kelembagaan, pembentukan tindakan, dan transformatif, lihat Bab) merupakan bagian dari rekonstruksi ini.



Catatan 1: Untuk deskripsi langkah-langkahnya, lihat Gambar 3.

Catatan 2: Duplikat diidentifikasi dengan program EndNote dan juga secara manual melalui penyaringan judul. Lampiran 3 Tabel A3.1 memberikan alasan pengecualian setiap studi pada langkah 4.

Catatan 3: 29 laporan yang diidentifikasi pada Langkah 5 sesuai dengan 25 studi

Strategi pencarian untuk identifikasi studi dilakukan dalam bahasa Inggris dan beberapa bahasa lain, termasuk bahasa Spanyol. Sekitar 15 kata kunci/istilah pencarian digunakan. Lima belas mesin pencari (berbasis web) ditelusuri, termasuk Web of Knowledge, Econpapers, IBSS (EBSCO), JSTOR, PsycINFO, SocINDEX, dan OECD. Selain itu, enam portal di MC, dan situs web organisasi penelitian yang aktif dalam bantuan pembangunan/kredit mikro ditelusuri, sementara sekitar 15 jurnal, beberapa di antaranya tidak tercakup dalam basis data elektronik yang disebutkan sebelumnya, diselidiki secara manual.

Secara skematis, operasi ini tampak sebagai berikut.

Analisis penelitian dilakukan secara kuantitatif (menghitung ukuran efek) dan secara kualitatif (menganalisis mekanisme yang diasumsikan bekerja saat MC digunakan).

Catatan: Gambar di atas direproduksi dengan izin dari Vaessen dkk, 'Dampak Kredit Mikro terhadap Kontrol Perempuan atas Pengeluaran Rumah Tangga di Negara-negara Berkembang: Tinjauan Sistematis' (Oslo: The Campbell Collaboration, 2014, hlm. 38 untuk informasi lebih lanjut tentang catatan).

Inspeksi yang Diumumkan dan yang Tidak Diumumkan

Contoh ketiga memiliki 'bobot' yang berbeda: apa yang diketahui tentang dampak inspeksi yang tidak diumumkan oleh Inspektorat Kesehatan (pemerintah Belanda) di panti jompo? Latar belakang tinjauan ini diberikan oleh De Klerks et al (2013):

Politisi dan regulator memiliki harapan yang tinggi terhadap inspeksi yang tidak diumumkan. Inspeksi yang tidak diumumkan, tidak seperti inspeksi yang diumumkan, menurut mereka, akan menghasilkan wawasan yang lebih jelas tentang risiko dan pengurangan beban regulasi. Untuk memverifikasi asumsi ini, tinjauan sistematis terhadap literatur ilmiah dan studi eksploratif dilakukan.

Lihat Kotak 4.4. Meskipun studi ketiga tidak melaporkan analisis kuantitatif, yang dikenal sebagai meta-analisis, karena jumlah studi terlalu sedikit, dua studi lainnya melakukannya. Dalam meta-analisis, data dari masing-masing studi dikumpulkan secara kuantitatif dan dianalisis ulang menggunakan metode statistik. Sama seperti studi individual yang meringkas data yang dikumpulkan dari banyak partisipan untuk menjawab pertanyaan penelitian tertentu (yaitu setiap partisipan merupakan titik data terpisah dalam analisis), meta-analisis meringkas data dari studi individual yang menyangkut pertanyaan penelitian tertentu (yaitu setiap studi merupakan titik data terpisah dalam analisis).

Aspek penting dari pekerjaan ini adalah memastikan kualitas metodologis studi yang

disertakan dalam meta-analisis. Seperti yang akan kami tunjukkan di Bab 5, kekuatan desain, validitas internalnya, dan hubungannya dengan masalah yang sedang diselidiki sangat penting saat memutuskan studi mana yang akan disertakan (dan dikecualikan). Pekerjaan yang terlibat dalam memeriksa kualitas dan penerapan studi disebut meta-evaluasi. Selain aktivitas seleksi ini, meta-analisis terdiri dari beberapa langkah lain, salah satunya menghitung efek pengobatan dengan interval kepercayaan 95% (CI) untuk setiap studi individual. Ringkasan statistik yang sering digunakan untuk mengukur efek pengobatan adalah rasio peluang (OR). Rasio ini merupakan ukuran hubungan antara paparan dan hasil. OR mewakili peluang terjadinya suatu hasil jika diberikan paparan tertentu, dibandingkan dengan peluang terjadinya hasil jika tidak ada paparan tersebut.

Tiga contoh ini menunjukkan bahwa tinjauan sistematis menggunakan prosedur yang transparan untuk menemukan, mengevaluasi, dan mensintesis hasil penelitian yang relevan. Prosedur ditetapkan secara eksplisit sebelumnya, untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut dapat direplikasi. Praktik ini juga dirancang untuk meminimalkan bias publikasi. Studi yang disertakan dalam tinjauan disaring berdasarkan kualitasnya, sehingga temuan sejumlah besar studi dapat digabungkan. Tinjauan sejawat merupakan bagian penting dari proses tersebut; peneliti independen yang berkualifikasi mengendalikan metode dan hasil penulis.

Perpustakaan Bukti dari Inisiatif Internasional untuk Evaluasi Dampak menyediakan pedoman bagi produsen tinjauan sistematis di masa mendatang, seperti halnya organisasi lain.

KOTAK 4.4 TINJAUAN SISTEMATIS EVALUASI INSPEKSI YANG DIUMUMKAN DAN YANG TIDAK DIUMUMKAN

Tujuan tinjauan ini adalah 'untuk memeriksa apakah ada penelitian tentang perbedaan antara inspeksi yang tidak diumumkan dan yang diumumkan. Pendekatan ini difokuskan pada penelitian kuantitatif dan kualitatif tentang perbedaan antara kedua jenis inspeksi'.

Kriteria inklusi dan strategi pencarian: 'Data dikumpulkan hingga Oktober 2011. Kami memperkenalkan tiga kriteria inklusi berikut: (1) Artikel ini menjelaskan penelitian kuantitatif dan/atau kualitatif di mana inspeksi yang tidak diumumkan dibandingkan dengan inspeksi yang diumumkan; (2) Artikel ini diterbitkan setelah tanggal 1 Januari 1995; (3) Artikel ini ditulis dalam bahasa Inggris, Jerman, atau Belanda.' Strategi pencarian terdiri dari tiga bagian.

Tabel 4.1 Spesifikasi artikel

Spesifikasi	Keamanan Pangan	Pendidikan Dasar	Program penitipan anak
Judul	Manfaat menguntungkan dari penerapan program inspeksi restoran yang diumumkan	Inspeksi mendadak di pendidikan dasar, laporan inspeksi	Tanpa pemberitahuan sebelumnya vs. Diumumkan Inspeksi Perizinan dalam Pemantauan Anak Program Perawatan
Penulis	Reske K, Jenkins	Inspektorat Pendidikan	Fiene R

	T, Fernandez C, VanAmber D, Hedbere C	Belanda	
Jurnal	Jurnal Kesehatan Lingkungan		Asosiasi Administrasi Regulasi Nasional
Tahun	2007	2007	1996
Negara	Minesota	Belanda	Pensilvania
Peer Reward	Ya	Tidak	Tidak
MSMS-Levela	MSMS-2/3	MSMS-1/2	MSMS-2

Skala Metode Ilmiah Maryland (MSMS) untuk validitas internal.

Pertama, mengingat inspeksi dilakukan di banyak area yang berbeda, penulis menelusuri dua basis data medis (MEDLINE dan CINAHL), basis data psikologis (PsycINFO), basis data sosiologi (SocINDEX), basis data ekonomi (EconLit), dan basis data untuk penelitian pendidikan (ERIC). Bagian kedua terdiri dari penelusuran gratis di Google Scholar menurut istilah Tidak Diumumkan, Diumumkan, Inspeksi, dan Penelitian, dan diterbitkan setelah 1 Januari 1995. Akhirnya, penulis meminta penelitian tentang perbedaan antara inspeksi yang tidak diumumkan dan yang diumumkan melalui grup diskusi regulator Belanda di Linked-In.

Tidak ada perhatian yang diberikan pada teori intervensi yang mendasari inspeksi yang diumumkan atau tidak diumumkan.

Temuan: 'Hanya tiga artikel relevan yang ditemukan yang membahas penelitian tentang perbedaan antara inspeksi yang tidak diumumkan dan yang diumumkan'. 'Terlepas dari seruan politik yang kuat untuk inspeksi yang tidak diumumkan dan pilihan yang dibuat oleh beberapa inspektorat untuk memeriksa secara tidak diumumkan, sangat sedikit penelitian yang telah dilakukan tentang perbedaan antara inspeksi yang tidak diumumkan dan yang diumumkan'. Lihat tabel 4.1 di atas.'

'Tidak satu pun dari ketiga penelitian tersebut dilakukan di panti jompo. Pengetahuan tentang perbedaan, keuntungan dan kerugian, antara inspeksi yang diumumkan dan yang tidak diumumkan kurang'. Oleh karena itu, penulis memutuskan untuk meluncurkan penyelidikan empiris (baru) yang berfokus pada inspeksi panti jompo.

4.4 PENDEKATAN LAINNYA

Meskipun tinjauan sistematis memegang peranan penting, selama 10 hingga 15 tahun terakhir pendekatan lain telah dikembangkan. Kami membahas pendekatan yang paling penting.

Tinjauan Cepat

Melakukan tinjauan penelitian sistematis sering kali merupakan urusan yang tepat waktu. Ganann dkk (2010: 1) berpendapat bahwa 'pembuat kebijakan dan pihak lain sering

kali memerlukan sintesis pengetahuan di suatu area dalam waktu enam bulan atau kurang. Tinjauan sistematis tradisional biasanya memerlukan waktu setidaknya 12 bulan untuk dilakukan'. Salah satu perkembangan terbaru adalah tinjauan cepat, yang 'menyederhanakan metode tinjauan sistematis tradisional untuk mensintesis bukti dalam jangka waktu yang lebih singkat'. 'Penilaian bukti cepat' (REA) – misalnya: merupakan alat dalam keluarga metode tinjauan sistematis dan didasarkan pada pencarian elektronik yang komprehensif dari basis data yang sesuai, sumber internet, dan tindak lanjut dari referensi yang dikutip. Untuk menyelesaikan REA dalam jangka waktu yang singkat, peneliti membuat beberapa konsesi dibandingkan dengan tinjauan sistematis penuh. Pencarian manual yang menyeluruh pada jurnal dan buku teks tidak dilakukan, dan pencarian literatur 'abu-abu' tentu dibatasi.

Booth et al (2012) menyusun pendekatan yang berbeda dalam hal ketelitian, bias, dan hasil, sementara Khangura et al (2010) membandingkan tinjauan sistematis dan tinjauan cepat (lihat Kotak 4.5).

KOTAK 4.5 PERBANDINGAN UMUM ANTARA TINJAUAN CEPAT DENGAN PENDEKATAN TINJAUAN SISTEMATIS

Tabel 4.2 Perbandingan umum antara pendekatan tinjauan cepat dengan pendekatan tinjauan sistematis

	Tinjauan cepat	Tinjauan sistematis
Jangka waktu	≤ 5 minggu	6 bulan sampai 2 tahun
Pertanyaan	Pertanyaan ditentukan secara apriori (dapat mencakup PICOS yang luas)	Seringkali merupakan pertanyaan klinis yang terfokus (PICOS yang terfokus)
Sumber dan pencarian	Sumbernya mungkin terbatas, tetapi sumber/strateginya dijelaskan secara eksplisit	Sumber-sumber yang dicari komprehensif dan strategi yang eksplisit
Pilihan	Berbasis kriteria; diterapkan secara seragam	Berbasis kriteria
Penilaian	Penilaian yang ketat dan kritis (hanya SR)	Penilaian yang ketat dan kritis
Sintesis	Ringkasan deskriptif/kategorisasi data	Ringkasan kualitatif +/- meta-analisis
Kesimpulan	Interpretasi terbatas/hati-hati terhadap temuan	Berbasis bukti

a Khusus untuk program KTA (Pengetahuan untuk Aksi) – kelompok lain telah bereksperimen dengan pendekatan lain dalam tinjauan cepat dan karenanya akan memiliki perbedaan lain;
 b Perbedaan utama; perbedaan potensial penting lainnya dicatat dalam sel. PICOS = populasi, intervensi, perbandingan, hasil dan desain studi; SR = tinjauan sistematis.

Pendekatan Tinjauan dan Sintesis Realis

Sejak tahun 1990-an, tinjauan dan sintesis realis menjadi agenda. Realisme bukanlah metode penelitian tetapi orientasi epistemologis; yaitu, pendekatan khusus untuk mengembangkan dan memilih metode penelitian. Akarnya berasal dari filsafat dan secara

intelektual terkait dengan rasionalisme kritis Popper. Tema utama pendekatan ini adalah bahwa intervensi (kebijakan, termasuk hukum) bekerja dengan menawarkan sumber daya yang dirancang untuk memengaruhi penalaran dan perilaku subjeknya (atau mengambil sumber daya). Apakah penalaran dan tindakan itu benar-benar berubah juga bergantung pada karakteristik subjek dan keadaan mereka:

Jadi, misalnya, untuk mengevaluasi apakah program pelatihan mengurangi pengangguran (O), seorang sarjana realis akan memeriksa mekanisme yang mendasarinya M (misalnya, apakah keterampilan dan motivasi telah berubah?) dan konteksnya C (misalnya, apakah ada kekurangan keterampilan dan peluang kerja lokal?). Dengan demikian, penelitian realis adalah tentang membuat hipotesis dan menguji konfigurasi CMO tersebut. Jika kita menggunakan bahasa sehari-hari, kita melihat, di bawah realisme, perubahan penekanan pada pertanyaan dasar dari 'apa yang berhasil?' menjadi 'apa yang membuat intervensi ini berhasil untuk siapa dalam keadaan apa?'

kajian sistematis mengikuti metodologi yang sangat spesifik dan sengaja tidak fleksibel, dengan tujuan memastikan keandalan yang tinggi. Sebaliknya, tinjauan realis mengikuti proses yang lebih heterogen dan berulang, yang kurang sesuai untuk diresepkan. Namun, proses itu harus sama ketatnya, dan harus memungkinkan untuk 'melihat di balik' tinjauan dan melihat bagaimana keputusan dibuat, bukti dicari, disaring dan dinilai, dan temuan dikumpulkan dan disintesis.

Karakteristik khas lainnya adalah bahwa dalam studi realis, teori intervensi sangat penting, yang kurang penting dalam karya Kolaborasi Campbell. Pawson dan yang lainnya menyampaikan saran untuk membantu proses ini berjalan dan meningkatkan transparansinya, karena ada kebutuhan untuk panduan dan standar (yang terus berkembang). Pada tahun 2010, proyek RAMESES (Realist and Meta-narrative Evidence Syntheses: Evolving Standards) dimulai yang sedang dalam proses menghasilkan panduan metodologis, standar publikasi, dan sumber daya pelatihan bagi mereka yang ingin menggunakan pendekatan realis.

Diagram alir langkah-langkah metodologis dan tugas tinjauan utama disajikan oleh Molnaret dkk. (2015) dalam sintesis realis tentang dampak kebijakan asuransi pengangguran terhadap kemiskinan dan kesehatan.

Sintesis realis tidak terutama difokuskan pada produksi hasil statistik tetapi penjelasan dan pemahaman. Dengan mengurai konfigurasi CMO dari program kebijakan, undang-undang, peraturan, dan pengaturan lainnya, para penulis mencoba menjelaskan apa yang membuat mereka 'berhasil'. Contoh sintesis realis adalah karya Pawson tentang hibah dan subsidi, karyanya tentang penamaan, mempermalukan, dan menyalahkan, studi Klein Haarhuis dan Niemeijer (2009) tentang dampak undang-undang Belanda dan studi program pemberian makanan sekolah Greenhalgh, Kristjansson, dan Robinson (2007). Banyak contoh lain telah dipublikasikan selama 10 hingga 15 tahun terakhir.

KOTAK 4.6 TAHAPAN DALAM PENDEKATAN SINTESIS REALIS

Tahap awal di mana cakupan tinjauan ditetapkan melibatkan negosiasi (dengan para komisioner atau pembuat keputusan) yang dimaksudkan untuk 'memilah' alasan mereka membutuhkan tinjauan dan memahami bagaimana tinjauan akan digunakan. Tahap ini juga melibatkan pembedahan yang cermat dari landasan teoritis intervensi, dengan menggunakan literatur pada awalnya bukan untuk memeriksa bukti empiris tetapi untuk memetakan secara luas wilayah konseptual dan teoritis.

Pencarian dan penilaian bukti selanjutnya dilakukan untuk 'mengisi' kerangka teoritis ini dengan temuan empiris, dengan menggunakan kerangka teoritis sebagai konstruksi untuk menemukan, mengintegrasikan, membandingkan, dan mengontraskan bukti empiris. Pencarian bukti adalah pencarian yang bertujuan, dan kemajuannya dibentuk oleh apa yang ditemukan. Ketika saturasi teoritis di satu area tercapai, dan tidak ada temuan baru yang signifikan yang muncul, pencarian dapat dihentikan.

Prosesnya, dalam setiap tahap dan di antara tahap, bersifat iteratif. Ada banyak hal yang terus-menerus berubah karena bukti baru mengubah arah dan fokus pencarian serta membuka area teori baru.

Hasil tinjauan dan sintesis menggabungkan pemikiran teoritis dan bukti empiris, dan difokuskan pada penjelasan tentang cara kerja intervensi yang sedang dipelajari dengan cara yang memungkinkan para pengambil keputusan untuk menggunakan pemahaman ini dan menerapkannya pada konteks khusus mereka sendiri. Para komisioner atau pengambil keputusan terlibat erat dalam membentuk kesimpulan dan rekomendasi yang akan diambil dari tinjauan tersebut.

Menggabungkan Pendekatan Kolaborasi Campbell dan Pendekatan Realis

Perkembangan lainnya adalah menggabungkan tinjauan penelitian sistematis dan sintesis realis, karena masing-masing memiliki sesuatu untuk ditawarkan kepada yang lain. Membuka kotak hitam intervensi atau pengaturan akan membantu evaluator yang bekerja sesuai dengan fokus Kolaborasi Campbell pada eksperimen dan kuasi-eksperimen, karena memungkinkan mereka untuk lebih mengetahui mengapa intervensi berhasil atau tidak. Karena salah satu masalah bagi evaluator realis adalah mendapatkan pengetahuan yang relevan yang memadai secara metodologis, pendekatan realis, sebaliknya, dapat memperoleh manfaat dari metodologi (yang lebih ketat) yang disarankan oleh Kolaborasi Campbell.

Contoh pendekatan gabungan diadopsi dalam tinjauan atas permintaan Kementerian Kehakiman Belanda. Tujuan pertama adalah untuk memberi Kementerian gambaran internasional tentang tindakan yang efektif, atau setidaknya menjanjikan, untuk mencegah kekerasan di area publik dan semi-publik. Dan tujuan kedua adalah untuk mendapatkan wawasan tentang mekanisme perilaku dan sosial yang mendasari tindakan pencegahan yang

efektif atau menjanjikan dan keadaan di mana tindakan tersebut dianggap efektif. Para penulis memulai dengan 454 judul penelitian yang tampaknya relevan. Judul dan abstrak diperiksa untuk menentukan apakah penelitian tersebut merupakan evaluasi atau tidak, apakah penelitian tersebut membahas pencegahan kekerasan, dan apakah penelitian tersebut berfokus pada kekerasan di ranah publik (semi-).

Dari 454 penelitian, 233 dipilih untuk analisis putaran kedua. Enam puluh empat dari penelitian ini tidak dapat diambil atau tidak diterima tepat waktu untuk dimasukkan dalam penelitian kami. Secara total, 169 publikasi dimasukkan dalam putaran kedua pemilihan literatur. Kriteria yang digunakan untuk membuat pemilihan akhir adalah apakah variabel dependen berkaitan dengan perilaku kekerasan atau tidak, apakah ada informasi yang tersedia tentang konteks intervensi dan apakah evaluasi tersebut berfokus pada efek perilaku intervensi. Sebanyak 48 studi tentang dampak pencegahan kekerasan di ranah publik dan semi-publik dipilih dan diikutsertakan.

Dalam studi-studi ini, 36 program pengurangan kekerasan dievaluasi. Program-program tersebut dikategorikan sebagai efektif, berpotensi efektif, berpotensi tidak efektif, dan tidak efektif, berdasarkan temuan-temuan studi dan kekokohan metodologisnya. Seperti yang akan dijelaskan, pendekatan ini sejauh ini serupa dengan apa yang disarankan oleh standar Kolaborasi Campbell. Namun, langkah berikutnya adalah menjawab pertanyaan tentang apa saja mekanisme (perilaku), konteks, dan hasil dari studi-studi yang diklasifikasikan sebagai 'memenuhi standar Kolaborasi Campbell'. Penggabungan standar Campbell dan pendekatan realistis dilakukan setelah menyelesaikan tinjauan sistematis gaya Campbell. Ini menyiratkan bahwa baru kemudian perhatian diberikan pada mekanisme dan konteks yang mendasarinya (dijelaskan dalam studi-studi dengan kualitas metodologis yang kuat).

Kesimpulan utama dari penggabungan kedua pendekatan tersebut adalah bahwa tampaknya (hanya) ada 'tiga mekanisme menyeluruh yang bekerja ketika program antikekerasan yang efektif telah dilaksanakan. Yang pertama bersifat kognitif, dengan fokus pada pembelajaran, pengajaran, dan pelatihan. Yang kedua menyangkut cara lingkungan sosial memberi penghargaan atau hukuman terhadap perilaku (melalui ikatan, pengembangan masyarakat, dan penargetan aktivitas polisi). Dan yang ketiga adalah pengurangan risiko'.

Pendekatan Pencarian Bukti

Pendekatan ini meninjau dan mensintesis sejumlah studi tentang topik tertentu dalam kurun waktu tertentu. Kleemans dkk (2007) menjelaskan pendekatan ini. Mereka meninjau dan mensintesis 31 studi evaluasi, yang mencakup satu bidang kebijakan (penegakan hukum) dalam satu periode (Januari 2002 hingga Mei 2004) di satu negara (Belanda). Ke-31 studi tersebut terkait dengan spektrum intervensi kebijakan yang luas, mereka menggunakan metode dan desain yang berbeda, dan hasilnya berkisar dari informasi tentang mekanisme dan masalah implementasi hingga bukti tentang keluaran. Sasaran utamanya adalah bagaimana menghasilkan sintesis hasil penelitian yang andal dan bermanfaat bagi para pembuat kebijakan, mengingat keragaman dan banyaknya studi evaluasi.

Para penulis pertama-tama memetakan berbagai intervensi penegakan hukum yang digunakan di Belanda selama periode tersebut. Lintasan tersebut sangat berbeda dari

intervensi umum yang dievaluasi di bawah naungan Kolaborasi Campbell. Para penulis menunjukkan bahwa sebagian besar intervensi tidak secara langsung ditujukan kepada individu atau klien, yang mungkin diperlakukan dengan cara yang berbeda, tetapi kepada para pelaku institusional, organisasi, atau rantai penegakan hukum.

Kedua, para penulis mengamati lebih dekat studi yang mengevaluasi intervensi dan strategi ini. Mereka menyaring semua studi dan menilai kualitas metodologisnya sesuai dengan empat kriteria. Yang pertama adalah validitas internal evaluasi: apakah sebuah studi secara jelas menunjukkan bahwa sebuah intervensi menghasilkan hasil tertentu? Kriteria ini menyiratkan bahwa desain penelitian harus mengecualikan faktor-faktor pengganggu sebanyak mungkin. Untuk evaluasi validitas internal, mereka menggunakan Skala Metode Ilmiah Maryland (MSMS) (lihat di atas). Menurut MSMS, semua 31 evaluasi adalah studi level 1 atau level 2, yang berarti bahwa validitas internal terbatas. Kriteria kedua adalah validitas deskriptif studi: kecukupan keseluruhan informasi pelaporan.

Dua elemen utama yang terlihat: seberapa baik desain penelitian dijelaskan dan diperhitungkan (termasuk pemilihan metode); dan apakah beberapa sumber informasi telah digunakan untuk mengukur variabel dependen dan independen. Validitas deskriptif dari penelitian tersebut ternyata secara umum memadai. Desain, ukuran sampel, dan pengukuran variabel dijelaskan dan diperhitungkan dengan relatif baik. Sebagian besar penelitian menggunakan data dari berbagai sumber informasi.

Kriteria ketiga menilai apakah evaluasi menentukan sejauh mana intervensi telah benar-benar dilaksanakan. Penelitian telah menunjukkan bahwa integritas program, yaitu pelaksanaan program atau intervensi sesuai dengan rencana, seringkali tidak memadai. Ditemukan bahwa semua evaluasi memberikan bukti tentang sejauh mana intervensi (kebijakan) telah dilaksanakan. Evaluasi tersebut memberikan wawasan tentang 'integritas program' dan dengan demikian memenuhi satu prasyarat penting, meskipun mendasar, untuk hubungan antara intervensi kebijakan dan hasil.

Kriteria keempat dan terakhir menilai apakah evaluator memperhatikan asumsi yang mendasari intervensi kebijakan penegakan hukum (teori intervensi) dan apakah mereka dihadapkan dengan kenyataan atau tidak. Ditemukan bahwa lebih dari sepertiga dari 31 evaluasi memberikan deskripsi yang jelas tentang teori intervensi.

(Tinjauan Sistematis) 'Atas Tinjauan (sistematis) (alias Tinjauan Meta)'

Pendekatan relevan lainnya adalah tinjauan (sistematis) atas tinjauan (sistematis), yang terkadang disebut tinjauan meta. Dalam tinjauan meta, hanya tinjauan dan meta-analisis yang disertakan dan hasil studi tersebut dirangkum. Salah satu alasan untuk melakukan tinjauan sistematis atas tinjauan adalah untuk memastikan bahwa dalam tinjauan yang ditinjau, sebagian besar, jika tidak semua, studi primer yang relevan dan tersedia tercakup. Tinjauan atas tinjauan juga mungkin berguna ketika pertanyaan tinjauan sangat luas, ketika beberapa tinjauan telah dipublikasikan dan ketika ada perdebatan tentang perbedaan temuan dan kesimpulan dari tinjauan ini (mencakup topik yang sama).

Namun, kriteria inklusi yang berbeda yang diadopsi oleh berbagai tinjauan juga dapat membuat sintesis dan interpretasi menjadi bermasalah. Tinjauan meta yang dilakukan

Nagtegaal (2012) mengenai tinjauan sistematis yang mengkaji masalah-masalah yang dilaporkan sendiri pasca-pelecehan seksual anak merupakan contoh tinjauan meta.

Sintesis Studi Kualitatif

Snilstveit dkk (2012) berpendapat bahwa 'tidak seperti sintesis kuantitatif yang mengubah informasi menjadi metrik umum dan mensintesis data ini untuk menguji teori menggunakan meta-analisis statistik, sintesis kualitatif bertujuan untuk mensintesis data kualitatif, yang umumnya berbasis teks.

Tinjauan semacam itu mengadopsi pendekatan naratif, bukan statistik, dan berupaya menghasilkan wawasan dan rekomendasi baru dengan melampaui ringkasan temuan dari berbagai studi seperti dalam tinjauan naratif tradisional'. Snilstveit dkk membahas kelemahan dalam pendekatan ini (seperti kurangnya transparansi dan kurangnya kejelasan tentang metode dan panduan formal tentang cara melakukan sintesis ini), tetapi mereka juga menawarkan panduan tentang berbagai pendekatan untuk sintesis kualitatif. Seperti yang akan dibahas nanti di Bab 7, perangkat lunak telah tersedia yang memungkinkan peneliti kualitatif untuk melakukan analisis konten dengan cara yang lebih transparan (dan 'kuantitatif').

Greenhalgh dkk (2005) mengembangkan tinjauan meta-narasi. Meta-narasi adalah 'alur cerita' penelitian yang sedang berlangsung dalam tradisi ilmiah tertentu, yang didefinisikan sebagai kumpulan pengetahuan teoritis yang koheren dan serangkaian studi primer yang saling terkait di mana studi-studi berikutnya dipengaruhi oleh temuan-temuan studi sebelumnya. Para penulis membedakan beberapa fase ketika melakukan meta-narasi. Mereka menerapkan pendekatan ini pada pertanyaan tentang apa saja faktor penentu penyebaran inovasi dalam organisasi layanan kesehatan. Noblit dan Hare (1988) membahas 'pendekatan meta-etnografi'.

Tiga jenis analisis menjadi ciri khas studi semacam itu. Salah satunya melibatkan 'penerjemahan' konsep-konsep dari studi-studi individual ke satu sama lain, dengan demikian mengembangkan konsep-konsep atau metafora yang menyeluruh. Noblit dan Hare menyebut proses ini sebagai analisis translasi resiprokal (RTA). Sintesis sanggahan melibatkan penjelajahan dan penjelasan kontradiksi antara studi-studi individual. Dan sintesis garis-garis argumen (LOA) melibatkan pembangunan gambaran keseluruhan (misalnya budaya, organisasi) dari studi-studi bagian-bagiannya.

BAB 5

DESAIN PENELITIAN

5.1 APA ITU DESAIN PENELITIAN?

De Vaus (2001) menjelaskan konsep ini dengan menggunakan analogi berikut:

Saat membangun gedung, tidak ada gunanya memesan material untuk penyelesaian tahap proyek hingga kita mengetahui jenis bangunan yang sedang dibangun. Keputusan pertama adalah apakah kita memerlukan gedung perkantoran bertingkat tinggi, pabrik untuk memproduksi mesin, sekolah, rumah tinggal, atau blok apartemen. Hingga hal ini dilakukan, kita tidak dapat membuat sketsa rencana, memperoleh izin, menyusun jadwal kerja, atau memesan material.

Demikian pula, penelitian memerlukan desain atau struktur sebelum pengumpulan atau analisis data dapat dimulai. Fungsi desain penelitian adalah untuk memastikan bahwa bukti yang diperoleh memungkinkan kita untuk menjawab pertanyaan awal se jelas mungkin. Memperoleh bukti yang relevan memerlukan penentuan jenis bukti yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk menguji teori, untuk mengevaluasi program, atau untuk menggambarkan beberapa fenomena secara akurat. Dengan kata lain, saat merancang penelitian, kita perlu bertanya: berdasarkan pertanyaan penelitian ini, jenis bukti apa yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan cara yang meyakinkan?

Apa arti analogi ini saat melibatkan penelitian hukum empiris? Sebuah contoh mungkin membantu. Misalkan Anda diminta untuk menyelidiki dampak undang-undang baru terhadap pencegahan dan pengurangan kekerasan dalam rumah tangga di negara X? Undang-undang tersebut diterapkan pada tahun 2015 untuk wilayah utara negara tersebut dan pada tahun 2016 untuk wilayah lainnya di negara tersebut. Undang-undang tersebut berfokus pada peningkatan kegiatan penegakan hukum dan pengurangan kekerasan dalam rumah tangga.

Meneliti dampak undang-undang ini terlebih dahulu mengharuskan kita untuk mempelajari prevalensi dan insiden kekerasan dalam rumah tangga (selama beberapa tahun). Mungkin setelah undang-undang tersebut diterapkan, terjadi perubahan angka (asumsikan prevalensi dan insiden yang lebih rendah). Apakah perubahan ini dapat dikaitkan dengan penerapan undang-undang tersebut? Tidak, karena mungkin ada faktor lain yang 'bersaing' yang menjadi pendorong di balik perubahan tersebut dan menjelaskan penurunan angka tersebut.

Untuk faktor-faktor yang bersaing, pikirkan kampanye informasi publik tentang kekerasan dalam rumah tangga yang dilaksanakan pada periode yang sama dan yang (bisa) berdampak pada perilaku. Atau pikirkan organisasi masyarakat sipil yang baru didirikan untuk memperingatkan masyarakat dan pelaku tentang masalah kekerasan dalam rumah tangga. Itu juga dapat berkontribusi pada penurunan jumlah. Untuk menilai dampak undang-undang baru (dengan cara yang valid dan andal), perlu untuk bekerja dengan desain penelitian yang mampu

mengatasi masalah atribusi (kausal): dapatkah penurunan jumlah kekerasan dalam rumah tangga di negara X (atau sebagian darinya) dikaitkan dengan undang-undang baru? Desain mana yang akan (tidak) berlaku?

Desain pasca-uji (saja) yang sederhana – di mana sampel representatif penduduk negara tersebut satu atau dua tahun setelah penerapan undang-undang ditanya apakah undang-undang baru tersebut telah membuat mereka mengubah perilaku mereka – tidak akan berhasil. Desain seperti itu (terkadang secara keliru diberi label sebagai ‘eksperimental’) tidak mengatasi masalah atribusi.

Desain pra-uji/pasca-uji (satu kelompok) juga tidak akan menghasilkan informasi yang valid tentang dampak undang-undang baru, karena desain tersebut (dan juga desain pasca-uji-saja yang sederhana) tidak memungkinkan untuk membandingkan apa yang akan dilakukan orang jika tidak ada undang-undang baru tentang kekerasan dalam rumah tangga. Secara metodologis: informasi tentang kontrafaktual tidak ada, karena kelompok kontrol (atau kondisi) tidak ada. Masalah lain (yang berhubungan dengan pengumpulan data) adalah bahwa apa yang dikatakan orang tidak selalu sama dengan apa yang mereka lakukan (atau telah mereka lakukan).

Sekarang harus diakui bahwa menemukan kontrafaktual ketika evaluasi dampak suatu undang-undang dipertaruhkan sulit, jika tidak mustahil: undang-undang sering kali diterapkan untuk semua orang dalam masyarakat pada saat yang sama. Hanya ketika sebuah undang-undang dan/atau penerapannya tersebar dari waktu ke waktu dan/atau dari satu daerah ke daerah lain, maka dimungkinkan untuk bekerja dengan sebuah rancangan yang membahas – sampai batas tertentu – masalah kontrafaktual.

Dalam contoh (hipotetis) yang kami gunakan, undang-undang tersebut diterapkan di daerah utara pada tahun 2015, dan setahun kemudian di seluruh negeri. Kemudian rancangan penelitian perbandingan jalur dapat digunakan; masyarakat/penduduk di bagian negara tersebut di mana pengaturan (hukum) tersebut belum diterapkan, dapat (dalam kondisi tertentu!) digunakan sebagai kelompok pembanding untuk masyarakat/penduduk di bagian negara lainnya.

5.2 JENIS DAN CONTOH DESAIN DARI PENELITIAN HUKUM EMPIRIS

Pada bagian ini, dibahas jenis-jenis utama (dan subjenis) desain. Kami mengikuti perbedaan De Vaus (2001) antara desain eksperimental, quasi-eksperimental, cross sectional, longitudinal dan studi kasus, tetapi kami menambahkan desain komparatif (seperti yang sering disebut dalam studi hukum). Flick (2009), yang menulis dari perspektif penelitian kualitatif, mengacu pada jenis desain yang sama, tetapi tidak memasukkan eksperimen.

Ada juga perbedaan lain yang disarankan, seperti antara desain deskriptif (misalnya 'studi kasus'), desain korelasional (misalnya 'studi cross-sectional'), desain kausal ('desain eksperimental dan quasi-eksperimental') dan desain meta-analitis (bagian statistik dari tinjauan sistematis dan pekerjaan sintesis, dirujuk dalam Bab 4). Namun, kategori-kategori ini saling tumpang tindih dan tidak dapat dikecualikan. Perbedaan lainnya adalah antara desain tetap dan fleksibel serta kuantitatif dan kualitatif; kategorisasi ini dengan mudah menciptakan

kesalahpahaman tentang apa arti kata-kata ini. Terkadang, metode pengumpulan data ('survei', 'kuesioner') disamakan dengan desain penelitian.

Beberapa pembaca mungkin bertanya-tanya kapan pendekatan penelitian seperti 'pendekatan berbasis teori', 'metode Delphi', 'analisis sekunder' dan 'penelitian tindakan' akan dibahas. Namun, pendekatan-pendekatan ini secara keliru dilihat sebagai desain penelitian. Pendekatan berbasis teori bukanlah desain tetapi metode tentang cara mendeteksi teori intervensi yang mendasarinya (lihat Bab 3). Metode Delphi adalah metode pengumpulan data, yang akan kita bahas di Bab 6, yang juga berlaku untuk 'analisis sekunder' (menggunakan dan menganalisis data (administratif, 'tersimpan') yang ada). 'Riset tindakan' tidak kita bahas sama sekali.

Desain Riset Eksperimental

Karakteristik utama dari desain ini adalah penugasan acak subjek (orang, pengadilan, penjara, pengacara, pelanggar) ke dalam kelompok perlakuan dan kontrol. Kelompok perlakuan adalah kelompok yang dihadapkan dengan intervensi (program modifikasi perilaku untuk mengurangi perilaku antisosial, rezim organisasi baru di penjara, program regulasi dan inspeksi, hukum lunak atau situs web untuk korban).

Kelompok kontrol adalah kelompok yang tidak 'mendapatkan' intervensi. Pengukuran pra-tes dan pasca-tes merupakan bagian dari desain. Nama umumnya adalah RCT: uji coba terkontrol acak. Sebagian besar ahli metodologi menganggap desain ini sebagai pilihan paling kuat untuk menjawab pertanyaan kausal ('atribusi'), termasuk pertanyaan tentang dampak intervensi. Pengacakan subjek membuat satu-satunya perbedaan antara situasi perlakuan dan kontrol adalah intervensi itu sendiri. Desain ini, jika diterapkan dengan cara yang memadai, mampu mendeteksi kausalitas. Ini adalah 'antibiotik' yang kuat terhadap ancaman validitas.

Rossi, Lipsey, dan Freeman (2003) menekankan bahwa acak tidak berarti sembarangan atau berubah-ubah. Sebaliknya, mengalokasikan target secara acak ke kelompok eksperimen dan kontrol memerlukan kehati-hatian yang sangat tinggi untuk memastikan bahwa setiap unit (orang, organisasi, dll.) dalam populasi target memiliki peluang yang sama dengan yang lain untuk dipilih ke dalam salah satu kelompok. Blog White tentang 'sepuluh hal yang bisa salah dengan uji coba terkontrol acak (eksperimen)' adalah bahan bacaan yang menarik.

Sejumlah subtype desain eksperimen, termasuk desain satu kelompok dengan dua pra-uji dan pasca-uji, desain blok acak, dan desain empat kelompok Solomon. Desain irisan berjenjang mengukur intervensi yang diluncurkan secara berurutan kepada partisipan eksperimen (baik sebagai individu atau kelompok individu) selama sejumlah periode.

Urutan individu atau kelompok yang berbeda menerima intervensi ditentukan secara acak. Pada akhir alokasi acak, semua individu atau kelompok akan menerima intervensi. Desain irisan berjenjang menggabungkan pengumpulan data di setiap titik di mana kelompok (anggota) (langkah) baru menerima intervensi. Eksperimen double blind adalah desain di mana baik peneliti maupun subjek tidak menyadari kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Desain ini digunakan untuk mencegah hasil penelitian 'dipengaruhi' oleh efek plasebo atau bias pengamat (argumennya adalah bahwa relatif mudah bagi seorang peneliti untuk memengaruhi pengamatan eksperimen).

KOTAK 5.1 DESAIN PENELITIAN DAN ANCAMAN VALIDITAS

Wortman (1983), berdasarkan karya sebelumnya oleh Campbell, Stanley, dan Cook, adalah orang pertama yang membahas ancaman ini dan memasukkan 'pengujian, sejarah, instrumentasi, seleksi, pematangan, mortalitas eksperimental, regresi statistik, dan seleksi-pematangan serta interaksi lainnya'. Ia menggunakan mnemonik THIS MESS (huruf pertama dari Testing, History, dsb.). Kemudian daftar tersebut diperluas dengan lebih banyak ancaman. Lihat di bawah untuk informasi lebih lanjut.

Bijleveld (2013) mencantumkan asumsi yang bersifat ontologis yang penting untuk desain yang membahas kausalitas (dan untuk analisis statistik secara umum). Misalnya, unit analisis (orang, tahanan, pasien, kelas) diasumsikan berperilaku dengan cara yang independen dari apa yang dilakukan orang lain; jika ada peniruan atau persuasi penuh terhadap unit analisis, yang menyiratkan bahwa semuanya akan terlihat dan bertindak dengan cara yang sama, asumsi ini tidak akan berlaku. Asumsi lain adalah bahwa unit analisis tersebut mewakili 'suatu populasi' (dan 'lebih dari sekadar keunikannya sendiri').

KOTAK 5.2 EKSPERIMEN ACAK CONTOH 1: APAKAH INFORMASI DAN E-COACH MEMBANTU KORBAN CEDERA PRIBADI?

Contoh pertama adalah uji coba terkontrol acak oleh Elbers et al (2013): 'Peserta adalah individu yang berusia di atas 18 tahun pada saat pendaftaran, yang mengalami cedera dalam kecelakaan lalu lintas kurang dari dua tahun lalu dan mengklaim kompensasi atas kerugian finansial. Selain itu, mereka diharuskan berbicara bahasa Belanda dan memiliki akses ke internet. [Mereka] direkrut oleh tiga kantor penyelesaian klaim Belanda.

Desain penelitian adalah uji coba terkontrol acak. Situs web intervensi dikembangkan dengan (1) informasi tentang proses kompensasi, dan (2) kursus pemecahan masalah berbasis bukti yang dibantu oleh terapis. Situs web kontrol berisi beberapa tautan ke situs web yang sudah ada. Ukuran hasil adalah pemberdayaan (korban), efikasi diri, status kesehatan (termasuk depresi, kecemasan, dan gejala somatik), keadilan yang dirasakan, kemampuan bekerja, pengetahuan tentang klaim, dan tingkat beban. Hasil dilaporkan sendiri melalui kuesioner daring dan diukur empat kali: pada awal, dan pada bulan ke-3, ke-6, dan ke-12.

KOTAK 5.3 EKSPERIMEN ACAK CONTOH 2: APAKAH PEMBAYARAN PENDAPATAN TAMBAHAN OLEH PEMERINTAH AS, BERDASARKAN PROYEK PEMELIHARAAN PENDAPATAN NEW JERSEY-PENNSYLVANIA, MERUPAKAN DISINSENTIF KERJA?

Eksperimen ini diluncurkan oleh Office of Economic Opportunity (badan eksekutif program Perang Melawan Kemiskinan/Masyarakat Hebat Presiden AS Lyndon B Johnson). Eksperimen ini dimulai pada tahun 1968 dan berlangsung selama tiga tahun. Studi eksperimental ini ditujukan pada populasi sasaran keluarga utuh (bukan keluarga yang terpecah) yang pendapatannya di bawah 150% dari tingkat kemiskinan (saat itu) dan yang kepala keluarga laki-lakinya berusia antara 18 dan 58 tahun. Ada delapan perlakuan yang terdiri dari berbagai kombinasi jaminan, yang dipatok pada tingkat kemiskinan saat itu dan tarif pajak pembayaran (d disesuaikan dengan pendapatan yang diterima oleh keluarga). Perlakuan lainnya terdiri dari bekerja dengan tarif pajak yang berbeda. Kelompok kontrol terdiri dari keluarga yang tidak menerima pembayaran apa pun.

Eksperimen dilakukan di empat komunitas di New Jersey dan satu di Pennsylvania (AS). Survei rumah tangga dilakukan untuk mengidentifikasi keluarga yang memenuhi syarat. Keluarga yang teridentifikasi diundang untuk berpartisipasi; setelah kesepakatan tercapai, keluarga dialokasikan secara acak ke salah satu kelompok eksperimen atau ke kelompok kontrol. Meskipun sekitar 1300 keluarga awalnya direkrut, pada akhir studi eksperimental 22% telah menghentikan kerja sama mereka. Yang lain telah melewati satu atau lebih wawancara atau telah keluar dari eksperimen karena berbagai alasan. Kurang dari 700 yang tersisa untuk analisis.

KOTAK 5.4 PEMBLOKIRAN

Pemblokiran adalah prosedur untuk mengisolasi variasi yang disebabkan oleh variabel pengganggu. Variabel pengganggu adalah sumber variasi yang tidak diinginkan yang dapat memengaruhi variabel dependen. Ini adalah faktor-faktor yang memiliki beberapa efek pada respons, tetapi tidak menarik bagi peneliti; namun, variabilitas yang ditransmisikannya ke respons perlu diminimalkan atau dijelaskan. Faktor pengganggu yang umum meliputi operator eksperimen yang berbeda, peralatan uji, saat mempelajari suatu proses, dan waktu (shift, hari, dll.), di mana waktu dalam sehari atau shift dapat menjadi faktor yang memengaruhi respons. Kegagalan untuk memblokir adalah kelemahan umum dalam merancang eksperimen.

KOTAK 5.5 EKSPERIMEN DAN CROWDSOURCING ONLINE

Azzam dan Jacobson (2013) telah menjajaki kelayakan pendekatan baru untuk membuat kelompok pembanding dalam studi eksperimental: crowdsourcing online. Studi mereka membandingkan hasil survei dari kelompok kontrol acak dengan hasil survei dari kelompok pembanding yang dibuat dari layanan crowdsourcing M(echanical) Turk milik Amazon.com untuk menentukan daya bandingnya. Temuan studi menunjukkan bahwa crowdsourcing

online merupakan sumber daya yang berpotensi layak untuk desain penelitian di mana akses ke kelompok pembanding, anggaran besar, dan/atau waktu terbatas.

Desain Penelitian Kuasi-eksperimental

Desain kuasi-eksperimental (QED) adalah desain yang bertujuan untuk mempelajari intervensi seperti pengaturan hukum dengan cara eksperimental, tetapi tanpa pengacakan. Mirip dengan uji coba acak, eksperimen kuasi bertujuan untuk menunjukkan kausalitas antara intervensi/pengaturan dan hasilnya. Studi ini menggunakan pengukuran pra-intervensi dan pasca-intervensi serta kelompok kontrol yang dipilih secara tidak acak.

QED berusaha untuk mencocokkan (bukan mengacak) karakteristik kelompok perlakuan dan kontrol sedekat mungkin untuk menghilangkan bias seleksi sejauh mungkin. Pencocokan statistik berarti bahwa berkenaan dengan variabel penting seperti demografi, status sosial ekonomi, dan lainnya yang diketahui relevan untuk proyek penelitian tertentu, kedua kelompok (wilayah, orang, sekolah, rumah sakit, distrik polisi, dll.) 'dibuat' – sebisa mungkin – serupa.

Jenis desain khusus adalah eksperimen alami. Tidak seperti uji coba terkontrol acak atau desain kuasi-eksperimental, peneliti tidak memiliki kemampuan untuk menempatkan peserta ke dalam kelompok perlakuan dan kontrol. Sebaliknya, perbedaan dalam hukum, kebijakan, atau praktik dapat memberikan kesempatan untuk menganalisis populasi seolah-olah mereka telah menjadi bagian dari sebuah eksperimen. Intinya, satu populasi telah menerima intervensi, sementara yang lain belum. Validitas penelitian ini sebagian besar bergantung pada premis bahwa penempatan subjek ke dalam kelompok 'perlakuan' dan 'kontrol' bersifat acak atau 'seolah-olah' acak. Ada beberapa subtype QED.

Kami membahas beberapa di antaranya. Tiga telah kami sebutkan: desain kelompok perbandingan jalur, desain pencocokan skor kecenderungan, dan eksperimen alami. Subtype lainnya adalah desain diskontinuitas regresi (RD). Dalam desain ini, peserta ditempatkan ke dalam kelompok eksperimen atau kontrol semata-mata berdasarkan skor batas pada ukuran pra-program/intervensi. Kriteria batas ini sesuai jika tujuannya adalah untuk menargetkan program atau perawatan kepada mereka yang paling membutuhkan atau pantas mendapatkannya. Seperti yang dijelaskan oleh Bamberger et al (2012):

Desain ini memerlukan definisi populasi target (misalnya, narapidana yang dibebaskan dari penjara) sementara variabel penugasan harus diidentifikasi. Biasanya, hal ini akan terkait dengan kebutuhan atau kemungkinan keberhasilan [seperti pengurangan residivisme dalam contoh ini]. Skala harus ordinal atau interval dengan posisi yang tepat dan terukur dan harus memungkinkan untuk menilai setiap orang pada skala tersebut. Batas kelayakan yang tepat dan terukur juga harus ditetapkan, dan harus jelas siapa yang berada di sekitar atau di bawah batas tersebut. Prosedur seleksi yang ketat harus diterapkan, sehingga setiap orang di atas titik batas diterima dan setiap orang di bawah batas ditolak. Setelah seleksi selesai dan program dilaksanakan, evaluasi melibatkan perbandingan

subjek yang berada tepat di atas titik batas dengan yang berada tepat di bawahnya. Jika proyek tersebut berdampak, akan ada diskontinuitas ('loncatan') pada garis regresi pada titik batas.

Berk dan Rauma (1983) memberikan contoh ketika mereka memperkirakan dampak program yang menyediakan kelayakan untuk pembayaran asuransi pengangguran bagi narapidana yang dibebaskan di California. Desain perbedaan-dalam-perbedaan (DID) mengakui bahwa jika tidak ada penugasan acak, kelompok perlakuan dan kontrol cenderung berbeda karena berbagai alasan. Namun, terkadang hasil perlakuan dan kontrol bergerak secara paralel jika tidak ada perlakuan. Jika demikian, divergensi jalur pascaperlakuan dari tren yang ditetapkan oleh kelompok pembanding dapat menandakan efek perlakuan. Dalam pengaturan yang paling sederhana, ini adalah pengaturan di mana hasil diamati untuk dua kelompok selama dua periode waktu. Salah satu kelompok terpapar perlakuan pada periode kedua tetapi tidak pada periode pertama.

Kelompok kedua tidak terpapar perlakuan selama kedua periode tersebut. Dalam kasus di mana unit yang sama dalam suatu kelompok diamati pada setiap periode waktu, perolehan rata-rata pada kelompok kedua (kontrol) dikurangi dari perolehan rata-rata pada kelompok pertama (perlakuan). Ini menghilangkan bias dalam perbandingan periode kedua antara kelompok perlakuan dan kontrol yang dapat menjadi hasil dari perbedaan permanen antara kelompok-kelompok tersebut, serta bias dari perbandingan dari waktu ke waktu dalam kelompok perlakuan yang dapat menjadi hasil dari tren.

KOTAK 5.6 CONTOH QED 1: APAKAH POLISI DI HOT SPOTS MENGURANGI ANGKA KEJAHATAN YANG BERKEKERASAN?

Braga dkk (2012) menyelidiki program hot spot Safe Street Team (SST) milik Departemen Kepolisian Boston. Dengan menggunakan pemetaan terkomputerisasi dan perangkat lunak basis data, basis data tempat tingkat mikro dari kejahatan indeks kekerasan di semua ruas jalan dan persimpangan di Boston dibuat. Area hot spot SST terdiri dari ruas jalan dan persimpangan. 'Tempat mikro' ini digunakan untuk mengembangkan unit perbandingan yang setara untuk studi evaluasi (pencocokan skor kecenderungan). Data dikumpulkan (seperti jumlah tahunan kejahatan indeks kekerasan antara tahun 2000 dan 2009) dan dikaitkan dengan penanganan (hot spot SST) dan ruas jalan serta persimpangan perbandingan.

Bijleveld (2013) menjelaskan bagian konseptual dari (sub)desain ini sebagai berikut. Masalah yang dia mulai adalah mencari tahu dampak program perawatan pelaku pada kenakalan seksual remaja: Pencocokan skor kecenderungan mengasumsikan bahwa beberapa pelaku memiliki kemungkinan lebih besar untuk menerima perawatan daripada yang lain. Pelaku pelecehan remaja terhadap anak-anak yang sangat muda, misalnya, akan memiliki kemungkinan lebih besar untuk mendapatkan perawatan melalui program

intervensi perilaku daripada pelaku pelecehan remaja terhadap anak-anak. Beberapa pelaku pelecehan seksual terhadap anak-anak akan mendapatkan perawatan di tahun-tahun sebelumnya, meskipun itu tidak terbukti. Dan beberapa lainnya akan lebih aktif dalam perilaku nakal mereka daripada yang lain. Ketika pencocokan skor kecenderungan diterapkan, kelompok-kelompok berikut dapat dibandingkan: pelaku yang dapat diharapkan bahwa mereka telah mendapatkan perawatan sebelumnya, tetapi pada kenyataannya tidak mendapatkan perawatan tersebut versus pelaku yang juga dapat diharapkan bahwa mereka menjadi bagian dari prosedur perawatan dan memang dirawat.

Orang-orang ini mirip satu sama lain dalam hal kemungkinan untuk dirawat dan profil risiko mereka hampir sama, tetapi satu kelompok mendapatkan perawatan dan yang lainnya tidak. Asumsi penting adalah bahwa data yang 'cukup' tersedia pada variabel yang cocok. Ketika sebuah penelitian membandingkan kelompok dengan cara ini, logika pencocokan skor kecenderungan diikuti. Remler dan van Ryzyn (2011) memberikan contoh lain. 'Kita mungkin memiliki data administratif tentang mahasiswa, termasuk usia pasti, jenis kelamin, jurusan, tahun di perguruan tinggi, nilai rata-rata poin dan seterusnya dan menggunakan data ini untuk memperkirakan persamaan statistik yang memprediksi kesukarelaan untuk program pengurangan stres (di universitas). Persamaan yang dihasilkan menghasilkan probabilitas yang diprediksi ("kecenderungan") untuk menjadi sukarelawan (untuk program itu). Mereka yang memiliki skor kecenderungan tinggi tetapi tidak menjadi sukarelawan untuk program stres digunakan untuk membuat kelompok perbandingan'. Tollenaar, van der Laan dan van der Heyden (2012) memberikan contoh ketiga.

Mereka memperkirakan 'dampak ketidakmampuan dan dampak pada residivisme pasca-pembebasan dari suatu ukuran yang menggabungkan penahanan yang lama dan rehabilitasi, yang disebut ukuran ISD untuk pelanggaran frekuensi tinggi (HFO) (diterapkan di Belanda), dibandingkan dengan praktik standar pemenjaraan jangka pendek. Para penulis menerapkan desain kuasi-eksperimental. Kelompok intervensi terdiri dari semua HFO yang dibebaskan dari ISD dalam periode 2004-2008. Dua kelompok kontrol berasal dari populasi HFO yang tersisa yang dibebaskan dari hukuman penjara standar. Untuk membentuk kelompok kontrol, kombinasi imputasi ganda (MI) dan pencocokan skor kecenderungan (PSM) digunakan. Ditemukan bahwa ukuran ISD tampaknya efektif dalam mengurangi residivisme dan kejahatan. Efek ketidakmampuan yang diperkirakan menunjukkan bahwa sebagian besar kasus dan pelanggaran pidana yang serius dicegah'.

KOTAK 5.7 EKSPERIMEN ALAMI: APA DAMPAK DARI PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA SECARA EKSOGEN (KARENA PEMBANGUNAN KASINO) TERHADAP PENGURANGAN KEMISKINAN DAN GANGGUAN JIWA ANAK-ANAK?

Remler dan van Ryzin (2011) memberikan contoh, yang dikenal sebagai studi kasino Cherokee. Sampel populasi representatif dari sekitar 1500 anak pedesaan (Great Smokey

Mountains) diberi penilaian psikiatris tahunan selama periode delapan tahun (1993–2000). Seperempat dari sampel adalah Indian Amerika, sisanya, sebagian besar berkulit putih. Di tengah-tengah studi, sebuah kasino (dibuka di reservasi Indian) memberi setiap Indian Amerika suplemen pendapatan yang meningkat setiap tahun. Peningkatan ini mengangkat 14% keluarga yang diteliti keluar dari kemiskinan, sementara 53% tetap miskin (yang lainnya tidak pernah dianggap miskin). Pendapatan keluarga non-India tidak terpengaruh.

Keputusan untuk mendirikan kasino memberikan dorongan pada pendapatan keluarga terlepas dari kebiasaan, motivasi, watak, atau faktor lain apa pun yang mampu memengaruhi kesehatan mental anak-anak. 'Dengan kata lain, keluarga-keluarga di reservasi tidak memilih sendiri perilaku (seperti memperoleh gelar sarjana) yang dihasilkan dari pendapatan mereka yang lebih tinggi – peningkatan pendapatan terjadi begitu saja, seperti memenangkan lotre'. Costello dkk (2003) menemukan bahwa 'Intervensi kasino' yang mengangkat keluarga keluar dari kemiskinan karena alasan yang tidak dapat dikaitkan dengan karakteristik keluarga, 'memiliki dampak besar pada beberapa jenis gangguan kejiwaan anak-anak, tetapi tidak pada yang lain'. Aspek penting dari eksperimen alami adalah 'kemampuan untuk membuat perbandingan – baik dari waktu ke waktu atau dengan kelompok yang tidak mendapatkan perawatan. Dalam studi Casino, para peneliti mulai mengumpulkan data sebelum kasino dibuka.

Oleh karena itu, mereka memiliki ukuran sebelum (atau uji coba) kesehatan mental untuk dibandingkan dengan ukuran kesehatan mental setelah kasino dibuka (uji coba pasca). Ukuran uji coba pra ini memberikan perkiraan kontrafaktual: Bagaimana status kesehatan mental anak-anak jika kasino tidak dibuka? Dengan membandingkan perubahan tersebut, para peneliti dapat menyimpulkan efek kausal pendapatan terhadap kesehatan mental'. Para peneliti mengumpulkan data tentang keluarga yang tidak tinggal di reservasi Cherokee dan dengan demikian tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan pendapatan tambahan tiba-tiba dari kasino. Kelompok perbandingan yang tidak terekspos ini juga memberikan perkiraan kontrafaktual'.

Desain Penelitian Longitudinal

Studi longitudinal adalah studi penelitian observasional yang mengumpulkan informasi tentang sampel yang sama (seperti individu atau rumah tangga) pada interval yang berulang selama periode waktu yang panjang. Artinya, peneliti mencatat informasi tentang subjek mereka tanpa memanipulasi lingkungan penelitian.

Keputusan yang biasanya harus dibuat peneliti yang menentukan jenis desain yang tepat adalah sebagai berikut apakah 'kasus' yang sama (orang, organisasi, negara, pengadilan) akan diikuti dari waktu ke waktu? Dan: apakah data akan dikumpulkan pada titik waktu yang berbeda, seperti halnya dalam desain longitudinal prospektif di mana kelompok (yaitu termasuk anggota organisasi) dipilih yang akan dipelajari, dilacak, dan dipelajari kembali pada

satu atau beberapa momen di masa mendatang?

Studi longitudinal juga dapat bersifat retrospektif atau dua arah. Studi retrospektif melihat ke belakang dan menyelidiki 'sejarah', misalnya dengan melakukan wawancara dan menganalisis dokumen. Monahan dan Swanson (2009) menggunakan desain seperti itu ketika mereka membahas pertanyaan tentang bagaimana karier kelas pengacara (Universitas Virginia telah berkembang selama bertahun-tahun. Mereka menggunakan data (yang tersimpan) untuk mengkarakterisasi awal karier dan survei untuk mengumpulkan informasi tentang momen-momen selanjutnya dalam kehidupan. Desain dua arah menggabungkan kedua pendekatan tersebut.

Kadang-kadang ungkapan 'studi kohort' digunakan. Studi semacam itu biasanya didasarkan pada sekelompok orang yang memiliki peristiwa (penting) yang sama (kohort kelahiran, kohort pernikahan, dll.) dan diikuti. Daripada mengambil sampel berdasarkan peristiwa kehidupan (penting), survei panel mengambil sampel dari sebagian populasi, dan kemudian menindaklanjutinya secara berkala (seperti studi panel rumah tangga atau panel pengujian produk). Ada beberapa sub-desain.

Desain Penelitian Lintas Seksi

Desain lintas seksi juga bersifat observasional. Ciri khas dari studi semacam itu adalah bahwa studi tersebut meneliti berbagai kelompok populasi pada satu titik waktu (di mana populasi juga dapat berupa organisasi atau lembaga). Anggap saja dalam hal mengambil cuplikan. Dalam desain cross-sectional standar, data dikumpulkan pada satu titik waktu. Desain cross-sectional memiliki tiga ciri khas: tidak ada dimensi waktu, mengandalkan perbedaan yang ada daripada perubahan (karena kebijakan atau intervensi 'luar' lainnya) dan kelompok berdasarkan perbedaan yang ada daripada alokasi acak.

KOTAK 5.8 CONTOH DESAIN LONGITUDINAL 1: BAGAIMANA ANAK LAKI-LAKI DARI LONDON BERKEMBANG DALAM HUBUNGANNYA DENGAN KEJAHATAN DAN NON-KEJAHATAN SELAMA 50 TAHUN? STUDI CAMBRIDGE DALAM PERKEMBANGAN NEGARA BURUK

Contoh desain longitudinal prospektif adalah Studi Cambridge dalam Perkembangan Nakal. Studi ini diprakarsai oleh Donald West pada tahun 1961. David Farrington bergabung dengannya pada tahun 1969 dan menjadi satu-satunya direktur proyek pada tahun 1981. Pengumpulan data dimulai pada tahun 1961–62 ketika sebagian besar anak laki-laki berusia antara delapan dan sembilan tahun. Ini adalah tindak lanjut selama 50 tahun terhadap 400 pria London.

Baru-baru ini, anak-anak mereka yang sudah dewasa diwawancarai untuk menjadikan ini sebagai studi tiga generasi. Dengan menggunakan campuran laporan diri, wawancara mendalam, dan pengujian psikologis, para peneliti mengumpulkan data kualitatif dan kuantitatif untuk menjelaskan dan memahami seluk-beluk dan pengaruh kecenderungan antisosial dan prososial pada pria muda yang melakukan tindak pidana dan bukan pelaku

tindak pidana.

KOTAK 5.9 CONTOH DESAIN LONGITUDINAL 2: APA YANG DAPAT DIKATAKAN TENTANG PENTINGNYA FAKTOR BIOLOGIS DAN GENETIK DALAM MENJELASKAN PERILAKU ANTISOSIAL YANG BERTAHAN LAMA?

Studi Penelitian Kesehatan dan Pengembangan Multidisiplin Dunedin. ('Studi Dunedin') telah berlangsung sejak 1972–73. Studi ini merupakan studi longitudinal tentang kesehatan, perkembangan, dan kesejahteraan sampel umum warga Selandia Baru. Mereka diteliti sejak lahir (1972–73), ditindaklanjuti, dan dinilai pada usia tiga tahun saat studi longitudinal dimulai. Sejak saat itu, mereka dinilai setiap dua tahun hingga usia 15 tahun, kemudian pada usia 18 tahun (1990–91), 21 tahun (1993–94), 26 tahun (1998–99), 32 tahun (2003–2005), dan 38 tahun (2010–2012).

Studi ini, dengan fokus awal pada dampak faktor lingkungan terhadap perkembangan manusia, telah berkembang dan tumbuh untuk mencakup data genetik dan genomik, untuk mengeksplorasi bagaimana gen dan lingkungan berinteraksi, dan untuk menginformasikan keputusan kebijakan. Pada awal 1990-an, Moffit dan Caspi mulai menganalisis data tentang kejahatan, perilaku antisosial, genetika, dan variabel dari ilmu saraf dan neuropsikologi.

KOTAK 5.10 CONTOH DESAIN LONGITUDINAL 3: APAKAH ASAL USUL HUKUM SUATU NEGARA MEMPENGARUHI ISI HUKUM SUBSTANTIFNYA DI BIDANG PERLINDUNGAN PEMEGANG SAHAM?

Armour dkk. (2009) menggunakan kumpulan data panel yang mencakup berbagai negara maju dan berkembang dan menunjukkan bahwa sistem hukum umum lebih melindungi kepentingan pemegang saham daripada sistem hukum perdata pada periode 1995–2005. Namun, sistem hukum perdata mulai mengejar ketertinggalan, yang menunjukkan bahwa asal usul hukum tidak terlalu menjadi hambatan bagi konvergensi formal dalam hukum perlindungan pemegang saham. Studi ini merupakan uji (longitudinal) hipotesis Legal Origines.

Empat kumpulan data dihasilkan. Tiga di antaranya adalah kumpulan data lima negara untuk periode 1970–2005, yang mencakup bidang perlindungan pemegang saham, perlindungan kreditor, dan regulasi ketenagakerjaan. Kumpulan data keempat digunakan untuk mencakup perlindungan pemegang saham, tetapi mencakup cakupan negara yang lebih luas dalam jangka waktu yang lebih singkat (20 negara selama periode 1995–2005, termasuk sistem yang sudah maju seperti Kanada, Prancis, dan Jerman, negara-negara berkembang (India, Malaysia, Afrika Selatan), dan sistem transisi (Tiongkok, Latvia). Periode

tersebut dipilih karena pada saat itu hampir semua sistem di seluruh dunia sedang menjalani gerakan umum untuk meliberalisasi ekonomi mereka, dan reformasi hukum yang bertujuan untuk memperkuat perlindungan pemegang saham menjadi agenda kebijakan.

KOTAK 5.11 CONTOH DESAIN LINTAS-SEKSI 1: APA SAJA JALAN MENUJU KEADILAN BAGI MASYARAKAT BELANDA?

Contoh studi lintas-seksi adalah studi WODC Paths to Justice yang memberikan gambaran kuantitatif tentang 'bentang sengketa', sebagaimana dilihat dari perspektif warga negara Belanda. Siapa – di Belanda – yang memiliki masalah apa (yang relevan secara hukum), siapa yang menyelesaikannya dan melalui cara apa, siapa yang 'memasuki arena hukum' dan apa hasilnya? Studi-studi ini diulang setiap beberapa tahun, dengan sampel yang berbeda. Studi-studi ini merupakan bagian dari program penelitian yang lebih besar yang meneliti masalah yang sama di beberapa negara lain dengan memanfaatkan pendekatan yang serupa.

KOTAK 5.12 CONTOH DESAIN LINTAS-SEKSI 2: TINDAK PIDANA MANA, SEPERTI PENYERANGAN, PERAMPOKAN, PERAMPOKAN, TINDAK PIDANA SEKSUAL ATAU PENCURIAN PRIBADI, YANG DIALAMI SELAMA 12 BULAN TERAKHIR? SURVEI KORBAN KEJAHATAN INTERNASIONAL (ICVS)

ICVS dirancang untuk menghasilkan data yang memungkinkan perbandingan lintas negara yang valid dan mencakup lebih dari 30 negara. Survei ini telah dilakukan selama beberapa dekade. Hasilnya menunjukkan perbedaan yang substansial antarnegara. ICVS juga melacak persentase kejahatan yang dilaporkan ke polisi oleh para korban. Beberapa negara tidak hanya berpartisipasi dalam studi korban internasional, tetapi juga memiliki survei viktimisasi untuk negara mereka sendiri

Desain Studi Kasus

Menurut Yin (2003) 'kebutuhan khusus untuk studi kasus muncul dari keinginan untuk memahami fenomena sosial yang kompleks'. Yin menggambarkan studi kasus sebagai studi empiris yang menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata. Studi kasus bertujuan untuk memberikan pemahaman selengkap mungkin tentang suatu peristiwa atau situasi. Studi kasus berfokus pada fenomena (sosial) 'dalam satu atau beberapa manifestasinya, dalam lingkungan alaminya, selama periode tertentu, dengan berfokus pada deskripsi terperinci, interpretasi, dan penjelasan yang dikaitkan oleh beberapa kategori partisipan dalam sistem dengan proses (sosial)' (di ruang sidang, penjara, kamp pelatihan, kantor pengacara). Yin menganggap bahwa studi kasus paling baik digunakan untuk menjawab pertanyaan

'bagaimana dan mengapa' melalui analisis mendalam terhadap satu situasi, peristiwa, atau lokasi.

KOTAK 5.13 CONTOH DESAIN STUDI KASUS 1: APA DAMPAK PENGUNGKAPAN NAMA PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN PELANGGARAN TERHADAP PERILAKU PERUSAHAAN DI BELANDA?

Contoh studi yang menggunakan desain ini diberikan oleh Van Erp (2010) tentang pengungkapan nama perusahaan yang melakukan pelanggaran. Jenis sanksi publik ini semakin populer sebagai alternatif dari regulasi perintah dan kontrol tradisional di negara-negara Barat. Studi ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang mekanisme kerja yang mendasari pengungkapan nama pelanggar melalui studi kasus kebijakan Otoritas Pasar Keuangan Belanda (AFM): 'Pertama, analisis dokumen dilakukan terhadap dokumen hukum dan parlemen, yurisprudensi, sumber Internet, laporan tahunan, dan siaran pers AFM.

Analisis ini mencakup peringatan publik dan sanksi publik yang dikeluarkan pada tahun 2007 dan 2008. Kedua, sekitar 30 wawancara dilakukan dengan regulator dan pengawas, pakar, dan petugas kepatuhan. Ketiga, wawancara telepon dilakukan dengan perusahaan yang terkena sanksi mengenai dampak publikasi terhadap reputasi mereka. Terakhir, analisis liputan media tentang peringatan publik dan sanksi di surat kabar nasional dan regional dilakukan melalui LexisNexis.

KOTAK 5.14 CONTOH DESAIN STUDI KASUS 2: APAKAH ASUMSI TENTANG PERSAINGAN PENGACARA DALAM MASALAH PERCERAIAN DI INGGRIS MEMILIKI VALIDITAS EMPIRIS?

Webley (2010) merangkum studi yang dilakukan oleh Eekelaar dkk. (2000) ini sebagai studi kasus tentang interaksi pengacara-klien dalam konteks perceraian. Studi ini meneliti pekerjaan sampel kecil pengacara perorangan. Eekelaar dkk. menggunakan metodologi tiga kali lipat. Pertama, mereka mengamati sepuluh pengacara tingkat mitra di tempat kerja selama sehari (observasi 14 hari), mencatat apa yang dilakukan pengacara tersebut dalam istilah deskriptif.

Cara pengumpulan data kedua adalah dengan melakukan wawancara dengan 40 pengacara yang diminta untuk berbicara tentang kasus-kasus yang telah dipilih sebelumnya dari awal kasus hingga posisi saat ini. Para pengacara ini berasal dari empat wilayah di Inggris dan Wales. Setelah semua data terkumpul, transkrip wawancara dianalisis menggunakan analisis isi, sedangkan kutipan ilustrasi disertakan dalam uraian temuan mereka sebagai bukti atas apa yang mereka amati dan dengar.

Kita dapat membedakan antara studi kasus tunggal dan studi kasus jamak. Uji coba N=1 (dengan satu orang) yang berasal dari bidang kedokteran dan juga digunakan dalam penelitian forensik adalah contoh studi kasus tunggal, yang juga dikenal sebagai 'desain subjek tunggal'. Studi kasus jamak memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi perbedaan dalam dan antarkasus. Karena perbandingan akan dilakukan, sangat penting bahwa kasus dipilih dengan cermat sehingga peneliti dapat memprediksi hasil yang serupa di seluruh kasus, atau memprediksi hasil yang kontras berdasarkan suatu teori.

Studi kasus juga dilakukan pada tingkat makro (misalnya di bidang posisi negara-negara pada indikator supremasi hukum dan indikator hak asasi manusia). Dalam dunia evaluasi, (sub)desain Analisis Komparatif Kualitatif (QCA) menjadi populer. Metode ini mengklaim menggabungkan studi kasus tradisional 'kualitatif' dengan pendekatan kuantitatif: 'QCA dapat diterapkan secara bermanfaat pada desain penelitian yang melibatkan N berukuran kecil dan menengah (misalnya, 5–50). Dalam rentang ini, sering kali terdapat terlalu banyak kasus bagi peneliti untuk menyimpan semua pengetahuan kasus "di dalam kepala mereka", tetapi terlalu sedikit kasus untuk sebagian besar teknik statistik konvensional'.

KOTAK 5.15 CONTOH DESAIN STUDI KASUS 3: APA SAJA FITUR UTAMA DARI SERTIFIKASI PIHAK KETIGA SWASTA YANG DAPAT DIANDALKAN DAN MENGATUR SENDIRI, DAN APA SAJA KEUNGGULAN INSTITUSIONAL PERBANDINGAN MEREKA DIBANDINGKAN DENGAN REGULASI ADMINISTRATIF OLEH BADAN PEMERINTAH?

Sertifikasi swasta sebagai sarana regulasi risiko dan jaminan kualitas dapat menawarkan keuntungan dibandingkan regulasi pemerintah, termasuk keahlian teknis yang unggul, inspeksi dan pemantauan entitas yang diatur dengan lebih baik, peningkatan respons terhadap konsumen, dan efisiensi yang lebih besar. Dalam studi ini, dua kasus sertifikasi swasta yang andal di bidang regulasi dilaporkan: keselamatan kebakaran dan makanan halal. Penulis menggambarkan bagaimana persaingan merek, profesionalisme, kontrol birokrasi, rasa misi bersama, dan jaringan sosial mendukung sertifikasi swasta yang andal. Faktor-faktor ini merupakan mekanisme yang terkait dengan teori-teori yang berbeda seperti teori Aviram tentang regulasi jaringan (Aviram, 2003) dan teori modal sosial.

'Desain' Komparatif (alias Penelitian Hukum Komparatif)

Dibandingkan dengan desain lain yang telah kita bahas sejauh ini, kurang jelas apa yang dimaksud dengan 'desain' ini. Bahkan ada keraguan serius bahwa ada yang namanya desain komparatif (atau 'suatu'). Kadang-kadang desain komparatif dipandang sebagai nama untuk berbagai metode dalam melihat hukum, kadang-kadang desain komparatif dipandang sebagai berbagai 'perspektif' dan kadang-kadang fokusnya adalah pada 'metode fungsional hukum komparatif', yang 'telah menjadi mantra sekaligus momok hukum komparatif'.

Bagi para pendukungnya, ini adalah metode yang paling, mungkin satu-satunya, paling bermanfaat; bagi para penentangannya, hukum ini menggambarkan segala hal yang buruk

tentang hukum perbandingan arus utama'. Palmer (2004) berpendapat bahwa 'semua pengacara adalah penganut paham perbandingan dalam arti alamiah, seperti ketika mereka membuat perbedaan, menarik kesimpulan, atau mencari kasus yang tepat'.

Jawaban Husa (2007) terhadap pertanyaan 'bagaimana metode (perbandingan) bekerja dalam praktik, yaitu langkah-langkah apa yang harus diambil?' adalah ini: 'proses hukum perbandingan, secara garis besar, adalah sebagai berikut: 1) Mengajukan pertanyaan fungsional (bagaimana – secara umum dipahami – masalah sosio-hukum X diselesaikan?), 2) menyajikan sistem dan cara mereka memecahkan masalah X, 3) membuat daftar persamaan dan perbedaan dalam cara memecahkan masalah X, 4) mengadopsi sudut pandang baru untuk mempertimbangkan penjelasan tentang perbedaan dan persamaan, dan 5) mengevaluasi penemuan secara kritis (dan terkadang menilai solusi mana yang "terbaik")'. Husa (2007) menyarankan untuk bekerja dengan 'metodologi yang fleksibel' saat membuat perbandingan; namun, apa yang dimaksud dengan 'fleksibilitas' dan 'metodologi' masih belum jelas, dan hal yang sama berlaku untuk beberapa langkah lainnya.

Dalam laporan kemajuannya tentang hukum perbandingan selama 50 tahun terakhir, Reimann (2002) berpendapat bahwa '[s]aat hukum perbandingan telah menjadi keberhasilan yang cukup besar dalam hal menghasilkan banyak pengetahuan, hukum tersebut telah menjadi kegagalan yang menggelegar sehubungan dengan perkembangannya yang lebih umum sebagai bidang penyelidikan'. Sepuluh tahun kemudian, menyimpulkan bahwa 'kita tidak dapat berbicara tentang "metodologi hukum perbandingan" atau "metodologi hukum perbandingan", tetapi harus berbicara tentang metode yang digunakan dalam penelitian hukum perbandingan, karena tidak ada metode tunggal atau perspektif tunggal [atau desain] yang eksklusif untuk hukum perbandingan'.

Oderkerk (2014) setidaknya sama kritisnya. Untuk membantu mengartikulasikan apa saja prinsip dasar dari desain penelitian komparatif, kita beralih ke Lijphart (1971). Ia menunjukkan bahwa desain tersebut menyerupai desain eksperimental, tetapi hanya dalam 'cara yang sangat tidak sempurna'. Dua 'masalah utama yang dihadapi metode komparatif menyebabkan hal ini: banyak variabel, jumlah kasus yang sedikit'. Lijphart menunjuk pada 'metode perbedaan' dan 'metode variasi bersamaan' (yang dicetuskan oleh John Stuart Mill):

Metode perbedaan terdiri dari membandingkan contoh-contoh di mana (a) fenomena terjadi, dengan contoh-contoh dalam hal lain yang serupa di mana fenomena tersebut tidak terjadi... metode variasi bersamaan adalah versi yang lebih canggih: alih-alih hanya mengamati keberadaan atau ketiadaan variabel operatif, metode ini mengamati dan mengukur variasi kuantitatif dari variabel operatif dan menghubungkannya satu sama lain.

Eberle (2009) mengartikulasikan empat langkah dalam penelitian hukum komparatif:

Bagian pertama (Langkah 1) adalah memperoleh keterampilan seorang pembanding untuk mengevaluasi hukum secara jelas, objektif, dan netral. Bagian

kedua (Langkah 2) adalah evaluasi hukum sebagaimana dinyatakan secara konkret, dalam kata-kata, tindakan; kita dapat menyebutnya sebagai hukum eksternal. Setelah kita memahami hukum sebagaimana dinyatakan sebenarnya, kita dapat beralih ke bagian ketiga (Langkah 3) dari metodologi: mengevaluasi bagaimana hukum benar-benar beroperasi dalam suatu budaya. Kita dapat menyebutnya sebagai hukum dalam tindakan atau hukum internal. Setelah kita mengevaluasi hukum sebagaimana dinyatakan dan hukum dalam tindakan, kita dapat mengumpulkan data kita (Langkah 4) dan menyimpulkan dengan pengamatan komparatif yang dapat menjelaskan budaya hukum asing dan budaya kita sendiri.

Orücü (2012) mengemukakan bahwa 'kemungkinan perbandingan bergantung pada keberadaan dan ketersediaan data. Data dapat diperoleh dengan cara terbaik dengan menggunakan metodologi ilmu sosial.

Para peneliti tentu saja menggabungkan desain. Bahkan, hal ini sering kali patut dipuji. Berikut ini adalah beberapa contoh.

KOTAK 5.16 CONTOH DESAIN (PENELITIAN HUKUM) PERBANDINGAN 1: APA ITU HUKUM KONTRAK INTI UMUM? PROYEK CORNELL DAN PROYEK TRENTO

Proyek Cornell disponsori oleh Yayasan Ford dan dipandu oleh Schlesinger (1968); proyek ini berfokus pada upaya mewujudkan 'pemahaman yang lebih baik tentang pembentukan kontrak (dan inti umumnya) dan untuk mengembangkan pengetahuan dan materi pengajaran untuk pengajaran mata kuliah hukum di masa mendatang. Diperkirakan bahwa di masa mendatang praktisi rata-rata harus memiliki keakraban tidak hanya dengan hukum umum Amerika Serikat tetapi juga dengan inti hukum umum dunia' (Shadoan, 1968).

Proyek Trento memperluas cakupan proyek Cornell di luar hukum kontrak dan telah menekankan pada kontrak, properti, dan perbuatan melawan hukum, dengan sejumlah subtopik seperti perwalian komersial, kesalahan, dan penipuan dalam hukum kontrak. Proyek ini bergantung pada apa yang dalam dunia perbandingan hukum dikenal sebagai 'pendekatan faktual', yaitu metodologi penelitian mendalam berbasis fakta, yang menyajikan sejumlah kasus, 15 hingga 30, kepada wartawan nasional dan meminta solusi yang ditawarkan oleh sistem hukum mereka (Orücü, 2012).

KOTAK 5.17 CONTOH DESAIN PERBANDINGAN (PENELITIAN HUKUM) 2: BAGAIMANA SISTEM BANTUAN HUKUM YANG DIDANAI NEGARA DISUSUN DI NEGARA-NEGARA? PERSYARATAN MINIMUM MANA UNTUK BANTUAN HUKUM YANG DIDANAI NEGARA YANG DAPAT DITETAPKAN DARI KONVENSI HAK ASASI MANA DAN DARI HUKUM KASUS PENGADILAN HAK ASASI MANA EROPA?

Dalam studi ini, para penulis telah membandingkan sistem bantuan hukum dari sembilan negara dan menilai bagaimana kinerjanya dalam kerangka hak fundamental untuk mengakses keadilan yang dilindungi oleh Pasal 6 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (ECHR). Selain mendeskripsikan sistem, tujuannya adalah untuk mengidentifikasi tren, terkait dengan biaya layanan, cara alternatif untuk memberikan bantuan hukum, dan efektivitas layanan yang diberikan. Penelitian ini berfokus pada sejumlah sub-pertanyaan, seperti: apa saja kriteria kelayakan, ambang batas keuangan, kontribusi sendiri, kriteria kelayakan, kelompok yang dikecualikan dan dikecualikan, dan jenis masalah? Berapa anggaran bantuan hukum yang didanai negara dan, jika tersedia, kontribusi yang berbeda per kontributor?

Apa saja cakupan layanan bantuan hukum, dan apa saja batasan dan pengecualiannya? Layanan (awal, wajib) mana yang tersedia? Apa saja dampak sistem bantuan hukum terhadap kualitas akses ke keadilan dan dampaknya terhadap orang-orang dengan sarana terbatas, dan terhadap penyelesaian konflik? Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner. Laporan yang tersedia di internet digunakan dari semua negara dalam bahasa asli. Wawancara dilakukan dengan para ahli nasional dari badan bantuan hukum atau dari akademisi. Para spesialis ini juga memverifikasi informasi yang dikumpulkan melalui penelitian pustaka. Untuk Prancis, Skotlandia, dan Inggris & Wales, laporan terbaru dan sumber publik memberikan informasi yang memadai'.

KOTAK 5.18 DESAIN PERBANDINGAN (PENELITIAN HUKUM) CONTOH 3 DARI DESAIN PERBANDINGAN: BAGAIMANA PENDEKATAN KOMISI EUROPA UNTUK EFISIENSI KEADILAN (CEPEJ) BEKERJA DALAM PRAKTIK SAAT MENGUKUR PENGADILAN DAN SISTEM PERADILAN DAN SAAT BERFOKUS PADA PENGURANGAN KETERLAMBATAN DALAM PROSES PERADILAN?

Komisi Eropa untuk Efisiensi Keadilan (CEPEJ) merupakan salah satu kegiatan antarpemerintah Dewan Eropa. Ketika CEPEJ dibentuk pada tahun 2002, salah satu tugas pertamanya adalah mengembangkan metodologi untuk mengevaluasi secara komparatif komposisi dan fungsi sistem peradilan Eropa. Kuesioner asli terdiri dari 123 pertanyaan yang dirancang untuk memberikan gambaran umum tentang struktur dan operasi peradilan di masing-masing negara. Kuesioner tersebut mencari informasi umum dan rincian khusus mengenai sistem peradilan negara:

- Akses ke keadilan dan pengadilan;
- Fungsi sistem peradilan negara dan efisiensi relatifnya;
- Penggunaan teknologi informasi dalam sistem peradilan;
- Apakah sistem peradilan menyediakan persidangan yang adil bagi para pihak yang berperkara;

- Informasi mengenai hakim, jaksa penuntut umum, dan pengacara;
- Informasi mengenai agen penegakan hukum dan pelaksanaan putusan pengadilan.

Untuk memfasilitasi proses pengumpulan data, para ahli memutuskan bahwa setiap negara harus mencalonkan seorang 'koresponden nasional'. Studi CEPEJ yang lebih baru bekerja dengan metodologi yang agak berubah.

- Menggunakan desain cross-sectional untuk mengambil gambaran sekilas dan menemukan area potensial yang menarik, lalu menggunakan desain longitudinal untuk menemukan tren (dan penjelasannya).
Ambil contoh studi Paths to Justice. Kelompok warga sipil yang memiliki jumlah masalah sosial-hukum terbesar dan paling tidak puas dengan solusi untuk masalah ini yang ditawarkan oleh sistem peradilan, dapat diikuti secara longitudinal untuk menemukan penjelasan, tetapi juga untuk melihat apakah ada kemajuan yang dibuat dalam 'pengobatan' kelompok populasi ini oleh sistem peradilan.
- Menggunakan desain longitudinal tetapi di mana garis waktu terputus oleh intervensi tertentu, misalnya undang-undang baru (terkait dengan eksperimen alami).
Desain deret waktu terputus bekerja dengan beberapa observasi pra-uji dan pasca-uji yang diberi jarak pada interval waktu tertentu. Desain seperti itu adalah desain di mana serangkaian observasi berurutan yang diberi jarak waktu yang sama terputus oleh penerapan pengobatan atau intervensi. Contoh klasik dalam penelitian hukum empiris adalah evaluasi Campbell dan Ross (1968) tentang dampak Connecticut Crackdown terhadap pelanggaran kecepatan pada jumlah kematian lalu lintas. Contoh lain adalah studi Muller (2004) tentang pencabutan undang-undang helm sepeda motor Florida dengan melacak kematian sepeda motor bulanan selama beberapa tahun sebelum dan sesudah pencabutan undang-undang tersebut. Subdesain ini disebut 'terputus', karena rangkaian waktu dihadapkan dengan (dan terputus oleh) penerapan perawatan/kebijakan/undang-undang.
- Menggabungkan studi longitudinal (kohort) dengan desain eksperimental.
Di sini, Studi Longitudinal dan Eksperimental Montreal (MILES) terhadap anak laki-laki dengan status sosial ekonomi rendah adalah contohnya. Studi ini dimulai pada tahun 1984 dan mencakup program pencegahan acak yang diberikan selama periode 2 tahun ketika anak laki-laki berusia 7–9 tahun. Program ini menargetkan perilaku mengganggu dan mencakup dua komponen utama: pelatihan keterampilan sosial untuk anak laki-laki di sekolah dan pelatihan untuk orang tua selama kunjungan keluarga. Program pencegahan ini telah terbukti, berdasarkan evaluasi (eksperimental), memiliki efek jangka pendek dan jangka panjang pada perilaku mengganggu, antisosial, dan nakal, yang diidentifikasi sebagai hasil utama penelitian, serta kinerja akademik dan putus sekolah.
- Menggunakan pendekatan studi kasus tunggal dan desain kuasi-eksperimental). Di sini

fokusnya biasanya pada satu orang (misalnya pembunuh (berantai), pasien, polisi, hakim).

Salah satu penelitian tersebut mengevaluasi efektivitas pengobatan perilaku untuk gangguan panik pada anak laki-laki berusia 10 tahun. Dalam penelitian ini, anak laki-laki tersebut, Michael, mengalami serangan panik yang sering dan berulang, yang tidak berhasil diobati dalam terapi bermain sebelumnya. Michael selanjutnya diobati menggunakan versi modifikasi dari Pengobatan Kontrol Panik, pengobatan manual yang dikembangkan dan dievaluasi untuk orang dewasa. Pengobatan tersebut diberikan dengan hati-hati. Selain menggunakan wawancara klinis semi-terstruktur sebelum dan sesudah perawatan untuk mengevaluasi gejala gangguan panik, Michael dan ibunya melengkapi dan menyerahkan catatan harian tentang jumlah serangan panik yang dialami serta tingkat kecemasan globalnya secara keseluruhan setiap hari.

- Menggunakan survei lintas bagian di mana pictogram Belanda Kijkwijzer dan PEGI (Informasi Permainan Pan Eropa) dipelajari dengan tamu misterius (produsen dan penjual produk audiovisual untuk anak-anak yang berkunjung dan menelepon untuk mengetahui apakah mereka menggunakan pictogram), di mana analisis konten diterapkan pada program TV untuk mengetahui apakah film diberi pictogram dengan benar dan di mana desain kuasi-eksperimental diterapkan untuk mengetahui sejauh mana pictogram ini menarik dan informatif bagi konsumen.

Pictogram ditempatkan pada sampul, bahan pengemas, poster, dan bahan iklan lainnya dan juga ditampilkan di awal film atau program televisi. Pictogram terutama dimaksudkan untuk memberi tahu orang tua dan guru tentang bahaya produk audiovisual untuk anak-anak di bawah usia tertentu. Selain itu, Kijkwijzer membantu bisnis audiovisual untuk mematuhi Undang-Undang Media Belanda dan Undang-Undang Pidana, yang menyatakan bahwa anak-anak di bawah usia enam belas tahun harus dilindungi dari media yang berbahaya.

5.3 KRITERIA YANG MENILAI KECUKUPAN DESAIN PENELITIAN

Meskipun daftar yang disajikan di bawah ini tidak lengkap, kriteria ini penting dalam menilai penerapan, kesesuaian, dan kualitas suatu desain: validitas internal, validitas eksternal, validitas deskriptif, relevansi masalah (desain), hubungan dengan teori dan aspek etika dan hukum dari desain. Ada beberapa kriteria untuk menilai kualitas dan kecukupan penelitian hukum empiris yang berkaitan dengan pengambilan sampel, keterwakilan, pemilihan unit, operasionalisasi konsep dan variabel, pengumpulan data, analisis data, dan pelaporan. Ini akan dibahas dalam dua bab berikutnya.

Sebelumnya, kami merujuk pada ancaman terhadap validitas yang didiagnosis selama bertahun-tahun ketika mempelajari, khususnya, hubungan kausal. Lebih dari 30 ancaman telah dirumuskan. Kami merujuk pada Cook dan Campbell (1979) dan daftar yang tersedia di internet.

Kriteria 1: Validitas Statistik

Pada dasarnya ini berarti berbicara tentang signifikansi statistik dari hubungan kuantitatif antara variabel. Untuk memeriksa signifikansinya, digunakan uji statistik.

Kriteria 2: Validitas Internal

Gomm (2008) menjelaskan validitas dengan mengatakan bahwa 'itu berarti sesuatu seperti kebenaran. Sebagian besar peneliti menerima bahwa kita tidak akan pernah bisa mengetahui kebenaran dengan pasti, jadi dalam penelitian yang valid adalah yang belum dibatalkan validitasnya, meskipun ada upaya untuk melakukannya'. Ia mengaitkan posisi ini dengan epistemologi falsifikasi Popper.

Validitas internal adalah sejauh mana struktur desain penelitian memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan yang tidak ambigu. Cara penyusunan studi (misalnya, melacak perubahan dari waktu ke waktu, membuat perbandingan) dapat menghilangkan penjelasan alternatif untuk temuan. 'Semakin desain studi menghilangkan interpretasi alternatif ini, semakin kuat validitas internal studi tersebut'. Dalam sebuah makalah yang menilai validitas internal studi administrasi bisnis, Berg et al (2004) menyatakannya seperti ini: 'Studi dengan validitas internal yang tinggi memberikan hasil yang tidak rentan terhadap cacat sedangkan desain dengan validitas internal yang rendah menghasilkan hasil yang rentan terhadap efek variabel ketiga dan faktor pengganggu'.

Validitas internal sebagian besar hanya relevan dalam studi yang mencoba menetapkan atau menguji hubungan kausal. Jika studi tidak menggunakan kata-kata seperti 'penjelasan', 'penyebab' atau 'hubungan kausal', tetapi secara de facto membahas topik-topik ini, validitas internal juga penting. Contoh situasi semacam itu adalah ketika seorang evaluator mengklaim menyelidiki dampak (akibat) dari undang-undang baru terhadap perusahaan, tetapi tidak menggunakan kata-kata seperti 'kausalitas' atau 'penjelasan kausal'. Validitas internal juga merupakan kriteria yang relevan ketika uji coba (proyek, regulasi, dll.) dirancang dan diuji dan ketika peneliti melihat hubungan antara kesetiaan implementasi dan dampak intervensi.

Kriteria 3: Validitas Eksternal

Validitas eksternal didefinisikan sebagai sejauh mana hasil tertentu dari suatu penelitian dapat digeneralisasikan ke populasi yang lebih luas. Ingat kembali bahwa validitas secara umum mengacu pada perkiraan kebenaran proposisi, kesimpulan, atau simpulan. Itu berarti bahwa validitas eksternal mengacu pada perkiraan kebenaran simpulan yang melibatkan generalisasi. Validitas eksternal biasanya membedakan antara validitas populasi (sejauh mana hasil suatu penelitian dapat digeneralisasikan dari sampel tertentu yang diteliti ke kelompok subjek yang lebih besar) dan validitas ekologis (sejauh mana hasil suatu eksperimen dapat digeneralisasikan dari serangkaian kondisi lingkungan yang diciptakan oleh peneliti ke kondisi lingkungan lainnya (pengaturan dan kondisi)).

Kriteria 4: Validitas Deskriptif

Dalam bentuk yang paling sederhana, kriteria ini membahas kualitas pelaporan studi secara keseluruhan, seperti yang kita lihat di Bab 4. Farrington (2003) mengembangkan daftar periksa berisi 14 item yang mencakup berbagai elemen berbeda (misalnya desain studi, hipotesis yang akan diuji, dan ukuran efek). Baru-baru ini, Pernyataan Konsort dikembangkan yang terdiri dari daftar periksa berisi 25 item.

Daftar tersebut berfokus pada pelaporan bagaimana uji coba terkontrol acak (fokus Pernyataan ini) dirancang, dianalisis, dan diinterpretasikan. Perhatian diberikan pada judul dan

abstrak, pendahuluan dan latar belakang, metode (termasuk informasi tentang peserta, intervensi, tujuan, hasil, ukuran sampel, pengacakan, penyamaran, dan metode statistik), hasil (termasuk informasi tentang arus peserta, rekrutmen, data dasar, jumlah yang dianalisis, hasil dan estimasi, analisis tambahan, dan kejadian buruk), interpretasi, generalisasi, dan bukti keseluruhan dari uji coba terkontrol acak (RCT). Telah digunakan untuk meningkatkan standar pelaporan RCT dalam bidang kedokteran dan telah didukung secara internasional oleh editor jurnal dan badan profesional. Perry dkk (2010) menggunakan Consort Statement dalam sebuah studi yang memiliki 'tujuan keseluruhan untuk menilai validitas deskriptif dalam sampel representatif dari uji coba kejahatan dan keadilan.

Sampel tersebut terdiri dari 83 RCT yang sebelumnya telah diidentifikasi oleh Farrington dan Welsh (2005)'. Sayangnya, kesimpulannya tidak terlalu positif: 'Secara keseluruhan, temuan menunjukkan bahwa studi kejahatan dan keadilan memiliki validitas deskriptif yang rendah. Pelaporan buruk pada metode pengacakan, ukuran hasil, analisis statistik, dan temuan studi, meskipun jauh lebih baik dalam hal pelaporan latar belakang dan detail peserta'. Sementara Pernyataan CONSORT berfokus pada studi terkontrol acak, untuk desain observasional Pernyataan STROBE (juga daftar item) memberikan panduan metodologis yang terkait dengan daftar CONSORT.

Di samping ketiga jenis validitas ini, ada validitas (dan reliabilitas) instrumen pengumpulan data dan validitas konstruk (kecukupan definisi operasional dan pengukuran konstruk teoritis yang mendasari intervensi dan hasil): kami merujuk ke Bab 6 dan 7 untuk informasi lebih lanjut.

Kriteria 5: Relevansi Masalah Desain Penelitian dan Bahaya Bias Keberhasilan

Pemilihan desain penelitian terkait dengan jenis masalah yang diteliti, seperti yang ditunjukkan oleh contoh (hipotetis) dari bagian 5.2. Menganggap bahwa desain selalu 'cocok' dengan masalah dan bahwa setiap desain 'akan berhasil', adalah suatu kesalahan. Meskipun beberapa (jenis) masalah penelitian tidak terlalu selektif dalam pemilihan desainnya, masalah penelitian lainnya sangat selektif. Alasannya adalah bahwa pemilihan desain penelitian yang memadai, terpuji, atau 'cocok' merupakan syarat mutlak untuk menghasilkan bukti yang valid dan andal. Hal ini berkaitan dengan kekuatan desain. Kekuatan sebagian besar bergantung pada kriteria yang dibahas di atas, dan khususnya validitas internal. Desain bervariasi dalam hal sejauh mana mereka dapat mengendalikan berbagai bentuk kesalahan, dan karenanya beberapa desain memberikan bukti yang lebih andal daripada yang lain.

Dalam literatur, beberapa skala telah disarankan untuk menggambarkan kekuatan relatif desain. Kadang-kadang disebut sebagai 'hierarki bukti atau desain'. Contoh yang digunakan dalam kriminologi adalah Skala Metode Ilmiah Maryland. Biasanya, eksperimen (RCT) berada di 'puncak' skala, sementara studi korelasional dengan hanya satu momen pengukuran berada di 'bawah'. Kriteria yang digunakan Kolaborasi Campbell saat mengambil keputusan mengenai desain penelitian mana yang akan disertakan dan mana yang akan dikecualikan dari tinjauan sistematis kurang lebih sama.

Dalam dunia penelitian medis dan kesehatan, Cochrane Library juga mengikuti tipologi seperti itu, meskipun pendekatan lain diterima. Dua kotak berikutnya merangkum dua

'hierarki' lainnya tetapi juga merujuk pada kritik terkenal tentang konsep hierarki.

Dalam literatur metodologis, konsekuensi negatif dari bekerja dengan desain yang tidak sesuai dengan masalah penelitian telah ditangani. Untuk evaluasi program kebijakan, Rossi (1987) menciptakan 'Hukum Evaluasi Baja Tahan Karat': semakin lemah desain evaluasi dampak (yaitu desain kuasi-eksperimental lebih lemah daripada eksperimental; desain cross-sectional lebih lemah daripada longitudinal; studi kasus tunggal lebih lemah daripada studi kasus jamak), semakin besar kemungkinan temuan positif ditemukan dibandingkan dengan situasi ketika desain yang lebih kuat digunakan. Gomm (2008) menyebut masalah ini sebagai 'bias terhadap putusan keberhasilan dalam studi efektivitas'.

Untuk kriminologi, Logan (1972) menemukan bahwa ketika tidak ada kelompok kontrol yang digunakan dalam desain, temuannya jauh lebih positif daripada ketika kelompok kontrol acak digunakan. Ia meneliti 100 studi kriminologi; Tabel 5.1 menyajikan bukti. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa ketika desain eksperimental digunakan, evaluasi dampak lebih tepat (dan – dalam kasus ini – kritis) dalam hasilnya daripada ketika desain yang kurang kuat digunakan.

Sejak Logan (1972), penelitian lain dengan temuan serupa telah dihasilkan dalam pekerjaan sosial, dalam bidang kedokteran dan dalam bidang kriminologi. Welsh et al (2011) mereplikasi sebagian penelitian Weisburd et al (2001) (apakah ketahanan desain penelitian memiliki pengaruh pada hasil penelitian?) dan menemukan hasil serupa bahwa 'korelasi keseluruhan antara desain penelitian dan hasil penelitian bersifat moderat tetapi negatif dan signifikan (Tau-b= -0.175, p=0.029). Hal ini menunjukkan bahwa desain penelitian yang lebih kuat cenderung tidak melaporkan efek yang diinginkan atau, sebaliknya, desain penelitian yang lebih lemah mungkin bias ke atas'.

Gomm (2008) merangkum bukti tentang masalah rumit ini:

Studi tentang efektivitas tanpa kelompok kontrol sama sekali tidak dilengkapi dengan baik untuk memberikan bukti guna menentukan apakah suatu intervensi merupakan penyebab dari hasil yang tercatat. Tampaknya juga benar bahwa ketika pengacakan digunakan untuk membuat kelompok kontrol (yaitu 'eksperimen nyata'), temuan efektivitas lebih kecil kemungkinannya dibandingkan ketika kelompok kontrol dibuat dengan cara lain.

Ia menambahkan daftar sekitar 15 'resep untuk bias'.

KOTAK 5.19 DUA CONTOH HIERARKI BUKTI, BERDASARKAN DESAIN PENELITIAN

Tingkat I: Uji coba terkontrol acak (RCT) yang dilakukan dengan baik dan memiliki kekuatan yang sesuai

Tingkat II: Uji coba terkontrol acak (RCT) yang dilakukan dengan baik, tetapi kecil dan memiliki kekuatan yang kurang

Tingkat III: Studi observasional non-acak

Tingkat IV: Studi non-acak dengan kontrol historis

Tingkat V: Seri kasus tanpa control

1. Tinjauan sistematis dan meta-analisis
2. RCT dengan hasil yang pasti
3. RCT dengan hasil yang tidak pasti
4. Studi kohort
5. Studi kasus kontrol
6. Survei lintas bagian
7. Laporan kasus

KOTAK 5.20 POIN-POIN KRITIK TERHADAP HIERARKI BUKTI

- Schwartz dan Mayne (2005) membahas standar kualitas lain yang tidak selalu terkait dengan skala/desain ini. Burrows dan Walker (2013) menyarankan cara untuk menilai (pendapat) pakar.
- Pawson dan Tilley (1997) dan Pawson (2006) tidak berfokus pada hierarki tetapi pada kontribusi penelitian (desain) terhadap pengembangan dan penjelasan teori.
- Hierarki tidak memperhitungkan bagaimana desain yang berbeda digunakan dalam dunia praktik. Studi yang menjelaskan bagaimana eksperimen (acak) – sebagai contoh – dilakukan menunjukkan kekurangan utama. Lihat Farrington (2003) dan Greenberg dan Barnow (2014) (dalam analisis mereka tentang ‘delapan jenis kelemahan yang agak tumpang tindih yang terjadi dalam mengevaluasi (melalui RCT) dampak atau pengaruh program sosial.’
- Desain yang berada pada peringkat lebih rendah tidak selalu berlebihan. Misalnya, hubungan antara merokok dan kanker paru-paru ditemukan melalui studi kohort yang dilakukan pada tahun 1950-an.

Tabel 5.1 Kontrol eksperimen dan hasil eksperimen: penelitian tentang program untuk mengurangi kejahatan dan kenakalan remaja

Tabel 5.1 Kontrol eksperimental dan hasil eksperimental: penelitian tentang program untuk mengurangi kejahatan dan kenakalan remaja

	Jumlah yang dinilai berhasil (%)	Jumlah yang dinilai tidak berhasil (%)
19 penelitian dengan kelompok kontrol acak	7 (37)	12 (63)
23 penelitian dengan kelompok kontrol non-acak	16 (70)	7 (30)
58 studi tanpa kelompok	50 (86)	8 (14)

control		
---------	--	--

Cara membaca tabel ini

Logan meninjau 100 studi tentang program yang dirancang untuk mengurangi perilaku kriminal; 58 di antaranya memiliki desain tanpa kelompok kontrol – yaitu, program tersebut hanya menampilkan orang-orang yang menerima program, dan tidak ada orang yang menerima perawatan alternatif atau tidak menerima perawatan sama sekali.

Sisanya memiliki kelompok kontrol, 23 dengan kelompok kontrol non-acak, dan 19 dengan kelompok kontrol acak. Tabel tersebut menunjukkan bahwa jika tidak ada kelompok kontrol, para peneliti cenderung menilai program tersebut berhasil, dan jika ada kelompok kontrol acak, mereka cenderung menilai program tersebut gagal.

Kriteria 6: Hubungan dengan Teori

Seperti yang telah ditunjukkan sebelumnya, teori dengan huruf 't' kecil atau 'T' kapital penting dalam ELR. Oleh karena itu, tidak baik untuk melihat pemilihan dan konstruksi desain penelitian sebagai latihan teknis semata. Sikap seperti itu menimbulkan risiko bahwa hipotesis tunggal dipelajari tanpa menghubungkannya dengan teori yang lebih umum (penjelasan atau intervensi). Jika hipotesis disimpulkan dari teori yang ada, mengujinya lebih efisien dalam mewujudkan akumulasi pengetahuan daripada bekerja dengan hipotesis yang berdiri sendiri.

Kriteria 7: Aspek Etis Pilihan Desain, khususnya Pengacakan

Salah satu, jika bukan pertanyaan yang paling sering dibahas dalam pilihan desain adalah apakah, dan sejauh mana, pengacakan orang/aktor lain ke kelompok eksperimen atau kelompok kontrol secara etis benar. Argumen yang menentang jawaban positif adalah bahwa beberapa orang, yang dapat memperoleh manfaat dari intervensi, dan sangat membutuhkan peningkatan situasi (sosial, hukum atau medis) mereka, dapat menjadi bagian dari kelompok kontrol dan 'tertinggal'. Argumen yang mendukung penugasan yang cocok atau acak adalah pertama-tama bahwa tidak diketahui apakah intervensi akan berhasil (untuk mengetahui hal itu adalah tujuan dari penelitian) dan kedua bahwa tidak etis, jika masyarakat menghadapi efek samping yang tidak diinginkan dan negatif dari intervensi, hanya karena tidak dievaluasi dengan cara yang tepat dan valid.

Mengenai eksperimen pengadilan, Lind (1985) menggambarkan RCT (atau 'perkiraan dekat dengan mereka') yang meneliti inovasi dalam prosedur perdata. Dia merujuk pada sebuah komite yang tidak hanya melihat tidak ada kondisi umum untuk melarang bekerja dengan desain acak, tetapi juga setuju dengan pepatah bahwa perbedaan dalam perlakuan itu berbahaya. Intinya adalah bahwa kerugian dapat diatasi dengan manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian acak.

Baru-baru ini, Weisburd (2003) berpendapat bahwa:

sebenarnya ada keharusan moral untuk melakukan eksperimen acak dalam kejahatan dan keadilan. Kebutuhan itu berkembang dari kewajiban profesional kita untuk memberikan jawaban yang valid atas pertanyaan tentang efektivitas

perawatan, praktik, dan program. Hal itu didukung oleh argumen statistik yang menjadikan eksperimen acak sebagai metode yang lebih disukai untuk mengesampingkan penyebab alternatif dari hasil yang diamati.

Namun, dan seperti yang disebutkan dalam Kotak 6.20 di atas, cara eksperimen dilakukan dalam kehidupan nyata, termasuk kekurangan dan kelemahan yang terkait dengannya, menjadikan gagasan tentang 'keharusan moral' untuk melakukan RCT menjadi klaim yang berlebihan.

Aspek lain dari desain yang menjadi bagian dari diskusi tentang etika mencakup cara pengumpulan dan analisis data. Kode etik berkaitan dengan masalah persetujuan yang diinformasikan, privasi, dan kerahasiaan. Secara umum, titik awalnya adalah bahwa peneliti harus melakukan segalanya untuk menegakkan integritas profesional. Baru-baru ini, replikasi, yang terkait dengan penipuan ilmiah dan plagiarisme, juga ada dalam agenda etika.

Kesimpulan

Beralih dari (jenis) masalah penelitian ke (jenis) desain bukanlah 'pilihan bebas'. Mengingat 'spesifikasi' masalah penelitian dan peran teori, kriteria metodologis membantu menunjukkan desain mana yang dapat dan harus digunakan dan mana yang tidak boleh digunakan (atau setidaknya kurang diinginkan). Dengan kata lain, ada batasan metodologis yang diberlakukan pada proses pemilihan desain penelitian: desain ini bukanlah 'satu ukuran yang cocok untuk semua', atau 'semua ukuran bisa digunakan'. Beberapa panduan memang tepat. Panduan berarti memberikan saran dan merumuskan saran, berdasarkan penelitian sebelumnya dan buku pegangan serta buku teks (metodologis); panduan tidak berarti menginstruksikan peneliti bagaimana menangani berbagai hal dan apa yang harus dilakukan.

Jangan lupa untuk mengatur waktu dan saran yang cukup saat merancang dan/atau memilih desain proyek empiris. Jangan pernah melompat dari permasalahan penelitian ke pengumpulan data, dengan berpikir bahwa memilih orang yang akan diwawancarai, dokumen yang akan dianalisis, atau data yang akan diteliti sama dengan mengembangkan desain penelitian.

Bagaimana cara mengatasi batasan praktis? Jawabannya ada tiga:

Pertama, berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan desain terbaik (yang terpuji). *Kedua*, jika masih ada batasan praktis (misalnya finansial, administratif, waktu), seperti yang terkadang terjadi, pilihlah untuk menurunkan ambisi penelitian. Ketika ambisi awalnya adalah untuk memilah efek kausal dari prosedur baru dalam hukum perdata terhadap tingkat efisiensi dan kepuasan pihak-pihak yang terlibat, yang menempatkan 'atribusi' tepat di jantung penelitian, pilihlah untuk mengganti 'atribusi' dengan 'kontribusi'. Karena analisis atribusi menyiratkan desain yang kuat, analisis kontribusi dapat bekerja dengan desain yang kurang kuat, sementara sebagian mengompensasi 'hilangnya' 'validitas' dengan menggunakan teori yang kuat, yaitu teori yang didukung dan bukti penelitian dari repositori sebagai sumber informasi untuk mendukung temuan empiris dan untuk mengikuti metode eliminasi umum (GEM), di mana hipotesis bahwa intervensi dapat menjelaskan hasil, 'dihancurkan', yaitu

dikritik secara serius, sementara melakukan hal yang sama terhadap penjelasan yang bersaing. *Ketiga*, jika opsi ini secara praktis tidak mungkin, jangan lakukan penelitian.

BAB 6

METODE PENGUMPULAN DATA

6.1 UNIT ANALISIS, OPERASIONALISASI DAN KODE

Memikirkan tentang 'unit analisis' merupakan tugas penting dalam penelitian empiris; unit analisis meliputi individu, kelompok, keluarga, pejabat, organisasi, kotamadya, pengadilan, penjara, tetapi juga kontrak, surat wasiat, pedoman, protokol, dan putusan. Setelah unit analisis dipilih, pertanyaan berikutnya adalah: siapa (atau apa) yang ada dalam unit tersebut? Apakah semua pengadilan di suatu negara dipilih atau hanya sampel? Apakah sampel korban berusia di bawah 25 atau di atas 65 tahun, atau apakah seluruh spektrum demografi? Apakah semua dokumen yang ditemukan dalam register dan berkas tentang penipuan pengadaan merupakan unit analisis, atau sampel dari dokumen yang berusia kurang dari tiga tahun? Ketika populasi cukup besar, seseorang dapat bekerja dengan sampel.

Jika sampel dipilih secara acak dan metode pengumpulan data berkualitas tinggi digunakan, teknik statistik untuk menyimpulkan informasi tentang populasi yang lebih luas (statistik inferensial) dapat digunakan. Pengambilan sampel mungkin terlihat sederhana, tetapi 'mungkin merupakan bagian yang paling berantakan dari pekerjaan empiris inferensial'. Karena pengambilan sampel sangat terkait dengan analisis statistik data, dalam Bab 7 kita akan membahas lebih mendalam aspek (statistik) pengambilan sampel.

Sering kali rumit, dan juga sangat berantakan, adalah operasionalisasi konsep-konsep utama penelitian menjadi variabel-variabel yang dapat diukur. Konsep (juga dikenal sebagai konstruk) adalah properti atau karakteristik yang dapat digeneralisasi yang terkait dengan objek, peristiwa, atau orang. Konsep-konsep tersebut mungkin memiliki tingkat abstraksi yang berbeda dan (kadang-kadang) merupakan bagian dari teori-teori yang terlibat dalam proyek penelitian.

Beberapa konsep, seperti usia seseorang, bersifat tepat dan mudah dioperasionalkan, sementara konsep-konsep lain, seperti kepribadian seseorang, lebih abstrak dan sulit dioperasionalkan. Contoh pertama (usia) adalah konstruk satu dimensi, sedangkan yang kedua adalah konstruk multidimensi (yaitu terdiri dari beberapa dimensi yang mendasarinya). Dalam teori yang diuraikan dalam Bab 4, konsep seperti 'penyebaran inovasi', 'pemain berulang versus pemain tunggal', 'pencegahan' dan 'disonansi kognitif' bersifat multidimensi. Hal yang sama berlaku untuk konstruksi hukum seperti pengisian kesenjangan (dalam kontrak), kemitraan publik-swasta, hak asasi manusia, keadilan prosedural dan pelanggaran aturan.

Variabel adalah representasi konsep yang dapat diukur. Misalnya, kecerdasan seseorang sering diukur berdasarkan skor IQ-nya, yang merupakan indeks yang dihasilkan dari tes. Dalam hal ini, kecerdasan adalah konsepnya, dan skor IQ adalah variabelnya, yang diukur dengan menggunakan tes IQ. Variabel yang menjelaskan variabel lain disebut variabel independen, sedangkan variabel yang dijelaskan disebut variabel dependen. Kaitannya dengan teori akan terlihat jelas. Operasionalisasi adalah proses 'mengubah' konsep menjadi variabel yang dapat diukur. Dalam Kotak 6.1 disajikan contoh-contoh tentang cara

mengoperasionalkan.

Setelah operasionalisasi, keputusan tentang cara mengumpulkan data dan cara mengodekannya adalah langkah berikutnya. Kita mulai dengan proses pengodean:

Pengodean data adalah [tugas] dalam kajian empiris yang bersifat universal, tidak peduli apakah datanya kuantitatif atau kualitatif, dari mana hipotesis dan data berasal. Pengodean adalah proses menerjemahkan properti atau atribut dunia (variabel) ke dalam bentuk yang rentan terhadap analisis sistematis. Proses itu sendiri memerlukan, pertama, pengembangan skema yang tepat untuk memperhitungkan nilai-nilai setiap variabel dan, kedua, secara metodis dan fisik menetapkan semua unit nilai untuk setiap variabel.

Kode dapat didasarkan pada teori tetapi juga pada tema, topik, konsep, istilah atau kata kunci yang ditemukan dalam data. Memiliki kode saja tidak cukup; daftar kode ('perincian setiap variabel yang diminati beserta nilai-nilai setiap variabel, seperti variabel "jenis kelamin jaksa" dengan nilai-nilai: laki-laki dan perempuan') diperlukan tetapi, sekali lagi, tidak cukup. Alasannya sederhana: ELR hampir tidak akan pernah menangani hanya satu atau dua variabel. Untuk memungkinkan analisis data, para peneliti harus menetapkan semua unit studi nilai untuk setiap variabel. Itu berarti membuat buku kode untuk 'menyimpan skema dan informasi relevan lainnya dan untuk menentukan bagaimana mereka pada akhirnya akan memasukkan data mereka ke dalam paket perangkat lunak statistik sehingga mereka dapat menganalisisnya'.

Mari kita beralih ke tiga jenis data yang biasanya digunakan ELR: data tersimpan, data primer, dan Big Data.

6.2 DATA JENIS I

Data Tersimpan, Termasuk Data Register Dan Administratif

Data disimpan dalam gudang data yayasan sains nasional, universitas, organisasi penelitian, dan kantor statistik (nasional) serta organisasi lain, dan – terkadang – tersedia untuk analisis oleh komunitas ilmiah. Mengingat perhatian yang diberikan pada kebijakan Data Terbuka di Eropa dan AS, ketersediaannya mungkin akan meningkat. Data tersimpan telah dikumpulkan, dikodekan, dan dibersihkan. Peneliti menggunakan data ini tidak hanya untuk menjawab pertanyaan penelitian substantif, tetapi juga untuk replikasi penelitian, untuk mengetahui apakah temuan dan kesimpulan berlaku ketika kondisi yang berbeda, populasi yang berbeda atau periode waktu yang berbeda menjadi bagian dari penelitian. Terkadang peneliti terlibat dalam replikasi untuk meninjau kualitas data (analisis). Untuk penelitian hukum empiris, beberapa organisasi menyimpan data register yang relevan dan data dari sumber lain (seperti survei).

Salah satunya adalah kantor statistik (nasional). Statistik Belanda misalnya bertanggung jawab atas statistik yang akan digunakan dalam praktik, oleh para pembuat kebijakan dan untuk penelitian ilmiah. Informasi yang diterbitkan organisasi ini menggabungkan banyak

aspek masyarakat, dari indikator ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi dan harga konsumen hingga keputusan peradilan (putusan, jumlah korban, jumlah kejahatan), kesehatan dan partisipasi budaya. Yang paling penting adalah Basis Data Statistik Sosial (SSB), yang terdiri dari sejumlah register yang saling berhubungan, di mana data mikro demografi dan sosial ekonomi disertakan.

Selain itu, ada satelit SSB yang menjelaskan topik tertentu secara terperinci berdasarkan kombinasi register termasuk informasi tentang variabel dan yang berasal dari organisasi pemerintah dan organisasi lainnya. Contoh satelit adalah kejahatan dan keadilan, pembangunan ekonomi, tenaga kerja dan pengangguran, serta kesehatan. Karena informasi digabungkan selama beberapa tahun pada tingkat individu (yang anonim), orang dapat diikuti dari waktu ke waktu. Kementerian, kotamadya, pengadilan, dan aktor (hukum) lainnya biasanya juga mengumpulkan dan menyimpan data, meskipun data tersebut sering kali kurang tersedia.

Organisasi internasional seperti Bank Dunia, IMF, OECD, dan Eurostat juga mengumpulkan sejumlah besar data tentang topik yang relevan untuk ELR (misalnya kemitraan publik-swasta). Arsip data organisasi penelitian ilmu sosial menyimpan data survei (seperti survei opini, survei korban, survei perumahan dan kesehatan) dan data dari studi perilaku. Contohnya adalah DANS: Pengarsipan Data dan Layanan Jaringan Belanda, yang mempromosikan akses berkelanjutan ke data penelitian digital. DANS mendorong para peneliti untuk mengarsipkan dan menggunakan kembali data secara berkelanjutan, misalnya melalui sistem pengarsipan daring. Jenis arsip data lainnya adalah yang membahas topik-topik hukum seperti surat wasiat, kontrak, pedoman, putusan, dan peraturan, dll.

Fakultas Hukum Stanford memiliki beberapa. Salah satunya adalah Intellectual Property Litigation Clearinghouse. Alat daring gratis ini menyediakan data waktu nyata tentang litigasi kekayaan intelektual. Hasil usaha swasta dari lembaga kliring tersebut, LexMachina (LM), adalah perangkat lunak berbasis web dan layanan analisis data yang membuat kumpulan data terstruktur atau berlabel dari hakim, pengacara, pihak, dan paten yang diperoleh dari berkas perkara dan dokumen yang diperoleh dari sistem Akses Publik ke Catatan Elektronik Pengadilan, Sistem Informasi Dokumen Elektronik Komisi Perdagangan Internasional, dan Kantor Paten dan Merek Dagang. Semua sumber diproses oleh mesin pemrosesan bahasa alami, yang membersihkan data (misalnya membuat nama perkara dan pihak yang konsisten), mengkode atau mengklasifikasikannya, lalu menandainya untuk pencarian dan analisis melalui aplikasi web LM. Hal ini semakin mendekati Legal Big Data.

Contoh dari Belanda adalah basis data WODC untuk kasus-kasus neurolaw. Untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana ilmu saraf berperan dalam kasus hukum perdata Belanda, dari 1500 kasus yang telah diseleksi sebelumnya, sekitar 300 kasus, di mana informasi ilmu saraf berperan, telah dipilih untuk penyelidikan lebih lanjut. Basis data kasus hukum saraf ini diperluas setiap tahun.

Terakhir, ada basis data (organisasi penelitian) yang menyimpan data administratif dari organisasi pemerintah (yang aktif di bidang hukum, regulasi, kejahatan, dan keadilan). Contohnya adalah data dari kasus hukum (pidana) atau proses peradilan lainnya. Di Belanda,

WODC dari Kementerian Keamanan dan Kehakiman Belanda memiliki gudang data tentang rantai hukum pidana. Gudang data ini terdiri dari data dari berbagai organisasi, yang masing-masing beroperasi secara relatif otonom dan independen. Ini berarti bahwa setiap organisasi mendaftarkan data dengan caranya sendiri dan dalam sistem operasionalnya sendiri.

Basis data penting dari organisasi-organisasi ini adalah basis data nasional kepolisian Belanda (yang berisi informasi tentang laporan kejahatan dan tersangka), Layanan Kejaksaan Umum, yang berisi informasi tentang kasus-kasus peradilan, Badan Penjara, Badan Perlindungan dan Perawatan Anak, Petugas Masa Percobaan, dan Badan Penagihan Denda Pusat. Semua organisasi ini berisi data tentang individu dan tindakan mereka. Akan tetapi, sistem-sistem tersebut tidak dibangun dari perspektif yang sama, dan berbeda dalam banyak aspek lainnya.

KOTAK 6.1 DARI OPERASI YANG SEDERHANA KE YANG LEBIH KOMPLEKS

Contoh 1

Masalah penelitiannya adalah: apa yang menyebabkan masalah pertumbuhan anak-anak di negara X, wilayah Q? Hipotesisnya adalah: anak-anak di wilayah tersebut tidak cukup makan sayur (dan anak-anak yang makan sayur tumbuh lebih cepat). Untuk mempelajari hipotesis ini, konsep perlu dioperasionalkan. Apa yang dimaksud dengan anak-anak? Berapa usia mereka? Bagaimana pertumbuhan didefinisikan? Apakah itu berat badan, tinggi badan, pertumbuhan mental atau kekuatan? Apa yang dimaksud dengan cukup? Apa arti ungkapan 'lebih cepat'? Skala waktu apa yang akan digunakan untuk mengukurnya? Apa itu sayur? Ada lusinan (jenis) sayur, masing-masing mengandung kadar vitamin dan mineral yang berbeda. Apakah anak-anak diberi makan sayur mentah, atau dimasak?

Contoh 2

Masalah penelitiannya adalah: apakah lebih banyak dana Eropa untuk UKM (usaha kecil, menengah, dan mikro) dan lebih banyak organisasi 'perantara hubungan bisnis' yang disponsori pemerintah akan merangsang pendirian UKM dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di negara X, Y, dan Z?

Teorinya adalah bahwa pendanaan pemerintah melalui subsidi akan berfungsi sebagai dorongan bagi para pengusaha untuk merangsang mereka agar menjalankan bisnis mereka dan/atau meningkatkannya, sementara organisasi perantara hubungan bisnis akan membantu memberi tahu mereka tentang aturan, regulasi, peluang pasar, mitra, jaringan, dll., yang juga akan memberikan dorongan pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Operasionalisasi:

Apa itu UKM: apakah batasannya jelas dan dapatkah batasan tersebut diterapkan pada organisasi (kapan suatu organisasi termasuk kecil, menengah?). Kapan sesuatu menjadi dana pemerintah?: subsidi, kredit, pinjaman? Apakah semua jenis subsidi (tunai, barang) dan semua jenis kredit akan disertakan?

Kapan sesuatu menjadi perantara hubungan bisnis: apakah batasan antara firma konsultan umum dan organisasi perantara yang terfokus 'klip und klar'? Dapatkah pedagang tunggal bertindak sebagai perantara hubungan bisnis? Apakah ada pendaftaran kriteria dan karakteristik perantara ini?

Apa itu pertumbuhan ekonomi? Apa itu penciptaan lapangan kerja?

Contoh 3

Masalah penelitiannya adalah: 'studi sebelumnya tentang kompleksitas kontrak menggunakan ukuran objektif seperti jumlah halaman, jumlah kilobyte, atau jumlah ketentuan untuk mengukur kompleksitas ini. Kami berpendapat bahwa tingkat di mana kontrak membebani beban kognitif pada pihak-pihak kontrak harus dianggap sebagai dimensi penting lain dari kompleksitas kontrak'. Masalah penelitian adalah sejauh mana ukuran objektif kuantitatif dari kompleksitas (misalnya panjang), elemen objektif dari beban kognitif (misalnya waktu mengerjakan tugas) dan elemen subjektif dari beban kognitif (misalnya upaya mental) mengukur berbagai aspek kompleksitas kontraktual.

Teori: Hagedoorn dan Heslen (2009) mengembangkan 'sebuah model konseptual dari kompleksitas kontrak menggunakan perspektif multidimensi di mana dimensi objektif dan subjektif diperhitungkan. Analisis empiris kami menggabungkan sampel dari hampir 400 kontrak aliansi R&D dalam industri biofarmasi dengan pengukuran beban kognitif dari kontrak-kontrak ini.

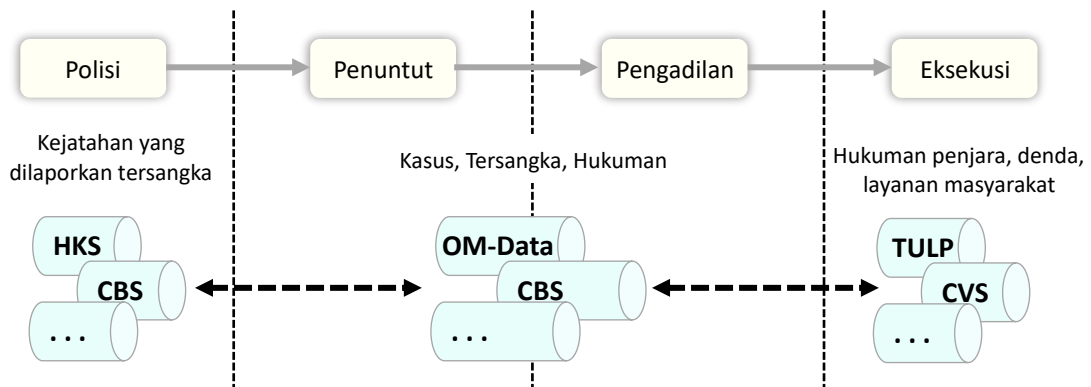
Operasionalisasi:

Pertama, ukuran kompleksitas kontraktual yang terkenal digunakan (kilobyte, jumlah kata dan jumlah halaman). Para penulis juga mengembangkan kuesioner untuk studi percontohan dengan lima pertanyaan berdasarkan item yang divalidasi dan banyak digunakan yang ditemukan dalam literatur beban kognitif. Beban kognitif meliputi beban mental, upaya mental dan kinerja. Misalnya: sebagai ukuran subjektif tidak langsung, para peserta (dari studi percontohan) diminta untuk melaporkan upaya mental yang diperlukan untuk memahami materi, yang diadopsi dari skala yang sudah ada. Pengukuran tingkat stres yang dialami diadopsi dari Subjective Workload Assessment Technique (SWAT) dan National Aeronautics and Space Administration – Task Load Index (NASA-TLX). Dalam penelitian beban kognitif, skala Likert tujuh poin sering digunakan untuk mengukur upaya mental yang diperlukan dan tingkat kesulitan materi.

KOTAK 6.2 DATA PEMERINTAH TERBUKA (OGD)

Data Pemerintah Terbuka (OGD) tergolong relatif baru. Konsep ini merujuk pada data yang dipublikasikan pemerintah secara aktif di internet untuk penggunaan publik dan yang dapat dinilai tanpa batasan dan digunakan tanpa pembayaran. Uni Eropa menggunakan istilah 'Informasi Sektor Publik' untuk merujuk pada OGD. Semakin banyak pemerintah yang memulai pengembangan dan implementasi infrastruktur OGD.

Membuat kombinasi, melacak orang dan/atau kasus melalui rantai hukum pidana, menganalisis beban kasus dan waktu yang telah berlalu, memeriksa 'kasus (dan orang) yang hilang' dan banyak topik lainnya tidak mungkin dipelajari, jika tidak ada gudang data – tempat penyimpanan data terpusat yang dikumpulkan dari berbagai sumber ini. Data ini disimpan dan disusun sedemikian rupa sehingga memudahkan pencarian dan pelaporan. Ini menyediakan model data yang seragam untuk semua data terlepas dari sumbernya. Kotak 6.3 memberikan contoh studi yang dimungkinkan melalui gudang data ini.

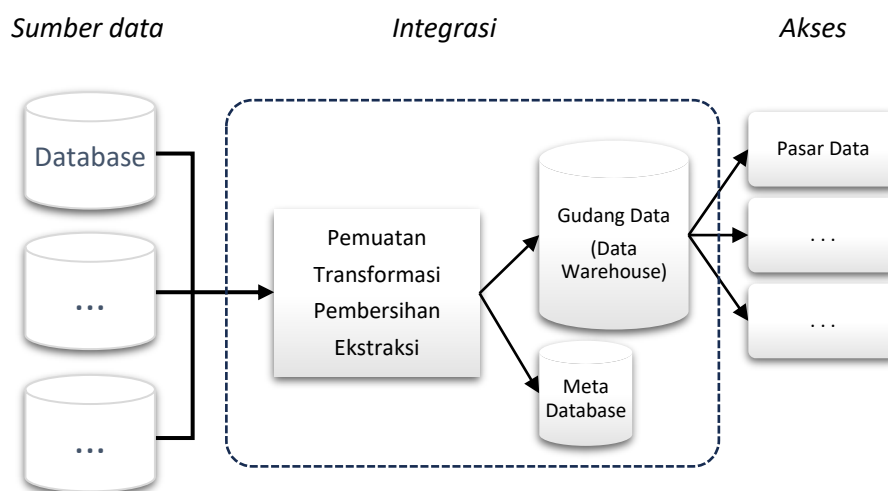


Gambar 6.1 Contoh basis data dalam rantai hukum pidana Belanda

KOTAK 6.3 TENTANG KURVA KEJAHATAN BERDASARKAN USIA YANG MENYIMPANG PADA POPULASI AFRIKA-KARIBIA. KASUS WARGA ANTILLIA YANG TINGGAL DI BELANDA.

Jennissen menyelidiki sejauh mana kurva kejahatan berdasarkan usia 'konvensional' (dicirikan oleh angka kejahatan yang meningkat pesat selama masa pubertas, yang mencapai puncaknya pada akhir masa remaja dan awal masa dewasa tetapi kemudian turun ke tingkat yang relatif sangat rendah bagi orang-orang di usia paruh baya) juga berlaku untuk warga Antillen, Maroko, Turki, Suriname, dan orang-orang keturunan asli Belanda. Untuk penelitian ini, penulis menggunakan basis data nasional kepolisian Belanda untuk menyusun kurva kejahatan berdasarkan usia.

Data ini digabungkan secara perorangan dengan SSB (Basis Data Statistik Sosial, Statistik Belanda; anonim). Sebagian besar desain studi kohort diterapkan (lihat Bab 5). Studi tersebut menemukan bahwa angka kejahatan di antara warga Antillen (penduduk dari pulau-pulau di Laut Karibia) yang tinggal di negara Eropa Belanda tetap tinggi untuk pelaku kejahatan berusia dua puluhan dan tiga puluhan, tidak seperti kelompok etnis besar lainnya yang tinggal di Belanda. Penelitian tersebut mencakup analisis kuantitatif data mengenai orang-orang yang terdaftar sebagai pelaku kejahatan di Belanda. Studi ini menemukan indikasi bahwa tingginya tingkat keluarga yang berantakan mungkin terkait dengan tingkat pelaku kejahatan yang relatif tinggi di antara pria dewasa Antillen yang berusia hingga sekitar 45 tahun.



Gambar 6.2 Tinjauan umum pendekatan gudang data

Laboratorium Data Kehakiman (JDL) Kementerian Kehakiman Inggris sampai batas tertentu setara dengan gudang data WODC. JDL bekerja dengan kumpulan besar data administratif pemerintah. JDL telah 'sampai September 2014 memberikan 117 analisis kepada badan amal, perusahaan sosial, organisasi sektor publik dan swasta di Inggris dan Wales'

Semua contoh ini sebagian besar berkaitan dengan catatan publik. Ada juga dokumen pribadi. Dokumen-dokumen ini: kisah orang pertama tentang peristiwa dan pengalaman adalah 'dokumen kehidupan' dan mencakup buku harian, portofolio, foto, karya seni, jadwal, lembar memo, puisi, surat kepada surat kabar, dll. Tidak seperti sumber data kualitatif lainnya, pengumpulan data dari dokumen relatif tidak terlihat oleh, dan memerlukan kerja sama minimal dari, orang-orang dalam lingkungan yang sedang dipelajari. Informasi dari dokumen juga dapat digunakan untuk membuat pertanyaan wawancara atau mengidentifikasi peristiwa yang akan diamati.

6.3 DATA JENIS II

Data Primer ('Baru') Dan Metode

Metode pengumpulan data dapat berupa kuantitatif atau kualitatif, obtrusif atau tidak obtrusif, dan multi-metode dan multi-sumber. Dalam studi kualitatif, data biasanya dikumpulkan melalui empat metode utama, yang digunakan secara individual atau dalam kombinasi: observasi, wawancara, analisis dokumen, dan analisis film, gambar, audio, dan sumber (internet) (lainnya). Seperti yang dijelaskan Webley (2010), 'data dapat memiliki sejumlah bentuk. Data dapat mencakup catatan yang dibuat oleh peneliti yang memberikan deskripsi terperinci tentang apa, di mana, dan bagaimana orang melakukan apa yang mereka lakukan, interaksi mereka, proses, atau deskripsi observasi peneliti terhadap sumber berbasis teks, suara, video atau gambar, transkrip rapat, dll.'. Kelompok fokus merupakan bagian dari perangkat tersebut. Metode kuantitatif melibatkan penggunaan pengukuran numerik: data kuantitatif adalah data dalam bentuk angka.

Pengumpulan data obtrusif adalah pengumpulan data di mana peneliti menunjukkan

kehadirannya dengan jelas kepada partisipan; partisipan tahu bahwa mereka adalah bagian dari sebuah studi; mereka tahu bahwa mereka akan ditanyai pertanyaan, bereaksi terhadap sketsa, mengirimkan kembali amplop (dalam survei pos) atau menjawab kuesioner yang dibantu komputer secara daring. Peneliti mengajukan pertanyaan tentang sikap terhadap sanksi pidana baru, yang lain ingin tahu apa pendapat Anda tentang undang-undang pengungsi yang berlaku, atau menanyakan berapa penghasilan Anda saat ini (atau kapan Anda berencana untuk menyelesaikan gelar doktor Anda). Karena orang berbohong dan menipu (apa pun alasannya) dan lupa (karena mereka terkadang menjadi 'manajer waktu' yang ceroboh), tidak ada kepastian apriori tentang tingkat kebenaran pernyataan mereka, yaitu sejauh mana mereka mengungkapkan apa yang 'sebenarnya' dipikirkan, diyakini, direncanakan, dan dilakukan orang tersebut.

Pengumpulan data yang tidak mencolok kurang lebih kebalikannya; responden atau 'unit analisis' tidak tahu (atau melihat atau mengalami) bahwa mereka atau perilaku mereka, atau konsekuensi dari perilaku mereka, diukur. Pengukuran yang tidak mencolok adalah pengukuran yang tidak mengharuskan peneliti untuk mengganggu konteks penelitian (dari 'responden').

Pengukuran tersebut tersembunyi, dan sering kali tidak mencolok. Alih-alih menanyakan apa yang diminum orang-orang selama pesta, pendekatan yang tidak mencolok akan mengumpulkan kaleng dan botol kosong dari tempat pembuangan sampah (atau kebun) yang relevan, menghitung jumlah mereka (dan jumlah pengunjung pesta) dan menganalisis merek dan label. Ada contoh lain: untuk memastikan popularitas jurnal di ruang tunggu di rumah sakit, seseorang dapat mengamati keausannya. Loket masuk di supermarket memberikan bukti dari sisi mana pelanggan datang. Kamera tersembunyi dapat menunjukkan perilaku konsumen di toko.

Sementara beberapa dekade lalu dalam ilmu sosial, perang paradigma terjadi antara penganut 'aliran' kualitatif atau kuantitatif, 'perang' ini sekarang kurang lebih telah menghilang. Salah satu, jika bukan yang paling penting, alasan adalah bahwa para peneliti 'dari kedua belah pihak' telah mencapai kesimpulan bahwa penelitian multi-metode dan multi-sumber sering kali lebih tepat daripada studi metode tunggal. Nanti kita akan kembali ke sini, termasuk diskusi singkat tentang apa yang dimaksud dengan kata kunci 'triangulasi'. Kita mulai dengan metode yang lazimnya mengganggu, kemudian membahas metode yang lazimnya tidak mengganggu, dan kita akhiri dengan metode yang, bergantung pada cara pengoperasiannya, dapat bersifat mengganggu atau tidak mengganggu.

KOTAK 6.4 METODE PENGUMPULAN DATA YANG MENONJOL

Survei (menggunakan kuesioner)

Survei merupakan bentuk pengumpulan data yang populer, terutama saat mengumpulkan informasi dari kelompok yang lebih besar, di mana standarisasi penting. Survei dapat disusun dengan berbagai cara, tetapi selalu terdiri dari dua komponen: pertanyaan dan respons. Standarisasi diwujudkan dengan menggunakan wawancara terstruktur.

Ada berbagai jenis survei: survei tatap muka, telepon, kertas, pensil, dan daring. Survei biasanya berfokus pada situasi aktual, tetapi survei pertanyaan hipotetis juga digunakan. Kemudian, responden dihadapkan dengan informasi tentang langkah-langkah kebijakan, pengaturan hukum, atau produk/perangkat yang (belum) ada. Terkadang proses pengambilan keputusan responden diikuti dan dicatat dengan menanyakan apakah dan sejauh mana perilaku mereka akan berubah, akan berubah, atau tidak akan berubah, jika intervensi (hukum) Y telah dilaksanakan (atau pengaturan hukum P disediakan).

Contohnya adalah studi Thompson dan Appelbaum (1974) tentang penerimaan sosial terhadap kebijakan kependudukan. Terkait dengan survei pertanyaan hipotetis adalah 'survei preferensi yang dinyatakan', survei 'kesediaan untuk membayar (dan menerima)', dan 'survei sketsa'. Deskripsi singkat tentang situasi atau orang (sketsa) diperlihatkan kepada responden untuk memperoleh pendapat/penilaian atau niat (perilaku) mereka. Wawancara (mendalam)

Dalam sebuah penelitian oleh Wijkhuis dkk (2011), 'peraturan pengampunan', yang mulai berlaku di Belanda pada tahun 2007, dan berarti bahwa izin tinggal akan secara resmi diberikan kepada kelompok pencari suaka yang dibatasi, dievaluasi dalam hal penerimaan sosial dan dampaknya. Wawancara mendalam dilakukan dengan 59 responden. Dalam evaluasi lain (dari upacara naturalisasi Belanda) sekitar 45 wawancara mendalam dilakukan.

Terkadang wawancara mendalam dilakukan dengan (hanya) informan kunci.

Metode kelompok fokus

Kelompok fokus adalah bentuk wawancara kelompok yang memanfaatkan komunikasi antara peserta penelitian untuk menghasilkan data. Meskipun wawancara kelompok sering digunakan sebagai cara yang cepat dan mudah untuk mengumpulkan data dari beberapa orang secara bersamaan, kelompok fokus secara eksplisit menggunakan interaksi kelompok sebagai bagian dari metode tersebut. Artinya, alih-alih peneliti meminta setiap orang untuk menjawab pertanyaan secara bergiliran, orang-orang didorong untuk berbicara satu sama lain: mengajukan pertanyaan, bertukar cerita anekdot, dan mengomentari pengalaman serta sudut pandang satu sama lain.

Kromhout dan van San (2003) mempelajari masalah apakah kelompok etnis di Belanda, selain 'empat besar', merupakan kelompok yang paling banyak melakukan kejahatan remaja, dengan tujuan untuk mengetahui apakah diperlukan tindakan pencegahan. Penelitian ini melibatkan remaja berusia 12 hingga 17 tahun dan dewasa muda berusia 18 hingga 24 tahun dan terbatas pada anggota generasi pertama dari kelompok etnis minoritas (Barat dan non-Barat). Di samping data kuantitatif, 10 pertemuan kelompok fokus

diselenggarakan yang melibatkan 77 profesional yang pekerjaannya sehari-harinya membawa mereka berhubungan dengan remaja dari berbagai kelompok etnis.

Metode Delphi

Metode ini awalnya dikembangkan sebagai metode peramalan interaktif yang mengandalkan panel pakar. Para pakar menjawab kuesioner dalam dua putaran atau lebih. Setelah setiap putaran, seorang fasilitator memberikan ringkasan anonim dari ramalan para pakar dari putaran sebelumnya serta alasan yang mereka berikan untuk penilaian mereka. Para pakar didorong untuk merevisi jawaban mereka sebelumnya berdasarkan tanggapan dari anggota lain. Dipercaya bahwa selama proses ini rentang jawaban akan berkurang dan kelompok akan berkumpul menuju jawaban yang 'benar'. Akhirnya, proses berakhir setelah kriteria berhenti yang telah ditentukan sebelumnya (misalnya jumlah putaran, pencapaian konsensus, stabilitas hasil). Selama bertahun-tahun metode ini telah diterapkan untuk lebih dari sekadar peramalan dan juga digunakan dalam studi evaluasi dan survei secara umum.

Skala pengukuran

Skala Guttman, Thurston, dan Likert mengukur sikap, opini, niat berperilaku, dan perilaku yang dilaporkan. Proyek penelitian 'Dinilai oleh populasi umum: Sebuah studi tentang preferensi hukuman di Belanda' oleh Ruiters dkk (2011) menggunakan beberapa skala. Proyek ini mempelajari bagaimana masyarakat Belanda, jika diberi kesempatan, akan menghukum pelaku berbagai jenis kejahatan. Salah satu skala yang digunakan adalah skala 'Algemene Bezorgdheid Criminaliteit (ABC)' (skala tentang kekhawatiran umum tentang kejahatan).

KOTAK 6.5 PERANGKAT DAN PERANGKAT LUNAK UNTUK MEMBANTU MENCATAT, MENSISTEMATISASI DAN MENGANALISIS ISI

Beberapa perangkat teknis/digital tersedia (sering kali dengan biaya rendah) untuk digunakan saat melakukan wawancara. Contohnya adalah ethnocorder yang memiliki lebih dari 20 jenis elemen multimedia yang dapat digunakan dalam pertanyaan atau tanggapan termasuk mikrofon internal iPhone, kamera, dan perekam video. Program perangkat lunak mengkategorikan dan menganalisis data yang berasal dari wawancara (kualitatif)

Kerugian dari metode yang berorientasi pada wawancara atau kuesioner adalah bahwa orang yang diwawancarai atau peserta (dalam kelompok fokus) dapat mendistorsi informasi melalui kesalahan mengingat, persepsi selektif, keinginan untuk menyenangkan pewawancara atau hanya karena mereka merasa 'perlu' untuk memberikan jawaban, tetapi tidak tahu benar dari yang salah. Studi laporan diri dapat menyebabkan pelaporan yang bias. Proses seleksi tentang siapa yang berpartisipasi dalam kelompok fokus dan/atau survei sangat penting,

seperti halnya dinamika kelompok, karena dapat mendistorsi validitas temuan.

Mengenai penggunaan skala pengukuran, NSF (2002) melihat penyediaan informasi objektif tentang apa yang diketahui dan dapat dilakukan oleh peserta tes sebagai hal yang menguntungkan; mereka (biasanya) dapat dinilai dengan cara yang lugas dan sebagian besar diterima oleh publik sebagai indikator yang kredibel. Kerugiannya adalah bahwa tes tersebut mungkin terlalu disederhanakan dan dangkal; mereka juga dapat memakan waktu dan mungkin bias terhadap beberapa kelompok peserta tes. Kotak 6.5 menyebutkan perangkat dan program perangkat lunak yang membantu merekam dan mensistematisasikan data yang dikumpulkan dalam wawancara (mendalam) dan kelompok fokus.

Bentuk pengumpulan data yang dilembagakan seperti dengar pendapat publik, komisi kebenaran, dan penyelidikan parlemen juga memiliki sifat yang berbeda. Dengar pendapat publik sering kali merupakan pertemuan formal untuk menerima kesaksian tentang tindakan (pemerintah) yang diusulkan, seperti undang-undang. Kesaksian biasanya direkam untuk catatan publik, dan laporan yang merangkum poin-poin utama dibuat. Terkadang dengar pendapat dilakukan di depan pengadilan. Dengar pendapat publik juga bisa kurang formal. Rowe dan Frewer (2000) memberikan gambaran umum tentang pendekatan dan batasan serta peluangnya.

Sering kali, dengar pendapat publik diterapkan bersamaan dengan jenis pengumpulan data lainnya, seperti panel ahli dan tinjauan penelitian sistematis. Contoh menarik tentang pelibatan publik adalah cara Akademi Nasional bekerja dengan 'Pertemuan Komite' mereka. Mengumpulkan informasi melalui - antara lain - pertemuan yang diumumkan terlebih dahulu melalui situs web Akademi Nasional Sesuai dengan hukum federal dan dengan beberapa pengecualian, pertemuan komite [ini] terbuka untuk umum, dan semua materi tertulis yang diberikan kepada komite oleh individu yang bukan pejabat, agen, atau karyawan Akademi Nasional disimpan dalam berkas akses publik yang tersedia untuk diperiksa.

Komisi kebenaran telah menjadi komponen umum kebijakan pascakonflik di seluruh dunia. Gonzalez dkk (2014) menyajikan data sekitar 30 komisi kebenaran yang dibentuk selama periode kurang dari 30 tahun, sementara Sirleaf (2014), melihat periode sejarah yang lebih panjang, menemukan hampir 70. Ia mendefinisikan komisi kebenaran sebagai:

badan non-yudisial yang disetujui secara resmi yang diorganisasi untuk waktu terbatas. Mereka biasanya dibentuk pada masa transisi untuk tujuan khusus, yakni mengkaji pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Mereka bertujuan untuk mencapai tujuan keadilan restoratif dengan menggabungkan unsur-unsur pencarian kebenaran publik, konfrontasi antara korban dan pelaku, permintaan maaf publik, dan pencatatan sejarah.

KOTAK 6.6 METODE PENGUMPULAN DATA YANG TIDAK MENYINGGUNG

Lensa baca

Lensa baca digunakan saat dokumen dianalisis. Salah satu contohnya adalah analisis

dampak ilmu saraf pada keputusan Mahkamah Agung tentang kesalahan remaja dengan menerapkan analisis isi keputusan. Untuk Belanda, Kogel dan Westgeest (2015) melakukan sesuatu yang terkait: 'Untuk menilai bagaimana informasi genetika neurosains dan perilaku digunakan dalam praktik peradilan pidana di Belanda, kami secara sistematis mengumpulkan kasus pidana Belanda yang memasukkan informasi genetika neurosains atau perilaku. Meskipun kasusnya beragam, beberapa tema muncul, seperti kerusakan otak prefrontal dalam kaitannya dengan tanggung jawab pidana dan risiko residivisme, dan pandangan yang berbeda tentang implikasi pengetahuan neurobiologis tentang kecanduan untuk menilai tanggung jawab pidana'. Contoh lain adalah meta-evaluasi dan sintesis Klein Haarhuis dan Niemeijer (2009) terhadap 59 evaluasi (dampak) hukum Belanda. Mereka menerapkan lensa baca untuk mengkategorikan dan menganalisis konten evaluasi legislatif. Salah satu tugas mereka adalah mengkategorikan jenis intervensi kebijakan, mekanisme yang mendasarinya, dan hasil evaluasi.

Tamu misterius

Ada sejarah panjang penggunaan tamu misterius dalam penelitian (terapan), studi evaluasi, pemasaran, dan audit. Mungkin salah satu studi tertua yang menggunakan dan mendeskripsikan tamu misterius secara sistematis adalah LaPiere (1934). Ia bepergian ke AS bersama seorang 'mahasiswa muda Tiongkok dan istrinya. Keduanya ramah, menawan, cepat memenangkan kekaguman dan rasa hormat dari orang-orang yang berkesempatan untuk menjadi akrab dengan mereka'. Mereka mendatangi 67 hotel, perkemahan mobil, dan rumah turis untuk mencari akomodasi dan makan di 184 restoran dan kafe. LaPiere menyimpan catatan terperinci tentang tanggapan petugas hotel, pelayan, operator lift, dan pelayan wanita terhadap kehadiran pasangan Tionghoa tersebut. Agar reaksi tidak berubah secara tidak wajar karena kehadirannya, LaPiere sering membiarkan pasangan Tionghoa tersebut mengamankan kamar atau akomodasi lainnya sementara ia mengurus barang bawaan, dan bila memungkinkan ia mengizinkan mereka memasuki restoran sebelum dirinya.

Selanjutnya, LaPiere mengirimkan kuesioner ke semua tempat usaha yang telah mereka kunjungi. Ia memberikan jeda waktu enam bulan antara kunjungan sebenarnya dan pengiriman kuesioner, untuk mengurangi dampak kunjungan pasangan Tionghoa tersebut. Pertanyaan yang paling menarik dalam kuesioner tersebut adalah, 'Apakah Anda akan menerima anggota ras Tionghoa sebagai tamu di tempat usaha Anda?' Kuesioner ini dikembalikan oleh 81 restoran dan kafe serta 47 tempat usaha penginapan. Ini merupakan tingkat respons sebesar 51%. Untuk memastikan bahwa respons kuesioner tidak secara langsung dipengaruhi oleh kunjungan pasangan Tionghoa tersebut, LaPiere juga memperoleh respons terhadap kuesioner yang sama dari 32 hotel dan 96 restoran yang berlokasi di wilayah yang sama di negara tersebut, tetapi tidak dikunjungi oleh para pelancong.

Setelah hampir tiga tahun, LaPiere memiliki data yang diperlukan untuk membuat

perbandingan antara sikap sosial dengan perilaku sosial. Kesimpulannya adalah bahwa 'hampir semua (lebih dari 90%) hotel, tempat perkemahan, rumah wisata, restoran, dan kafe yang dikunjungi oleh LaPiere dan pasangan Tionghoa tersebut menjawab bahwa mereka tidak akan melayani orang Tionghoa. Selain itu, distribusi respons dari tempat-tempat yang tidak dikunjungi hampir sama, yang menunjukkan bahwa temuan tersebut tidak disebabkan oleh kunjungan terakhir para pelancong'. Kesimpulan: antara perilaku, sikap (dan niat berperilaku) terdapat perbedaan yang serius.

Selama bertahun-tahun, metode tamu misterius (pasien simulasi, pelanggan semu, dan pembeli pengganti) telah menjadi populer. Keuntungan penting dari belanja misteri adalah bahwa tamu misterius terlatih dengan baik dalam pengamatan, mengetahui proses organisasi atau situasi dan hanya memiliki satu aktivitas untuk dilakukan: berperilaku (dengan cara tertentu).

Metode pengukuran produk perilaku manusia yang dapat ditemukan di tempat dan situasi di mana 'produsen' tidak tahu bahwa data akan dikumpulkan

Ort et al (2014) memberikan contoh: mengukur ukuran penggunaan obat terlarang di wilayah geografis tertentu dengan analisis air limbah (WWA). 'Penggunaan obat terlarang adalah aktivitas terselubung dan tersembunyi yang menghadirkan tantangan metodologis untuk sistem pengawasan obat terlarang. Metode survei berbasis kuesioner secara tradisional telah menjadi komponen penting dari pendekatan yang digunakan untuk memantau penggunaan obat terlarang, tetapi diakui bahwa metode ini tidak cukup untuk memantau tren penggunaan obat terlarang secara memadai dan cepat, dan memerlukan data pelengkap dari sumber lain. Analisis produk ekskresi obat terlarang dalam air limbah [WWA] telah dieksplorasi sejak 2008 sebagai pendekatan tambahan untuk memperkirakan penggunaan obat terlarang di wilayah tertentu, yaitu daerah tangkapan air dari pabrik pengolahan air limbah. Meskipun pendekatan tersebut tidak dapat memberikan informasi tentang perilaku pengguna tunggal dan demografi mereka, ada sejumlah cara di mana WWA dapat melengkapi metode survei lainnya dan memberikan informasi tambahan untuk memahami situasi obat terlarang dengan lebih jelas.

Data air limbah dapat diperoleh dalam jangka waktu yang singkat, tidak rentan terhadap bias respons, dan dapat membantu mengidentifikasi spektrum obat terlarang yang digunakan oleh suatu populasi. Studi air limbah di berbagai negara juga telah mendeteksi variasi regional dalam penggunaan obat terlarang. Pengaruh urbanisasi terhadap penggunaan obat terlarang dievaluasi di Oregon (AS) dan Australia Selatan serta Queensland (Australia), yang menyimpulkan bahwa penggunaan obat terlarang lebih tinggi di wilayah perkotaan dibandingkan dengan wilayah yang lebih pedesaan. Analisis air limbah juga telah diterapkan untuk mendeteksi perbedaan transnasional dalam penggunaan obat terlarang. Konsumsi lima zat dievaluasi dengan menganalisis air limbah dari 19 kota di Eropa selama periode 1 minggu pada tahun 2011.

Seringkali wawancara merupakan jenis pengumpulan data yang penting, tetapi data register juga digunakan. Sirleaf (2014) melaporkan masalah kredibilitas komisi kebenaran, termasuk cara pernyataan dicatat. Dalam sebuah studi terhadap 88 parlemen di seluruh dunia, Yamamoto (2007) menyajikan contoh alat yang digunakan oleh berbagai parlemen untuk mengawasi pemerintahan mereka.

Salah satunya adalah penyelidikan parlemen. Ini dibentuk 'untuk memeriksa aspek positif dan negatif dari kebijakan tertentu dan untuk mengejar tanggung jawab pejabat yang bertanggung jawab'. Tujuh puluh enam dari 88 parlemen yang disurvei oleh Yamamoto (2007) memiliki prosedur untuk komite penyelidikan ini. Sidang di bawah sumpah merupakan salah satu karakteristik (beberapa) komite ini, tetapi metode lain juga diterapkan (seperti mengelola survei pendapat dan pengalaman, panel ahli, dan tinjauan pustaka).

Tindakan yang tidak mencolok adalah tindakan yang tidak mengharuskan peneliti untuk ikut campur dalam konteks penelitian. Ada juga metode pengumpulan data yang dapat digunakan dengan cara tidak mencolok atau mencolok.

KOTAK 6.7 METODE PENGUMPULAN DATA YANG AKAN DIGUNAKAN SECARA MENYINGGUNG ATAU TIDAK MENYINGGUNG

Metode observasi

Contohnya adalah panduan observasi, daftar periksa, dan lembar pencatatan. Eekelaar, Maclean, dan Beinart (2000) mempelajari 'pekerjaan pengacara dalam kasus perceraian di Inggris dan Wales. Mereka mengamati 10 pengacara tingkat mitra saat bekerja selama sehari (total observasi 14 hari karena 2 peneliti mengamati beberapa pengacara), mencatat apa yang dilakukan pengacara dalam istilah deskriptif'.

FaceReader™ adalah perangkat lunak untuk menganalisis enam ekspresi wajah dasar: senang, sedih, takut, jijik, terkejut, dan marah. Selain itu, perangkat lunak melacak orientasi kepala, memungkinkan pelacakan orientasi 3D kepala, mengklasifikasikan mulut terbuka-tertutup, mata terbuka-tertutup, dan alis terangkat-netral-turun.

Metode neurobiologis: teknik pencitraan, instrumen neuropsikologis dan fisiologis

Biodata dikumpulkan dalam studi yang meneliti aspek biologis, neurologis, dan psikologis dari agresi dan perilaku antisosial yang terus-menerus serta dalam studi tentang hukum saraf. Mereka menggunakan pengukuran neurobiologis dasar (termasuk penilaian neuropsikologis (seperti Tes Pembuatan Jejak, tugas Pembatalan D2, tes kelancaran verbal, Tugas Perjudian Iowa, tes Stroop-Color-Word, dan tugas Stop-it) dan penilaian denyut jantung istirahat) dan pengukuran neurobiologis yang lebih kompleks (termasuk pengukuran fisiologis hormon seperti kortisol atau oksitosin dan teknik pencitraan otak ((f)MRI) dan pemindaian hewan peliharaan).

Data berbasis sensor, pemantauan jarak jauh, dan webometrik

Karena digitalisasi kehidupan, lebih banyak kemungkinan untuk pengumpulan data yang

tidak mencolok dan mencolok telah tersedia. Miller (2012) menerbitkan 'Manifesto Psikologi Ponsel Cerdas' dan salah satu poinnya adalah ini: 'Pada tahun 2025, lebih dari 5 miliar orang di planet kita akan menggunakan ponsel cerdas ultra-broadband dan kaya sensor yang jauh melampaui kemampuan iPhone, Android, dan Blackberry. Meskipun telepon pintar tidak dirancang untuk penelitian psikologis, telepon pintar dapat mengumpulkan sejumlah besar data yang valid secara ekologis, dengan mudah dan cepat, dari sampel global yang besar. Jika peserta mengunduh "aplikasi psikologi" yang tepat, telepon pintar dapat merekam di mana mereka berada, apa yang mereka lakukan, dan apa yang dapat mereka lihat dan dengar, serta dapat menjalankan survei, tes, dan eksperimen interaktif melalui layar sentuh dan koneksi nirkabel ke layar, headset, biosensor, dan periferal lain di dekatnya. Jenis pengumpulan data ini memiliki dan akan memiliki konsekuensi langsung bagi pengumpulan data di banyak bidang studi, termasuk ELR.

Bail (2015) memperkenalkan aplikasi survei media sosial (SMSA) yang 'menggabungkan metode ilmu sosial komputasional dengan teknik survei konvensional untuk memungkinkan analisis perilaku kolektif yang lebih komprehensif secara daring. Meskipun sebagian besar aplikasi dirancang untuk meningkatkan kenyamanan teknologi komputasi – sering kali melalui teknologi seluler – saya berpendapat bahwa teknologi aplikasi juga menyediakan platform baru yang hebat untuk penelitian ilmu sosial. SMSA (1) memungkinkan peneliti untuk meminta izin untuk mengakses data publik dan nonpublik dari halaman media sosial suatu organisasi, (2) mensurvei organisasi-organisasi ini untuk mendapatkan data tambahan yang menarik bagi peneliti, dan (3) mengembalikan hasil analisis ilmiah kembali ke organisasi sebagai insentif bagi mereka untuk berbagi data dan berpartisipasi dalam penelitian ilmu sosial. Meskipun situs web media sosial seperti Facebook dan Twitter menyediakan sejumlah besar data kualitatif tentang organisasi dan perilaku kolektif, sumber data baru ini tidak memiliki informasi penting tentang konteks sosial yang lebih luas dari perilaku kolektif – atau melindunginya di balik batasan privasi yang ketat. Bekerja dengan SMSA dirancang untuk memecahkan kedua masalah tersebut.

Penurunan cepat dalam biaya perangkat perekaman audio dan video, kemampuan untuk mengirimkan informasi melalui internet, dan ketersediaan alat gratis atau berbiaya rendah seperti Google Earth memungkinkan organisasi untuk mendapatkan lebih banyak data mentah tentang apa yang sebenarnya terjadi di lapangan (misalnya di negara-negara berkembang) dan memahami data tersebut dengan menggunakan fitur anotasi dan berbagi dalam alat. Contoh dari jenis pemantauan jarak jauh ini adalah alat yang disebut FORMA (Forestry Monitoring for Action), yang dikembangkan oleh Center for Global Development dan pemerintah Denmark. Alat ini menggunakan citra satelit untuk menghasilkan peta deforestasi bulanan hingga skala yang sangat kecil.

Bidang penelitian webometrics (termasuk perawatan web) mencakup berbagai bentuk analisis tautan dan teks berbasis web. Studi Webometric telah mencakup analisis skala

besar terhadap situs jejaring sosial dan situs web sosial seperti Flickr, Twitter, dan YouTube, serta area web tradisional, seperti situs web universitas. Perusahaan ilmu data Belanda yang beroperasi secara internasional, Coosto, memiliki data yang tersedia sejak tahun 2009 dan seterusnya.

6.4 DATA JENIS III

Big Data

Big Data sangat terkait dengan data sensor dan webometrik. Dua pesan dari seorang sosiolog dan seorang pengacara memperkenalkan apa itu Big Data (Kotak 6.8).

KOTAK 6.8 DUA PESAN TENTANG BIG DATA

Pesan 1

Bail (2014) menerbitkan sebuah makalah tentang relevansi Big Data untuk meneliti budaya organisasi dan memulainya sebagai berikut: 'Lebih banyak data yang terkumpul pada tahun 2002 dibandingkan dengan semua tahun sebelumnya dalam sejarah manusia jika digabungkan. Pada tahun 2011, jumlah data yang terkumpul sebelum tahun 2002 dikumpulkan setiap dua hari. Pertumbuhan data yang dramatis ini mencakup hampir setiap bagian dari kehidupan kita, mulai dari pengurutan gen hingga perilaku konsumen. Meskipun sebagian besar data ini bersifat biner atau kuantitatif, data berbasis teks juga terkumpul dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Namun, ilmuwan sosial – dan khususnya sosiolog budaya – sebagian besar mengabaikan janji dari apa yang disebut Big Data'. Bail juga melaporkan bahwa 'munculnya Internet, media sosial, dan arsip sejarah digital telah menghasilkan sejumlah besar data berbasis teks dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun ilmuwan komputer telah menghasilkan perangkat baru yang canggih untuk analisis otomatis terhadap Big Data tersebut, mereka tidak memiliki arahan teoritis yang diperlukan untuk mengekstrak makna dari perangkat tersebut'.

Pesan 2

Zahorsky (2015) mengirimkan pesan berikut kepada rekan-rekannya: 'Para pengacara, berhati-hatilah: Analisis big data, seperti program yang memprediksi hasil penyelesaian dengan beberapa poin persentase, komputer yang secara universal menafsirkan dan memahami hukum negara bagian dan internasional, dan pesaing yang memberikan layanan hukum lebih cepat, murah, dan berhasil daripada kantor hukum konvensional, secara permanen mengubah lanskap hukum'.

Big Data terdiri dari log (panggilan), transaksi mobile-banking, konten yang dibuat

pengguna daring seperti posting blog, media sosial, aplikasi sensor dan pencarian daring serta citra satelit, termasuk data yang disimpan dalam email, weblog, intranet, ekstranet, dll. Karena dokumen (kertas) 'lama' seperti surat wasiat, kontrak, perjanjian dan materi kasus hukum lainnya, serta buku, surat kabar dan program TV, didigitalkan, semakin besar 'Big Data (hukum)' ini. Biasanya Big Data tidak dikumpulkan oleh peneliti tetapi dihasilkan oleh mesin, jaringan dan interaksi manusia pada sistem seperti media sosial. Mereka 'lahir digital'. Namun, Big Data juga dapat 'diproduksi' dengan digitalisasi materi yang ada seperti dokumen hukum, video, kaset audio, gambar, arsip, administrasi perusahaan dan laporan kesehatan.

Bail (2014) menjelaskan latar belakang perkembangan ini. Topik utamanya adalah bahwa sejumlah besar informasi berbasis teks tentang perilaku, sikap, aturan, lembaga, keputusan, dan emosi kini tersedia, yang sebelumnya tidak terpikirkan 20 tahun lalu:

Antara tahun 1995 dan 2008, jumlah situs web meningkat lebih dari 66 juta kali lipat, dan baru-baru ini melampaui 1 triliun. Meskipun sosiolog khawatir tentang kesenjangan digital di tahun-tahun sebelumnya, kesenjangan ini tampaknya terus menurun. Menurut survei tahun 2012, sekitar setengah dari semua orang Amerika mengunjungi situs media sosial seperti Facebook atau Twitter setiap hari, menghasilkan miliaran baris teks. Tren ini jauh lebih tinggi di kalangan orang muda, yang menunjukkan tren ini mungkin akan terus tumbuh seiring berjalannya waktu. Sebagian besar teks dari situs media sosial dapat diakses dengan mudah melalui program komputer sederhana. Namun, pertumbuhan data berbasis teks di Internet tidak terbatas pada situs media sosial. Teknologi screen-scraping dapat digunakan untuk mengekstrak informasi dari sejumlah situs Internet dalam jangka waktu yang hanya dibatasi oleh kapasitas penyimpanan digital.

Dan potensi untuk mengumpulkan data tersebut tidak hanya terkait dengan masa depan, tetapi juga masa lalu. Sejak 1996, Arsip Internet telah menyimpan semua teks dari hampir setiap situs web di Internet. Perkembangan data berbasis teks juga tidak terbatas pada Internet. Berkat teknologi digital baru dari berbagai bidang seperti ilmu perpustakaan dan komunikasi, sejumlah besar data kualitatif sedang diarsipkan. Google sendiri telah membuat salinan digital dari hampir setiap buku yang pernah ditulis bekerja sama dengan lebih dari 19 juta perpustakaan di seluruh dunia. Gudang data akademis seperti LEXIS-NEXIS atau ProQuest sekarang berisi salinan digital dari sebagian besar jurnal, surat kabar, dan majalah di dunia. Arsip Berita Televisi Vanderbilt berisi salinan dari sebagian besar siaran berita utama yang diproduksi sejak 1998. Sejumlah besar data berbasis teks yang menggambarkan debat legislatif, laporan pemerintah, dan wacana negara lainnya kini juga tersedia di situs web seperti Arsip Nasional Amerika Serikat dan Inggris Raya.

Data tentang negara-negara OECD tersedia dan menunjukkan tren serupa untuk banyak negara. Bagi negara berkembang, Buku Putih organisasi Global Pulse PBB 'Big Data untuk Pembangunan: Tantangan & Peluang' menggambarkan peningkatan spektakuler dalam penggunaan ponsel/ponsel pintar yang menghasilkan kumpulan data besar.

Penyebaran teknologi ponsel ke tangan miliaran orang selama dekade terakhir mungkin merupakan satu perubahan paling signifikan yang telah memengaruhi negara berkembang sejak gerakan dekolonisasi dan Revolusi Hijau. Di seluruh dunia, ada lebih dari lima miliar ponsel yang digunakan pada tahun 2010, dan dari jumlah tersebut, lebih dari 80% berada di negara berkembang. Di seluruh negara berkembang, ponsel secara rutin digunakan tidak hanya untuk komunikasi pribadi, tetapi juga untuk mentransfer uang, mencari pekerjaan, membeli dan menjual barang, atau mentransfer data seperti nilai, hasil tes, tingkat stok dan harga berbagai komoditas, informasi medis, dll.

Meskipun Big Data yang 'lahir digital' relevan untuk penelitian hukum empiris, hal yang sama berlaku untuk informasi yang tidak 'lahir digital' tetapi 'diubah' menjadi Big Data. Karena profesi hukum telah aktif selama berabad-abad dalam mencatat keputusan, motivasi, kontrak, litigasi, dan banyak lagi, ada banyak sekali materi yang dapat didigitalkan. Stevenson dan Wagoner (2014) menjelaskan contoh relevansi dan 'transformasi' materi hukum 'menjadi' Big Data. Para penulis berfokus pada litigasi:

KOTAK 6.9 CONTOH-CONTOH TENTANG PERVASIVITAS SENSOR, PENGIRIMAN LAYANAN DIGITAL DAN BIG DATA HUKUM

Atap pintar untuk membantu polisi NYC memerangi kejahatan dan mengumpulkan data Komisarisi Polisi New York Bill Bratton mengumumkan pada bulan Juni 2014 penggunaan infrastruktur perkotaan sebagai bentuk pengawasan baru. Tingkat pembunuhan di New York City lebih rendah dari sebelumnya, tetapi dalam proyek perumahan umum, penembakan meningkat 32%. Selain membanjiri area tersebut dengan petugas polisi tambahan, komisarisi Departemen Kepolisian New York meluncurkan program percontohan dua tahun senilai Rp. 15 Miliar untuk memasang sensor atap berbasis mikrofon di lokasi tertentu.

ShotSpotter, yang membuat sensor, bertujuan untuk membantu polisi bekerja lebih efektif dengan menyediakan data tentang insiden penembakan, yang banyak di antaranya tidak dilaporkan. Sensor menggunakan triangulasi untuk menentukan lokasi tembakan secara real-time. Analisis kemudian dapat memisahkan kebisingan seperti ledakan kembang api dari data yang terekam, dan akhirnya – mudah-mudahan – membuat pengerahan polisi lebih efektif dari waktu ke waktu.

Penyampaian layanan hukum secara digital

Banyak yurisdiksi melihat manfaat dari situs web yang menawarkan dirinya sebagai sumber daya hukum, sumber bantuan hukum, dan tempat penyelesaian sengketa bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Bentuk penyediaan yang tepat, yang sudah tersedia atau direncanakan, mencerminkan keadaan lokal tertentu. Roger Smith membahas pertanyaan apakah internet dapat mengubah layanan hukum bagi orang-orang berpenghasilan rendah. Ia membahas beberapa contoh portal tempat penyampaian digital berjalan dan berjalan,

meliputi contoh dari Kanada, Inggris, Belanda, dan AS: Portal Saran; Informasi interaktif; Dukungan orang tua – mengembangkan keterampilan; Komunitas daring; Mengembangkan avatar; Mengingat dasar-dasar; dan Tantangan bagi pemerintah. Portal-portal ini adalah layanan tetapi pada saat yang sama merupakan mesin ‘pengumpul’ data. ‘Haruskah kita membuat grafik seluruh sistem peradilan?’ Karya Puig dan Garcia Torrent (Universitas Stanford) pada sebuah proyek ‘Big data and the law: should we graph the entire justice system’ menyatakan: ‘Sistem Peradilan dapat direpresentasikan sebagai grafik: jaringan simpul yang dihubungkan oleh berbagai jenis hubungan. Pendekatan ini memungkinkan penemuan pola dan fitur yang muncul yang tidak diperhatikan dalam sejumlah besar data yang tidak berhubungan yang dihasilkan oleh pengadilan dan tribunal – oleh karena itu memberikan pencerahan baru yang sangat dibutuhkan tentang interaksi semua pelaku dan elemen penyusun yang terlibat dalam hukum. Tujuannya adalah untuk membuat jaringan semantik yang mencakup seluruh yurisdiksi, memungkinkan analisis yang jauh lebih mendalam dari setiap pelaku dan bagian penyusun, serta pemahaman yang lebih baik tentang sistem Peradilan secara keseluruhan’.

Data litigasi berarti (1) informasi dasar tentang kasus tertentu, seperti nama para pihak, pengacara, sifat gugatan, dan karakteristik lain tentang kasus tersebut (atau disebut sebagai 'meta-data kasus'); (2) informasi yang tercermin pada lembar berkas elektronik untuk kasus tertentu; dan (3) catatan pengadilan elektronik yang terkait dengan kasus tertentu. Ketika dikumpulkan dalam skala besar dan kemudian disaring menggunakan perangkat lunak, pola dan tren mulai muncul yang menjelaskan bagaimana para pihak, pengacara, dan hakim biasanya berperilaku selama proses litigasi.

Kategori aktif akhir dari data litigasi yang dibahas oleh para penulis adalah catatan pengadilan:

Catatan pengadilan menceritakan kisah kasus tertentu. Untuk memulai gugatan di pengadilan distrik, penggugat harus mengajukan pengaduan yang menetapkan dasar hukum yang sah untuk ganti rugi dan tuduhan faktual yang, jika benar, akan membenarkan ganti rugi tersebut. Tergugat kemudian akan menanggapi pengaduan tersebut dengan mengajukan jawaban, mosi untuk menolak, atau sejumlah instrumen hukum lainnya. Setelah mencapai keputusan akhir dalam kasus tertentu, hakim dapat mengeluarkan perintah, putusan, atau putusan yang disertai dengan pendapat tertulis di mana hakim akan mengartikulasikan temuan fakta dan simpulan hukumnya untuk mendukung keputusannya.

Informasi tentang proses dan hasil ini saat ini dapat dilacak dan diteliti secara digital melalui PACER, yang juga merupakan bagian dari Dunia Data Besar (Hukum).

Van Rijmenam (2015) memberikan beberapa contoh dari dunia firma hukum. Salah satunya merujuk pada Lexis Advance MedMal Navigator yang menawarkan prediksi tentang potensi kasus malapraktik medis. LexMachina menawarkan kepada pengacara paten apa yang

dilakukan MedMal Navigator untuk malapraktik. Layanan berbasis web ini menjelajahi internet untuk mencari data dari semua sumber informasi hukum paten yang dikenal dan tepercaya dan memuatnya secara otomatis ke dalam basis data induk. Ravellaw.com (mesin pencari hukum) adalah contoh ketiga.

KOTAK 6.10 RAVEL LAW SEBAGAI CONTOH VISUALISASI BIG DATA HUKUM

Ravel Law menunjukkan seperti apa bekerja dengan dan memvisualisasikan Big Data hukum: 'Jika Anda masuk ke Ravel Law, Anda akan menemukan kolom pencarian sederhana tanpa instruksi. Masukkan istilah – katakanlah: perubahan iklim. Saat bekerja dengan Westlaw dan Lexis, Anda akan menerima daftar kasus, di Ravel Law Anda menerima sesuatu yang sangat berbeda. Ravel Law memberi Anda daftar kasus, tentu saja, tetapi juga menampilkan representasi grafis interaktif dari jaringan kutipan semua kasus menggunakan istilah pencarian. Representasi visual memungkinkan pengguna dengan mudah dan langsung mengidentifikasi kasus yang mengutip kasus, kekuatan setiap kasus sebagai sumber kutipan bagi kasus lain, dan garis waktu kasus dalam jaringan. Jadi, jika seorang praktisi ingin mengidentifikasi "kasus besar" dalam suatu topik, atau dengan cepat melacak perkembangan topik tersebut dalam kasus hukum, Ravel Law akan menemukannya untuk Anda dalam hitungan detik, sedangkan menyusunnya melalui pencarian tradisional akan memakan waktu berjam-jam dan banyak latihan mental.

Apakah dunia (penelitian) dengan Big Data adalah dunia tanpa kesulitan (metodologis atau statistik)? Itu akan menjadi kesalahpahaman besar. Harford (2014) menyebutkan dua hal:

Karena kumpulan (Big) Data yang ditemukan sangat berantakan, sulit untuk mengetahui bias apa yang mengintai di dalamnya – dan karena kumpulan tersebut sangat besar, beberapa analis tampaknya telah memutuskan bahwa masalah pengambilan sampel tidak perlu dikhawatirkan. Contohnya adalah Twitter. Pada prinsipnya, dimungkinkan untuk merekam dan menganalisis setiap pesan di Twitter dan menggunakannya untuk menarik kesimpulan tentang suasana hati publik. (Dalam praktiknya, sebagian besar peneliti menggunakan sebagian kecil dari 'selang pemadam kebakaran' data yang sangat besar itu.) Namun, meskipun kita dapat melihat semua tweet, pengguna Twitter tidak mewakili populasi secara keseluruhan. (Menurut Pew Research Internet Project, pada tahun 2013, pengguna Twitter di AS sebagian besar masih muda, tinggal di perkotaan atau pinggiran kota, dan berkulit hitam. . . . 'N = Semua' sering kali merupakan ilusi yang menggoda.

Kesulitan kedua dari Big Data adalah bahwa mereka 'tidak memecahkan masalah yang telah menjadi obsesi para ahli statistik dan ilmuwan selama berabad-abad: masalah wawasan, menyimpulkan apa yang sedang terjadi, dan mencari tahu bagaimana kita dapat melakukan

intervensi untuk mengubah sistem menjadi lebih baik’.

6.5 PENELITIAN DAN TRIANGULASI METODE CAMPURAN

Nielsen (2010) menjelaskan penelitian campuran atau multimetode (MMR) sebagai:

setiap penelitian yang menggunakan lebih dari satu teknik penelitian untuk mempelajari satu atau beberapa fenomena yang saling terkait erat. Penelitian yang menggunakan beberapa 'taktik' untuk mengamati dan memahami lebih dapat diandalkan daripada satu studi tunggal, jika studi tersebut memiliki kualitas yang sebanding. Istilah 'triangulasi' sering digunakan untuk menggambarkan penerapan beberapa metode.

Asumsi metodologisnya adalah bahwa menggabungkan dua (atau lebih) metode membuahkan hasil dalam peningkatan instrumentasi untuk semua pendekatan pengumpulan data dan dalam mempertajam pemahaman peneliti tentang temuan. Sebuah studi yang umum mungkin dimulai dengan segmen kualitatif seperti diskusi kelompok fokus yang memberi tahu peneliti tentang isu-isu yang harus dieksplorasi dalam survei peserta program, diikuti oleh survei, yang kemudian diikuti oleh wawancara mendalam untuk mengklarifikasi beberapa temuan survei. Kami merujuk pada penggunaan survei (laporan mandiri) dan data registrasi (polisi, jaksa penuntut umum) terkait pelanggaran pidana. Sejauh mana satu sumber lebih dapat diandalkan daripada yang lain (dan sejauh mana ada pelaporan pelanggaran pidana yang berlebihan atau kurang) telah menjadi masalah selama beberapa waktu. Dalam edisi khusus Perilaku Kriminal dan Kesehatan Mental, Farrington dan Ttofi (2014) mempelajari perbedaan dan persamaan antara survei (laporan mandiri) dan catatan resmi penangkapan/pemidanaan:

Kedua metode ini memiliki kelebihan dan masalah yang berbeda. Misalnya, catatan resmi hanya mencakup 'puncak gunung es' pelanggaran, tetapi pelanggaran dicatat dengan cukup akurat dan lengkap untuk sampel yang sangat besar. Di sisi lain, laporan mandiri mengungkapkan lebih banyak 'angka gelap' pelanggaran tetapi memiliki masalah berlebihan dan penyembunyian dan juga masalah data yang hilang dalam sampel yang diwawancarai dibandingkan dengan sampel target. Orang-orang yang paling nakal seringkali adalah orang-orang yang paling sulit diwawancarai. Salah satu tujuan utama dari edisi khusus [jurnal] ini adalah untuk membandingkan informasi mengenai karier kriminal dari catatan resmi dengan informasi dari laporan diri.

KOTAK 8.11 CONTOH METODE CAMPURAN DALAM PENELITIAN HUKUM EMPIRIS

Proyek Penelitian Litigasi Perdata (CLRP) (Nielsen, 2010) mempelajari litigasi perdata dengan memanfaatkan survei di lima distrik peradilan federal, untuk mempelajari perilaku

klaim individu yang terlibat dalam sengketa yang mungkin menjadi tuntutan hukum, data kuantitatif tentang 'ledakan litigasi', dan pengamatan pengacara dan non-pengacara dalam berbagai lingkungan advokasi.

Tren kenakalan remaja di Belanda telah dipelajari oleh Van der Laan dan Blom (2011). Masalah penelitiannya adalah sebagai berikut: Perkembangan apa yang terjadi dalam proporsi, sifat, dan penyelesaian kenakalan remaja dalam periode 1996–2010? Para penulis menggabungkan metode berdasarkan kenakalan yang dilaporkan sendiri di satu sisi, dan statistik polisi dan peradilan di sisi lain. Melalui pelaporan mandiri, mereka memperoleh wawasan tentang jumlah anak muda yang menyatakan bahwa mereka bersalah melakukan tindak pidana dalam kurun waktu tertentu, yaitu 'pelaku tindak pidana yang melaporkan diri sendiri'. Statistik kepolisian memberi mereka wawasan tentang jumlah tersangka tindak pidana yang ditangkap. Data peradilan memberi wawasan tentang jumlah pelaku tindak pidana yang dituntut yang menurut Kejaksaan Umum perlu diajukan proses pidana dan yang tindak pidananya telah diselesaikan di pengadilan.

Beberapa kesimpulan dari tujuh studi longitudinal yang dilakukan di empat negara adalah sebagai berikut:

- Laporan diri tentang pelanggaran menunjukkan bahwa lebih banyak kejahatan (lebih dari 20 kali lebih banyak) dilakukan dibandingkan dengan pelanggaran yang berujung pada hukuman.
- Sebagian besar pria telah melakukan pelanggaran yang, secara teori, dapat berujung pada hukuman.
- Secara umum, pelanggar yang paling sering menurut laporan diri adalah yang paling mungkin dihukum.
- Laporan diri tentang pelanggaran memprediksi hukuman di masa mendatang.
- Karier kriminal berlangsung lebih lama menurut laporan diri daripada menurut catatan resmi hukuman.
- Usia permulaan pelanggaran beberapa tahun lebih awal dalam laporan diri daripada hukuman, sehingga memberikan kesempatan untuk intervensi dini guna mencegah persistensi dan eskalasi pelanggaran.

Meskipun temuan-temuan ini hanya kembali ke masalah kriminologis tentang cara mengukur (kembali)nya tindak pidana, untuk bidang-bidang lain yang dicakup oleh ELR, wawasan-wawasan ini juga relevan (konflik yang disebutkan dalam survei versus yang ditangani oleh mediator dan pengadilan; pembajakan digital, dll.).

Baru-baru ini, Blok dan Pedersen (2014) menerbitkan sebuah makalah dengan subjudul yang menantang 'Eksperimen kualitatif-kuantitatif dalam dunia Big Data'. Para penulis menambahkan ke menu tersebut, mencampur Big Data dengan metode pengumpulan data tradisional. Mereka menjelaskan bagaimana dalam proyek mereka pencampuran ulang metode campuran ini terjadi:

Studi Jaringan Sosial Kopenhagen adalah program penelitian lintas disiplin berskala besar . . . untuk membuat rekaman berkelanjutan dari interaksi sosial di semua saluran komunikasi di antara seluruh kelas mahasiswa baru (N>1000) mahasiswa Universitas Teknik Denmark, menggunakan telepon pintar yang dibagikan kepada mahasiswa sebagai alat ukur ('sosiometer'). Hal ini memungkinkan kita untuk memetakan secara digital jaringan sosial 'lengkap' dari seluruh kelas mahasiswa baru, termasuk pertemuan tatap muka melalui Bluetooth, kedekatan geolokasi melalui GPS, data jaringan sosial melalui aplikasi, dan data telekomunikasi melalui log panggilan. Selain itu, dengan cara 'menanamkan' seorang antropolog, data kerja lapangan etnografi 'tebal' tentang persahabatan dan hubungan sosial lainnya di antara kelompok mahasiswa yang sama [dilakukan]. Secara bersamaan, para peneliti melacak berbagai komponen dari struktur sosial melalui penerapan metode survei yang mapan.

6.6 KRITERIA MUTU

Gomm (2008) untuk penelitian empiris secara umum, dan Epstein dan Martin (2014) untuk ELR secara khusus telah menyarankan beberapa kriteria.

Kriteria 1 dan 2: Validitas dan Reliabilitas

Validitas dan reliabilitas instrumen pengukuran – bersama dengan objektivitas – adalah 'kriteria tradisional yang digunakan untuk menilai penelitian ilmiah. Hal ini diterima oleh sebagian besar peneliti kuantitatif dan banyak peneliti kualitatif. Validitas, untuk sebuah instrumen, adalah tentang apakah instrumen tersebut memberikan ukuran yang akurat dari apa yang ingin diukur. Reliabilitas adalah apakah instrumen tersebut melakukan hal ini secara konsisten; apakah instrumen tersebut memberikan hasil yang sama dalam keadaan yang sama'.

Ada beberapa sub tipe dari kriteria ini. Mengenai penelitian kualitatif (empiris hukum), Webley (2010) menambahkan kriteria 'keandalan' (atau 'integritas' atau 'keterpercayaan'), yang menunjukkan sejauh mana peneliti dan temuan mereka bebas dari bias. Epstein dan Martin (2014) membahas 'validitas tampilan', 'ketidakberpihakan' dan 'efisiensi', sambil menyebutkan peringatan 'bahwa memenuhi semuanya tidak selalu diperlukan, dan secara bersama-sama tidak selalu cukup meskipun secara kolektif sering kali membantu dalam memahami kapan suatu pengukuran lebih atau kurang valid'.

Validitas tampilan adalah ketika 'suatu pengukuran konsisten dengan bukti sebelumnya dari semua jenis: termasuk semua laporan atau anekdot kuantitatif, kualitatif dan bahkan impresional'. Mereka memperingatkan pembaca bahwa menggunakan validitas tampilan bukanlah penilaian yang asal-asalan, tetapi sebaliknya perbandingan yang cermat antara pengukuran baru dan bukti yang ada. Pengumpulan data tidak bias ketika pengukuran 'rata-rata tepat di seluruh aplikasi yang berulang'. Efisiensi berarti bahwa ketika ada beberapa ukuran yang tidak bias untuk dipilih, ukuran dengan kesalahan yang tercatat lebih sedikit lebih disukai daripada yang lain.

Karakteristik permintaan dan karakteristik pemicu bias lainnya dari instrumen

pengumpulan data juga harus disebutkan. 'Karakteristik permintaan' adalah istilah untuk menunjukkan situasi di mana hasil studi empiris bias karena ekspektasi peneliti mengenai kinerja partisipan (misalnya orang yang diwawancarai) pada tugas tertentu, menciptakan permintaan implisit bagi partisipan untuk melakukan (atau menjawab) seperti yang diharapkan. Itu adalah 'bias yang dihasilkan dari penerapan peran tertentu oleh subjek yang percaya bahwa ia telah memahami tujuan studi, atau dipicu oleh reaksi terhadap decoding manipulasi (eksperimen)'. MacCoun (1998) dan Kirk (2009) memberikan gambaran umum tentang bias ini (dalam penelitian psikologis dan terkait dengan desain dan metode pengumpulan data) dan beberapa cara untuk memerangnya.

Validitas dan reliabilitas terkait dengan teori pengukuran yang memandu pekerjaan peneliti saat mengumpulkan data. Mengapa skala tertentu digunakan, mengapa survei telepon lebih disukai daripada survei daring, mengapa data registrasi pada item fiskal diyakini 'mengungkapkan kebenaran' dan wawancara tidak atau cenderung tidak melakukannya, dan sejauh mana pengungkapan respons seseorang terhadap suatu item dalam suatu tes dikaitkan dengan 'variabel laten' yang mendasarinya, yang dimaksudkan untuk diketahui melalui penggunaan tes ini, adalah pertanyaan yang ditangani oleh teori pengukuran. Variabel laten yang mendasari dalam - misalnya - investigasi psikologi forensik dapat berupa perasaan depresi: sejauh mana seorang peneliti dapat yakin bahwa skor pada skala depresi, dan khususnya item X hingga Z, sesuai dengan kenyataan?

Dalam Bab 7, kami memperhatikan keandalan (dan validitas) ketika indikator statistik digunakan untuk menilai - antara lain - skala.

KOTAK 6.12 CONTOH KARAKTERISTIK PERMINTAAN, EFEK PREDISPOSISI-PESERTA, DAN EFEK EKSPERIMEN-HARAPAN

Keinginan sosial berarti jika peserta studi secara konsisten memberikan jawaban yang ingin didengar oleh peneliti, maka bias informasi akan terjadi.

Kemunduran ingatan berarti penurunan kemampuan untuk mengambil informasi dari memori saat peristiwa yang harus diingat surut seiring waktu.

Teleskop ke depan berarti persepsi yang salah bahwa suatu peristiwa terjadi lebih baru daripada yang sebenarnya.

Efek halo adalah bias kognitif di mana penilaian kita terhadap karakter seseorang dapat dipengaruhi oleh kesan kita secara keseluruhan terhadapnya. Hal ini dapat ditemukan dalam berbagai situasi – dari ruang sidang hingga kelas dan dalam interaksi sehari-hari. Hal ini juga akan terjadi ketika kata-kata pertanyaan dan urutan pertanyaan dirumuskan dalam satu arah (yaitu positif).

Kriteria 3: Etika

Pengumpulan data tentang sikap dan perilaku secara umum, tetapi mungkin lebih dari itu ketika menyangkut sikap dan perilaku terkait isu hukum, memerlukan prosedur yang cermat yang secara etika (dan hukum) masuk akal. Miles dan Huberman (1994) mencantumkan beberapa isu yang harus dipertimbangkan peneliti ketika menganalisis data. Mereka memperingatkan peneliti untuk menyadari isu-isu ini dan isu lainnya sebelum, selama, dan setelah penelitian dilakukan. Beberapa isu tersebut meliputi hal-hal berikut:

- Persetujuan yang diinformasikan (Apakah partisipan memiliki pengetahuan penuh tentang apa yang terlibat?)
- Bahaya dan risiko (Dapatkah penelitian tersebut merugikan partisipan?)
- Kejujuran dan kepercayaan (Apakah peneliti bersikap jujur dalam menyajikan data?)
- Privasi, kerahasiaan, dan anonimitas (Apakah penelitian tersebut akan terlalu mengganggu perilaku kelompok dan/atau individu?)
- Intervensi dan advokasi (Apa yang harus dilakukan peneliti jika partisipan menunjukkan perilaku yang merugikan atau melanggar hukum?)

Tiga di antaranya akan dibahas lebih mendalam. Yang pertama adalah persetujuan. Ada beberapa contoh di mana persetujuan disimpulkan, seperti ketika peneliti mengamati partisipan di depan umum, atau ketika persetujuan untuk berpartisipasi sebelumnya diperoleh oleh peneliti atau lembaga lain. Ketika data dikumpulkan langsung dari partisipan (misalnya melalui survei atau wawancara) untuk pertama kalinya, peneliti harus menilai kemauan dan kemampuan partisipan untuk secara sukarela menyetujui partisipasi. Peneliti perlu menjelaskan bagaimana mereka akan menilai dan mencatat partisipasi sukarela. Sering kali, peneliti membuat skrip dan/atau formulir untuk membantu dalam memperoleh dan mencatat persetujuan sukarela.

Masalah lainnya adalah menjaga privasi. Hal ini juga terkait dengan risiko pengungkapan ketika data dikumpulkan atau berasal dari sumber administratif. Seperti yang ditunjukkan Kalidien et al (2010) sehubungan dengan data peradilan pidana, karena tren masyarakat umum untuk membuat organisasi transparan, ada permintaan yang meningkat dari pengguna untuk membuat statistik kejahatan dapat diakses secara daring karena beberapa alasan: dengan statistik daring, menggabungkan dan menganalisis data akan menjadi lebih mudah dan dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang fenomena tertentu. Namun, penerapan penambahan data atau teknologi Web 2.0, seperti penggabungan data kejahatan daring, dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan seperti pelanggaran undang-undang privasi dan pengungkapan identitas sekelompok orang. Choenni, van Dijk, dan Leeuw (2010) telah menjelaskan cara untuk menghindari masalah ini.

Masalah etika ketiga adalah penipuan dalam penelitian ilmiah. Fabrikasi, pemalsuan, dan plagiarisme, yang diringkas sebagai FFP, adalah bentuk penipuan yang berbeda dalam sains. Fabrikasi adalah pembuatan data seolah-olah data itu nyata. Pemalsuan adalah manipulasi data ('pemalsuan') dan hasil penelitian lainnya, termasuk penghilangan informasi tertentu secara selektif (salah penyajian). Plagiarisme, menurut Freeland Judson (2004), adalah penyalahgunaan. Pengendalian diri, bekerja dengan protokol dan pedoman,

transparansi dalam prosedur tentang pengumpulan data, tinjauan sejawat, dan pendekatan serupa ada untuk mencegah penipuan dengan cara apa pun. Itu termasuk perangkat lunak yang mampu mendeteksi plagiarisme. Schuyt (2014) baru-baru ini menyajikan teori sosio-kriminologi untuk menjelaskan mengapa penyimpangan ini muncul dalam dunia ilmiah.

Terkait dengan Big Data, masalah etika juga dipertaruhkan. Salah satunya adalah konsekuensi privasi dan kebebasan sipil karena terseret dalam jaring Big Data. Lerman (2013) mengambil pendekatan yang berbeda, dengan fokus pada risiko pengecualian: ancaman yang ditimbulkan Big Data bagi mereka yang diabaikannya: pengabaian sistemik yang tidak acak terhadap orang-orang yang hidup di pinggiran big data, baik karena kemiskinan, geografi, atau gaya hidup, dan yang hidupnya kurang 'terdata' dibandingkan masyarakat umum. Di sektor-sektor utama, risiko marginalisasi mereka mendistorsi kumpulan data dan, akibatnya, mendistorsi analisis yang semakin diandalkan oleh aktor swasta dan publik. Mereka adalah pengecualian big data. Konsekuensi pengecualian bisa sangat besar:

- Mereka yang tertinggal dari revolusi big data mungkin menderita kerugian ekonomi yang nyata. Bisnis mungkin mengabaikan atau meremehkan preferensi dan perilaku konsumen yang tidak berbelanja dengan cara yang dapat dengan mudah ditangkap, diagregasi, dan dianalisis oleh alat big data. Toko-toko mungkin tidak buka di lingkungan mereka, yang tidak hanya menghalangi mereka untuk berbelanja, tetapi juga kesempatan kerja;
- Politisi dan pemerintah mungkin menjadi sangat bergantung pada big data sehingga pengecualian dari aliran data menyebabkan pengecualian dari kehidupan sipil dan politik – sebuah hambatan terhadap kewarganegaraan penuh.

Kesimpulan

- Data dapat berupa apa saja: disimpan, terlahir digital, dibuat digital, mengganggu, tidak mengganggu, numerik atau kualitatif. Sering kali data harus dikumpulkan, semakin banyak data yang disimpan dalam register, gudang data atau arsip, atau 'dikumpulkan' secara otomatis (Big Data).
- Berpikirlah sebelum Anda melompat ke jenis pengumpulan data yang terkenal dan sering digunakan: mewawancarai korban, litigator, hakim, personel penjara dan lain-lain dapat dengan mudah menghasilkan informasi yang kurang optimal jika data yang ada dalam sistem administratif atau arsip data dihilangkan (atau dianggap membosankan atau 'buang-buang waktu', karena sindrom 'tidak-ditemukan-di-sini' yang dialami beberapa peneliti).
- Berpikirlah di luar kotak. Analisis air limbah untuk mengukur penggunaan obat terlarang adalah contohnya, seperti halnya bekerja dengan Big Data.
- Ingatlah relevansi (dan kompleksitas) teori pengukuran.
- Big Data merupakan perkembangan baru yang penting bagi ELR, meskipun tidak tanpa (beberapa) masalah. Akan tetapi, 'data' (metode pengumpulan) tradisional juga dihadapkan pada masalah dan, terlebih lagi, tidak diarahkan untuk mengukur perkembangan waktu nyata di dunia digital.

- Bersikaplah transparan dan catat tindakan Anda saat bekerja dengan data, pertama, untuk memungkinkan replikasi dan kedua, untuk mencegah masalah integritas.

BAB 7

ANALISIS DAN VISUALISASI DATA KUANTITATIF DAN KUALITATIF

Analisis data adalah sekumpulan metode yang membantu mendeskripsikan fakta, mendeteksi pola, mengembangkan penjelasan, dan menguji teori. Analisis data kuantitatif mendeskripsikan, menjelaskan, dan mengevaluasi fenomena dengan menggunakan metode berbasis matematika (khususnya statistik). Analisis data kualitatif adalah proses dan prosedur yang digunakan peneliti untuk beralih dari data kualitatif ke (beberapa bentuk) eksplorasi, penjelasan, pemahaman, atau interpretasi orang, situasi, pengaturan, dan 'produk'. Semakin banyak data kualitatif yang 'didigitalkan' dan dapat diakses dengan metode kuantitatif. Selama ini, 'perang paradigma' terjadi di antara kedua 'cabang' tersebut, tetapi, sebagian karena inovasi di bidang metode berbantuan komputer dan Big Data (termasuk data sensor), 'perang' ini mulai menghilang.

Bagian 7.2 hingga 7.4 di bawah ini membahas analisis data kuantitatif, sementara bagian 7.5 berfokus pada analisis Big Data, dan bagian 7.6 membahas analisis data kualitatif. Bagian 7.7 membahas penggabungan analisis kualitatif dan kuantitatif, sementara bagian 7.8 menyajikan informasi tentang visualisasi data. Bagian 7.9 membahas kriteria untuk menilai kualitas (metodologis) analisis data sementara bagian 7.6 memberikan beberapa panduan.

7.1 ANALISIS DATA KUANTITATIF

Penelitian empiris (hukum) dapat menggunakan berbagai macam desain dan metode penelitian (lihat Bab 5 dan 6). Sebagian besar desain ini didasarkan pada populasi yang ditentukan: misalnya penduduk negara tertentu, kotamadya, populasi pasar tenaga kerja, hakim di pengadilan, tahanan di penjara, mahasiswa di universitas, atau karyawan perusahaan. Biasanya hanya beberapa unit dalam populasi tertentu yang dipelajari. Jika pemilihan ini didasarkan pada strategi, unit-unit yang dipilih ini dapat membentuk sampel. Contoh terkenal dari hubungan kedua konsep – sampel dan populasi – dapat ditemukan dalam survei. Survei mengumpulkan data pada sejumlah unit berdasarkan sampel (acak) dari populasi yang ditentukan. Di Belanda, misalnya, sampel acak sebanyak 4000 unit dapat diambil dari populasi 10.245.782 pemilih yang memenuhi syarat.

Dalam dua bagian berikutnya, metode sampel, metodologi pengumpulan data, respons, alasan tidak berpartisipasi (= tidak merespons) dan metode untuk mengurangi bias yang berasal dari tidak adanya respons dijelaskan. Metode statistik untuk menganalisis data akan diuraikan – dari statistik deskriptif sederhana, seperti nilai rata-rata dari distribusi tertentu, hingga statistik inferensial yang digunakan untuk menarik kesimpulan umum pada populasi yang ditentukan berdasarkan sampel. Meskipun hingga saat ini berbagai contoh teori, desain penelitian, dan metode pengumpulan data telah disajikan, berkenaan dengan analisis data kuantitatif, bab ini mengambil rute lain. Semua isu dan contoh metodologis dan statistik berfokus pada satu bidang penelitian: pemilihan umum. Bila tujuannya adalah untuk memberi tahu pembaca tentang luas dan lebarnya metode dan pendekatan ELR, menu prasmanan akan

mencerahkan dan menarik. Namun, saat melakukan analisis data kuantitatif dan statistik, sangat penting bagi pembaca untuk mengalami apa artinya menggali data (topik) sekonkret mungkin.

Kami telah memilih empat studi pemilu untuk membantu mengungkap apa yang dilakukan peneliti hukum empiris saat mereka bekerja dengan data kuantitatif. Yang pertama adalah Studi Pemilu Parlemen Belanda. Contoh kedua diambil dari Survei Sosial Eropa: survei lintas negara yang dilakukan di sekitar 30 negara, yang mencakup sikap sosial dan politik. Contoh ketiga adalah studi tentang Misi Pengamatan Pemilu OSCE (Organisasi untuk Keamanan dan Kerja Sama di Eropa) tempat tempat pemungutan suara diamati. Dan studi keempat membahas eksperimen tentang cara meningkatkan tingkat respons melalui insentif.

Tiga dari studi tersebut termasuk dalam keluarga desain observasional, sementara satu lagi adalah eksperimen. Studi-studi tersebut berbeda dalam unit analisis: pemilih yang memenuhi syarat dalam studi pertama, warga negara dalam studi kedua, tempat pemungutan suara dalam studi ketiga, dan rumah tangga dalam studi keempat. Pemilih, warga negara, dan rumah tangga adalah orang (alami); tempat pemungutan suara adalah unit organisasi yang menjadi bagian dari proses pemungutan suara dan memiliki karakteristiknya sendiri. Tempat pemungutan suara seperti itu tidak dapat 'ditanyai', tetapi pejabat yang bertanggung jawab atas organisasi-organisasi ini dapat melakukannya.

Meskipun unit analisis ini agak berbeda, kami akan menunjukkan seberapa relevan dan dapat diterapkannya berbagai metode dan teknik statistik, baik saat mengambil sampel dan mengumpulkan data maupun saat menganalisis hasilnya. Kami mulai dengan tulang punggung survei: register tempat sampel diambil. Selanjutnya, metode pengumpulan data akan dibahas. Kami akan menyentuh kualitas survei dengan merinci bias respons dan nonrespons (untuk tinjauan umum Total Survey Error. Ini akan diikuti dengan pengenalan singkat metode statistik saat menganalisis data. Dalam kotak, informasi tentang tingkat pengukuran variabel dan validitas serta reliabilitas saat bekerja dengan data statistik disajikan.

KOTAK 7.1 TENTANG PEMILU DAN PERATURAN

Pemilihan umum merupakan inti dari demokrasi. Kebebasan fundamental dan hak politik yang diperlukan untuk pemilihan umum yang demokratis ditetapkan oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1948 dan Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) pada tahun 1996. UDHR telah diterima oleh semua anggota PBB dan merupakan standar internasional. ICCPR mengikat secara hukum bagi semua negara yang meratifikasi. Dalam Pasal 25 hak untuk berpartisipasi dalam urusan publik dan hak suara diuraikan. Ada sejumlah deklarasi dan komitmen regional, yang sering kali didasarkan pada UDHR dan ICCPR. Contohnya termasuk Deklarasi Uni Afrika tentang Prinsip-prinsip yang Mengatur Pemilihan Umum Demokratis pada tahun 2007, Piagam Arab tentang Hak Asasi Manusia pada tahun 1994, Deklarasi Amerika tentang Hak dan Kewajiban Manusia pada tahun 1948, dan Kode Praktik Baik tentang Masalah Pemilu (2002) yang diadopsi oleh Komisi Eropa untuk Demokrasi melalui

Hukum ('Komisi Venesia'). Pemilihan umum merupakan bagian dari hukum tata negara nasional serta berbagai Komitmen Internasional yang didasarkan pada negara-negara anggota organisasi internasional, termasuk Organisasi untuk Keamanan dan Kerja Sama di Eropa (OSCE). Berdasarkan Komitmen Kopenhagen tahun 1990, Kantor OSCE untuk Lembaga Demokratis dan Hak Asasi Manusia (OSCE/ODIHR) di Warsawa mengamati pemilihan umum di hampir 60 negara anggotanya, yang meliputi negara-negara di Eropa dan Eurasia, AS, dan Kanada. Untuk tujuan ini, Misi Pengamatan Pemilihan Umum (EOM) dilakukan, untuk menilai berbagai fase pemilihan umum: sebelum, selama, dan setelah Hari Pemilihan. Ini adalah praktik umum untuk penilaian pemilu di negara-negara yang sedang dalam masa transisi atau demokrasi baru.

Sehubungan dengan pemilu di Uni Eropa, Layanan Riset Parlemen Eropa menerbitkan infografis yang menjelaskan karakteristik utama sistem pemungutan suara di Parlemen Eropa: pemungutan suara wajib (atau tidak), sistem pemungutan suara, jumlah anggota parlemen, usia minimum kandidat, dan ada atau tidaknya ambang batas elektoral untuk partai.

7.2 SENSUS PENDUDUK, PENGAMBILAN SAMPEL, RESPONS DAN PEMBOBOTAN

Sensus Penduduk

Kita mulai dengan Studi Pemilihan Umum Parlemen Belanda (DPES). Karena berbagai alasan, pengetahuan tentang populasi dan unit-unitnya sangat penting. Pertama, untuk mengetahui populasi pemilih yang memenuhi syarat, diperlukan basis data dengan catatan populasi, termasuk karakteristik seperti usia dan kewarganegaraan. Untuk menghasilkan basis data seperti itu, diperlukan sensus penduduk yang di dalamnya karakteristik dasar dari semua individu dikumpulkan untuk titik waktu tertentu. Rata-rata, negara-negara yang terhubung dengan Komisi Ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Eropa (UNECE) melakukan sensus setiap sepuluh tahun. Untuk tujuan ini, sebagian besar negara UNECE melakukan wawancara tatap muka menggunakan kuesioner kertas. Cara pengumpulan informasi lainnya termasuk telepon, internet, dan kuesioner yang diisi sendiri. Beberapa negara – Denmark, Finlandia, Norwegia, Swedia, Belanda, Austria, dan Slovenia – menyusun sensus mereka dari daftar yang ada ('data tersimpan'), terkadang dikombinasikan dengan survei skala besar, dan tidak mengumpulkan data tambahan.

Pendekatan berbasis daftar digunakan karena pertimbangan finansial (mewawancarai orang jauh lebih mahal daripada menggunakan data tersimpan), dan karena populasi menjadi kurang bersedia untuk berpartisipasi dalam survei. Aspek ketiga adalah bahwa ketika menggunakan data daftar, jawaban yang diinginkan secara sosial bagi pewawancara – misalnya tentang konsumsi obat-obatan (keras), rokok, alkohol – yang diberikan selama wawancara tidak memungkinkan.

Dalam survei, hanya pemilihan unit yang sempit dalam populasi yang ditentukan yang biasanya didekati. Jika pemilihan didasarkan pada sampel acak, yaitu peluang untuk dipilih

sama untuk semua unit, kita dapat menarik kesimpulan umum berdasarkan populasi tertentu. Jelas, ada banyak cara untuk mengambil sampel, dan ada tradisi panjang studi di bidang ini untuk tujuan itu. Pada tahun 1906, Sir Arthur Bowley memelopori penggunaan teknik pengambilan sampel dalam survei (sosial), dan menunjukkan bahwa, dengan menggunakan 'seleksi acak dari populasi', ukuran keakuratan estimasi dapat diperoleh.

Pada tahun 1934, Neyman menunjukkan bahwa metode sampel berstrata memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan sampel non-stratifikasi. Dalam sampel berstrata, populasi dibagi menjadi sejumlah subpopulasi, yang sering dikaitkan dengan kelompok yang menjadi minat peneliti, misalnya pria dan wanita, anak muda dan orang tua, penduduk asli dan etnis minoritas, orang yang tinggal di daerah pedesaan dan perkotaan, dll.

Sampel diambil dari subpopulasi, yang mengoptimalkan perbandingan kelompok-kelompok ini. Sepuluh tahun kemudian, Hansen dan Hurwitz (1943) memperkenalkan sampel berstrata multi-tahap. Pada tahap pertama, unit-unit primer dipilih dengan probabilitas yang proporsional dengan ukurannya; dan pada tahap kedua, di dalam unit-unit primer yang dipilih, sejumlah unit sekunder yang tetap dipilih. Metode ini masih merupakan strategi pengambilan sampel yang umum dalam survei sosial. Misalnya, pada tahap pertama, pemilihan acak kotamadya di suatu negara dilakukan, untuk memastikan bahwa kemungkinan untuk diikutsertakan lebih tinggi karena lebih banyak penduduk yang tinggal di kotamadya tersebut. Pada tahap kedua, pemilihan acak sejumlah orang tetap akan dilakukan di kotamadya yang dipilih. Contoh tipikal adalah pemilihan 200 dari 430 kotamadya di Belanda, diikuti dengan pemilihan 20 orang dari setiap kotamadya, sehingga menghasilkan sampel sebanyak 4000 orang.

Kami sekarang akan menguraikan teknik pengambilan sampel berstrata yang diterapkan pada Studi Pemilihan Parlemen Belanda 2006 (DPES 2006). Sampel bruto awal mencakup 4000 orang Belanda, berusia 18 tahun atau lebih. Sampel diambil dari Daftar Dasar Kotamadya, yang mencakup seluruh penduduk yang tinggal di Belanda. Daftar ini berisi informasi regional terperinci (sebagaimana alamat tersedia), jenis kelamin, usia, negara asal, status perkawinan, dan kewarganegaraan. Untuk DPES, hanya warga negara berkewarganegaraan Belanda dan berusia 18 tahun atau lebih pada hari pemilihan yang harus disertakan dalam sampel. Perlu dicatat bahwa DPES tidak mencakup pemilih yang memenuhi syarat yang tinggal di luar negeri, juga tidak mencakup pemilih yang memenuhi syarat yang tinggal di pulau-pulau kecil di bagian utara Belanda. Yang juga dikecualikan adalah orang-orang yang tidak tinggal di rumah tangga pribadi, tetapi, misalnya, tinggal di rumah sakit dan pusat perawatan. Pengecualian yang disengaja terhadap sebagian populasi sasaran ini disebut 'tidak tercakup'.

Dalam Bab 6, kami membahas cara-cara pengumpulan data. Saat ini, pendekatan mode campuran² menjadi semakin populer dalam kerja lapangan berskala besar. Pendekatan ini bersifat campuran karena menggunakan wawancara oleh pewawancara, baik secara langsung maupun melalui telepon, dan/atau tanpa campur tangan pewawancara, misalnya melalui surat atau internet.

Strategi pengumpulan data mode campuran menghadirkan masalah dan tantangan

tertentu. Pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner harus sesuai dengan berbagai mode pengumpulan data. Namun, hal ini tidak selalu mudah untuk diwujudkan. Misalnya, bagaimana mungkin membuat opsi 'tidak tahu' bagi responden agar sesuai dengan lingkungan yang berbeda dari kuesioner versi internet dan wawancara tatap muka? Sering kali, jika opsi 'tidak tahu' disediakan dengan jelas bagi responden di internet, opsi tersebut akan lebih sering digunakan daripada dalam wawancara tatap muka atau telepon di mana opsi 'tidak tahu' tidak langsung tersedia. Banyak eksperimen telah mengungkapkan bahwa efek mode pengumpulan data wawancara itu ada, persis seperti yang telah kami singgung di bab sebelumnya. Para peneliti harus mengatasi masalah pelanggaran tren akibat perubahan dari desain mode tunggal ke mode campuran.

KOTAK 7.2 PENELITIAN MODE CAMPURAN DAN STATISTIK

Di Statistik, modus gabungan internet/telepon/tatap muka umumnya digunakan. Alasan utama untuk memulai pengumpulan data melalui internet adalah pengurangan biaya: sejauh ini ini adalah metode termurah. Jika orang yang dipilih tidak merespons, dua pengingat akan dikirim. Jika itu juga tidak berhasil, dan nomor telepon tersedia, modus berikutnya dalam desain sekuensial ini adalah wawancara telepon. Jika orang yang dipilih tidak dapat dihubungi melalui telepon, modus tatap muka digunakan sebagai upaya terakhir untuk membuat orang yang dipilih merespons. Untuk setiap orang yang dipilih, maksimal sembilan upaya kontak akan dilakukan yang tersebar selama tiga hari dan tiga shift harian dalam periode pengumpulan data yang bervariasi antara dua dan empat minggu. Setelah periode ini, orang yang dipilih dinyatakan tidak merespons karena tidak melakukan kontak.

Bias Respons, Non-respons, dan Pembobotan

Tingkat respons sering dianggap sebagai indikator kualitas dalam survei. Jika semua orang terpilih dalam sampel berpartisipasi, tingkat respons akan menjadi 100%. Kesalahan karena non-respons tidak akan ada, dan kita hanya perlu mengatasi kesalahan lain dalam desain, pengumpulan, pemrosesan, dan analisis data survei. Namun, pada akhirnya, sebagian besar atau semua survei mengalami non-responsivitas, yang merupakan bagian penting dari Total Kesalahan Survei. Salah satu bagian dari faktor non-respons disebabkan oleh kegagalan untuk menjalin kontak dengan orang-orang terpilih dalam sampel. Dalam survei yang dilakukan oleh Statistik Belanda, sekitar 4% sampel terdiri dari non-kontak.

Namun, alasan utama untuk tidak berpartisipasi dalam survei adalah penolakan seseorang untuk melakukannya. Sekitar 20 hingga 25% responden tidak bersedia bekerja sama. Ini berarti bahwa sebagian besar survei memiliki tingkat respons rata-rata sekitar 60 hingga 65%, dan akibatnya tingkat non-respons 35 hingga 40%. Mari kita lihat lebih spesifik pada DPES 2006. DPES dilakukan dari enam minggu hingga sesaat sebelum hari pemilihan (wawancara pertama) dan sesaat setelah hari pemilihan (wawancara kedua) di antara orang-orang terpilih yang sama dalam sampel. Ini menyiratkan bahwa DPES adalah studi panel dua

gelombang. Selama gelombang pertama, tingkat respons DPES 2006 adalah 66,9%. Non-responsivitas biasanya merupakan hasil dari penolakan responden untuk berpartisipasi (21%) dan tidak tersedianya peserta selama periode kerja lapangan (6%). Alasan lainnya adalah kegagalan untuk melakukan kontak (3%), komplikasi yang terkait dengan orang yang pindah ke kotamadya lain (2%) dan kendala bahasa (1%).

KOTAK 7.3 RESPONS DALAM STUDI PEMILU PARLEMEN BELANDA (DPES) 1972–2012

Dalam DPES, respons pada gelombang kedua telah berada di bawah 50% sejak 1972, mencapai titik terendah sepanjang masa sebesar 27% pada tahun 2002. Tingkat respons yang rendah ini sebagian disebabkan oleh berkurangnya jumlah panel karena DPES merupakan studi dua gelombang, yang dilakukan sesaat sebelum dan sesudah pemilihan umum. Untuk DPES pada tahun 2006, peningkatan substansial dalam respons – menjadi 55% pada gelombang pertama dan 45% pada gelombang kedua – merupakan target utama. Target ini mudah dicapai dengan respons sebesar 72% dan 64% pada kedua gelombang. Pada tahun 2010, tingkat respons lebih rendah: 67% pada gelombang pertama dan 57% pada gelombang kedua. Karena keterbatasan biaya, pada tahun 2012 hanya satu wawancara setelah hari pemilihan yang dilakukan tanpa pendekatan ulang terhadap nonrespons. Hal ini menghasilkan tingkat respons sebesar 62%. Dengan menjadikan respons sebagai indikator, kualitas DPES pada tahun 2006 secara signifikan lebih baik daripada DPES pada tahun 2010 dan 2012.

Dalam DPES, metode konversi penolakan diterapkan. Konversi penolakan adalah prosedur yang digunakan oleh peneliti survei untuk mendapatkan kerja sama dari responden sampel yang telah menolak permintaan survei awal. Dalam DPES, orang yang menolak didekati kembali melalui mode pengumpulan data lain: telepon atau surat. Untuk tujuan ini, kuesioner yang dipersingkat digunakan. Pendekatan kembali terhadap nonkontak dan penolakan menghasilkan respons tambahan sebesar 3,3% melalui telepon dan 1,4% melalui surat. Karena pengurangan panel, sekitar 7% hilang pada gelombang kedua. Akibatnya, respons tatap muka gelombang kedua adalah 60,2%. Sekali lagi, konversi penolakan dan upaya kontak tambahan menambahkan 4,1% lebih lanjut, menghasilkan tingkat respons gelombang kedua akhir sebesar 64,3%. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, sampel dapat diambil dari Daftar Dasar Kotamadya Belanda yang mencakup informasi dasar untuk semua penduduk di Belanda. Daftar ini juga berfungsi sebagai alat untuk produksi dan penyebaran berbagai statistik demografi.

Municipal Basic Register terhubung dengan register lain seperti register otoritas pajak tentang pendapatan, dan survei (skala besar), seperti Survei Permintaan Perumahan, Survei Korban Kejahatan, dan Survei Angkatan Kerja. Semua data ini disertakan dalam Basis Data Statistik Sosial (SSB), yang memungkinkan Statistik Belanda untuk menghasilkan statistik sosial dan mengambil sampel berdasarkan seluruh populasi Belanda dan subpopulasi (yang sangat spesifik). Subpopulasi tersebut misalnya dapat mencakup semua perempuan imigran non-

Barat, berusia 18 hingga 24 tahun, yang tinggal di daerah pedesaan. Semua informasi tersebut sudah ditemukan dalam basis data (yang disebut variabel latar belakang), dan akibatnya tidak perlu mengumpulkan informasi ini dari survei tambahan.

Di atas kami membahas kualitas survei, dan menunjukkan bahwa DPES pada tahun 2006 memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada survei tahun 2010 dan 2012. Namun, ketiga studi DPES masih mengalami bias seleksi, karena non-pemilih jelas kurang terwakili dibandingkan dengan angka partisipasi resmi. Untuk DPES tahun 2006 dan 2010, hanya satu dari tiga non-pemilih yang berpartisipasi dalam survei, sementara pada tahun 2012 DPES sedikit lebih representatif karena satu dari dua non-pemilih bersedia menjawab pertanyaan. Alasannya adalah perubahan desain survei, dari studi panel dua gelombang menjadi studi satu gelombang setelah pemilihan. Perubahan ini berarti bahwa DPES 2012 tidak perlu memperhitungkan pengurangan panel.

Namun, yang lebih penting lagi, partisipasi dalam survei juga dapat mengubah sikap dan perilaku. Ada beberapa bukti bahwa calon non-pemilih yang berpartisipasi dalam survei pemilihan pada kenyataannya mengubah perilaku mereka dan pergi ke tempat pemungutan suara pada hari pemilihan, sehingga mengurangi proporsi non-pemilih dalam sampel lebih jauh. Temuan ini didasarkan pada eksperimen semu yang dilakukan pada tahun 2006 di mana pertanyaan tentang perilaku pemilih diajukan pada bulan November tahun itu. Pertanyaan tentang perilaku pemilih juga ditujukan kepada sampel baru sekitar 10.000 orang berusia 18 tahun atau lebih dalam Survei Angkatan Kerja (LFS) dan sekitar 800 dalam Studi Situasi Kehidupan Permanen (POLS).

Dalam DPES, jumlah pemilih adalah 93%, dan dalam LFS dan POLS 88% sementara angka jumlah pemilih resmi adalah 80%. Ini menyiratkan bahwa bias jumlah pemilih jauh lebih tinggi (13%) dalam DPES daripada dalam LFS dan POLS (8%). Perbedaan 5% antara kedua angka tersebut – 13% dikurangi 8% – dikaitkan dengan efek stimulus. Bias 8% lainnya dalam ketiga studi tersebut dapat dikaitkan dengan kombinasi (a) bias seleksi: lebih banyak pemilih yang berpartisipasi dalam survei sosial daripada yang bukan pemilih dan (b) keinginan sosial: responden tidak mau mengakui bahwa mereka tidak memilih. Berdasarkan penelitian lain, kita dapat berasumsi bahwa bias 8% disebabkan oleh 2% keinginan sosial dan 6% bias seleksi. Dalam DPES 2012, desainnya berubah menjadi studi satu gelombang, yang dilakukan setelah pemilihan umum pada 12 September. Jumlah pemilih resmi adalah 74,6%, tetapi DPES mengindikasikan bahwa 86% mengatakan bahwa mereka telah memberikan suara mereka tahun itu, sementara lebih dari setengah ($14,0/25,4 = 0,55$) dari non-pemilih benar-benar berpartisipasi dalam DPES. Hasil ini sebanding dengan temuan LFS dan POLS pada tahun 2006, yang juga menemukan bahwa sedikit lebih dari setengah dari non-pemilih berpartisipasi.

Kami telah menunjukkan bahwa Basis Data Statistik Sosial memiliki banyak manfaat: hemat biaya, meringankan beban responden, dan berfungsi sebagai alat untuk menghasilkan banyak statistik sosial. Namun, ada keuntungan lain: karena karakteristik utama populasi Belanda tersedia untuk responden dan non-responden, kami dapat mengeksplorasi kelebihan dan kekurangan representasi beberapa kelompok dalam sampel. Informasi ini khususnya berguna untuk mengoreksi bias dalam temuan, cukup dengan meningkatkan jawaban yang

diberikan dari kelompok yang kurang terwakili dan juga mengurangi jawaban dari kelompok yang terlalu terwakili.

Dengan kata lain: jawaban-jawaban tersebut diberi bobot ulang untuk memastikan bahwa distribusi yang tidak merata dalam sampel disesuaikan sejalan dengan distribusi dalam populasi. Ambil contoh populasi, di mana distribusi gender dalam populasi tersebut adalah 50% laki-laki dan 50% perempuan, sedangkan dalam sampel distribusinya adalah 60 berbanding 40. Pembobotan memungkinkan kita untuk memastikan bahwa bagian jawaban laki-laki yang lebih tinggi dan bagian jawaban perempuan yang lebih rendah akan disesuaikan dengan menggunakan bobot yang lebih tinggi untuk jawaban yang diberikan oleh perempuan dan bobot yang lebih rendah untuk laki-laki. Singkatnya, informasi dari responden dan non-responden memungkinkan kita untuk menetapkan bobot yang lebih tinggi untuk kelompok yang kurang terwakili, dan juga untuk bobot yang lebih rendah dari kelompok yang terwakili secara berlebihan. Penerapan prosedur pembobotan yang disesuaikan tersebut dapat meningkatkan representasi sampel dan akibatnya kualitas estimasi statistik.

7.3 ANALISIS DATA KUANTITATIF DAN STATISTIK

Statistik Deskriptif

Sekarang kita beralih ke analisis data kuantitatif. Pertama, kita perlu mengeksplorasi data secara deskriptif. Ini berarti melihat bagaimana kita menggunakan statistik sebagai alat untuk memberikan gambaran umum tentang karakteristik utama data individual (mikro), misalnya jawaban yang diberikan oleh responden dan disimpan dalam basis data, di mana baris mewakili responden dan kolom mewakili variabel. Mari kita lihat variabel individual terlebih dahulu. Dengan membuat tabel frekuensi, angka dan persentase kategori jawaban dicantumkan. Ukuran yang paling umum digunakan untuk menunjukkan pusat distribusi adalah mean: semua pengamatan dijumlahkan dan dibagi dengan jumlah total pengamatan (misalnya enam responden: $(3 + 4 + 8 + 8 + 6 + 7)/6 = 6$).

Kita juga dapat melihat kategori dengan frekuensi tertinggi: modus. Dalam contoh di atas, modusnya adalah 8 karena dua responden memberikan jawaban ini. Ukuran lainnya adalah median: titik di mana separuh dari jumlah total pengamatan tercapai. Ini adalah ukuran kecenderungan sentral dan membagi distribusi menjadi dua, sehingga 50% skor berada di atas median dan 50% di bawah. Oleh karena itu, kita perlu memberi peringkat jawaban – 3, 4, 6, 8, 8, 7 – dan menemukan bahwa mediannya adalah 6. Ukuran lainnya adalah rentang, yang menunjukkan perbedaan antara skor maksimum dan minimum dalam suatu distribusi (dalam contoh: $8 - 3 = 5$).

Dengan ukuran-ukuran di atas, adalah mungkin untuk menghitung ukuran-ukuran untuk variasi dalam skor: varians dan simpangan baku. Varians mengukur jarak kuadrat ke mean, sedangkan simpangan baku adalah jarak rata-rata semua skor dari mean. Sekali lagi, kami menggunakan enam responden dan nilai mean yang sudah dihitung 6. Jumlah semua jarak $(-3; -2; 0; 2; 2; 1)$ selalu 0. Untuk varians kami menghitung jarak kuadrat: $(32 + 22 + 02 + 22 + 22 + 12)$ dibagi dengan $6 = 22/6$ atau 3,67. Simpangan baku adalah akar kuadrat ($\sqrt{}$) dari varians (s): $\sqrt{3,67} = 1,91$. Perhatikan bahwa perhitungan ini didasarkan pada asumsi bahwa

keenam responden adalah populasi, dan bukan sampel. Jika mereka membuat distribusi sampel, jarak kuadrat harus dibagi dengan jumlah kasus dikurangi 1. Dalam rumus varians sampel, ini direpresentasikan oleh $n - 1$.

Oleh karena itu, untuk sampel ini, varians akan sama dengan $22/5$ atau $4,40$, dan simpangan baku akan sama dengan $2,10$. Jelas, semakin rendah simpangan baku dan varians dibandingkan dengan rata-rata yang diberikan, semakin kita dapat yakin bahwa rata-rata variabel spesifik ini merupakan prediktor yang baik untuk semua nilai yang diberikan oleh responden dalam sampel. Rata-rata dan simpangan baku terkait dengan fitur penting dalam statistik: distribusi normal. Distribusi normal bersifat simetris dan memiliki kurva kepadatan berbentuk lonceng dengan satu puncak. Untuk distribusi normal, hampir semua nilai (97,5%) terletak dalam tiga simpangan baku dari rata-rata. Jika distribusinya tidak normal, misalnya dalam kasus di mana distribusinya sangat miring ke kanan atau ke kiri, ada risiko bahwa statistik yang menunjukkan apakah korelasi signifikan secara statistik atau tidak adalah salah. Dalam kasus seperti itu, signifikansi statistik harus didasarkan pada distribusi binomial.

Sekarang mari kita beralih dari statistik deskriptif satu variabel tunggal, yang disebut statistik univariat, ke statistik bivariat. Statistik bivariat menguji hubungan statistik antara dua variabel. Dua variabel berhubungan positif ketika nilai rendah dan tinggi pada satu variabel bertepatan dengan nilai rendah dan tinggi pada variabel lainnya. Demikian pula, ketika nilai rendah pada satu variabel bersamaan dengan nilai tinggi pada variabel lainnya, hubungannya negatif. Karena deskripsi numerik hubungan bivariat sering digeneralisasikan ke suatu populasi, kita perlu mengetahui seberapa yakin kita bahwa hubungan deskriptif berdasarkan sampel juga akan ditemukan dalam populasi. Dengan kata lain: apakah hubungan tersebut signifikan secara statistik atau tidak? Untuk menilai signifikansi statistik ini, kita perlu mengeksplorasi statistik inferensial. Kotak 7.4 memberikan informasi dasar tentang variabel dan tingkat pengukurannya, yang penting untuk memahami operasi statistik mana yang mungkin (dan diizinkan).

KOTAK 7.4 VARIABEL DAN TINGKAT PENGUKURAN

Dalam statistik, variabel dapat dikategorikan ke dalam salah satu tingkat pengukuran berikut: Nominal; Ordinal; Interval; Rasio.

Variabel nominal merupakan tingkat pengukuran terendah. Kategori variabel ini hanya dibedakan berdasarkan namanya. Oleh karena itu, kode numerik yang mewakili kategori dapat dipilih secara acak selama dikaitkan secara unik dengan satu kategori. Contoh variabel nominal adalah pilihan Partai. Kategori variabel ini tidak diurutkan secara logis (misalnya Buruh, Demokrat Kristen, Liberal).

Variabel ordinal tidak dapat dikodekan secara acak karena kategorinya diurutkan berdasarkan peringkat. Misalnya, variabel Tingkat Pendidikan bersifat ordinal karena diasumsikan bahwa tingkat dapat diurutkan menurut jumlah pengetahuan yang telah

diperoleh responden. Umumnya, tingkat pengetahuan terendah telah dicapai ketika orang menyelesaikan (1) hanya pendidikan sekolah dasar. Tingkat yang lebih tinggi diperoleh oleh mereka yang memiliki (2) pendidikan kejuruan rendah, (3) pendidikan menengah, (4) kejuruan menengah dan (5) pendidikan kejuruan tinggi atau gelar universitas. Untuk menyatakan peringkat ini, kode variabel ordinal harus dalam urutan menaik atau menurun, dari (1) hingga (5).

Berbeda dengan variabel ordinal, variabel interval memiliki perbedaan (atau interval) yang diketahui secara pasti antara kategori berikutnya. Contoh variabel interval adalah 'tahun lahir'. Kategori variabel ini diurutkan berdasarkan peringkat dan interval antara kategori berikutnya (misalnya satu tahun) berjarak sama satu sama lain. Variabel rasio memiliki 'titik nol' absolut tambahan, misalnya pendapatan (Rp. 2.000.000 dua kali lipat Rp. 1.000.000) atau usia (10 tahun dua kali lipat 5 tahun). Contoh umum variabel interval, tetapi bukan variabel rasio, adalah derajat Celsius (20 derajat tidak dua kali lebih panas dari 10 derajat).

Variabel dikotomi adalah kategori variabel khusus. Mereka selalu memiliki tepat dua kategori, seperti Gender. Variabel-variabel ini memungkinkan peneliti untuk memberi peringkat observasi dalam hal ada/tidaknya (atau ya/tidak). Untuk variabel Gender, responden adalah perempuan atau bukan (laki-laki). Selain itu, menjadi tidak relevan apakah ada interval yang sama antara semua kategori atau tidak karena hanya ada satu interval. Oleh karena itu, secara matematis, variabel dikotomis memiliki karakteristik yang sama dengan variabel interval.

Statistik Inferensial

Dalam statistik inferensial, ukuran sampel penting karena perhitungan didasarkan pada fakta bahwa semakin banyak responden, semakin besar kemungkinan bahwa perhitungan akan mewakili populasi yang lebih besar. Selain itu, simpangan baku juga penting. Semakin rendah simpangan baku, semakin kita dapat yakin bahwa nilai rata-rata dalam sampel merupakan estimasi yang baik dari nilai dalam populasi yang lebih besar yang tidak diteliti. Seperti yang disebutkan sebelumnya, simpangan baku mencerminkan jarak rata-rata ke nilai rata-rata yang ditemukan dalam sampel. Semakin kecil jarak ini, semakin baik estimasi nilai rata-rata yang diambil dari responden dalam populasi sampel.

Dua aspek – ukuran sampel (n) dan simpangan baku – mencakup ukuran galat baku ($s\bar{x}$) yang ditemukan dengan membagi simpangan baku dengan akar kuadrat ukuran sampel: s/\sqrt{n} . Misalkan kita memiliki sampel 100 responden, dan simpangan baku sama persis dalam contoh berdasarkan enam responden: 1,66. Untuk kasus ini, standar error adalah 0,17 (perhitungan: $1,66/\sqrt{100}$). Standar error merupakan fitur penting karena memungkinkan kita menghitung interval kepercayaan di sekitar estimasi. Standar error memberi tahu kita dalam rentang mana kita dapat memperkirakan bahwa, misalnya, 95% dari semua kemungkinan rata-rata sampel akan berada dalam rentang ini. Perhitungan kasar interval ini dilakukan dengan

mengalikan dua standar error dan dengan mengurangi/menambahkan nilai ini ke/dari nilai rata-rata. Dalam contoh kita, $6 \pm 2 \times 0.17 = 5,66$ dan $6,34$.

Banyak Lembaga Statistik Nasional dan organisasi penelitian lainnya juga menyediakan Interval Kepercayaan (CI) sebagai tambahan pada estimasi (nilai rata-rata) untuk memahami seberapa andal suatu estimator. CI yang sangat besar akan menunjukkan bahwa estimator tidak banyak bicara tentang (sub)populasi yang ditentukan. CI juga berguna untuk menguji hipotesis penelitian. Dalam contoh di atas, hipotesis yang mengharapkan nilai rata-rata kurang dari 5,50 akan ditolak.

Namun, dalam analisis statistik, strategi lain adalah menggunakan tingkat signifikansi (notasi: α). Tingkat signifikansi yang umum adalah 10%, 5%, dan 1%. Ketika hasil sampel berada di luar interval ini, hasilnya akan masuk ke area penolakan dan hipotesis nol juga ditolak sebagai hasilnya (lihat juga Bab 3). Probabilitas yang tepat (juga dikenal sebagai 'nilai-p' atau hanya 'p') dapat dihitung dengan paket perangkat lunak statistik apa pun. Nilai-p ini dapat berupa satu sisi atau dua sisi, tergantung pada apakah ada gagasan tentang apakah nilai yang diharapkan dari satu kelompok lebih tinggi atau lebih rendah daripada nilai yang diharapkan untuk kelompok lain (satu sisi), atau apakah tidak ada gagasan (sama sekali) (dua sisi).

Paket Statistik untuk Ilmu Sosial (SPSS) mencakup pengujian untuk menilai apakah hubungan antara dua atau lebih variabel signifikan secara statistik, dan seberapa kuat asosiasinya. Satu uji untuk membandingkan (perbedaan antara) nilai rata-rata dua kelompok adalah uji-t. Perbandingan lebih dari dua kelompok dimungkinkan dengan menggunakan analisis varians (ANOVA) (membandingkan antara rata-rata kelompok). Jika varians antara rata-rata kelompok (variens antar kelompok) kecil, kita sering tidak akan menemukan perbedaan statistik yang besar antara dua kelompok. Demikian pula, jika varians di sekitar rata-rata kelompok (variens dalam kelompok) besar, mean bukanlah penduga yang baik (yaitu CI besar), dan akibatnya kita tidak akan menemukan bahwa nilai rata-rata kelompok akan berbeda secara statistik. Kombinasi varians antar kelompok yang rendah dan varians dalam kelompok yang tinggi hampir tidak akan menghasilkan temuan bahwa kelompok tersebut berbeda. Kombinasi ini tercermin dalam pembagian antara varians kelompok/variens dalam kelompok, dan dinyatakan dalam nilai-F. Nilai-F yang besar dikaitkan dengan varians antara yang relatif besar dibandingkan dengan varians dalam, dan sebaliknya nilai-F yang rendah dikaitkan dengan varians antara yang rendah dan varians dalam yang tinggi.

Dalam desain eksperimen, hipotesis menguji apakah perlakuan memengaruhi rata-rata kelompok eksperimen. Analisis varians sering kali diterapkan, tergantung pada pengaturan eksperimen yang tepat. Jika rata-rata kelompok berbeda, penting untuk memverifikasi perlakuan mana yang menyebabkan perubahan. Pendekatan yang umum adalah menggunakan uji-t. Montgomery (2005) merinci berbagai desain eksperimen dan analisis varians yang sesuai. Pada bagian berikut tentang analisis data, dasar-dasar metode ini diuraikan lebih lanjut.

Sekarang mari kita lanjutkan dengan analisis tabel. Tabel kontingensi umumnya digunakan untuk menggambarkan asosiasi atau hubungan antara variabel dengan jumlah kategori yang rendah (sebaiknya < 10), dan sering digunakan hanya untuk variabel nominal

dan ordinal. Tabel ini terdiri dari dua atau lebih kolom dan baris, tergantung pada jumlah kategori. Sel-sel bagian dalam berisi pengamatan untuk setiap kombinasi kolom dan baris. Sel-sel bagian luar disebut marginal, di mana jumlah total pengamatan untuk setiap kolom dan setiap baris disajikan. Jumlah total semua marginal adalah jumlah total pengamatan dan ditunjukkan di kanan bawah tabel kontingensi.

Salah satu ukuran asosiasi yang berlaku untuk semua tabel adalah chi-kuadrat (χ^2). Tinggi chi-kuadrat ini menunjukkan perbedaan antara jumlah yang diamati dan yang diharapkan dalam sel-sel bagian dalam tabel kontingensi. Angka yang diharapkan dihitung dari situasi hipotetis di mana tidak ada hubungan statistik antara variabel. Chi-kuadrat yang tepat dihitung dengan mengambil perbedaan antara jumlah yang diamati dan yang diharapkan dari setiap sel. Perbedaan ini dikuadratkan, dibagi dengan jumlah yang diharapkan terkait, dan akhirnya dijumlahkan.

Dengan demikian, chi-kuadrat menunjukkan tingkat perbedaan antara tabel yang diamati dan tabel tanpa hubungan statistik apa pun. Nilai chi-kuadrat yang tinggi menunjukkan tingkat hubungan yang tinggi dan sebaliknya. Berdasarkan chi-kuadrat, pengukuran asosiasi Cramér's V telah dikembangkan untuk tabel di mana setidaknya satu variabel adalah ordinal. Kelebihan Cramér's V adalah nilainya selalu antara 0 (tidak ada hubungan) dan 1 (hubungan sempurna). Nilai yang lebih rendah dari 0,25 menunjukkan hubungan yang rendah, dan nilai 0,35 dan lebih tinggi menunjukkan hubungan yang kuat. Untuk hanya variabel ordinal, pengukuran asosiasi Kendalls Tau B (jumlah kategori sama) dan Kendalls Tau C (jumlah kategori tidak sama) sering digunakan. Nilai-nilai bervariasi antara -1,00 (asosiasi negatif sempurna), dan 1,00 (asosiasi positif sempurna), di mana 0,00 menunjukkan tidak ada hubungan.

Pengukuran asosiasi lain berdasarkan variabel ordinal adalah korelasi orde peringkat Spearman Rho. Manfaat korelasi peringkat Spearman adalah korelasi ini cukup mirip dengan koefisien korelasi Pearson, yang merupakan pengukuran asosiasi penting untuk variabel interval/rasio. Namun, korelasi Pearson (r) memerlukan hubungan yang mendekati linier, yang tidak diperlukan untuk korelasi Spearman. Asosiasi linier mungkin sepenuhnya negatif ($r = -1,00$, jika setiap peningkatan satuan x menghasilkan penurunan satuan y) atau sepenuhnya positif ($r = 1,00$). Hubungan antara dua variabel juga dapat ditunjukkan oleh nilai pada variabel dependen (y) yang diprediksi oleh skor pada variabel independen (x). Teknik ini disebut analisis regresi. Dalam analisis semacam itu, garis ditarik yang meminimalkan jarak antara titik-titik kedua variabel dalam diagram sebar. Peningkatan satu unit variabel independen dikaitkan dengan peningkatan bersamaan sebesar x unit pada variabel dependen lainnya: ini adalah koefisien- b .

KOTAK 7.5 RINGKASAN UKURAN STATISTIK/TINGKAT VARIABEL

Dependent variable (y)	Independent variable(s) (x1; x2; x3 . . . xN)		
	Nominal	Ordinal	Interval or Ratio
Nominal	Chi square Cramér's V	Chi square Cramér's V	Chi square Cramér's V
Dichotomous	Chi square Cramér's V Logistic regression	Chi square Cramér's V Logistic regression	Chi square Cramér's V Logistic regression
Ordinal	Chi square Cramér's V Ordinal regression	Kendalls tau-b and tau-c Spearman's Rho Ordinal regression	Kendalls tau-b and tau-c Spearman's Rho Ordinal regression
Interval or Ratio	Pearson's R T-test and F-test (multiple) Linear regression	Pearson's R T-test and F-test (multiple) Linear regression	Pearson's R T-test and F-test (multiple) Linear regression

Intersep atau konstanta (a) juga merupakan parameter penting selain koefisien b (b) karena setiap garis lurus secara matematis dapat dikaitkan dengan rumus $y = a + bx$. Intersep (a) adalah nilai y saat garis memotong sumbu y. Nilai ini dapat ditemukan dengan memperluas garis regresi ke sumbu y. Jika semua skor y terletak tepat pada garis regresi, hubungan liniernya sempurna, dan varians yang dijelaskan adalah 1,00 (100%). Dalam model regresi (teoretis) seperti itu, semua nilai variabel y dapat diprediksi secara tepat berdasarkan nilai variabel x. Dalam praktik umum, varians yang dijelaskan jauh lebih rendah. Varians yang dijelaskan dapat ditingkatkan dengan menambahkan lebih banyak variabel x (x2; x3; xN) ke dalam model. Penyertaan lebih banyak variabel independen mengacu pada analisis regresi berganda.

Jenis analisis regresi yang spesifik dan sering digunakan adalah analisis regresi logistik. Ini digunakan jika variabel dependen (y) bersifat dikotomis, yang hanya terdiri dari dua kategori (lihat Kotak 7.5). Variabel independen dimasukkan baik sebagai variabel interval atau sebagai kategori di mana satu kategori akan berfungsi sebagai kategori referensi. Nilai dari semua kategori lainnya mencerminkan jarak dari kategori referensi ini, yang dinyatakan sebagai nilai-b dan rasio peluang (OR). OR sebesar 1,00 menunjukkan bahwa tidak ada perubahan dibandingkan dengan kategori referensi; jika OR secara signifikan lebih rendah atau lebih tinggi dari 1,00, OR menyatakan kemungkinan bahwa kategori ini memiliki skor yang lebih rendah, atau lebih tinggi pada variabel dependen dibandingkan dengan kategori referensi.

KOTAK 7.6 MENGHITUNG VALIDITAS DAN RELIABILITAS, SKALA DAN MODEL PENGUKURAN

Validitas mengacu pada apakah suatu pengukuran benar-benar mengukur apa yang ingin diukur. Pertanyaan dapat mengukur sesuatu yang sangat berbeda dari apa yang dimaksudkan. Reliabilitas berkaitan dengan (tidak adanya) kesalahan acak dari pengukuran:

dalam keadaan yang sama, pengukuran yang diulang seharusnya (secara kasar) menghasilkan hasil yang serupa. Misalnya, kemungkinan bahwa suatu pengukuran tidak dapat diandalkan meningkat ketika pertanyaan yang digunakan dapat ditafsirkan dalam berbagai cara. Jika seorang peneliti tertarik untuk mengukur suatu konsep dengan lebih dari satu indikator, jawaban dapat dijumlahkan untuk membuat skala Likert. Reliabilitas skala ini akan lebih tinggi daripada reliabilitas setiap pertanyaan terpisah. Ini tentu saja tidak berarti bahwa pengukuran yang andal juga valid.

Dimungkinkan juga untuk menghitung reliabilitas suatu konsep (yang diukur) yang terdiri dari sejumlah variabel. Dalam SPSS, tersedia berbagai ukuran, yang paling sering digunakan adalah alfa Cronbach. Hal ini didasarkan pada jumlah variabel (juga ditunjukkan sebagai item), dan korelasi antara semua variabel. Semakin banyak item dan semakin tinggi korelasi antar-item, semakin tinggi pula ukuran alfa. Alfa yang lebih rendah dari 0,60 menunjukkan bahwa reliabilitasnya rendah dan konsepnya tidak reliabel (terukur). Jika ukuran alfa berada di antara 0,60 dan 0,70 reliabilitasnya sedang, dan di atas 0,80 reliabilitasnya tinggi. Jika reliabilitasnya tidak memuaskan, solusinya adalah memasukkan lebih banyak item dalam skala Likert. Jika suatu item menunjukkan korelasi yang lemah dengan item lain, solusinya adalah menghapus item tersebut dalam skala. SPSS menghitung alfa jika suatu item dihapus.

Selain skala Likert, ada kemungkinan lain untuk membuat skala berdasarkan beberapa variabel.

Dalam model pengukuran, skala dihitung berdasarkan korelasi antara variabel yang disertakan. Sejumlah variabel direduksi menjadi satu atau beberapa variabel baru: faktor-faktor yang mewakili (seleksi) variabel tersebut. Analisis semacam itu adalah analisis 'faktor', yang paling banyak digunakan adalah Analisis Komponen Utama (PCA) dan Analisis Faktor Utama (PFA). Penilaian apakah solusi faktor yang diberikan tepat bergantung pada asumsi teoritis dan angka statistik, seperti varians faktor yang dijelaskan, dan beban variabel tunggal pada faktor yang dipilih.

Dalam semua contoh di atas, variabel-variabel tersebut saling terkait sedemikian rupa sehingga skor pada variabel independen memprediksi – sampai batas tertentu – skor pada variabel dependen dalam model regresi. Model Persamaan Struktural (SEM) memungkinkan penyertaan banyak model regresi secara simultan. Dalam banyak kasus, dua atau lebih variabel dependen disertakan. SEM juga memungkinkan penyertaan model pengukuran di mana berbagai variabel dikaitkan dengan konsep 'laten', yang pada kenyataannya (diasumsikan) mewakili berbagai faktor (lihat Kotak 7.6). Ada berbagai ukuran 'kecocokan' yang menunjukkan sejauh mana model mencerminkan data empiris (korelasi) dengan baik.

Dalam dunia yang ideal, semua model akan didasarkan pada teori (penjelas). Teori-teori ini akan menentukan variabel dan, khususnya, mekanisme yang diasumsikan mampu memengaruhi variabel lain (yaitu variabel dependen). Meskipun teori penjelas tersedia (lihat Bab 3), tidak semua model dapat didasarkan pada teori tersebut. Salah satu alasannya adalah bahwa teori-teori ini tidak benar atau valid secara apriori (untuk semua situasi). Alasan lainnya adalah bahwa dalam penelitian, situasi baru dianalisis yang belum menjadi objek analisis teoritis. Ketika revolusi media sosial pertama kali menyusup ke masyarakat dan muncul pertanyaan tentang apa dampak Facebook dan Twitter terhadap perilaku pemilih, serangkaian variabel baru masuk ke dalam persamaan yang belum dikembangkan teori penjelasannya, apalagi diuji.

Tidak adanya teori yang dapat diterapkan dan diuji juga meluas ke model sederhana yang menyertakan satu variabel dependen dan satu variabel independen, serta model kompleks, seperti SEM dengan banyak variabel independen dan dependen. Saat menggunakan teori, perlu dipastikan apakah hubungan antara variabel yang diperiksa palsu atau tidak, dengan kata lain, apakah korelasi mungkin disebabkan oleh variabel lain yang tidak diperhitungkan dalam analisis awal.

Contoh akan membantu. Statistik Belanda menunjukkan bahwa imigran non-Barat di Belanda lebih sehat daripada penduduk asli. Namun, variabel 'ketiga' dapat menjelaskan sifat palsu dari temuan yang tampak aneh ini. Dalam kasus ini, misalnya, satu faktor yang tidak diteliti adalah perbedaan usia antara penduduk asli dan imigran non-Barat. Imigran non-Barat di Belanda rata-rata jauh lebih muda, dan orang yang lebih muda biasanya lebih sehat daripada orang yang lebih tua. Jika kita memperhitungkan usia dalam model, fakta bahwa non-imigran sebenarnya kurang sehat daripada penduduk asli terungkap.

Tidak perlu dikatakan, lebih banyak variabel dapat dimasukkan dalam model seperti itu, termasuk tingkat pendidikan (orang yang berpendidikan tinggi lebih sehat daripada yang berpendidikan rendah). Dalam model (regresi), kita harus menyadari bahwa hasilnya menunjukkan efek dari kontribusi unik dari variabel independen yang disertakan yang dikontrol untuk variabel independen lainnya. Variabel independen harus dipilih berdasarkan teori dan bukti penelitian sebelumnya (yang kuat). Dalam contoh ini, teori dari demografi dan epidemiologi membantu menemukan variabel-variabel ini (dan menjelaskan temuan-temuan), tetapi ini tidak selalu terjadi. Sebagai aturan praktis, semakin banyak variabel yang disertakan, semakin sulit pula penafsirannya. Mengambil contoh negara asal dan kesehatan, untuk semua variabel yang disertakan, kami mengesampingkan perbedaan-perbedaan (misalnya dalam usia, pendidikan, dan sebagainya) antara imigran non-Barat dan penduduk asli. Namun, perbedaan-perbedaan tersebut masih ada, yang terungkap dalam statistik bivariat. Dengan membandingkan hubungan bivariat dengan hasil-hasil berdasarkan model-model yang lebih kompleks, kami dipaksa untuk memberikan penjelasan yang tepat, yang seringkali lebih sulit daripada yang diharapkan pada pandangan pertama. Faktanya, para peneliti harus berhadapan dengan dua dilema:

- Hubungan sederhana (bivariat) antara variabel yang ditemukan melalui statistik deskriptif menggambarkan statistik faktual yang sebenarnya, tetapi juga dapat

- menyesatkan karena variabel lain mungkin memainkan peran penting, sementara
- Temuan berdasarkan model kompleks sering kali tidak dapat dipahami karena semakin banyak variabel yang dimasukkan dalam analisis statistik, sering kali (atau setidaknya kadang-kadang) tanpa dikaitkan dengan teori t (T) kecil atau kapital.

KOTAK 7.7 SUBSUMASI

Yang dapat membantu adalah menyimpulkan dari teori-teori yang ada tentang komunikasi interpersonal dan perilaku di dunia digital, wawasan tentang bagaimana Facebook dan Twitter dapat berinteraksi dengan perilaku memilih. Teori-teori ini menunjuk pada mekanisme kognitif dan perilaku yang berperan dalam berbagai pengaturan komunikasi. Dengan memasukkan komunikasi interpersonal Facebook dan Twitter ke dalam mekanisme yang lebih umum ini, variabel-variabel yang relevan dapat ditemukan. Leeuw (2012) memberikan contoh.

Demi kejelasan, kami sarankan untuk membangun model kompleks secara bertahap, dimulai dari model sederhana, lalu memperluas model dengan memasukkan beberapa variabel lagi untuk setiap langkah berikutnya. Kami mencoba melakukannya sedemikian rupa sehingga teori penjelasan atau intervensi dapat memainkan perannya.

7.4 EMPAT CONTOH

Sampai saat ini, kami telah menjelaskan berbagai metode untuk bekerja dengan data kuantitatif, baik pada tingkat deskriptif maupun pada tingkat inferensial. Sekarang, kami menyajikan contoh yang menjelaskan bagaimana hasil analisis semacam ini terlihat saat berhadapan dengan pertanyaan spesifik dan praktis. Contoh pertama menyangkut tingkat kepuasan masyarakat Belanda terhadap demokrasi Belanda, dengan data dari DPES. Contoh kedua menggunakan Survei Sosial Eropa sebagai sumber. Contoh ketiga membahas penelitian empiris tentang kualitas pemilihan umum di negara-negara OCSE. Terakhir, contoh keempat merinci eksperimen tentang dampak insentif dalam surat di muka terhadap perilaku respons dalam survei.

Contoh 1: Studi Pemilihan Umum Parlemen Belanda (DPES) tentang Tingkat Kepuasan Masyarakat Belanda terhadap Demokrasi Belanda

Tabel 7.1 menyajikan dan membandingkan kepuasan warga negara Belanda terhadap demokrasi berdasarkan perbedaan gender dan tingkat pendidikan. Mari kita lihat kolom di bawah ini dengan total persentase. Kolom tersebut mengungkap bahwa, berdasarkan 1633 responden dalam DPES 2012, 13% sangat puas dengan demokrasi Belanda, 66% lainnya cukup puas, 18% tidak terlalu puas, dan 2% sama sekali tidak puas.

Keempat persentase ini berjumlah 100% dan mencakup jawaban dari seluruh 1633 responden. Kolom ketiga dan keempat menyajikan distribusi gender yang menunjukkan bahwa 16% responden laki-laki dan 11% responden perempuan sangat puas. Tabel tersebut dengan

jelas menunjukkan bahwa pemilih dengan pendidikan tertinggi, khususnya, lebih puas daripada pemilih dengan pendidikan rendah. Cara lain untuk menyajikan temuan adalah dengan menggunakan diagram batang (Gambar 7.1).

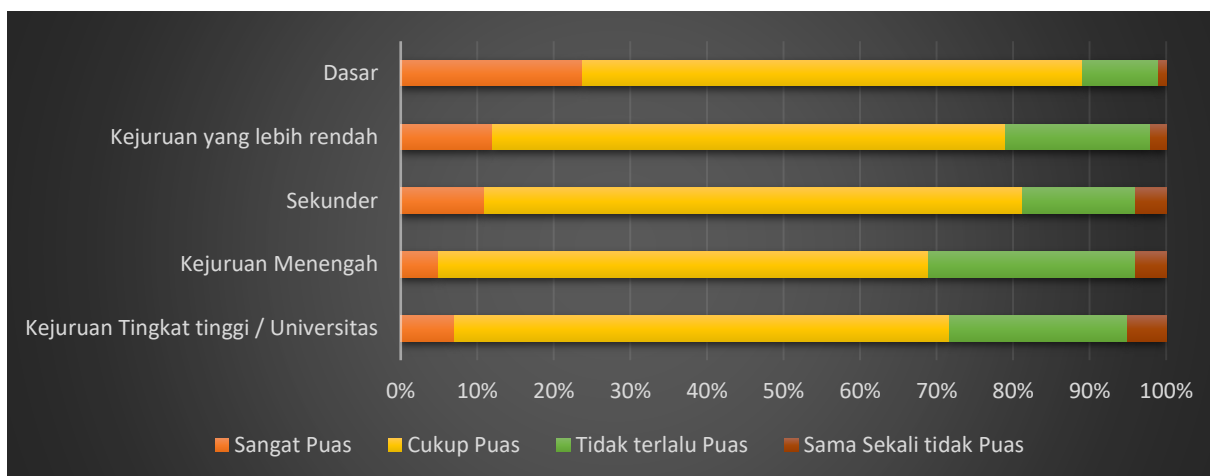
Dengan melihat warna hitam, terlihat jelas bahwa sebagian besar responden berpendidikan tinggi merasa 'sangat puas dengan demokrasi' daripada responden yang berpendidikan rendah. Di sisi lain, dengan melihat warna abu-abu dan abu-abu muda, kita melihat bahwa jawaban 'tidak terlalu' dan 'tidak sama sekali' lebih banyak ditemukan di kalangan responden yang berpendidikan rendah daripada responden yang berpendidikan tinggi.

Lebih jauh, jika kita menganggap indikator kepuasan ini sebagai variabel interval, mulai dari (1) sangat (223 kasus), (2) cukup (1092 kasus), (3) tidak terlalu (308 kasus), hingga (4) tidak sama sekali (39 kasus), nilai rata-ratanya adalah 2,1, yang sangat dekat dengan posisi 'cukup puas'. Nilai median dan modusnya adalah 2,0, dan rentangnya adalah 3,0. Simpangan baku dihitung dengan rata-rata semua perbedaan absolut antara semua 1662 kasus yang memberikan jawaban, berkisar dari 1 hingga 4 (223 + 1092 + 308 + 39) dan nilai rata-rata. Simpangan baku ini (angka 0,64) biasanya dihitung menggunakan program perangkat lunak komputer, seperti SPSS. Variansnya adalah 0,41 (0,64 * 0,64). Statistik inferensial menunjukkan bahwa galat baku adalah 0,016.

Sekadar mengingatkan Anda, kami menghitung galat baku dengan membagi simpangan baku dengan akar kuadrat ukuran sampel ($0,64/40,3 = 0,016$). Dengan mengalikan galat baku dengan 1,96, kita memperoleh 0,03. Jika kita menambahkan dan mengurangi angka ini (0,03) dari nilai rata-rata 2,1, muncul interval kepercayaan: 2,08 dan 2,13. Statistik inferensial dapat digunakan untuk menghitung ukuran asosiasi antara karakteristik. Kami telah mengungkapkan bahwa ada hubungan antara pendidikan dan kepuasan terhadap demokrasi: Cramér's $V = 0,14$; $p < 0,001$. Ada juga hubungan dengan gender: Cramér's $V = 0,08$; $p = 0,014$. Perhatikan bahwa hubungan ini kurang jelas karena ukuran asosiasi lebih rendah (0,08), dan nilai p lebih tinggi, tetapi masih jelas di bawah ambang batas 0,05.

Tabel 7.1 Kepuasan terhadap demokrasi Belanda berdasarkan jenis kelamin dan pendidikan, 2012 (n = 1633)

	Total	Jenis Kelamin		Pendidikan				
		Pria	Wanita	Dasar	Kejuruan yang lebih rendah	Sekunder	Kejuruan Menengah	Kejuruan Tingkat tinggi / Universitas
Sangat Puas	13	16	11	7	5	11	12	24
Cukup Puas	66	63	68	64	64	71	67	66
Tidak terlalu puas	18	18	19	23	27	15	19	10
Sama sekali tidak puas	2	3	2	5	4	4	2	1



Gambar 7.1 Kepuasan terhadap demokrasi Belanda berdasarkan pendidikan (n = 1633)

Contoh 2: Survei Sosial Eropa (ESS) dan Tingkat Kepercayaan pada Lembaga

Survei Sosial Eropa (ESS) adalah survei lintas negara yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan interaksi antara lembaga-lembaga Eropa yang terus berubah dan keyakinan serta perilaku sosial dan politik warga negara Eropa. Populasi yang digunakan oleh ESS adalah semua orang berusia 15 tahun ke atas di setiap negara yang berpartisipasi. Data telah dikumpulkan melalui wawancara tatap muka dua kali setahun sejak tahun 2002. Para pemimpin penelitian ESS telah berupaya keras untuk meningkatkan akurasi survei.

Di semua negara, sampel acak sistematis diambil dan kesepakatan dicapai di antara tim peneliti mengenai komposisi kerangka sampel yang tepat. Beberapa langkah diambil untuk meningkatkan tingkat respons, seperti insentif bagi peserta dan pelatihan khusus bagi pewawancara. Tingkat respons telah melampaui 60% dalam banyak kasus. Kesalahan nonrespons telah dipantau secara ketat untuk memastikan keterwakilan.

Selain itu, upaya telah dilakukan untuk mengurangi kesalahan pengukuran dengan memperhatikan penerjemahan pertanyaan survei. ESS mencakup banyak topik, termasuk kepercayaan pada orang lain dan pada lembaga seperti peradilan, polisi, parlemen, dan partai politik. Salah satu pertanyaan dalam survei tersebut menanyakan: 'Tolong beri tahu saya dengan skor 0–10 seberapa besar Anda secara pribadi mempercayai masing-masing lembaga yang saya bacakan. Nol (0) berarti Anda sama sekali tidak mempercayai suatu lembaga, dan 10 berarti Anda memiliki kepercayaan penuh.' Perbandingan lintas negara mengungkapkan bahwa Belanda adalah negara dengan tingkat kepercayaan yang tinggi.

Bersama dengan negara kesejahteraan sosial-demokrat lainnya – termasuk Norwegia, Finlandia, Denmark, dan Swedia – Belanda memiliki peringkat yang tinggi. Sebagian besar, 64%, penduduk Belanda mempercayai orang lain. Hal ini sangat kontras dengan tingkat kepercayaan di banyak negara Eropa Timur dan Selatan. Di Turki, Bulgaria, dan Portugal, tingkat kepercayaan sosial kurang dari 20%. Temuan lainnya adalah bahwa banyak (72%) warga negara Belanda mempercayai polisi (skor 6–10). Hanya di beberapa negara Nordik, khususnya Denmark dan Finlandia, lebih banyak orang mempercayai polisi. Sekitar 63% penduduk Belanda memiliki kepercayaan pada sistem peradilan. Hanya di empat negara lain – Swiss,

Norwegia, Denmark dan Finlandia – kepercayaan pada sistem peradilan lebih tinggi.

Di Belgia, kepercayaan jauh lebih rendah pada 44%, angka yang sebanding dengan yang di Prancis dan Inggris. Tingkat kepercayaan yang lebih rendah ditemukan di Ukraina, Bulgaria dan Kroasia. Mayoritas orang Belanda juga memiliki kepercayaan pada lembaga politik: di parlemen, pada politisi dan pada partai politik. Tingkat kepercayaan ini lebih tinggi daripada di sebagian besar negara lain dan mirip dengan yang ditemukan di Norwegia, Finlandia, Denmark dan Swedia. Tingkat kepercayaan yang sangat rendah ditemukan di negara-negara Eropa Timur, seperti Polandia, Bulgaria, Ukraina dan Hungaria. Di beberapa negara Mediterania, seperti Yunani dan Portugal, kepercayaan pada lembaga politik rendah dibandingkan dengan negara-negara Eropa lainnya.

Selain itu, tingkat partisipasi dalam pemilihan parlemen tinggi di Belanda: hanya di Denmark, Swedia dan Norwegia lebih banyak orang pergi ke tempat pemungutan suara. Ini juga berlaku untuk Belgia dan Siprus, di mana kehadiran wajib telah diperkenalkan. Namun, jika menyangkut kegiatan politik lainnya, seperti demonstrasi, menghubungi politisi, menandatangani petisi dan memboikot produk, Belanda menempati posisi tengah dalam peringkat Eropa (lihat Tabel 7.2).

Pada Tabel 7.3 ditampilkan korelasi antara berbagai indikator kepercayaan dan partisipasi pemilih. Dengan menggunakan korelasi urutan peringkat (Spearman's Rho), korelasi yang kuat antara keduanya terungkap. Sebagian besar korelasi mencapai 0,80 atau lebih tinggi. Korelasi yang tinggi ini menyiratkan bahwa jika posisi negara pada satu indikator kepercayaan tersedia, kita dapat membuat prediksi yang cukup baik mengenai posisi negara dalam peringkat tersebut untuk indikator kepercayaan lainnya. Korelasi tertinggi ditemukan pada kepercayaan pada partai politik dan kepercayaan pada politisi (0,99). Namun, tidak semua indikator kepercayaan berkorelasi kuat. Hal ini khususnya berlaku untuk korelasi antara kepercayaan pada parlemen Eropa (EP) dan partisipasi pemilih (0,36).

Perhatikan bahwa ini juga merupakan satu-satunya korelasi yang tidak signifikan ($p > 0,05$). Pemeriksaan terhadap angka-angka dalam tabel menunjukkan mengapa korelasi ini rendah: partisipasi pemilih yang tinggi tidak sering kali disertai dengan kepercayaan yang besar pada EP, dan hal itu juga berlaku untuk kombinasi partisipasi pemilih yang rendah dan tingkat kepercayaan yang rendah pada EP. Nilai korelasi peringkat Spearman biasanya sangat mendekati nilai R Pearson, dan ini juga berlaku untuk korelasi antara delapan indikator di atas. R-kuadrat (R^2) adalah varians yang dijelaskan dan memberi tahu kita bagian varians variabel dependen (y) yang dijelaskan oleh nilai-nilai pada variabel independen (x). Istilah lain untuk R^2 adalah kesesuaian model (dalam hal ini regresi antara variabel x dan y).

Sekarang mari kita lihat contoh dengan menjelaskan varians kepercayaan pada polisi versus kepercayaan pada sistem peradilan. Diagram sebar (Gambar 7.2) menunjukkan bahwa R^2 sama dengan 0,82. Perhatikan bahwa ini sesuai dengan nilai R Pearson sebesar 0,90 (korelasi) dengan mengambil akar kuadrat 0,82. Perhatikan juga bahwa nilai R korelasi sebesar 0,90 ini sesuai dengan nilai yang sama persis seperti yang dinyatakan dalam korelasi Rho Spearman pada Tabel 7.3. Selain itu, persamaan regresi ditampilkan. Nilai rata-rata menunjukkan bahwa kepercayaan pada polisi rata-rata lebih tinggi (57%) dibandingkan dengan

kepercayaan pada sistem peradilan (44%).

Titik potong garis regresi adalah 20,56, yang sama dengan posisi kepercayaan pada polisi dan kepercayaan 0% pada sistem peradilan. Kemiringan (nilai-b) adalah 0,88, yang menunjukkan bahwa di atas kepercayaan 20,6%, kepercayaan 0,88% harus ditambahkan untuk setiap kepercayaan 1% pada sistem peradilan. Misalnya, jika kepercayaan pada sistem peradilan adalah 70%, prediksi untuk kepercayaan pada polisi adalah: $20,56\% + (0,88 * 70\%) = 82,16\%$. Perhatikan bahwa ini secara efektif mencerminkan posisi Swiss (masing-masing 70% dan 82%).

Tabel 7.2 Kepercayaan terhadap orang lain dan lembaga (politik), tingkat partisipasi di 28 negara (%)

	Tahun Survei	Orang lain	Sistem Peradilan	POLISI	Politisi	Parlemen	Partai politik	Parlemen	Keluar
Belgia	2012	46	44	66	31	44	30	47	89
Bulgaria	2012	18	10	23	4	7	4	32	52
Siprus	2012	21	40	44	9	18	9	32	79
Denmark	2012	78	86	90	47	63	48	45	88
Jerman	2012	41	60	77	20	39	18	32	72
Estonia	2012	48	42	58	16	26	14	36	64
Finlandia	2012	74	79	93	41	61	41	44	67
Perancis	2010	27	40	54	13	24	10	28	55
Yunani	2010	26	28	39	3	7	3	12	62
Hongaria	2010	31	36	44	15	29	14	37	62
Irlandia	2012	48	46	73	15	21	13	33	70
Islandia	2012	59	60	90	23	31	18	33	81
Kosovo	2012	22	19	49	11	19	12	48	43
Kroasia	2010	35	17	32	4	8	4	15	54
Belanda	2012	65	67	77	50	52	48	45	75
Norwegia	2012	75	82	83	44	66	43	35	78
Ukraina	2010	29	6	10	4	6	5	25	57
Austria	2006	44	60	66	16	40	17	28	75
Polandia	2012	26	20	46	6	13	6	29	49
Portugal	2012	20	19	51	4	9	3	16	58
Rusia	2012	32	21	20	13	18	14	23	60
Slovenia	2012	35	18	49	7	15	7	23	66
Slowakia	2012	24	15	27	10	15	10	22	59
Spanyol	2012	44	25	59	7	21	7	26	69
Republik Ceko	2012	33	30	42	14	19	14	28	59
Inggris Raya	2012	48	52	73	21	31	19	18	66
Swedia	2012	63	66	74	38	60	38	36	83
Swiss	2012	54	70	82	45	63	41	35	49

Tabel 8.3 Kepercayaan terhadap orang lain dan lembaga (politik), partisipasi di 28 negara: Spearman's Rho

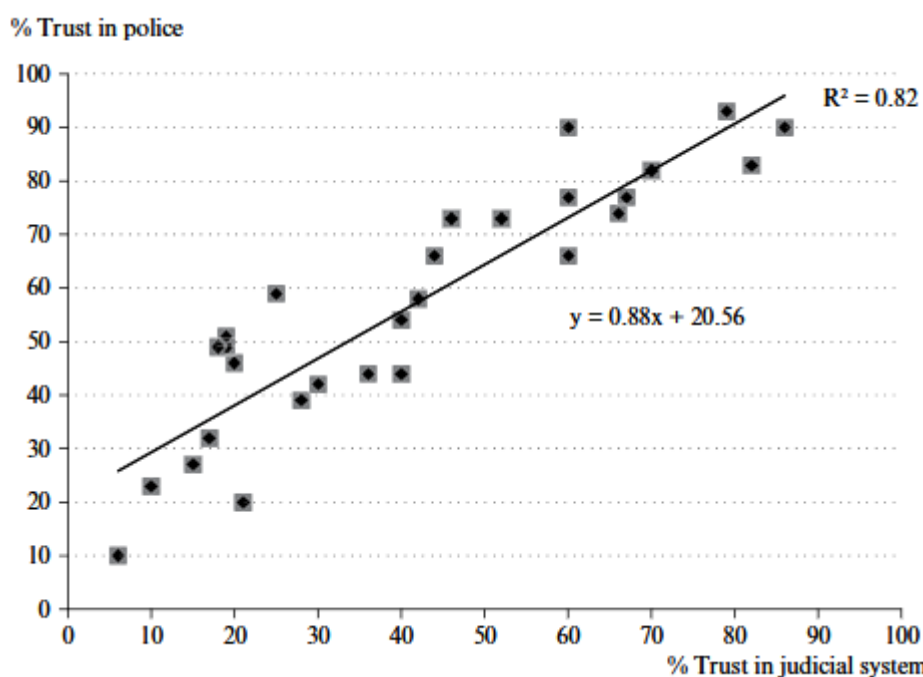
	Orang lain	Sistem Peradilan	POLISI	Politisi	Parlemen	Partai politik	Parlemen Eropa	Keluar
Kepercayaan: orang lain	1,00							
Kepercayaan: sistem peradilan	0,84**	1,00						
Kepercayaan: polisi	0,83**	0,90**	1,00					
Kepercayaan: politisi	0,85**	0,91**	0,83**	1,00				
Kepercayaan: parlemen	0,84**	0,93**	0,88**	0,96**	1,00			
Kepercayaan: partai politik	0,84**	0,88**	0,78**	0,99**	0,95**	1,00		
Kepercayaan: Parlemen Eropa	0,48*	0,57**	0,56**	0,69**	0,67**	0,67**	1,00	
Jumlah pemilih dalam pemilihan Parlemen	0,63**	0,66**	0,60**	0,59**	0,60**	0,58**	0,36	1,00

Catatan:

* $p < 0,05$ (dua sisi).

** $p < 0,01$ (dua sisi).

Sumber: ESS.



Gambar 8.2 Kepercayaan pada polisi dan kepercayaan pada sistem peradilan: diagram sebar (n = 28 negara)

Contoh 3: Misi Pemantauan Pemilu: Kualitas Tempat Pemungutan Suara OSCE yang Diukur

Contoh ketiga memiliki sifat yang berbeda: penelitian empiris tentang kualitas pemilu di kawasan OSCE. OSCE adalah Organisasi untuk Keamanan dan Kerja Sama di Eropa (OSCE); organisasi ini menangani berbagai masalah terkait keamanan, termasuk pengendalian senjata, hak asasi manusia, minoritas nasional, demokratisasi, strategi kepolisian, kontraterorisme, serta kegiatan ekonomi dan lingkungan. Semua 57 negara peserta menikmati status yang

sama, dan keputusan dibuat berdasarkan konsensus atas dasar yang mengikat secara politik, tetapi tidak mengikat secara hukum.

Tempat pemungutan suara merupakan elemen penting dari proses pemilu. Tempat pemungutan suara merupakan tempat pemungutan suara dan tempat penghitungan suara oleh penyelenggara pemilu. Misi Pemantauan Pemilu (EOM) memainkan peran penting dalam mengevaluasi kualitas pemilu. OCSE telah mengembangkan buku pegangan, termasuk buku pegangan tentang Pemantauan Media untuk Misi Pengamatan Pemilu dan brosur yang menjelaskan metodologi utama pekerjaan ini. Metodologi EOM didasarkan pada partisipasi pemantau pemilu internasional.

Untuk tujuan ini, semua negara anggota OSCE diminta untuk mengirim pemantau internasional: pemantau jangka panjang (LTO) untuk meliputi seluruh periode pemilu selama dua hingga tiga bulan, dan pemantau jangka pendek (STO) yang tinggal selama seminggu di sekitar hari pemilihan. Kantor Lembaga Demokratik dan Hak Asasi Manusia (ODIHR) menyediakan metodologi dan koordinasi untuk EOM. Tim inti yang terdiri dari 10 hingga 20 pakar pemilu internasional, bersama dengan staf lokal, ditempatkan di lapangan. OSCE/ODIHR menyebarkan ratusan STO.

Rata-rata sekitar 330 STO berada di lapangan per pemilihan, dengan jumlah ini meningkat dari sedikit lebih dari 200 pada tahun 1996 menjadi 400 pada tahun 2010. STO dipasang dalam tim yang terdiri dari dua orang, dan bersama dengan seorang pengemudi dan juru bahasa, mereka mengunjungi sekitar 10 hingga 12 tempat pemungutan suara dan melaporkan pengamatan mereka di setiap tempat pemungutan suara dengan menjawab lebih dari 50 pertanyaan pada 'Formulir Laporan Pengamat'.

Segara setelah itu, biasanya pada sore hari setelah hari pemilihan (dalam waktu 24 jam setelah penutupan tempat pemungutan suara), OSCE/ODIHR merilis pernyataan awal tentang pemilihan dan menerbitkan laporan akhir pemilihan dengan rekomendasi dalam waktu sekitar enam hingga 10 minggu setelah selesainya proses pemilihan. 'Kualitas pemilu', termasuk penilaian berdasarkan pengamatan di dalam tempat pemungutan suara, dianalisis berdasarkan beberapa kriteria yang berfokus pada pertanyaan apakah pemilu tersebut sejalan dengan paragraf-paragraf tertentu dalam komitmen Kopenhagen 1990, yang mengharuskan pemilu berlangsung setara, adil, rahasia, bebas, universal, transparan, dan akuntabel.

Selain EOM skala penuh, pendekatan lain untuk mengamati pemilu adalah misi pemilu terbatas, tanpa STO, yang disebut Misi Penilaian Pemilu (EAM). EAM telah menjadi lebih populer dalam beberapa tahun terakhir sebagai alat untuk meliputi pemilu di negara-negara anggota lainnya, termasuk negara-negara demokrasi 'lama' seperti Belanda, AS, dan Inggris.

Terkait metodologi dan statistik, hal pertama yang perlu disebutkan adalah bahwa EOM tidak perlu bersusah payah menghadapi masalah tidak adanya respons. Pada dasarnya semua tempat pemungutan suara yang didekati harus bekerja sama: ketua tempat pemungutan suara, sebagaimana dinyatakan dalam undang-undang pemilu dan tata tertib pemantau, tidak dapat menolak kehadiran pemantau internasional (yang terakreditasi). Akan tetapi, di beberapa negara bagian, beberapa bagian negara tidak dapat dicakup. Di Federasi Rusia, pemantau hanya berada di wilayah barat dan selatan negara tersebut. Baru-baru ini, dalam

pemilihan presiden dan legislatif 2014 di Ukraina, tidak ada pemantau yang dikirim ke wilayah Luhansk dan Donetsk karena risiko keselamatan.

Masalah ini pada dasarnya adalah masalah populasi: sampel didasarkan pada sebagian populasi dan semua kesimpulan tidak terkait dengan negara secara keseluruhan, tetapi bagian tertentu dari populasi tersebut. Dalam EOM yang khas, OSCE/ODIHR meminta sejumlah pemantau internasional, sering kali antara 300 dan 600. Dalam rencana penempatan, wilayah dipilih di mana LTO beroperasi. Sejumlah pemantau internasional dialokasikan ke wilayah LTO. Misalnya dalam Pemilihan Presiden 2014 baru-baru ini di Ukraina, total 40 tim LTO dikerahkan. Di dalam wilayah LTO sejumlah distrik dipilih di mana tim pemantau yang ditugaskan secara khusus harus mengamati pada hari pemungutan suara. Meskipun tidak ada bias seleksi karena non-respons (karena berbagai alasan), lebih banyak tempat pemungutan suara yang diamati di daerah perkotaan daripada di daerah pedesaan.

Alasan utamanya adalah bahwa tempat pemungutan suara terpencil lebih sulit diakses, dan tempat pemungutan suara yang terletak dekat dengan akomodasi pemantau lebih sering berada di daerah perkotaan daripada di daerah pedesaan. Seberapa parah bias seleksi ini bergantung pada korelasi antara perkotaan/pedesaan dan penilaian pemantau. Jika temuan pemantau di daerah pedesaan tidak berbeda dengan temuan di daerah perkotaan, yang menandakan tidak ada korelasi, estimasi tidak akan terpengaruh oleh bias seleksi. Namun, jika korelasi memang ada, misalnya situasi di daerah perkotaan lebih positif daripada di daerah pedesaan, hasilnya akan terlalu positif. Maka, obat mujarab adalah dengan menimbang ulang data: tempat pemungutan suara yang berlokasi di perkotaan akan menerima bobot yang lebih rendah, dan tempat pemungutan suara di pedesaan akan menerima bobot yang lebih tinggi.

Pemantau meliputi pembukaan tempat pemungutan suara, proses pemungutan suara, penghitungan suara, dan tabulasi hasil. Untuk keempat fase tersebut, pemantau mengisi pengamatan mereka dalam formulir laporan pemantau khusus. Pada siang dan malam hari pemilihan, hingga 8000 formulir laporan, berdasarkan pengamatan ini, diserahkan atau difaks ke kantor pusat EOM. Baru-baru ini, formulir ini telah dikirim dan diproses secara otomatis menggunakan perangkat lunak di tangan pemantau saat mengisi formulir laporan pemantau. Penyimpangan yang parah, seperti penjejalan kotak suara, intimidasi terhadap pemilih dan pemantau, diperiksa.

Jawaban untuk satu pertanyaan dalam empat formulir laporan pemantau, khususnya, menjadi bahan pemeriksaan ketat: 'Pelaksanaan proses [pembukaan; pemungutan suara; penghitungan; tabulasi] sangat buruk/buruk/baik/sangat baik'. Indikator keseluruhan ini merupakan alat yang sangat penting dalam penilaian pemilu berdasarkan temuan pemantau jangka pendek. Pentingnya pertanyaan ini dalam formulir laporan pemantau disorot dalam pengarahannya dan tanya jawab pemantau.

Pertanyaan ini juga menjadi tokoh kunci dalam pernyataan serta dalam negosiasi dengan berbagai delegasi yang terlibat dalam pernyataan bersama, yang dibuat dalam EOM khas oleh Majelis Parlemen OSCE dan Dewan Eropa, serta Delegasi Parlemen UE. Selain indikator keseluruhan, sekitar 50 pertanyaan khusus lainnya yang berkaitan dengan masalah dan penyimpangan disertakan dalam formulir laporan pemantau. Pemantau juga diminta

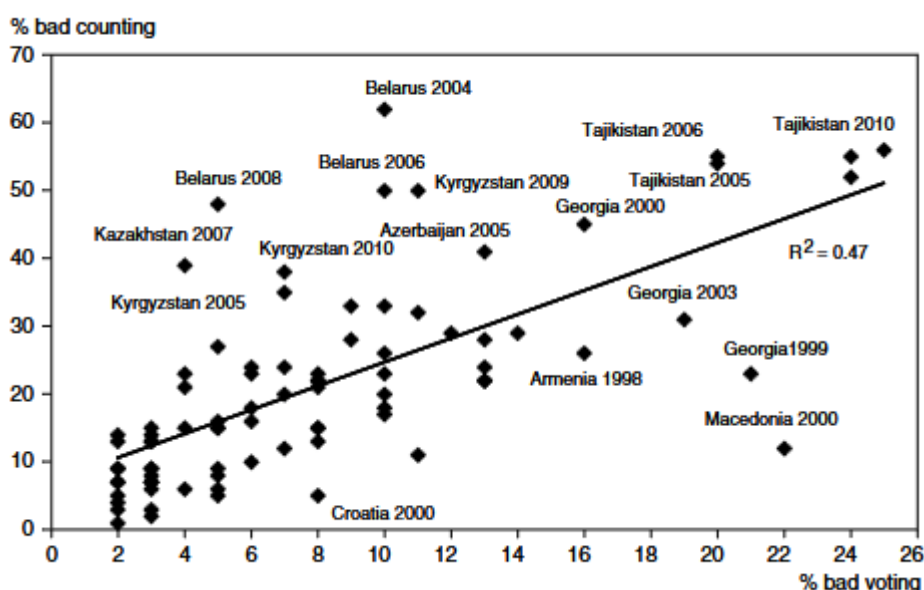
untuk memberikan komentar tertulis dan rincian lebih lanjut. Komentar yang diberikan oleh pemantau dalam formulir khusus diproses untuk menghasilkan ikhtisar dalam basis data masalah dan untuk mengidentifikasi pelanggaran yang signifikan.

Jelas, metodologi dalam EOM didasarkan pada campuran pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Komentar memberikan wawasan lebih jauh tentang apa yang dilihat dan didengar selama pengamatan, dan menyertai sifat informasi kuantitatif yang lebih statistik. Jika pelanggaran kuantitatif yang jelas (misalnya, pengisian kotak suara) tidak dijelaskan lebih lanjut melalui komentar, hal ini akan diselidiki dan data – jika diperlukan – akan dibersihkan sebagaimana mestinya.

Estimasi dan korelasi tersebut dibandingkan dengan temuan EOM lainnya. Misalnya, jika intimidasi diamati di 5% tempat pemungutan suara dalam suatu pemilihan, dan intimidasi hanya diamati di 2% dari semua pemilihan, ini menandakan bahwa ada masalah serius dalam pemilihan tersebut. Di sisi lain, angka 'pemilihan keluarga atau kelompok' sebesar 5% tergolong rendah dan bahkan dapat dianggap sebagai indikasi positif dari ketaatan yang lebih besar terhadap prinsip 'kerahasiaan' dalam pemilihan tersebut. Pelanggaran yang jelas terhadap berbagai prinsip tersebut harus disertai dengan penilaian yang (sangat) negatif secara keseluruhan. Beberapa masalah dan penyimpangan berkorelasi lebih kuat dengan indikator keseluruhan, dan akibatnya memiliki dampak yang lebih kuat pada keputusan pemantau apakah penilaian tersebut (sangat) buruk atau (sangat) baik, daripada yang lain.

Temuan pemantau dipelajari dari perspektif komparatif. Dalam Schmeets (2011), berdasarkan 96 EOM pada periode 1996-2010, sebuah tolok ukur diperkenalkan untuk mengevaluasi temuan pengamat berdasarkan indikator keseluruhan. Kuartil terbaik dari penilaian keseluruhan proses pemungutan suara terdiri dari sekelompok pemilihan dengan laporan negatif hingga 3%. Kuartil berikutnya mencakup antara 3 dan 6,5% laporan negatif, diikuti oleh kelompok yang berkisar antara 6,5 dan 10%, dan kuartil terburuk terdiri dari lebih dari 10% laporan negatif. Demikian pula, keempat kelompok pemilihan dipilih berdasarkan penilaian keseluruhan pengamatan penghitungan suara: kelompok terbaik terdiri dari pemilihan di mana kurang dari 9% laporan negatif, kelompok berikutnya berada dalam kisaran 9 hingga 16,9%, kelompok ketiga dari 17,0 hingga 27,4%, dan kelompok terburuk terdiri dari pemilihan yang pengamatan penghitungan suaranya lebih dari 27,5% negatif.

Benchmark ini menunjukkan bahwa proses pemungutan suara di Tajikistan dan Kaukasus Selatan – Azerbaijan, Georgia dan Armenia – termasuk dalam kategori terburuk (lebih dari 10% laporan negatif) dan akibatnya diberi label pemilihan 'sangat buruk'. Pemilihan umum di Albania, Belarus, Kazakhstan dan Makedonia ditemukan di kuartil ketiga ('buruk'). Negara-negara lain dicirikan sebagai 'baik' atau 'sangat baik'. Gambaran berubah untuk penghitungan suara. Tajikistan (55%) dan Belarus (52%) melampaui ambang batas 27,5 dan termasuk dalam kuartil terburuk dengan lebih dari setengah laporan pengamat negatif. Ini juga berlaku untuk Azerbaijan (38%) dan Kazakhstan (32%). Cara lain untuk menyajikan angka-angka tersebut adalah dalam grafik di mana penilaian proses pemungutan suara adalah variabel x, dan penilaian proses penghitungan adalah variabel y (lihat Gambar 7.3).



Gambar 7.3 Penilaian buruk hingga sangat buruk terhadap TPS di 81 tempat pemungutan suara dan penghitungan suara, 1996–2010

Sebanyak 81 EOM disertakan dan untuk beberapa EOM label juga disertakan. Mari kita lihat salah satu dari dua EOM di Kroasia pada tahun 2000: pengamat menilai 8% tempat pemungutan suara dalam proses pemungutan suara dan 5% tempat pemungutan suara dalam proses penghitungan suara secara negatif. Di Kazakhstan pada tahun 2007, 4% tempat pemungutan suara dinilai buruk atau sangat buruk, begitu pula 39% tempat penghitungan suara. Perhatikan bahwa kedua penilaian, proses pemungutan suara dan penghitungan suara, saling terkait. Garis regresi menunjukkan bahwa penilaian keseluruhan yang negatif terhadap proses pemungutan suara dikaitkan dengan penilaian keseluruhan yang negatif terhadap penghitungan suara dalam EOM ($R^2 = 0,47$). Dengan kata lain, jika tim pengamat menyimpulkan bahwa hanya di sejumlah kecil tempat pemungutan suara prosesnya buruk atau bahkan sangat buruk, mereka juga bersikap lunak dalam penilaian keseluruhan mereka terhadap proses penghitungan suara.

Gambaran umum ini dengan jelas menunjukkan bahwa variasi lintas negara cukup besar. Selain itu, penilaian keseluruhan terhadap proses pemungutan suara jelas lebih positif dibandingkan dengan proses penghitungan suara. Penjelasan untuk temuan ini adalah bahwa tim pemantau tinggal sekitar 30 menit di tempat pemungutan suara untuk mengamati proses pemungutan suara, sedangkan mereka tinggal dari awal hingga akhir untuk mengamati prosedur penghitungan suara. Mereka mungkin melihat lebih banyak masalah dan penyimpangan selama tinggal setidaknya dua hingga tiga jam untuk mengamati prosedur penghitungan suara daripada selama mengamati proses pemungutan suara. Penjelasan lebih lanjut adalah bahwa mungkin lebih mudah untuk memanipulasi proses penghitungan suara daripada proses pemungutan suara, dan akibatnya lebih banyak pelanggaran akan terlihat selama penghitungan suara.

Contoh 4: Eksperimen untuk Meningkatkan Tingkat Respons dengan Insentif dalam Studi Angkatan Kerja Belanda 2005

Desain yang tepat untuk menguji dampak suatu perlakuan adalah eksperimen terkontrol acak. Desain eksperimen yang tepat penting karena memungkinkan kita untuk menarik kesimpulan umum. Pengacakan dan pemblokiran adalah dua prinsip penting (lihat Bab 5 untuk informasi lebih lanjut). Ketika lembaga statistik nasional mengubah metodologi pengumpulan datanya, hal ini sering kali berdampak pada estimasi statistik, misalnya penilaian penduduk terhadap lingkungan tempat tinggal mereka sebagai aman atau tidak aman.

Untuk mengukur dampak dari perubahan metodologi tersebut, yaitu pelanggaran tren, sampel dibagi menjadi dua blok, dengan satu blok mendapatkan manfaat dari metode pengumpulan data tradisional, dan blok lainnya dari metode pengumpulan data baru. Interpretasi perbedaan antara temuan berdasarkan kedua sampel adalah perubahan dalam metodologi pengumpulan data. Perkiraan tersebut dikelilingi oleh margin, dan akibatnya sangat penting untuk memastikan keakuratan temuan sebelumnya, yang melibatkan pemilihan ukuran sampel kelompok eksperimen dan kontrol secara cermat.

Contoh eksperimen semacam itu adalah revisi surat pendahuluan untuk menilai dampak pada tingkat respons. Jenis penelitian tersebut memiliki sejarah panjang di mana berbagai ukuran telah dibahas dan diuji sebagai cara untuk meningkatkan tingkat respons. Groves dan Couper (1998) membedakan faktor-faktor yang berada di bawah kendali peneliti seperti desain survei, topik dan panjang kuesioner, pemilihan dan motivasi pewawancara, dan jumlah upaya kontak. Namun, karakteristik sosiodemografi, perilaku, dan sikap orang yang akan diwawancarai juga penting. Faktor-faktor lain terkait dengan interaksi antara pewawancara dan orang-orang yang dipilih. Dillman et al (2009) menyebut 'rasa hormat terhadap responden' sebagai elemen penting untuk memfasilitasi kerja sama. Surat pendahuluan merupakan elemen penting untuk mendapatkan rasa hormat (dan partisipasi).

Surat pengantar harus bertujuan untuk membangun hubungan baik antara peneliti dan responden dengan menunjukkan mengapa survei harus dilakukan dan mengapa kerja sama responden penting. Feskens (2009), Stoop (2014) dan Kappelhof (2015) menguraikan strategi yang disesuaikan untuk kelompok yang sulit disurvei, seperti kelompok etnis minoritas. Dan, di antara yang lain, Dillman (1991) mengacu pada penggunaan insentif tanpa syarat. Ada banyak literatur yang menunjukkan bahwa insentif tanpa syarat, bahkan dalam jumlah kecil, meningkatkan kerja sama orang-orang dalam survei. Menariknya, literatur tidak mengklaim hal yang sama untuk penghargaan atas partisipasi dalam survey.

Efek insentif prabayar pada tingkat respons sering dijelaskan dengan mengacu pada teori pertukaran sosial. Responden potensial menerima insentif dari lembaga penelitian tanpa harus memberikan sesuatu sebagai balasannya. Menurut teori ini, insentif dipandang sebagai tindakan kebaikan dan tanda kepercayaan, dan kebaikan ini membangkitkan norma timbal balik. Dalam menerima hadiah, calon responden merasa lebih atau kurang berkewajiban oleh norma sosial untuk menanggapi dengan cara yang sama.

Di Belanda, sebuah eksperimen skala besar ($n = 10.995$), berdasarkan Survei Angkatan Kerja Belanda (LFS), dilakukan pada bulan November–Desember 2005 oleh Statistik Belanda.

Eksperimen tersebut menemukan bahwa tingkat respons meningkat dari 66% menjadi 73% jika 10 perangko (nilai: Rp. 14.000) disertakan dalam surat muka. LFS dirancang sebagai panel berputar dengan lima gelombang. Setiap bulan, sampel sekitar 7500 alamat diambil dengan pengambilan sampel dua tahap yang berstrata. Sampel bulanan November dan Desember 2005 diacak ke dalam empat kelompok perlakuan tanpa perangko, 5 perangko, 10 perangko, dan 20 perangko. Secara total, 6960 alamat didekati pada bulan November dan 6029 pada bulan Desember. Alamat-alamat tersebut dialokasikan ke dalam empat kelompok perlakuan sebagai: (1) Tanpa insentif, 6195 alamat; (2) Insentif senilai Rp. 20.000 (5 perangko), 3146 alamat; (3) Insentif senilai Rp. 40.000 (10 perangko), 3148 alamat; (4) Insentif senilai Rp. 80.000 (20 perangko), 500 alamat.

Tabel 7.4 Respon dan non-respon rumah tangga berdasarkan varian insentif

	0 Stamp		5 Stamp		10 Stamp		20 Stamp	
		%		%		%		%
Penolakan	1211	23.2	476	18.1	432	16.1	57	13.1
Tidak ada peluang	240	4.6	125	4.8	123	4.6	26	6
Masalah Bahasa	78	1.5	37	1.4	51	1.9	5	1.2
Tidak ada kontak	262	5	127	4.8	106	4	29	6.7
Tanggapan	3419	65.6	1865	70.9	1964	73.4	317	73
Total	5210	100	2630	100	2676	100	434	100

Tujuan dari percobaan ini adalah untuk menyelidiki pertanyaan penelitian berikut: (1) Apa pengaruh insentif Rp. 20.000, Rp. 40.000, dan Rp. 80.000 terhadap tingkat respons? (2) Apakah insentif meningkatkan selektivitas, yaitu mengurangi variasi dalam tingkat respons antara subpopulasi yang berbeda?

Tabel 7.4 memberikan gambaran tentang respons kerja lapangan di bawah empat kelompok perlakuan percobaan. Respons meningkat secara substansial ketika perangko disertakan dalam surat awal. Dibandingkan dengan kelompok tanpa insentif, lonjakan tingkat respons sama dengan 5, 7,8, dan 7,4% untuk kelompok dengan 5, 10, dan 20 perangko. Perhatikan bahwa hal ini disebabkan oleh persentase penolakan yang lebih rendah, masing-masing sebesar 5,1, 7,1, dan 10,1%.

Pertanyaan penelitian kedua membahas selektivitas dalam respons, yaitu apakah insentif mengurangi atau meningkatkan variasi dalam tingkat respons antara subpopulasi yang berbeda. Distribusi respons dari variabel penjelas untuk keempat perlakuan hanya menunjukkan efek kecil dari insentif pada selektivitas untuk sebagian besar variabel. Namun, ada efek pada distribusi respons di seluruh wilayah dan negara asal. Pengaruh pada distribusi respons sangat kuat untuk tiga kota terbesar di Belanda – Amsterdam, Rotterdam, dan Den Haag – yang memiliki tingkat nonrespons tertinggi.

Insentif 10 perangko menghasilkan peningkatan tingkat respons dari 53 menjadi 65%, sedangkan di luar ketiga kota tersebut ada peningkatan sedang, dari 70 menjadi 76%. Di sisi lain, insentif tidak meningkatkan respons di antara kelompok etnis minoritas non-Barat. Sekitar 60% dari kelompok yang tidak menerima insentif berpartisipasi dalam survei. Dari kelompok

minoritas non-Barat yang menerima surat lanjutan yang menyertakan 10 perangko, 58% berpartisipasi. Ini bertentangan dengan temuan yang ditemukan di antara penduduk asli (peningkatan dari 69 menjadi 77%) serta di antara orang asing Barat (dari 64 menjadi 73%). Akibatnya, kesenjangan dalam tingkat respons antara etnis minoritas non-Barat dan penduduk asli meningkat. Ini juga berlaku untuk kesenjangan antara etnis minoritas non-Barat dan Barat. Efek insentif pada perilaku respons juga diuji dengan analisis regresi logistik. Efek interaksi antara insentif dan variabel sosial-demografis lainnya pada tingkat respons menunjukkan peningkatan atau penurunan selektivitas.

Oleh karena itu perilaku respons (1 = respons; 0 = kategori respons lainnya) diberikan dalam model regresi logistik menggunakan variabel penjelas berikut: (1) Perawatan (tanpa insentif, 5 perangko dan 10 perangko); (2) Usia (15–34/35–44/45–54/55–64/65 dan lebih tua); (3) Jenis kelamin (laki-laki/perempuan); (4) Ukuran rumah tangga (1/2/3/4/5 atau lebih anggota); (5) Pendapatan rumah tangga (distandarisasi); Wilayah (tiga kota terbesar/daerah lain); (6) Negara asal (penduduk asli Belanda/orang asing Barat/orang asing non-Barat). Terlepas dari pengaruh utama variabel independen yang disertakan pada variabel dependen (respons – ya/tidak), Statistika Belanda menyertakan apa yang disebut interaksi orde kedua dengan insentif dalam model regresi.

Dua interaksi signifikan ditemukan: (a) insentif × wilayah dan (b) insentif × negara asal. Hasilnya menegaskan temuan dalam asosiasi bivariat bahwa perbedaan dalam tingkat respons antara migran non-Barat dan migran Barat serta penduduk asli Belanda meningkat karena insentif. Perbedaan dalam tingkat respons antara tiga kota terbesar dan daerah lain menyusut. Dengan kata lain, jika kita fokus pada wilayah, ada lebih sedikit selektivitas jika kita menggunakan insentif 10 stempel. Namun, melihat negara asal menunjukkan peningkatan selektivitas.

Contoh ini menunjukkan cara menganalisis dampak perlakuan dalam sebuah eksperimen. Dimulai dengan tabel silang, model regresi berikutnya (dalam hal ini regresi logistik karena variabel dependen bersifat dikotomis) menyediakan informasi tentang efek utama dan interaksi antara perlakuan dan variabel independen lainnya.

Kita tinggalkan tahap jenis dan contoh analisis data kuantitatif ini mengenai pemilihan umum dan beralih ke sesuatu yang berbeda: analisis Big Data.

7.5 ANALISIS BIG DATA

Big Data biasanya mencakup kumpulan data dengan ukuran yang melampaui kemampuan perangkat lunak yang umum digunakan untuk menangkap, mengkurasi, mengelola, dan memproses data dalam waktu yang cukup lama. Sejumlah kerangka kerja pemrosesan dan analisis sumber terbuka telah mengakar dalam arena Big Data, misalnya Apache Hadoop. Bagian ini menjelaskan dua contoh tentang bagaimana Big Data dapat dianalisis: satu dari linguistik hukum komputasional dan satu dari bekerja dengan data pencarian Google.

Contoh 1: Studi Hukum Komputasional

Katz dan Bommarito (2013) mempelajari betapa rumitnya aturan hukum:

Pertanyaan ini khususnya menantang, karena hukum harus beroperasi dalam konteks statis dan dinamis, baik pada saat ini maupun lintas waktu. Sementara keadaan saat ini biasanya mendikte bagaimana aturan hukum dibuat, inovasi dalam interaksi sosial, pertukaran ekonomi, dan perilaku politik menghasilkan dunia yang semakin kompleks yang perilakunya selanjutnya harus diatur oleh hukum. Jadi, ketika masyarakat atau ekonomi menjadi lebih kompleks, aturan hukum dapat dikatakan harus beradaptasi untuk menyesuaikan dengan kompleksitas ini. Meskipun ide ini jelas dalam teori, ketika seseorang mengamati masyarakat dan perangkat aturan hukumnya yang kompleks, sulit untuk menilai secara objektif perlunya kompleksitas ini. Kompleksitas hukum yang diamati mungkin didorong oleh upaya sungguh-sungguh untuk mengimbangi perkembangan yang sedang berlangsung di masyarakat. Atau, hal itu mungkin hanya merupakan hasil sampingan dari upaya politisi untuk memberikan manfaat tertentu kepada individu atau kelompok kepentingan tertentu.

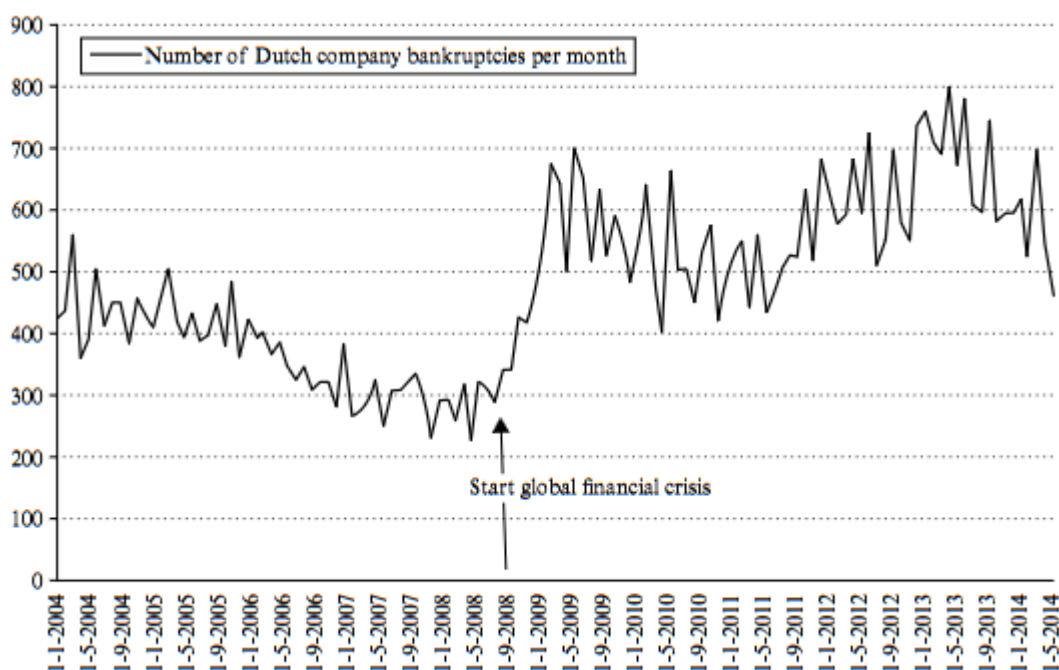
Politisi mungkin berusaha memaksimalkan fungsi pemilihan ulang mereka sendiri dengan memodifikasi aturan hukum dengan cara yang konsisten dengan preferensi konstituen inti mereka. Untuk membantu menyelesaikan masalah ini, Katz dan Bommarito mengembangkan metode untuk mengukur kompleksitas seobjektif mungkin. Fokus mereka adalah Kode Amerika Serikat yang menampilkan total sekitar 50 Judul. Dalam bentuk yang dipublikasikan, kode tersebut berisi ratusan ribu ketentuan dan puluhan juta kata. Teori mereka berpusat pada individu hipotetis yang terlibat dalam proses perolehan pengetahuan:

Akuisisi pengetahuan, bidang di persimpangan psikologi dan ilmu komputer, mempelajari protokol yang digunakan individu untuk memperoleh, menyimpan, dan menganalisis informasi. Dengan menggunakan ide-ide yang dikembangkan di bidang ini, kami mengembangkan dan menerapkan protokol akuisisi untuk Kode tersebut . . . dan mengonseptualisasikan kompleksitas sebagai biaya pelaksanaan protokol akuisisi. Protokol kami menunjukkan bahwa tiga fitur kualitatif utama dari Kode yang berkontribusi pada kompleksitasnya adalah struktur, bahasa, dan saling ketergantungan. Pembeneran konseptual ini memungkinkan kami untuk mengalihkan pembahasan tentang kompleksitas hukum melewati penilaian yang mirip dengan pepatah 'Saya mengetahuinya saat saya melihatnya'. Setelah mengidentifikasi ketiga aspek kompleksitas ini, kami mengukurnya secara empiris dengan menerapkan teknik komputasi yang berskala pada cakupan kumpulan informasi yang besar ini.

Contoh 2: Istilah Penelusuran Google, Google Correlate, dan Memprediksi Jumlah Kebangkrutan di Belanda

Willemsen dan Leeuw (sedang dalam proses penerbitan) mempelajari perkembangan kebangkrutan di Belanda dengan menggunakan metode daring dan otomatis Google untuk pemilihan kueri: Google Correlate. Metode ini menentukan kueri mana yang paling mirip dengan data; kueri penelusuran ini dapat digunakan untuk membuat estimasi nilai sebenarnya dari fenomena tersebut. Google Correlate menelusuri jutaan kueri kandidat untuk

menemukan kecocokan terbaik untuk rangkaian waktu yang ditargetkan.



Gambar 7.4 Kebangkrutan bisnis per bulan di Belanda (2004–2014)

Contoh awal adalah Google Flu Trends (GFT). GFT dibuat pada tahun 2008 dan bekerja dengan algoritme penelusuran untuk melacak aktivitas flu berdasarkan penelusuran individu untuk istilah terkait flu. Meskipun hasilnya spektakuler, GFT juga menghadapi kritik serius. Oleh karena itu, kami menantang diri sendiri untuk mencari tahu seberapa baik pendekatan ini dapat bekerja, saat menangani masalah yang dikenal dalam penelitian hukum (empiris): kebangkrutan di Belanda.

Ketika suatu perusahaan, lembaga, atau orang perseorangan tidak lagi mampu memenuhi kewajiban keuangannya, di Belanda, mereka – atau satu atau lebih kreditor mereka – dapat mengajukan kebangkrutan di tingkat Pengadilan Distrik. Jumlah kebangkrutan yang dinyatakan per bulan sebagian bergantung pada jumlah hari Pengadilan Distrik bersidang selama bulan tersebut, dan dapat berfluktuasi secara signifikan dari bulan ke bulan. Lihat Gambar 7.4 untuk data hukum administratif yang diunduh dari Statistik Belanda.

Gambar 7.4 menunjukkan bahwa dimulainya krisis keuangan global berdampak sangat serius pada jumlah kebangkrutan di Belanda. Dimulai dengan kebangkrutan Lehman Brothers pada 14 September 2008, krisis keuangan memasuki fase kritis yang ditandai oleh kegagalan bank-bank terkemuka dan upaya pemerintah Amerika dan Eropa untuk menyelamatkan lembaga keuangan. Hal ini mengurangi kemungkinan bagi perusahaan untuk memperoleh pinjaman baru guna melanjutkan bisnis mereka.

Willemsen dan Leeuw (sedang dalam proses) mengunggah rangkaian waktu kebangkrutan ke dalam spreadsheet Google Correlate. Hanya dua variabel yang diunggah – tanggal (bulan dan tahun) dan jumlah kebangkrutan untuk setiap bulan – sementara tidak ada label atau nama berkas yang relevan yang dilampirkan. Selanjutnya, koefisien korelasi (r)

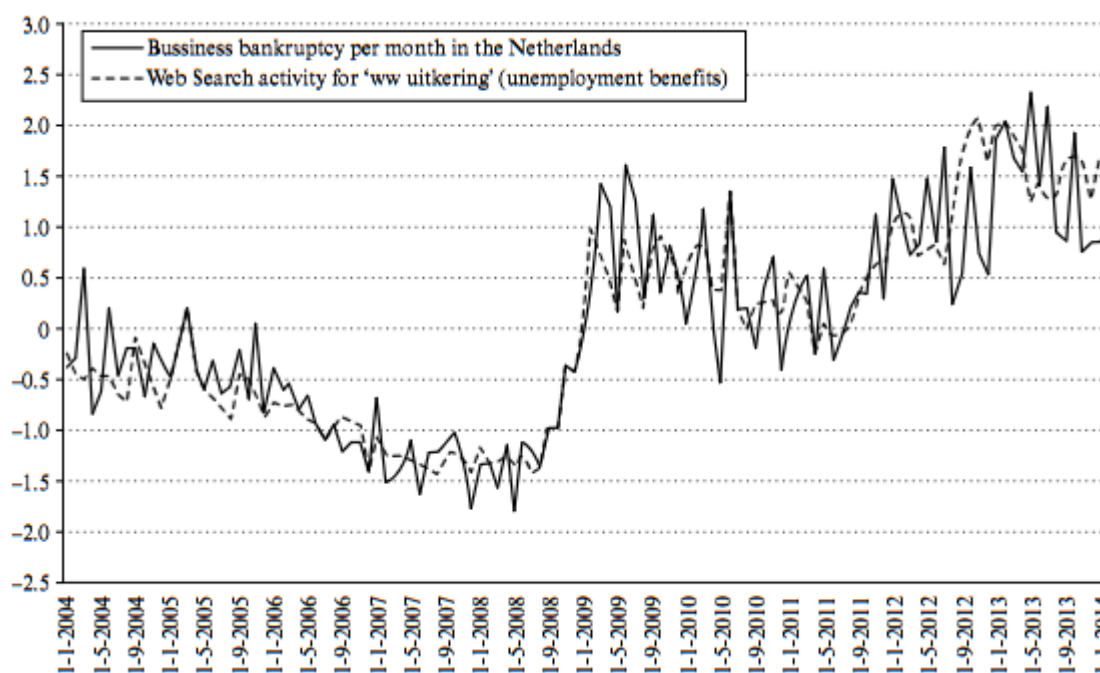
dihitung antara rangkaian waktu (Statistik Belanda) dan rangkaian waktu frekuensi untuk setiap kueri dalam basis data Google. Google Correlate menggunakan algoritma perkiraan tetangga terdekat (ANN) atas jutaan kueri kandidat dalam pohon pencarian daring untuk menghasilkan hasil dalam hitungan detik.

Kueri yang ditampilkan Google Correlate adalah kueri dengan koefisien korelasi tertinggi (lihat Tabel 7.5). Kueri Belanda pada Tabel 7.5 paling berkorelasi dengan pola target yang diunggah (kebangkrutan). Variasi dalam kueri dapat memprediksi jumlah kebangkrutan dalam waktu dekat, yang petunjuknya juga ditemukan pada Gambar 8.5. Ini menunjukkan bahwa kueri dengan korelasi tertinggi (=‘WW-uitkering’ [tunjangan pengangguran]) memiliki bentuk yang sama dengan deret waktu yang kami unggah dari Statistik Belanda (yang mewakili angka administratif dan ‘nyata’ kebangkrutan). Fakta bahwa kueri juga bertindak sangat baik pada saat terjadi perubahan yang sangat serius sungguh luar biasa.

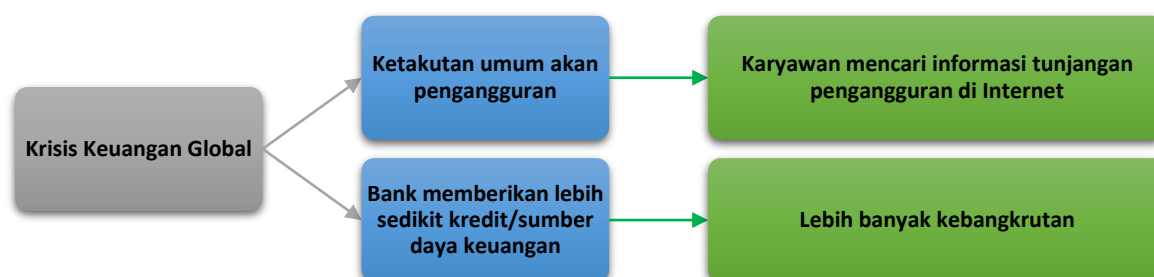
Selanjutnya, kami beralih ke pertanyaan tentang apa peran teori t kecil dalam memahami temuan ini. Teori t-kecil kami, yaitu, ekspektasi tentang bagaimana dunia bekerja dan apa yang dibutuhkan untuk memahami fenomena yang menarik (Lempert, 2010: 887) (lihat Bab 3) berpendapat bahwa karyawan perusahaan dengan masalah keuangan yang parah menggunakan istilah pencarian ini untuk menemukan informasi yang relevan, bahkan sebelum kebangkrutan diucapkan di Pengadilan Distrik. Teori t-kecil juga menunjukkan bahwa krisis keuangan global menyebabkan dua mekanisme lain: takut menjadi pengangguran dan kurangnya sumber daya keuangan.

Tabel 7.5 Kueri teratas untuk rangkaian waktu kebangkrutan di Google Correlate

Korelasi	Kueri	Terjemahan
0,900	WW Uitkering	Tunjangan pengangguran
0,872	WW	Singkatan untuk undang-undang pengangguran Belanda
0,857	Berekenen WW	Hitung tunjangan pengangguran
0,856	To excel	To Excel
0,848	Doorstart	Peluncuran ulang (suatu bisnis)
0,847	Credios	Agen penagihan utang Belanda
0,847	Uitkering	Tunjangan pengangguran
0,844	Failissement	Kebangkrutan
0,842	Hoogte WW	Besarnya manfaat



Gambar 7.5 Aktivitas yang diunggah pengguna untuk Kebangkrutan Bisnis per bulan di Belanda. Aktivitas Pencarian Web untuk 'wwuitkering' (tunjangan pengangguran) ($r = 0,900$)



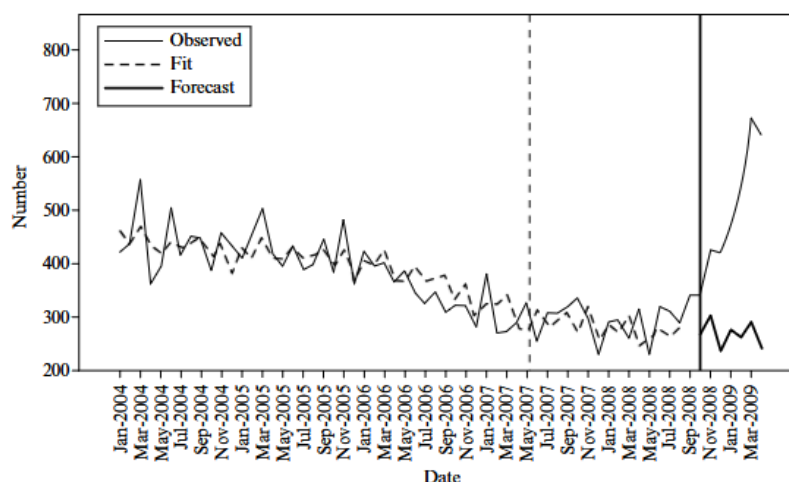
Gambar 7.6 Teori t-kecil mengenai mekanisme hubungan antara krisis keuangan global dan kebangkrutan

Mekanisme pertama menyebabkan lebih banyak permintaan untuk 'tunjangan pengangguran' dan istilah serupa, yang terakhir lebih untuk kebangkrutan (istilah terkait). Dengan menghubungkan mekanisme perilaku ini (dari teori t-kecil kami) dengan krisis keuangan global membuat temuan Google dapat dipahami (lihat Gambar 7.6).

Setelah menemukan kueri berkorelasi yang dapat dikaitkan dengan teori ini, langkah selanjutnya adalah mengeksplor skor kueri yang dinormalkan dan menggunakannya untuk membangun model prediksi baru di SPSS. Untuk menilai kekuatan prediktif model ini, kami harus memastikan bahwa model yang berisi data kueri memprediksi lebih baik daripada model autoregresif sederhana.

Untuk mengetahuinya, kami menggunakan tren kebangkrutan stasioner dari 1 Januari 2004 hingga 1 Oktober 2008. Kami kemudian mencoba memprediksi empat bulan berikutnya (ketika jumlah kebangkrutan benar-benar meledak) dengan model ARIMA reguler (Gambar

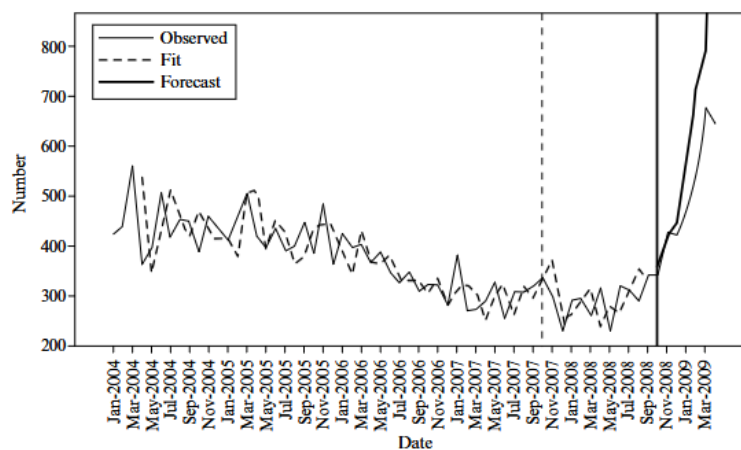
7.7a) dan model deret waktu serupa yang kami tambahkan data kueri yang dinormalkan dari Google Correlate (Gambar 7.7b). Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa prakiraan (di belakang garis putus-putus) dari model kedua jauh lebih baik daripada prakiraan menggunakan model ARIMA reguler.



Gambar 7.7a Model ARIMA reguler (hanya data kebangkrutan historis)

Kami merangkum beberapa karakteristik bekerja dengan Big Data:

- Koefisien korelasi [r] sangat tinggi (sekitar 0.90).
- Bekerja dengan teori t-kecil penting karena teori ini menjawab pertanyaan mengapa dan membantu para peramal untuk memahami mekanisme mana yang mungkin terlibat.
- Biaya pengumpulan dan analisis data, jika dibandingkan dengan pendekatan lain yang lebih klasik, sangatlah rendah. Alasannya sederhana: data tidak 'dikumpulkan' tetapi sampai batas tertentu 'disajikan' kepada para peneliti; perangkat lunaknya gratis dan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan (banyak) kueri sangat terbatas.



Gambar 7.7b Model ARIMA ditambah data kueri yang dinormalisasi sebagai variabel independent

7.6 ANALISIS DATA KUALITATIF

Meskipun ‘perang paradigma’ antara analisis kualitatif dan kuantitatif mulai menghilang, masih ada perbedaan penting. Sumber data kualitatif meliputi wawancara, observasi, dan dokumen, tetapi juga rekaman audio dan video, grafik, karya seni, gambar, dan foto, yang tersedia baik secara luring maupun daring. Dalam studi kualitatif, fokusnya biasanya adalah:

- Lebih pada makna, termasuk ‘deskripsi mendalam’, daripada pada pengukuran variabel spesifik dan fenomena yang dapat diukur;
- Lebih pada kedalaman dan detail serta kepekaan terhadap konteks daripada menemukan generalisasi; dan
- Lebih pada dampak nilai-nilai peneliti dan orang lain terhadap jalannya analisis daripada mengasumsikan kemungkinan penyelidikan bebas nilai.

Dalam buku ini, kami membatasi diri pada teks dan dokumen (‘data naratif’). Data ini dapat berupa kertas dan/atau bentuk digital, terstruktur tetapi juga tidak terstruktur, dan ‘resmi’ (seperti surat wasiat, klaim, putusan atau pernyataan kebijakan) tetapi juga ‘informal’ dan personal.

Mengapa ada pembatasan ini? Pertama, karena dalam dunia hukum jenis data ini (masih) dominan. Kedua, karena program perangkat lunak untuk analisis konten narasi mampu menganalisis jenis sumber lain, seperti video atau audio (lihat Kotak 7.8 untuk referensi program). Apa yang dapat dipelajari dari analisis konten teks dan dokumen juga relevan untuk jenis analisis konten lainnya.

Data teks atau narasi hadir dalam berbagai bentuk dan dari berbagai sumber. Taylor-Powell dan Renner (2003) dan Dholakia dan Zhang (2004) telah menginventarisasi sejumlah data tersebut:

- Pertanyaan terbuka dan komentar tertulis pada kuesioner dapat menghasilkan kata-kata tunggal, frasa singkat atau paragraf teks lengkap;
- Situs web;
- Testimoni, baik secara langsung maupun dalam korespondensi tertulis;
- Wawancara individual dalam bentuk catatan, ringkasan wawancara atau transkrip kata demi kata;

KOTAK 7.8 PERANGKAT LUNAK UNTUK ANALISIS DATA KUALITATIF TERMASUK ANALISIS ISI

Pada tahun 2006, Hall dan Wright mengajukan permohonan untuk menerapkan analisis isi dari ilmu sosial guna memahami hukum kasus: ‘Analisis isi lebih dari sekadar cara yang lebih baik untuk membaca kasus. Kami bukan penyebarluasan metode ini. Metode ini memiliki sejumlah keuntungan, beserta keterbatasan substansial, dibandingkan dengan analisis hukum konvensional. Yang kami klaim adalah, ketika seseorang membaca kasus dengan cara ini, seseorang terlibat dalam metode empiris hukum yang unik – suatu cara untuk menghasilkan pengetahuan yang objektif, dapat dipalsukan, dan dapat direproduksi

tentang apa yang dilakukan pengadilan dan bagaimana serta mengapa mereka melakukannya. Analisis isi bertujuan untuk pemahaman ilmiah tentang hukum itu sendiri sebagaimana ditemukan dalam opini pengadilan dan teks hukum lainnya. Kami berpendapat bahwa analisis isi membuat kajian hukum lebih konsisten dengan landasan epistemologis dasar penelitian ilmu sosial lainnya’.

Sepuluh tahun kemudian, program perangkat lunak tersedia secara luas untuk melakukan pekerjaan ini. Mereka mengatur, mengevaluasi, membuat kode, membuat anotasi, dan menginterpretasikan semua jenis data, membuat laporan dan visualisasi yang mudah dibaca, serta terhubung dan berbagi dengan peneliti lain. Biasanya disertai dengan instruksi YouTube dan video demo.

Cara menganalisis foto, film, TV, video, YouTube, grafiti, dan sumber data serupa

Untuk melakukan analisis komparatif terhadap gambar/foto/video, setiap gambar atau bingkai diperiksa dan dikodekan, kode dibagi menjadi beberapa bagian dan bagian-bagian tersebut dikelompokkan dan diberi label sebagai tema hingga data jenuh, redundansi informasi, dan/atau kejenuhan teoritis tercapai. Program seperti CAQDAS (misalnya QDA Miner 4.0) memfasilitasi pengodean gambar, foto, lukisan, dan jenis dokumen visual lainnya. Program lain (misalnya Transana, Atlas.ti) memfasilitasi pengodean data audio dan video.

Cara lain untuk menggunakan data visual adalah dengan merekam aspek-aspek tertentu dari perilaku. Perekaman video telah menjadi teknik sehari-hari yang umum untuk mendokumentasikan pengalaman, seperti hari libur atau perayaan. Perekaman video juga dilakukan di tempat umum, stasiun kereta bawah tanah, dan sejenisnya, yang menjadi sasaran pengawasan kamera video. Menganalisis film YouTube juga merupakan sumber informasi. Hal yang sama berlaku untuk data multimedia yang tersedia (sinetron, berita, iklan, materi daring), dan data visual pribadi (film keluarga – analisis dokumentasi) dan rekaman CCTV.

- wawancara kelompok diskusi atau kelompok fokus dapat melibatkan transkrip lengkap dan catatan dari moderator atau pengamat;
- blog, jurnal, dan buku harian;
- pengamatan dapat dicatat dalam catatan lapangan atau laporan deskriptif sebagai hasil dari pengamatan dan pendengaran;
- cerita dapat memberikan data dari laporan pribadi tentang pengalaman dan hasil program kebijakan dalam kata-kata orang itu sendiri;
- dokumen, laporan, putusan, catatan lapangan naratif, pertukaran email dan artikel berita atau materi tertulis/digital apa pun juga menyajikan sejumlah besar data kualitatif, termasuk yang berikut ini:

- a. Sistem Papan Buletin (media yang menampilkan semua pesan yang telah diposting di dalamnya dan balasannya masing-masing);
- b. komunitas daring;
- c. ruang obrolan/WhatsApp;
- d. akun Twitter dan data media sosial lainnya, termasuk perilaku pencarian (misalnya di Google).

yang dimiliki oleh sebagian besar pendekatan analisis data kualitatif. Aktivitas-aktivitas tersebut meliputi dokumentasi data dan proses pengumpulan data (termasuk manajemen data), organisasi/kategorisasi data ke dalam konsep, hubungan antar data, 'penguatan/legitimasi', dengan mengevaluasi penjelasan-penjelasan alternatif, menyangkal bukti, dan mencari kasus-kasus negatif serta pelaporan temuan-temuan.

Pengambilan Sampel, Dokumentasi, dan Manajemen Data

Pengambilan sampel, seperti halnya dalam penelitian kuantitatif, merupakan langkah penting dalam siklus empiris. Sering kali, peneliti kualitatif bertujuan untuk membandingkan kelompok, orang, organisasi, dokumen, atau peristiwa. Flick (2009) membedakan antara pengambilan sampel teoritis dan sampel yang bertujuan dan merujuk pada sekitar 10 sub tipe sampel. Onwuegbuzie dan Leech (2007) mengidentifikasi 22 skema pengambilan sampel. Terlepas dari tipologi pengambilan sampel yang digunakan, pengungkapan informasi tentang keputusan pengambilan sampel sangat penting, termasuk jenis sampel dan alasannya.

Data untuk studi kualitatif dapat dengan mudah menghasilkan 'volume' informasi yang serius. Wawancara satu jam dapat menghasilkan 20 hingga 25 halaman teks spasi tunggal (Kvale 1996). Miles (1979) menyatakan bahwa data kualitatif biasanya banyak, berantakan, sulit diatur, dan diskursif – 'gangguan yang menarik'. Hal ini dapat berupa catatan lapangan yang ekstensif, ratusan halaman transkrip dari wawancara atau kelompok fokus, dokumen, foto atau video, dan peneliti harus menemukan cara untuk memahami data tersebut. Bekerja dengan blog atau dokumen (hukum) juga dapat dengan mudah mengisi banyak DVD dan stik USB. Sekali lagi: bagaimana cara menangani hal ini? Akibatnya, pengelolaan dan reduksi data merupakan tugas penting dalam analisis kualitatif.

Konseptualisasi, Reduksi, Pengodean, dan Pengkategorian

Mengidentifikasi dan menyempurnakan konsep merupakan bagian penting dari proses iteratif analisis data kualitatif. 'Baca, baca, baca', adalah pepatah. Terkadang, pengonseptualisasian dimulai dengan pengamatan sederhana yang ditafsirkan secara langsung, 'diuraikan', lalu disatukan kembali dengan lebih bermakna. Bagan atau matriks yang dirancang dengan baik dapat memfasilitasi proses pengodean dan pengkategorian. Taylor-Powell dan Renner (2003) menambahkan hal berikut:

Beberapa orang menyebut pengkategorian informasi sebagai pengodean data atau pengindeksan data. Namun, pengkategorian tidak [secara otomatis] melibatkan pemberian kode numerik seperti yang Anda lakukan dalam analisis kuantitatif, di mana Anda memberi label variabel eksklusif dengan kode atau nilai yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk memberi makna pada kata-kata sebelumnya, Anda: a) mengidentifikasi tema atau pola – ide, konsep, perilaku,

interaksi, insiden, terminologi atau frasa yang digunakan; dan b) mengaturnya ke dalam kategori koheren yang merangkum dan memberi makna pada teks. Ini bisa jadi cukup padat karya, tergantung pada jumlah data. Namun, inilah inti dari analisis kualitatif. Ini melibatkan membaca dan membaca ulang teks dan mengidentifikasi kategori yang koheren.

Salah satu pendekatan yang lebih populer saat melakukan analisis data kualitatif (QDA) adalah bekerja dengan konsep yang peka. Istilah ini berasal dari Blumer (1954) yang membandingkan konsep definitif dengan konsep yang peka:

Konsep definitif merujuk secara tepat pada apa yang umum bagi suatu kelas objek, dengan bantuan definisi yang jelas dalam hal atribut atau tolok ukur yang tetap. Konsep sensitisasi tidak memiliki spesifikasi atribut atau tolok ukur tersebut dan akibatnya tidak memungkinkan pengguna untuk bergerak langsung ke contoh dan kontennya yang relevan. Sebaliknya, konsep ini memberi pengguna rasa referensi dan panduan umum dalam mendekati contoh empiris. Konsep sensitisasi hanya menyarankan arah untuk melihat.

Seperti yang dikemukakan Bowen (2006), peneliti (sosial) cenderung memandang konsep sensitisasi sebagai perangkat interpretatif. Meskipun Blumer (1954) menyarankan bahwa konsep-konsep ini dapat diuji, terdapat risiko serius bahwa konsep-konsep tersebut ternyata menghasilkan praktik-praktik imunisasi karena panduan tentang kapan data harus diberi label mengganggu atau mengonfirmasi konsep yang peka, sering kali tidak tersedia.

Miles, Huberman, dan Saldana (2014) menyebut aktivitas-aktivitas ini sebagai kondensasi data: ‘proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi, dan/atau mengubah data yang muncul dalam korpus lengkap catatan lapangan tertulis, transkrip wawancara, dokumen, dan materi empiris lainnya. Kondensasi data terjadi secara terus-menerus sepanjang masa proyek yang berorientasi kualitatif’.

Kita dapat memulai dengan daftar tema atau kategori terlebih dahulu, berdasarkan teori yang telah dipilih selama tahap-tahap awal siklus empiris; dari teori ini konsep-konsep telah disimpulkan yang dapat dibandingkan dengan bukti (dokumenter). Sangat penting untuk memahami apa yang kita cari. Salah satu pendekatan adalah mencari – dalam data – untuk konfirmasi atau verifikasi wawasan yang disimpulkan dari teori tersebut. Hal ini tidak direkomendasikan karena memverifikasi sebuah teori hanya relevan jika upaya untuk membantah dugaan tersebut juga dilakukan.

Pendekatan lain adalah, alih-alih bekerja dengan (sebagian besar hanya) tema atau kategori yang terbentuk sebelumnya, Anda membaca teks dan menemukan tema atau isu yang berulang (dan muncul) dalam data. Tema atau kategori ini kemudian menjadi (baru). Tema atau kategori ini mungkin berupa ide atau konsep yang belum Anda pikirkan.

Pengodean merupakan aktivitas penting bagi analisis data kualitatif. Miles, Huberman, dan Saldana (2014) membedakan antara berbagai jenis: pengodean deskriptif, pengodean

proses, pengodean emosi, pengodean nilai, pengodean dramaturgi, dan lainnya. Spencer, Ritchie, dan O'Connor (2003) menyarankan dua cara kerja:

metode 'kode dan ambil' lintas bagian, dan analisis in situ, non-lintas bagian. . . . Dalam metode kode dan pengambilan data lintas bagian, peneliti merancang sistem kategori umum yang diterapkan – secara manual atau dengan komputer – di seluruh set data dan digunakan sebagai sarana untuk mencari dan mengambil potongan data berlabel. Pendekatan ini dianggap menawarkan tinjauan sistematis tentang cakupan data; untuk membantu menemukan tema atau contoh yang tidak muncul secara teratur dalam data; untuk membantu menemukan kategori analitis dan konseptual dalam data; dan untuk membantu memahami data untuk membuat perbandingan atau koneksi.

Organisasi data non-lintas bagian melibatkan pengamatan bagian-bagian tertentu dari data secara terpisah, yang masing-masing mungkin memerlukan konseptualisasi kategori yang berbeda. Pendekatan ini dilihat oleh beberapa orang sebagai menawarkan peluang yang lebih baik daripada analisis lintas bagian untuk mendapatkan gambaran tentang kekhasan bagian-bagian tertentu dari materi; untuk memahami narasi atau proses yang kompleks; untuk mengatur data di sekitar tema yang tidak muncul di semua bagian data; dan untuk mengidentifikasi struktur keseluruhan dalam setiap kasus atau wawancara. Pendekatan non-cross-sectional juga mencakup sistem referensi silang yang tidak melakukan segmentasi teks tetapi memungkinkan analisis untuk menelusuri dan membuat jalur melalui data, terutama melalui penggunaan paket perangkat lunak komputer.

Membaca tidak hanya perlu dilakukan oleh orang perseorangan. Selama bertahun-tahun sejumlah program perangkat lunak yang berguna untuk analisis konten telah dikembangkan dan diuji. Kami merujuk ke Kotak 7.8 untuk informasi lebih lanjut. Ini tidak menjadi mangsa masalah 'kelelahan peneliti', dengan selektivitas dan bias sebagai konsekuensi negatif. Pekerjaan mesin sepenuhnya dapat direplikasi dan diaudit.

Memeriksa Hubungan dan Menampilkan Data Termasuk Verifikasi/Pemalsuan

Memeriksa hubungan adalah inti dari proses analitik karena mendorong peneliti untuk beralih dari deskripsi orang dan latar ke eksplorasi dan penjelasan tentang mengapa sesuatu terjadi seperti itu. Biasanya tujuannya adalah untuk menemukan tema yang berulang dalam dokumen, pola, urutan waktu, atau apakah ada atau tidak kelompok partisipan, responden atau aktor tertentu dan aktivitas, pernyataan atau sikap mereka.

Proses memeriksa hubungan dapat ditangkap dalam matriks yang menunjukkan bagaimana konsep yang berbeda saling terhubung. Chambliss dan Schutt (2015) memberikan contoh. Dimulai dengan matriks ini (Gambar 7.8).

Gambar 7.8 menampilkan matriks yang digunakan untuk menangkap hubungan antara sejauh mana pemangku kepentingan dalam program baru memiliki sesuatu yang penting yang dipertaruhkan dalam program tersebut dan perkiraan peneliti tentang dukungan mereka terhadap program tersebut. Setiap sel matriks harus diisi dengan ringkasan studi kasus

ilustratif. Dalam analisis matriks lainnya, kutipan dapat disertakan dalam sel untuk mewakili pendapat dari berbagai pemangku kepentingan ini, atau jumlah kasus dari setiap jenis dapat muncul di sel. Dengan mengingat pendekatan ini akan menghasilkan ide-ide untuk menyusun analisis data kualitatif. Hubungan sederhana yang diidentifikasi dengan matriks seperti yang ditunjukkan dalam pameran [ini] selanjutnya dapat diperiksa dan diperluas untuk membuat model kausal yang lebih kompleks.

LATIHAN		Formulir Pengkodean Untuk Hubungan: Kepentingan Para Pemangku Kepentingan		
	Baik	Netral atau tidak diketahui	Bertolak- belakang	
Tinggi				
Sedang				
Rendah				

Gambar 7.8 Formulir Pengkodean untuk Hubungan: Kepentingan Pemangku Kepentingan

Model kausal seperti itu menyerupai teori dengan t kecil (lihat Bab 3).

Miles, Huberman, dan Saldana (2014) menjelaskan beberapa cara untuk menganalisis data matriks. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

- Mulailah dengan 'pemindaian cepat' . . . 'mencermati' kolom dan baris.
- Perhatikan pencarian pola, tema, membuat kontras, perbandingan, dan kluster, lalu . . . hitung.
- Tampilan data tidak pernah berbicara sendiri . . . Selalu buat interpretasi dan penjelasan Anda eksplisit.
- Buat kontras/perbandingan.
- Masukkan hal-hal khusus ke dalam hal umum.
- Wawasan pertama harus diperiksa terhadap data primer. Perhatikan data mentah untuk berjaga-jaga terhadap situasi di mana wawasan ini tidak terbukti benar di 'tingkat dasar'.
- Pastikan pemahaman deskriptif jelas di tingkat individu atau dalam kasus terlebih dahulu sebelum Anda mencoba memahami pola lintas kasus.

Sangat penting selama langkah ini dalam proses analisis data kualitatif bahwa hubungan antara proses, orang, dan situasi yang terdeteksi dalam data tidak ditafsirkan tanpa refleksi kritis. Ketika teori penjelasan digunakan, yang darinya konsep disimpulkan dan dihadapkan dengan data, mencari konfirmasi atau verifikasi dalam data saja tidaklah disarankan. Seperti halnya ketika bekerja dengan data kuantitatif, sangat penting untuk merenungkan hubungan dalam materi empiris dan mencoba membantah teori yang digunakan. Bagian dari proses ini adalah

untuk mencari tahu penjelasan alternatif mana yang mampu menjelaskan hubungan tersebut.

Ketika tidak ada teori penjelasan yang digunakan, kemungkinan bias konfirmasi mungkin tampak lebih kecil, tetapi bisa lebih besar (karena peneliti mungkin bekerja dengan ‘teori implisit’ yang sangat perlu ‘diverifikasi’). Hal yang sama berlaku untuk analisis data kualitatif yang dilakukan sesuai dengan ‘Grounded Theory’ dan ‘sensitizing concept’ (lihat di bawah).

Menyajikan Temuan

Akhirnya, hasil analisis data disajikan. Lihat bagian 7.8 untuk informasi tentang visualisasi data.

Beberapa Contoh

Sesuai dengan Webley (2010) kami membatasi diri pada tiga pendekatan: analisis wacana, pendekatan grounded theory, dan netnografi. Analisis wacana, menurut Webley (2010), bukanlah satu mode analisis data, tetapi sebuah genre yang mencakup analisis percakapan (berfokus pada penggunaan bahasa, sintaksis, jeda, dan pengulangan dalam wacana yang sedang dipelajari). Gill (2000) melihat empat tema utama dalam genre ini: *‘perhatian terhadap wacana itu sendiri, pandangan tentang bahasa sebagai sesuatu yang konstruktif dan terkonstruksi, penekanan pada wacana sebagai bentuk tindakan dan keyakinan dalam organisasi retorika wacana’*. Chambliss dan Schutt (2015) membahas salah satu anggota keluarga genre yang terkenal – analisis percakapan. Ini:

adalah metode kualitatif khusus untuk menganalisis organisasi sekuensial dan detail percakapan. . . . Ini berfokus pada bagaimana realitas dibangun, bukan pada apa adanya. Dari perspektif ini, analisis terperinci tentang interaksi percakapan penting karena percakapan adalah ‘landasan sosiologis’: suatu bentuk organisasi sosial yang melaluinya lembaga kerja seperti ekonomi, pemerintahan, keluarga, sosialisasi, dll. tercapai.

Pendekatan grounded theory adalah contoh kedua. Pendekatan ini melihat ‘teori’ berkembang seiring dengan proses penelitian berlangsung. Dalam Bab 3, kita membahas teori dengan huruf kapital ‘K’ dan ‘k’ kecil, yang diuji melalui penelitian empiris. Pendekatan grounded theory bersifat datang-dan-pergi, di mana – saat meneliti – konsep muncul, dihadapkan dengan bukti, dibahas, terkadang ‘tetap’ dan diperkaya, dan terkadang ‘pergi’. Disebut ‘grounded theory’ karena didasarkan pada, atau berdasarkan, pengamatan ‘dalam realitas’. Ahli teori grounded pertama-tama merangkum pengamatan ke dalam kategori konseptual, dan ‘menguji’ koherensi kategori ini secara langsung dalam latar penelitian dengan lebih banyak pengamatan. Seiring waktu, saat peneliti menyempurnakan dan menghubungkan kategori konseptual, sebuah ‘teori’ mungkin berkembang (Chambliss dan Schutt, 2015). Meskipun pendekatan ini sering digunakan, kritik telah dilontarkan terhadapnya.

Netnografi, juga disebut cyberetnografi dan etnografi virtual, adalah contoh ketiga; ia menggunakan metode etnografi untuk mempelajari komunitas daring. Sementara etnografi meneliti komunitas di lokasi fisik (yang sama), netnografi meneliti hubungan yang berkembang

secara daring. Seorang netnografer menyimpan catatan lapangan baik yang bersifat observasional maupun reflektif, tetapi tidak seperti etnografer tradisional, ia dapat kembali untuk meninjau data asli – tes yang diposting – lama setelah data tersebut diproduksi. Data tersebut kemudian dapat dikodekan, diberi anotasi dengan interpretasi peneliti, diperiksa terhadap data baru untuk mengevaluasi ketahanan pola sosial, dan digunakan untuk mengembangkan teori yang didasarkan pada data tersebut.

KOTAK 7.9 NETNOGRAFI TENTANG SEXTING

Studi ini mengkaji 'sexting'. 'Sexting secara konvensional didefinisikan sebagai 'pertukaran pesan atau gambar seksual' dan 'pembuatan, pembagian, dan penerusan gambar telanjang atau hampir telanjang yang bernada seksual' melalui ponsel dan/atau internet. Kepentingan hukumnya adalah pada gambar-gambar eksplisit seksual yang ditujukan kepada anak di bawah umur yang merupakan bentuk pornografi anak. Penelitian kuantitatif tentang sexting menemukan angka kejadiannya mencapai 15% hingga 40% di kalangan anak muda, tergantung pada usia, dan cara mengukur apa yang dimaksud dengan sexting.

Tujuan dari penelitian kualitatif yang dirujuk dalam kotak ini adalah untuk menanggapi dan meningkatkan pemahaman kita tentang sifat kompleks sexting dan peran teknologi seluler dalam jaringan remaja sebaya. Ringrose et al. (2012) melakukan wawancara kelompok fokus dengan 35 orang muda berusia 8 dan 10 tahun di dua sekolah dalam kota London: 'Pada kelompok fokus kami meminta peserta untuk berteman dengan kami di Facebook, dengan profil Facebook penelitian. Mayoritas peserta kami menerima (31); dua peserta tidak menerima permintaan kami dan dua tidak memiliki akun Facebook.

Kami membuat halaman Facebook berbasis penelitian, dengan pengaturan sehingga daftar "teman" kami tidak dapat melihat kiriman satu sama lain atau daftar peserta. Kami kemudian dapat mengikuti pembaruan profil publik dari setiap teman Facebook. Atas dasar diskusi kelompok fokus dan konten daring Facebook, kami memilih sampel peserta studi kasus yang lebih kecil (22), yang dengannya kami menindaklanjuti masalah seputar komunikasi dan representasi seksual di Facebook dalam wawancara individu. Kami juga mewawancarai guru dan staf utama di sekolah tersebut'. Analisis konteks pesan teks dilakukan di mana 'skenario sexting' yang berbeda dijelaskan serta beberapa aktivitas dan faktor lain yang aktif dalam realitas digital dan 'klasik'.

7.7 MENGGABUNGKAN ANALISIS KUALITATIF DAN KUANTITATIF

Pada tahun 1993, Caracelli dan Greene menerbitkan sebuah makalah yang membahas transformasi data kualitatif menjadi data kuantitatif, dan data kuantitatif menjadi data kualitatif. Yang lain menyarankan bahwa kombinasi tersebut dapat membantu dalam solusi praktis untuk mengatasi keterbatasan penelitian mono-metode. Dan, memang, dapat dilihat

dari karya Tashakkori dan Teddlie (2003) dan Onwuegbuzie dan Leech (2007) bahwa sekarang ada kesepakatan luas tentang penggunaan beberapa metode dengan kekuatan yang saling melengkapi dan kelemahan yang berbeda. Bagian dari kesepakatan itu adalah bahwa konversi data kualitatif menjadi data kuantitatif ('kuantitisasi') dan konversi data kuantitatif menjadi kualitatif ('kualitisasi') dipandang sebagai perkembangan penting. Sandelowski (2000) menjelaskan proses-proses ini.

Kuantitisasi menyiratkan 'proses di mana data kualitatif diperlakukan dengan teknik kuantitatif untuk mengubahnya menjadi data kuantitatif. Peneliti harus terlebih dahulu mereduksi data verbal atau visual (misalnya, dari wawancara, observasi, artefak, atau dokumen) menjadi item, konstruksi, atau variabel yang dimaksudkan hanya untuk berarti satu hal dan yang, oleh karena itu, dapat direpresentasikan secara numerik'. Penulis memberikan beberapa contoh. Kebalikannya, *qualitizing*, 'mengacu pada proses di mana data kuantitatif diubah menjadi data kualitatif. Seperti dalam *quantitizing*, *qualitizing* dapat digunakan untuk mengekstrak lebih banyak informasi dari data kuantitatif.

Contoh dari proses ini adalah penggunaan skor pada instrumen untuk membuat profil partisipan – untuk membuat potret verbal atau tipologi mereka – di sekitar fenomena target'. Tashakkori dan Teddlie (1998) menjelaskan lima jenis profil naratif atau kualitatif: modal, rata-rata, komparatif, normatif, dan holistik.

Contoh pertama adalah studi Dutch Organized Crime Monitor. Pada akhir tahun 1990-an, Pusat Penelitian dan Dokumentasi (WODC) Kementerian Kehakiman Belanda membentuk sekelompok peneliti dari beberapa organisasi. Bersama-sama, mereka melakukan analisis sistematis terhadap investigasi tertutup polisi terhadap kelompok kriminal.

Sumber utama Monitor adalah berkas polisi tertutup dari kelompok kriminal, yang sering kali mencakup periode beberapa tahun. Selama periode 1996–2012, 150 investigasi skala besar (studi kasus) dianalisis secara sistematis. Setiap studi kasus dimulai dengan wawancara terstruktur dengan petugas polisi dan/atau jaksa penuntut umum. Selanjutnya, berkas polisi dianalisis dan laporan kasus ditulis, menggunakan daftar periksa yang ekstensif.

KOTAK 7.10 DAFTAR PERIKSA YANG DIGUNAKAN DALAM PEMANTAUAN KEJAHATAN TERORGANISASI DI BELANDA UNTUK MENGANALISIS 150+ KASUS

1. Data Kasus
2. Ringkasan investigasi polisi/penegak hukum (lihat di bawah)
3. Cara-cara yang digunakan para pelaku kejahatan (dari atas ke bawah/jaringan/pusat, dll.)
4. Aktivitas, metode (modus operandi), dan kerusakan yang ditimbulkan
5. Kontak dengan lingkungan
6. Luas, distribusi, dan penggunaan aset yang diperoleh secara ilegal (pendapatan kriminal)
7. Penuntutan pidana
8. Evaluasi kasus dan kemungkinan untuk pembelajaran/pencegahan

Mencermati poin 2: Ringkasan investigasi polisi/penegak hukum

- Apa alasan investigasi?
- Apa yang membuat polisi memutuskan untuk melakukan investigasi (jejak, informasi sebelumnya, laporan lain, dll.)?
- Pelanggaran dan tersangka yang sedang diselidiki: siapa mereka?
- Masalah dan perubahan signifikan apa saja yang terjadi selama investigasi
- Semua metode deteksi/polisi yang digunakan. [catat setiap metode yang digunakan dalam kaitannya dengan apa yang dihasilkannya (bukti, dll.)]. Metode mana yang menghasilkan informasi yang dapat diandalkan?
- Apakah ada perangkat lunak khusus yang digunakan untuk mencari berkas data besar, mengkategorikan, atau menganalisis? Jika ada, perangkat lunak apa ini? Dan apa hasil dari penggunaan perangkat lunak tersebut?
- Orang mana yang ditahan dan diinterogasi dan mana yang tidak; siapa yang didengar oleh polisi?
- Apa alasan beberapa orang tidak ditangkap atau dijawab pertanyaannya?
- Apakah tersangka telah membuat pernyataan? Sejauh mana mereka mengaku? Apakah tersangka diberi akses ke komputer polisi dan lembaga penegak hukum lainnya, dll. Dengan mengeluarkan kata sandi dan sejenisnya (misalnya untuk membantu mendekripsi berkas)?
- Berapa banyak informasi yang telah dikumpulkan terkait kasus tersebut (seperti pencucian uang, ekspor, impor, pengembangan malware)?
- Apakah ada kontak internasional (oleh tersangka dan pejabat polisi/penegak hukum)? Apakah ada permintaan bantuan hukum? Jika ada, apa tujuan pengajuan, apa hasilnya, dan berapa lama jangka waktunya?

Arsip polisi berisi hasil dari semua kegiatan polisi yang digunakan dalam suatu kasus, seperti penyadapan, teknik observasi, kepolisian yang menyamar, pengumpulan intelijen, interogasi tersangka, korban dan saksi, penyitaan barang, dan investigasi keuangan. Kekuatan kumpulan data ini ditemukan dalam kombinasi antara keluasan cakupan dan kedalaman konten. Namun, ini tidak boleh dipahami sebagai sampel yang representatif, karena menggunakan teknik kepolisian yang intrusif untuk menjelaskan fenomena tersembunyi, seperti kejahatan terorganisasi, berarti bahwa sampel yang lengkap atau acak jarang dapat dibayangkan. Lebih jauh, semua sampel, dalam beberapa hal, selektif dan dipengaruhi oleh prioritas polisi (serta kegagalan kelompok kriminal untuk melarikan diri dari perhatian polisi dan melindungi kegiatan mereka secara efektif).

Oleh karena itu, Dutch Organized Crime Monitor menggunakan pemilihan kasus yang strategis dari total populasi semua investigasi kriminal tertutup dari tim investigasi nasional dan regional (termasuk polisi fiskal). Sampel yang dipilih secara strategis ini tidak hanya berfokus pada kasus perdagangan narkoba tradisional (kokain, heroin, dan ganja) (37 kasus), tetapi juga pada fenomena lain yang jarang diprioritaskan, seperti narkoba sintetis (produksi

dan ekspor) (15 kasus), kasus campuran (termasuk narkoba tradisional dan narkoba sintetis) (21 kasus), penyelundupan manusia (16 kasus), perdagangan seks (18 kasus), penipuan dan pencucian uang (32 kasus), dan kegiatan kriminal lainnya (11 kasus).

Dengan menggunakan data dari 150 kasus Organized Crime Monitor ini, Kruisbergen et al (2015) menyelidiki bagaimana pelaku kejahatan terorganisir (Belanda) menginvestasikan uang mereka dalam ekonomi legal (objek real estat, perusahaan, obligasi, dan opsi, selain investasi dalam kegiatan kriminal serta segala bentuk konsumsi, seperti membelanjakan uang untuk hiburan malam, pakaian, mobil, kapal, dan perhiasan). Data empiris terdiri dari kumpulan data 1.196 aset individu (yang diduga) peserta dalam kejahatan terorganisir. Data tersebut mencakup berbagai kejahatan dan juga mencakup informasi tentang aset asing. Setiap laporan kasus (N = 150) dianalisis isinya untuk mendapatkan informasi yang tersedia tentang aset para pelanggar. 1196 aset ini beserta informasi kualitatif dan kuantitatif 'di sekitarnya' dianalisis melalui SPSS untuk memungkinkan analisis kuantitatif.

Contoh lain dengan pokok bahasan yang berbeda adalah studi oleh Nielsen (2010). Studi tersebut menganalisis:

hasil gugatan diskriminasi ketenagakerjaan yang diajukan di Pengadilan Federal dari tahun 1988 hingga 2003. Analisis kami diinformasikan oleh empat model teoritis: hukum formal, tindakan rasional/ekonomi, mobilisasi hukum, dan realis kritis, sementara tiga set data digunakan. Yang pertama adalah replikasi yang diperluas dari penelitian Donohue dan Siegelman sebelumnya tentang pengajuan kasus diskriminasi ketenagakerjaan. Kami mengumpulkan sampel acak kasus hak sipil ketenagakerjaan yang diajukan di pengadilan federal antara tahun 1988 dan 2003 di tujuh distrik federal yang beragam secara regional.

Kumpulan data kedua terdiri dari lebih dari 100 wawancara mendalam dengan penggugat, tergugat, dan pengacara mereka. Kami secara acak mengambil subsampel kasus dari sampel pengajuan kami di dua distrik. Jika memungkinkan, kami mewawancarai pihak lawan dan pengacara dalam kasus yang sama. Wawancara direkam, ditranskripsi, dan diberi kode. Kumpulan data ketiga adalah berkas data biaya rahasia yang diperoleh dari EEOC24 untuk tahun 1991–2002, yang berisi kumpulan pengaduan yang diajukan ke EEOC atau lembaga ketenagakerjaan yang adil negara bagian. . . . Daripada menganalisis hasil litigasi dalam istilah biner (apakah penggugat menang atau kalah?), kami menganalisis hasil kasus sebagai variabel berurutan. Pendekatan ini lebih baik menangkap karakter dinamis dari proses litigasi dan dilema yang dihadapi para pihak dan pengadilan dalam mengadili klaim. Dengan memasukkan kategori hasil yang berbeda yang sebagian besar tidak terukur dan karena itu tidak terlihat dalam penelitian lain, analisis kami lebih jelas mengungkapkan organisasi sosial litigasi diskriminasi.

Contoh ketiga mempelajari tata kelola dan lembaga perlindungan di Aruba serta mempertimbangkan kualitas tata kelola di negara mikro ini. Menurut literatur, mewujudkan penyeimbang terhadap administrasi publik merupakan tantangan dalam lingkungan berskala

kecil: modal manusia terbatas dan orang-orang secara teratur bertemu satu sama lain dalam berbagai peran sosial. Oleh karena itu, pertanyaan diajukan (oleh pemerintah Belanda dan Aruba) sejauh mana lembaga perlindungan di Aruba berhasil menjalankan tugas pemantauan dan pemeriksaan serta penyeimbangan.

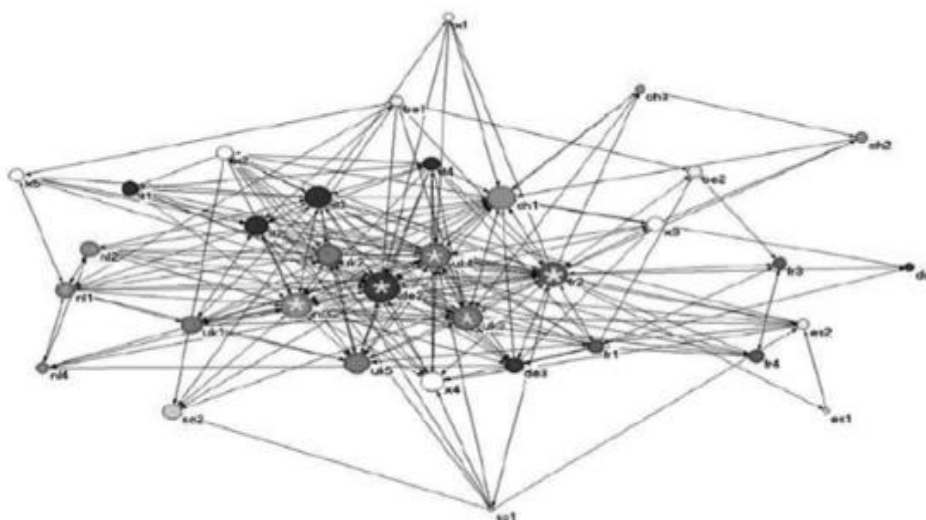
Antara tahun 2009 hingga 2011, Klein Haarhuis dkk mempelajari keadaan tata kelola dan penegakan hukum dan ketertiban di Aruba. Alasan di balik penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan menganalisis situasi terkini saat itu, termasuk masalah-masalahnya terkait tata kelola yang baik dan untuk mengetahui seberapa banyak ruang untuk perbaikan yang ada. Masalah-masalah tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi atau konflik kepentingan; buruknya fungsi 'Staten' dan dengan demikian demokrasi; dan kegagalan untuk mematuhi sejumlah perjanjian yang ditetapkan dalam protokol yang disepakati sebelumnya. Selain mengartikulasikan beberapa teori tentang negara mikro dan isu tata kelola, Klein Haarhuis dkk. mempelajari materi tertulis yang terkait dengan aspek tata kelola yang baik di Aruba. Materi tersebut mencakup studi dan evaluasi oleh komite pencari fakta atau penasihat organisasi internasional seperti Dana Moneter Internasional (IMF) (tentang keuangan pemerintah) dan studi oleh individu.

Para penulis juga mempelajari sumber dari lembaga checks and balances dan penegakan hukum, seperti laporan tahunan, atau laporan yang menggali lebih dalam, seperti studi oleh Kantor Akuntansi Umum dan Layanan Auditor Pusat, atau Dewan Penasihat. Para penulis juga memperoleh materi dari Biro Investigasi Kriminal dan Layanan Penuntutan Publik. Dokumen-dokumen ini dianalisis isinya dan juga digunakan untuk persiapan dan validasi (temuan dari) 86 wawancara anonim semi-terstruktur. Di antara mereka yang diwawancarai adalah perwakilan dari lembaga perlindungan, politisi – termasuk anggota 'Staten' dan pemerintah –, pejabat, perwakilan dari lembaga penegakan hukum, layanan imigrasi, dunia bisnis dan masyarakat sipil, dan beberapa mantan pejabat.

7.8 VISUALISASI DATA

Visualisasi data adalah 'proses yang (a) didasarkan pada data kualitatif atau kuantitatif dan (b) menghasilkan gambar yang mewakili data mentah, yang (c) dapat dibaca oleh pemirsa dan mendukung eksplorasi, pemeriksaan, dan komunikasi data'. Visualisasi data mungkin terlihat seperti 'anak baru' tetapi memiliki sejarah panjang. 'Penemuan' histogram oleh John Tukey pada tahun 1965 untuk menyajikan informasi tentang frekuensi fenomena dan pengembangan 'Peta Kematian Kolera' yang bahkan lebih tua adalah contoh dari masa lalu. Pengenalan PC sekitar tahun 1984 dan perangkat lunak Apple juga merupakan tonggak sejarah.

Ceramah TED Rosling (2007), yang menggunakan diagram gelembung untuk menggambarkan tren harapan hidup dari waktu ke waktu dan di seluruh dunia, merupakan pengubah permainan. Ide dasar visualisasi data adalah bahwa hal itu akan membantu calon pembaca dan pengguna untuk menerima, membaca, dan mengolah bukti dengan lebih baik, lebih dari saat bukti disajikan dalam bentuk tabel atau statistik 'kuno' (untuk ELR kuantitatif) atau dalam 'narasi' 'deskriptif tebal' (dalam penelitian kualitatif).



Gambar 7.9 Visualisasi jaringan diskusi pribadi di antara para hakim IP Eropa yang tergabung dalam Forum Venesia

Apa saja contoh penting visualisasi data?

Kita mulai dengan data kuantitatif. Lysy (2013) menyebutkan diagram gelembung, di mana diagram sebar tradisional, berdasarkan sejumlah besar titik data, disajikan secara visual sedemikian rupa sehingga pembaca lebih mampu melihat hutan daripada seribu pohon. Diagram pai, grafik statistik melingkar, yang dibagi menjadi irisan untuk menggambarkan proporsi numerik dan infografis (terdiri dari grafik, diagram, dan/atau ilustrasi yang sering kali terkait dengan satu topik), adalah contoh lainnya.

Mashup mengintegrasikan data digital dan aplikasi heterogen dari berbagai sumber. Dasbor (kadang-kadang digunakan untuk tujuan perbandingan) sering kali menyiratkan bekerja dengan mashup. Visualisasi ini biasanya non-interaktif. Lysy (2013) membahas presentasi data interaktif yang 'dapat dimanipulasi secara langsung dan sederhana oleh pengguna dengan cara yang mengalir bebas, termasuk tindakan seperti memfilter data dan menelusuri detail'. Peta interaktif – misalnya – perkembangan kejahatan di masyarakat, kota, atau negara adalah contoh yang terkenal.

Bagian dari visualisasi interaktif adalah animasi, yang salah satu contoh utamanya adalah Gapminder milik Rosling. Jejaring Sosial merupakan fokus penting ELR. Lazega (2012) memberikan contoh dalam studinya tentang pemetaan dialog peradilan lintas batas negara yang membahas pertanyaan apakah dan bagaimana hakim hak kekayaan intelektual Eropa belajar dari lobi. Ia menggunakan analisis jaringan sosial untuk memetakan jaringan sosial hakim (yang tergabung dalam Forum Venesia), termasuk hakim Pengadilan Tinggi, yang menggambarkan cara mereka memandang pekerjaan hakim lain lintas batas dan belajar dari satu sama lain.

Visualisasi (lihat Gambar 7.9) data kualitatif juga menjadi populer (dan penting). Kami telah membahas perangkat lunak untuk analisis konten dan bekerja dengan matriks. Mengingat pentingnya dokumen dalam penelitian hukum empiris (pikirkan yurisprudensi,

pidato politik, dan catatan sejarah), menggunakan Wordle atau TagCrowd membuat awan kata (tampilan visual jumlah kata dari satu atau lebih teks). Perangkat lunak visualisasi terkait tidak berurusan dengan kata-kata tetapi dengan kalimat, sementara 'jaringan frasa menyoroti koneksi pasangan kata daripada seluruh kalimat'.

Yang berbeda adalah proses diagram argumen untuk membantu proses merekonstruksi asumsi yang mendasarinya dengan menggunakan pendekatan yang digerakkan oleh TIK, yang sering disebut argumentasi yang didukung komputer atau visualisasi argumen yang didukung komputer. Karena membuat diagram argumen dengan tangan, menggunakan pena dan kertas, merupakan pekerjaan yang melelahkan, para peneliti telah beralih ke pengembangan perangkat lunak yang mendukung proses ini. Contohnya adalah Belvedere, Compendium, dan Cohere. Perangkat lunak ini mudah digunakan dan memungkinkan kemudahan penggunaan antarmuka.

KOTAK 7.11 TEOLOGI

Penulis memberikan deskripsi tentang pilihan alat yang digunakan dalam bidang penelitian, evaluasi, dan studi kebijakan ilmu sosial. Deskripsi ini memberikan perkiraan umum kepada pembaca tentang kemudahan penggunaannya, apakah alat tersebut tersedia secara gratis, serta kelebihan dan kekurangannya, beserta panduan tentang cara mengakses informasi lebih lanjut dan alternatif untuk alat tersebut. Penulis berharap jumlah alat yang tersedia akan tumbuh dengan cepat. Mereka juga melihat rangkaian visualisasi data, alat pemetaan, alat kualitatif, generator awan dunia, dan alat analisis jaringan sosial.

7.9 KRITERIA UNTUK MENILAI ANALISIS DATA

Kriteria untuk Menilai Analisis Data Kuantitatif (Statistik)

Statistics Canada (2002) menyebutkan 'kesesuaian untuk penggunaan' informasi statistik sebagai kriteria kualitas dan mengoperasionalkannya dalam enam dimensi: relevansi, akurasi, ketepatan waktu, aksesibilitas, interpretabilitas, dan koherensi data statistik (analisis):

Relevansi informasi statistik mencerminkan sejauh mana informasi tersebut memenuhi kebutuhan nyata klien. Relevansi berkaitan dengan apakah informasi yang tersedia menjelaskan isu-isu yang penting bagi pengguna. Akurasi informasi statistik adalah sejauh mana informasi tersebut secara tepat menggambarkan fenomena yang ingin diukurnya. Keakuratan biasanya dicirikan dalam hal kesalahan dalam estimasi statistik dan secara tradisional didekomposisi menjadi komponen bias (kesalahan sistematis) dan varians (kesalahan acak).

Relevansi juga dapat dijelaskan dalam hal sumber kesalahan utama yang berpotensi menyebabkan ketidakakuratan (misalnya, cakupan, pengambilan sampel, nonrespons, respons). Ketepatan waktu informasi statistik mengacu pada penundaan antara titik referensi

(atau akhir periode referensi) yang menjadi dasar informasi tersebut, dan tanggal informasi tersebut tersedia.

Aksesibilitas informasi statistik mengacu pada kemudahan untuk memperolehnya. Kemampuan menafsirkan informasi statistik mencerminkan ketersediaan informasi tambahan dan metadata yang diperlukan untuk menafsirkan dan memanfaatkannya dengan tepat. Koherensi informasi statistik mencerminkan tingkat keberhasilan penggabungannya dengan informasi statistik lainnya dalam kerangka analitik yang luas dan dari waktu ke waktu.

Meskipun dimensi-dimensi ini saling tumpang tindih dan saling terkait, seperti yang disinggung oleh Statistik Kanada (2002), 'setiap dimensi harus dikelola secara memadai jika informasi ingin digunakan; kegagalan dalam satu dimensi akan merusak atau menghancurkan kegunaan informasi'.

Salah satu cara untuk menangani kriteria seperti akurasi dan koherensi adalah dengan melakukan tinjauan data: mencari masalah atau anomali mengenai sampel, pengkodean, pengumpulan data (nilai yang hilang, penyimpangan dari prosedur operasi standar) dan asumsi yang mendasari kualitas data, termasuk rencana pengambilan sampel dan analisis, pemilihan alat statistik dan tujuan peneliti saat melakukan analisis. Tinjauan data merupakan bagian dari apa yang dikenal sebagai tata kelola data.

Kriteria untuk Menilai Analisis Data Kualitatif

Flick (2009) memulai diskusi tentang kriteria kualitas dalam penelitian kualitatif sebagai berikut:

Masalah tentang cara menilai penelitian kualitatif belum terpecahkan. . . . Haruskah penelitian kualitatif dinilai dengan kriteria dan konsep yang sama dengan penelitian kuantitatif atau adakah cara khusus untuk menilai penelitian kualitatif? Apakah ada kriteria atau strategi yang diterima secara umum untuk menilai penelitian kualitatif dan hasilnya? Dapatkah penelitian menjadi 'valid' dan 'reliabel' tanpa tunduk pada cara tradisional untuk menilai validitas dan reliabilitas? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu telah mendominasi diskusi tentang nilai.

Ia menyajikan kriteria yang dapat diterapkan saat melakukan penilaian kualitas dan yang muncul dari kemungkinan kekurangan penelitian kualitatif dan analisis data.

Salah satu kekurangannya adalah 'plausibilitas selektif': interpretasi dan hasil penelitian kualitatif dibuat transparan dan mudah dipahami oleh pembaca, hanya dengan jalinan kutipan 'ilustratif' dari wawancara atau protokol observasi. Terutama jika peneliti menggunakan ini sebagai 'satu-satunya instrumen untuk mendokumentasikan pernyataan mereka', kredibilitas yang diberikan tidak cukup.

Kekurangan lainnya adalah kurangnya pemeriksaan keaslian, khususnya ketika wawancara (mendalam) dilakukan. Sebelumnya kami merujuk pada kekurangan ketiga: bias konfirmasi/verifikasi. Flick (2009) dan Miles, Huberman, dan Saldana (2014) menetapkan delapan kriteria untuk menilai kemantapan analisis kualitatif (data): konfirmabilitas (kadang-

kadang disebut sebagai 'objektivitas'), reliabilitas/ketertanggung/auditabilitas, dan validitas/kredibilitas/keaslian internal. Golafshani (2003) membandingkan bagaimana validitas dan reliabilitas dinilai dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif.

Konfirmasi

Kriteria ini mengacu pada tingkat di mana hasil penelitian dapat dikonfirmasi atau dikuatkan oleh orang lain dan tidak hanya oleh peneliti kualitatif itu sendiri. Konfirmasi tidak sama dengan mencari konfirmasi hasil. Ada sejumlah strategi untuk meningkatkan konfirmasi. Peneliti dapat mendokumentasikan prosedur untuk memeriksa dan memeriksa ulang data selama penelitian. Peneliti lain dapat mengambil peran sebagai 'pendukung iblis' sehubungan dengan hasil, dan proses ini dapat didokumentasikan. Setelah penelitian, audit data dapat dilakukan untuk memeriksa prosedur pengumpulan dan analisis data, termasuk kemungkinan bias atau distorsi.

Keandalan/ketertanggung/auditabilitas

Keandalan berfokus pada pertanyaan apakah 'proses penelitian (dan analisis) konsisten, cukup stabil dari waktu ke waktu dan di seluruh peneliti dan metode'. Suatu penelitian dinilai positif dalam hal auditabilitas jika jejak audit dapat dilakukan, dengan melihat catatan lapangan dan catatan lain yang disimpan tentang apa yang dilakukan, dilihat, didengar, dll. oleh penyelidik. Keandalan menekankan perlunya memperhitungkan perubahan konteks di mana penelitian terjadi.

Validitas/kredibilitas/keaslian

Flick (2009) membuatnya tetap sederhana: 'pertanyaan tentang validitas dapat diringkas sebagai pertanyaan tentang apakah peneliti melihat apa yang mereka pikir mereka lihat'. Kriteria ini juga disebut 'nilai kebenaran': apakah data yang dikumpulkan dan dianalisis asli dan asal usulnya tidak diragukan? Pertanyaan yang harus diajukan adalah 'seberapa kredibel informan tersebut? Apakah pernyataan dibuat oleh seseorang yang memiliki hubungan kepercayaan dengan peneliti atau oleh seseorang yang baru saja ditemui peneliti? Apakah informan memiliki alasan untuk berbohong? Apakah pernyataan dibuat sebagai tanggapan atas pertanyaan peneliti, atau apakah pernyataan tersebut spontan?'

Seperti halnya analisis data kuantitatif, etika juga merupakan bagian dari perangkat penelitian. Chablis dan Schutt (2015) menguraikan perspektif mereka:

Analisis data kualitatif tidak pernah jauh dari masalah dan dilema etika. Pengumpulan data tidak boleh dimulai kecuali peneliti memiliki rencana yang menurut orang lain mungkin menghasilkan pengetahuan yang bermanfaat. Hubungan yang dikembangkan dengan partisipan penelitian dan pemangku kepentingan lain untuk memfasilitasi pengumpulan data juga harus digunakan untuk memberi tahu kelompok-kelompok ini tentang kemajuan dan temuan penelitian.

Privasi, anonimitas, dan kerahasiaan adalah topik pertama yang mereka bahas. Mengingat jarak yang sering kali lebih kecil antara peneliti dan subjek penelitian (orang, kelompok) dalam

penelitian kualitatif daripada dalam penelitian kuantitatif, masalah 'apa yang harus dilakukan ketika saya melihat perilaku yang merugikan, ilegal, atau salah dari pihak lain selama penelitian? Haruskah saya berbicara untuk kepentingan orang lain selain kepentingan saya sendiri? Jika demikian, kepentingan siapa yang saya bela?' tidak dapat diabaikan. Miles, Huberman dan Saldana (2014) membahas kelayakan suatu proyek penelitian, persetujuan berdasarkan informasi, manfaat, biaya dan timbal balik, kerugian dan risiko, kejujuran dan kepercayaan serta penggunaan dan penyalahgunaan hasil.

Kesimpulan

- Meskipun analisis data mungkin tampak sebagai aktivitas yang berdiri sendiri, ini adalah kesalahpahaman. Analisis data harus dilakukan sesuai dengan masalah penelitian, desain studi, dan teori/teori yang digunakan, bukan sebagai tindakan 'teknis' semata.
- Teknik dan alat analisis data kuantitatif dibangun berdasarkan ratusan tahun warisan ilmiah (dalam matematika, statistik, epidemiologi, dll.). Bagi banyak orang, termasuk peneliti hukum, dunia ini terkadang menyerupai hutan belantara yang berbahaya. Sekarang setelah paket statistik berbantuan komputer, termasuk film YouTube tentang 'cara melakukannya', telah tersedia secara luas, hutan belantara ini lebih terkendali tetapi ada juga bahaya baru: bahwa analisis kuantitatif dilakukan oleh orang-orang tanpa pemahaman dasar tentang bagian-bagian yang relevan dari latar belakang statistik dan matematika mereka. Oleh karena itu, ketika terlibat dalam pekerjaan semacam ini tanpa pelatihan dalam 'statistik dan matematika' dasar, sebaiknya ada seseorang yang memiliki pemahaman seperti itu.
- Dibandingkan dengan analisis kuantitatif, teknik dan alat analisis kualitatif memiliki warisan ilmiah yang jauh lebih pendek dan kurang maju. Kontrol kualitas dari dalam orientasi penelitian ini kurang diatur oleh 'aturan' epistemologis dibandingkan dengan metode dan statistik kuantitatif.
- Sangatlah baik untuk menyajikan data dan kesimpulan dengan cara yang mudah dibaca dan digunakan serta tepat waktu. Visualisasi data, termasuk cara transfer dan komunikasi, secara langsung maupun dalam realitas virtual merupakan faktor penting untuk keberhasilan penerimaan hasil penelitian oleh audiens di luar profesi penelitian. Bab 8 didedikasikan untuk masalah tersebut (dan satu masalah lainnya).
- Untuk membantu pembaca menemukan jalannya ke dalam literatur tentang analisis data kuantitatif, beberapa referensi ini akan membantu.

BAB 8

PENYAMPAIAN TEMUAN PENELITIAN

8.1 TRANSFER PENGETAHUAN, DEFINISI, CONTOH, DAN MEKANISME

Waktu di mana menerbitkan laporan setebal 232 halaman dengan statistik, referensi, dan ringkasan untuk menyelesaikan sebuah proyek telah berlalu. Visualisasi data tidak hanya sangat diperlukan, tetapi setelah laporan selesai, lembar fakta ('dua halaman'), seminar, webinar, film YouTube, dan aktivitas komunikasi TED (seperti) diperlukan untuk merangsang transfer, penyebaran, dan pemanfaatan temuan dan kesimpulan. Untuk memastikan bahwa pengacara, legislator, dan pejabat kebijakan mengetahui temuan tersebut, memperhatikannya, dan memutuskan untuk menggunakannya, diperlukan lebih banyak tindakan, seperti yang ditunjukkan Kotak 8.1.

Bagian ini membahas proses penyampaian dan pemanfaatan serta merangkum wawasan dari studi (tinjauan dan sintesis) yang membahas topik-topik seperti 'pembuatan kebijakan berbasis bukti' dan 'pemanfaatan pengetahuan'. Namun, transfer dan pemanfaatan hasil dari ELR ke dalam kajian dan praktik hukum lebih dari sekadar komunikasi dan persuasi. Hal ini juga menyiratkan masalah epistemologis, karena tradisi hukum yang dominan bersifat doktrinal, sedangkan jenis pengetahuan yang dihasilkan oleh ELR bersifat deskriptif, eksploratif, atau eksplanatif. Penelitian hukum doktrinal 'sebagian besar, merupakan disiplin yang mengambil proposisi normatif dan membuat pilihan di antara nilai dan kepentingan'. Di bagian 8.2 kita akan membahas masalah ini.

Definisi

Transfer pengetahuan (atau: penelitian) adalah proses di mana informasi penelitian yang relevan disediakan dan dapat diakses untuk praktik, perencanaan, pembuatan kebijakan, pembuatan undang-undang, dan kegiatan lainnya. Ini adalah proses memindahkan penelitian ke dalam praktik dan melampaui metode tradisional dalam menerbitkan hasil penelitian. Ini adalah proses dua arah yang mendukung produksi penelitian dan penyebaran serta penggunaan hasil penelitian oleh orang lain.

KOTAK 8.1 PENGALIHAN/PEMANFAATAN HASIL PENELITIAN DI BIDANG HUKUM BUKANLAH HAL YANG MUDAH

Kepolisian/penegak hukum

'Dalam kepolisian, kekhawatiran atas kesenjangan antara penelitian dan praktik tampaknya menjadi keluhan yang terus berulang: penelitian mungkin tidak memberikan kesan yang signifikan, atau setidaknya koheren, pada kepolisian seperti yang dipikirkan oleh para akademisi. Penelitian juga tidak menghasilkan perubahan operasional yang meluas, bahkan ketika penelitian tersebut telah diterima sebagai kebenaran.'

Lum (2009) mencatat kurangnya penelitian dalam kepolisian sehari-hari, yang menunjukkan bahwa penerjemahan penelitian yang lebih baik diperlukan agar kepolisian berbasis bukti dapat terwujud.

Hukum privat/ilmu perdata

Pape (2011) mempelajari penelitian dari psikologi kognitif dan ergonomi mengenai peringatan dan tanggung jawab produk untuk memeriksa apakah praduga pengacara tentang perilaku dan produk serta peringatan dalam hukum tanggung jawab produk Eropa (misalnya, apakah peringatan benar-benar mencegah kerusakan?) benar. Setelah meninjau dan mensintesis penelitian (hasil), Pape menyarankan perangkat dengan sejumlah prinsip tentang cara terbaik merancang peringatan, dll. Pengadilan, dalam persepsinya, 'dapat menggunakan ini untuk memfasilitasi evaluasi kecukupan peringatan'. Meskipun pendekatan ini merupakan contoh menarik dari penelitian hukum empiris di bidang hukum privat, Pape tidak membahas masalah bahwa pengadilan mungkin tidak atau hanya sebagian menggunakan perangkat tersebut. Ia juga tidak membahas masalah berbagai tingkat bukti yang dapat dibedakan, termasuk bukti yang saling bertentangan.

Hakim dan juri

Dua orang doktor Belanda yang diterbitkan sekitar tahun 2008 menemukan bahwa 'cara hakim membuat "putusan yang dapat diterima" terutama bergantung pada intuisi'. Dalam satu studi, lima tuntutan hukum direkonstruksi berdasarkan dokumen dan wawancara dengan para pihak, pengacara, hakim, dan lainnya, sementara peneliti doktor lainnya juga mewawancarai hakim untuk mengetahui bagaimana mereka sampai pada putusan mereka. Masalah transfer dan pemanfaatan dalam hukum saraf dan ilmu saraf memiliki sifat yang berbeda: bukan 'kurangnya pemanfaatan' temuan dan metode, tetapi 'daya tarik yang menggoda' yang mungkin dimiliki pencitraan saraf bagi juri (tiruan). Karena 'daya tarik' ini, hasil dari pencitraan saraf dapat menciptakan bias dalam pengambilan keputusan hakim dan juri. Beberapa penelitian menguji persuasifitas pencitraan saraf terhadap kemauan juri tiruan untuk menyatakan terdakwa pidana tidak bersalah karena alasan gila (NGRI). Ketika juri tiruan diberikan bukti yang mencakup kesaksian ahli berdasarkan pencitraan saraf struktural ditambah kesaksian ahli, mereka 1,3 kali lebih mungkin memberikan vonis NGRI daripada kesaksian ahli yang sama yang tidak memiliki bukti berbasis ilmu saraf. Namun, Baker et al (2013) tidak menemukan efek seperti itu. Bullis (2014) (meskipun tidak berdasarkan investigasi sistematis) membahas jarak antara ilmuwan sosial dan pengacara dari perspektif praktisi: 'Miskomunikasi menghasilkan kesalahan, kesalahpahaman, dan peluang yang hilang. Harapan dapat tidak terpenuhi ketika pengacara atau ilmuwan sosial tidak "mendengar" apa yang dikatakan pihak lain. Asumsi dan kerangka acuan yang berbeda antara dunia pengacara dan dunia ilmu sosial sebagian besar menjadi penyebabnya. Penelitian hukum dan penelitian ilmu sosial memiliki metode dan tujuan yang berbeda. Masalah komunikasi menjadi akut ketika kedua profesi perlu berkolaborasi.

KOTAK 8.2 JENIS-JENIS PEMANFAATAN PENGETAHUAN

1. *Instrumental*: ketika para pengambil keputusan di organisasi swasta atau publik menggunakan temuan penelitian untuk mengubah kebijakan/program/intervensi mereka (termasuk undang-undang dan pengaturan hukum lainnya).
2. *Konseptual*: ketika temuan membantu para pengambil kebijakan dan pengambil keputusan lainnya memahami kebijakan/intervensi (termasuk undang-undang dan pengaturan hukum lainnya).
3. *Pencerahan*: ketika temuan penelitian menambah pengetahuan di lapangan yang dapat digunakan oleh siapa saja, bukan hanya mereka yang terlibat dengan program/intervensi/undang-undang.
4. *Penggunaan proses*: perubahan kognitif, perilaku, program dan organisasi yang dihasilkan dari keterlibatan dalam proses penelitian dan belajar untuk berpikir sesuai dengan penelitian (temuan).
5. *Penggunaan simbolik*: ketika seorang peneliti dipekerjakan untuk mempelajari program/intervensi untuk melegitimasi keputusan yang telah dibuat sebelum pekerjaan penelitian.

Pemanfaatan pengetahuan (atau: penelitian) merupakan langkah lebih maju: bukti yang dihasilkan oleh para empiris tidak hanya diterima, tetapi juga diakui dan digunakan. Saunders (2012) membedakan beberapa jenis pemanfaatan pengetahuan (lihat Kotak 8.2).

Selama hampir seratus tahun, para peneliti dan praktisi telah mempelajari proses transfer, penyebaran, dan pemanfaatan dalam masyarakat. Gelombang pertama dimulai pada tahun 1920-an, dengan studi tentang penyebaran inovasi pertanian kepada para petani dan ide-ide pengajaran baru kepada personel sekolah. Rogers (1983) melihat studi benih jagung hibrida oleh Ryan dan Gross (1943) sebagai pelopor.

Fokusnya adalah pada individu. Gelombang kedua dimulai sekitar tahun 1960-an, ketika (khususnya) organisasi-organisasi menyediakan dana untuk penelitian tentang metode pemanfaatan dan untuk menyediakan bantuan teknis kepada para peneliti dan calon pengadopsi untuk meningkatkan penerapan penelitian yang disponsori pemerintah federal. Pusat Penelitian Pemanfaatan Pengetahuan Ilmiah (CRUSK) di Universitas Michigan adalah salah satu lembaga pemikir pertama di bidang ini yang kemudian mengikuti jejaknya di – antara lain – Belanda.

Pada tahun 1970-an terjadi perkembangan penting dalam bidang kedokteran, ketika Archie Cochrane menerbitkan bukunya *Effectiveness and Efficiency* (1972). Kritik Cochrane adalah bahwa kedokteran belum mengatur pengetahuan (kolektif)-nya dengan cara yang sistematis, andal, dan kumulatif; hasilnya kacau, individualistis, dan terkadang berbahaya. Ia mendorong praktisi kesehatan untuk mempraktikkan kedokteran berbasis bukti. Kemudian pekerjaan yang dimulai Cochrane berubah menjadi Kolaborasi Cochrane dengan sebuah perpustakaan (kumpulan basis data yang berisi berbagai jenis bukti independen berkualitas tinggi untuk menginformasikan pengambilan keputusan perawatan kesehatan), termasuk

tinjauan Cochrane. Pada akhir tahun 1990-an, sebuah organisasi saudara, Kolaborasi Campbell, didirikan yang meneliti efektivitas intervensi sosial (lihat Bab 5). Organisasi ini diberi nama untuk menghormati Dr. Donald T. Campbell (1916–1996) yang menganjurkan gagasan (Popperian) bahwa intervensi (pemerintah) dapat dilihat sebagai eksperimen sosial yang dapat menerapkan aturan bukti ilmiah.

Para evaluator dan peneliti kebijakan juga mempelajari masalah transfer dan pemanfaatan. Leviton dan Hughes (1981) mengidentifikasi 13 faktor yang memengaruhi pemanfaatan dan mengelompokkannya ke dalam lima kategori variabel: (1) relevansi evaluasi dengan kebutuhan calon pengguna; (2) tingkat komunikasi antara calon pengguna dan produsen evaluasi; (3) penerjemahan evaluasi ke dalam implikasinya terhadap kebijakan dan program; (4) kredibilitas atau kepercayaan yang diberikan pada evaluasi; dan (5) komitmen atau advokasi oleh masing-masing pengguna. Lima belas tahun kemudian Shulha dan Cousins (1997) melakukan tinjauan dan sintesis terhadap literatur yang diterbitkan sejak 1986, sementara Johnson dkk. (2009) melakukan hal yang sama dan mencakup periode yang mencakup 1986 hingga 2005. Perhatian menjadi begitu besar sehingga Patton 'menciptakan' paradigma khusus, evaluasi yang berfokus pada pemanfaatan.

Gelombang ketiga dimulai sekitar pertengahan 1990-an. Elemen-elemen krusialnya adalah penerapan kebijakan berbasis bukti, kepolisian, pekerjaan sosial, dan pendidikan, yang membedakan antara tingkat bukti (berdasarkan kriteria metodologis; lihat Bab 5) dan – sejak peluncuran internet – bentuk-bentuk baru visualisasi data dan aktivitas transfer (mesin pencari, Wiki, blog, pengawas digital, dan pemeriksa fakta digital).

Mekanisme

Apa saja mekanisme penting yang mendorong proses ini? Mengikuti Crona dan Parker (2011), 'model rekayasa' menyatakan bahwa penelitian akan digunakan oleh para pembuat kebijakan dan pihak lain jika metodologinya baik dan memiliki kualitas ilmiah yang tinggi. Model ini dikritik karena gagal mengenali pentingnya konteks sosial dan hubungan sosial dalam transaksi pengetahuan. Sebaliknya, penjelasan sosio-organisasi menyatakan bahwa pemanfaatan pengetahuan ditentukan terutama oleh karakter hubungan sosial antara peneliti dan pihak yang dituju.

Dalam literatur disebutkan sejumlah faktor lain:

- Latar atau konteks tempat terjadinya transfer penelitian kepada praktisi (seperti iklim politik, informasi yang bersaing dari penelitian lain, termasuk Google dan mesin pencari lainnya, kewajiban kontraktual dan aspek keuangan);
- Proses komunikasi dan informasi (formal dua arah atau (lebih) informal); saluran yang digunakan untuk komunikasi (tanpa media, media massa, media sosial), gaya presentasi, interaksi sosial antara peneliti dan penerima ('modal sosial'; kepercayaan);
- 'Kapasitas penyerapan' pengguna potensial: kemampuan untuk mengenali nilai bukti penelitian bagi praktik seseorang;
- Kredibilitas penelitian (kekokohan metodologinya; konten informatif);
- Kesulitan dalam menemukan bukti penelitian yang relevan (fragmentasi disiplin ilmu dan heterogenitas terminologi);

- ‘kelekatan’ pengetahuan (pengetahuan melekat pada orang tertentu dan sulit dipindahkan ke ‘lokasi’ lain tanpa usaha yang besar);
- Relevansi dan ketepatan waktu penelitian; dan
- Keterlibatan pengguna (advokasi atau pencerahan).

Model menarik tentang bagaimana transfer dan pemanfaatan pengetahuan terjadi telah dikembangkan oleh Henry dan Mark (2003). Mereka berfokus pada mekanisme (sosial, perilaku, dan kognitif) yang merangsang atau menghambat aktivitas ini dan mengonseptualisasikan pemanfaatan sebagai ‘pengaruh’. Selanjutnya, mereka membedakan antara beberapa tingkat mekanisme: individual, interpersonal, dan kolektif:

Ketiga tingkat ini sesuai dengan berbagai jenis proses perubahan yang telah dipelajari dalam ilmu sosial dan perilaku. Tingkat pertama, individual, mengacu pada kasus-kasus ketika proses evaluasi atau temuan secara langsung menyebabkan beberapa perubahan dalam pikiran atau tindakan satu atau lebih individu. Tingkat kedua, yaitu interpersonal, mengacu pada perubahan yang terjadi dalam interaksi antar individu, atau lebih tepatnya, pada proses atau hasil yang terutama terjadi dalam interaksi antar individu. Dan tingkat ketiga, kolektif, mengacu pada pengaruh langsung atau tidak langsung dari evaluasi terhadap keputusan dan praktik organisasi, baik publik maupun swasta. Lebih tepatnya, tingkat analisis kolektif terlibat ketika proses atau hasil perubahan beroperasi terutama dalam beberapa badan organisasi sosial agregat.

Contoh mekanisme individual adalah valensi suatu sikap (pembuat kebijakan, politisi, pengacara mungkin memiliki keyakinan positif atau negatif tentang intervensi atau satu atau lebih asumsi yang mendasarinya) dan saliens (pentingnya suatu isu sebagaimana dinilai oleh seorang individu).

Contoh mekanisme interpersonal adalah justifikasi (temuan penelitian mendukung posisi yang dipegang sebelumnya) dan persuasi (komunikasi hasil melalui organisasi yang kredibel meyakinkan para pembuat keputusan bahwa program atau intervensi harus didukung).

Contoh mekanisme kolektif adalah difusi (bukti keberhasilan suatu kebijakan di yurisdiksi lain memengaruhi penerapan kebijakan serupa di tempat lain) dan pembelajaran berorientasi kebijakan (organisasi) (perubahan pemikiran atau niat perilaku yang relatif bertahan lama yang dihasilkan dari pengalaman dan/atau informasi baru dan yang dapat muncul dalam beberapa cara, misalnya pembelajaran loop tunggal atau pembelajaran loop ganda).

8.2 KESENJANGAN NILAI FAKTA

Di mana kita? Mari kita asumsikan bahwa kita berada dalam situasi di mana temuan dan kesimpulan empiris diperhatikan oleh calon pengguna dari dunia hukum (dan kebijakan), sementara mereka memiliki sikap positif terhadap penggunaannya, saat menyusun undang-undang atau mengembangkan perangkat dan pengaturan hukum lainnya. Namun, pengambilan keputusan di dunia hukum sering kali bersifat normatif, sementara ELR menghasilkan fakta, korelasi, penyebab, dan informasi tentang dampak. Smits (2014)

menyatakan:

Disiplin hukum mencerminkan apa yang seharusnya dilakukan oleh individu, firma, negara, dan organisasi lain, atau yang seharusnya tidak dilakukan. Pertanyaan hukum yang umum adalah: apakah mencabut hak waris anak-anak seseorang harus diizinkan, apakah hukuman mati harus dijatuhkan untuk pelanggaran pidana, dalam keadaan apa dibenarkan untuk berperang, kapan peninjauan konstitusional harus diizinkan, dan apakah pelaut yang terdampar dapat memakan rekan terlemah mereka jika mereka kemungkinan besar akan mati kelaparan.

Hal ini berlaku tidak hanya untuk beasiswa hukum tetapi lebih berlaku lagi untuk praktik hukum. Artinya, ada kesenjangan serius antara bukti empiris tentang – misalnya – efek jera hukuman mati atau konsekuensi bagi kesejahteraan anak-anak, ketika mereka dicabut hak warisnya, di satu sisi, dan argumentasi hukum-normatif yang mendukung atau menentang hukuman mati atau pencabutan hak waris, di sisi lain.

Topik tentang bagaimana menghubungkan hasil penelitian empiris (deskriptif/kausal) dengan pertanyaan hukum normatif bukanlah topik yang baru. David Hume (1711) mungkin salah satu orang pertama yang membahasnya. Max Weber, dalam studinya 'Die Objektivität sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis' (1904) juga membahas masalah ini dan menyatakan bahwa 'eine empirische Wissenschaft vermag niemanden zu lehren, was er soll, sondern nur, was er kann und – unter Umständen – was er will' [seorang empiris ilmu (sosial) seharusnya tidak ada seorang pun yang memberi tahu apa yang harus (dilakukannya), tetapi hanya apa yang dia bisa dan – dalam keadaan – apa yang dia inginkan]. Menurut Weber, ilmu-ilmu sosial dan budaya termasuk ilmu ekonomi tidak pernah mampu 'bindende Normen und Ideale'. . . [zu] ermitteln, um daraus für die Praxis Rezipienten ableiten zu können' [untuk mengidentifikasi norma-norma dan cita-cita yang mengikat untuk memperoleh 'resep praktik' dari norma-norma tersebut]. Lepsius (2005) menyimpulkan bahwa bahkan cara yang menyeluruh dalam menetapkan fakta tidak akan menghilangkan masalah Bewertungsproblem, yaitu 'masalah penambahan nilai normatif terhadap fakta (karena tidak ada kewajiban hukum yang mengikuti fakta empiris)'.

Masalah-masalah berikut ini dipertaruhkan:

- Apakah para pengambil keputusan hukum dan peneliti perlu mengetahui dikotomi fakta-nilai ini dan pendekatan untuk mengatasinya?
Jawabannya adalah **ya**. Ketidaktahuan akan hal ini akan menyebabkan mereka tidak menggunakan bukti empiris, membandingkan hal yang sama tanpa mengetahui perbedaannya, atau memilih hasil penelitian tetapi menolak yang lain (karena tampaknya tidak sesuai atau 'tidak memverifikasi' pernyataan normatif yang telah dirumuskan).
- Apakah perlu mencoba menjembatani kesenjangan tersebut?
Jawaban kami adalah **ya** dan banyak penulis setuju. Satu argumen kembali ke Nathan

Roscoe Pound dan Oliver Holmes: hukum dalam buku dan hukum tertulis penting, tetapi jelas tidak cukup untuk memahami bagaimana 'hukum' berkembang, apa yang dilakukan dan tidak dilakukannya terhadap masyarakat, bagaimana hukum dapat dibuat (lebih) efektif dan - terkadang - kurang berbahaya. Argumen kedua adalah bahwa ketika pengacara memutuskan masalah normatif, merumuskan putusan, dan memperkenalkan aturan dan undang-undang, dengan konsekuensi yang sering kali luas, dan mereka tidak tahu benar dari yang salah mengenai mekanisme perilaku, efek dan efek samping, ini akan menciptakan pengaturan hukum tanpa 'pemeriksaan realitas'.

Pendekatan untuk Menganalisis dan Menangani Kesenjangan Fakta-Nilai

Pendekatan proses hukum Giesen

Giesen (2015) memindai beberapa pendekatan untuk masalah ini dan menyimpulkan bahwa 'literatur metodologis yang tersedia tidak benar-benar membawa kita lebih jauh. Kita tahu bahwa masalah ini nyata dan cukup serius; kita tahu bahwa kita perlu mengatasinya. Namun bagaimana caranya?'. Ia menerima tantangan untuk mengembangkan pendekatan (baru), yang disebut 'Due Process', dan memulainya dengan mengatakan bahwa seseorang perlu:

berhati-hati saat menggunakan wawasan dari tempat lain dalam diskusi hukum yang mengarah pada konsekuensi hukum; hukum tidak hanya tentang psikologi, sosiologi, atau ekonomi, tetapi juga (dan mungkin terutama) tentang penilaian nilai yang dibuat pada titik waktu tertentu di tempat tertentu.

Pendekatan yang hati-hati ini kemudian akan membuat hakim, praktisi, atau sarjana hukum hanya 'diizinkan' – dalam pengertian ilmiah dari kata tersebut – untuk melompat dari wawasan ekstralegal ke solusi hukum jika kriteria (formal, prosedural) tertentu telah terpenuhi: jika proses hukum diperhatikan. Serangkaian kriteria berikut yang tidak lengkap yang pada akhirnya menangani masalah metodologi yang umum (seperti validitas konstruk, validitas internal, dan bias validitas eksternal) dapat dicantumkan di sini sebagai kriteria relevan yang harus dipertimbangkan dan ditimbang oleh hakim atau sarjana, secara keseluruhan, sebelum menggunakan wawasan empiris dalam penalaran hukumnya:

- Apakah karya empiris tersebut sebenarnya relevan untuk pertanyaan hukum yang muncul,
- Apakah karya tersebut sesuai dengan keadaan terkini dalam bidang tersebut secara metodologis, serta berkenaan dengan desain penelitiannya, dll., dan implikasinya,
- Apakah (secara lebih umum) penelitian tersebut valid dan andal,
- Apakah ada karya empiris yang saling bertentangan tentang masalah yang sama,
- Apakah penelitian tersebut telah direplikasi dan dikonfirmasi atau tidak,
- Apakah penelitian tersebut hanyalah satu blok penyusun dari serangkaian penelitian yang lebih besar yang diperlukan untuk implikasi kebijakan,
- Apakah peneliti tersebut objektif, independen, dan ahli, dan seterusnya.

Mengenai faktor-faktor ini, dan faktor-faktor lain yang mungkin ditambahkan, justifikasi beralasan yang diberikan oleh pengguna informasi ekstralegal (hakim yang memutuskan kasus) akan menjadi krusial. Justifikasi itu, misalnya, perlu menangani masalah yang diangkat di atas, bahwa data agregat digunakan dalam kasus-kasus individual. Namun, jika dan ketika kriteria ini telah dipertimbangkan dengan baik, ditimbang satu sama lain, dan dibenarkan, bahan-bahan ekstralegal dapat dianggap andal (cukup) dan dengan demikian dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan (sekali lagi, tidak ada kewajiban untuk melakukannya). Hasil kebijakan publik atau hukum kemudian dapat diilhami oleh wawasan empiris yang ditemukan. Dengan kata lain: Sein kemudian dapat digunakan untuk menjawab Sollen, pada dasarnya karena semua perlindungan yang mungkin telah diterapkan. Konsekuensi penting dari pendekatan Proses Hukum yang dianjurkan di sini tentu saja adalah bahwa pendekatan ini meminta para hakim, praktisi, dan akademisi untuk menjadi atau setidaknya menjadi 'agak' akrab dengan metodologi ilmu sosial yang dipertaruhkan.

Meskipun pendekatan Giesen terhadap masalah kesenjangan menarik, satu kesulitan krusial tidak dibahas: bagaimana cara melompat dari bukti empiris yang valid (dan relevan) (sesuai dengan kriteria proses hukum yang wajar) ke pernyataan normatif? Sebuah contoh memperjelas poin ini. Ini menyangkut program kredit mikro/keuangan mikro, yang dikenal di negara berkembang sebagai instrumen kebijakan berdasarkan hukum dan regulasi (lunak). Baru-baru ini, empat tinjauan penelitian sistematis diterbitkan.

Tinjauan sistematis merangkum hasil studi empiris yang mengevaluasi dampak program kredit mikro. Studi (utama) telah ditinjau dan diteliti berdasarkan protokol yang mencakup kriteria proses hukum metodologis Giesen dan lainnya (tetapi lebih canggih). Proses peninjauan adalah untuk membedakan yang baik dari yang buruk; hanya studi yang lulus kriteria metodologis yang digunakan untuk analisis dan sintesis. Keempat tinjauan sistematis menimbulkan keraguan serius tentang dampak kredit mikro terhadap perempuan dan masyarakat. Mereka menantang kebijaksanaan yang diterima. Salah satu kesimpulan yang disampaikan Vaessen dkk (2014) adalah:

tampaknya ada kesenjangan antara keyakinan masyarakat yang sering optimistis terhadap kapasitas kredit mikro untuk memperbaiki posisi perempuan dalam proses pengambilan keputusan dalam rumah tangga di satu sisi, dan basis bukti empiris di sisi lain. Kami menyimpulkan bahwa tidak ada bukti yang konsisten mengenai dampak kredit mikro terhadap kendali perempuan atas pengeluaran rumah tangga. Mengingat kurangnya bukti secara keseluruhan mengenai dampak kredit mikro terhadap kendali perempuan atas sumber daya rumah tangga, maka sangat tidak mungkin bahwa, secara keseluruhan, kredit mikro memiliki dampak yang berarti dan substansial terhadap proses pemberdayaan dalam arti yang lebih luas.

Meskipun bukti dari tinjauan ini dan tinjauan lainnya kuat dan meyakinkan, pertanyaannya tetap: bagaimana penasihat hukum, sarjana hukum, dan penasihat kebijakan di bidang kredit

mikro dan bantuan pembangunan, beroperasi ketika mereka dihadapkan dengan hasil ini? Bagaimana mereka 'beralih' dari temuan yang canggung dan sangat jelas tentang tidak adanya atau hampir tidak adanya dampak pada pemberdayaan perempuan dari kredit mikro untuk menjawab pertanyaan apakah akan melanjutkan, meninggalkan atau memodifikasi program kredit mikro. Bagaimana hasil empiris dapat membantu atau membimbing orang-orang yang harus memberi nasihat atau memutuskan tentang masalah tersebut?

Jawaban sederhananya adalah: 'tinggalkan intervensi ini, karena penelitian yang kuat telah menemukan bahwa . . .'. Ini terlalu sederhana, karena mungkin ada faktor lain – normatif (termasuk ideologis) dan politik – yang dipertaruhkan, yang menilai kredit mikro begitu tinggi sehingga alih-alih meninggalkan intervensi, bukti penelitian yang kuat 'ditinggalkan', yaitu tidak digunakan.

Keyakinan normatif mungkin dan terkadang memang lebih besar daripada bukti, persis seperti yang ditunjukkan Giesen (2015): 'tetapi wawasan baru [dalam hal ini: hasil yang kuat dari beberapa tinjauan sistematis] itu sendiri tidak cukup; mungkin ada satu atau beberapa alasan yang baik untuk tidak menindaklanjuti wawasan tersebut, mengingat argumen lain yang diajukan kepada pembuat keputusan. Bahkan ketika mengikuti pendekatan proses hukum yang wajar, masalah kesenjangan tetap ada.

Mengingat situasi ini, kami memutuskan untuk mencari sendiri pendekatan yang mampu memangkas masalah kesenjangan. Yang pertama mencirikan hukum sebagai disiplin ilmu argumentatif, yang kedua memiliki latar belakang studi evaluasi dan yang ketiga adalah etika yang diinformasikan secara empiris.

8.3 HUKUM SEBAGAI DISIPLIN ARGUMENTATIF

Smits (2014) mendefinisikan ilmu hukum sebagai disiplin argumentatif:

Inti ilmu hukum adalah perilaku homo juridicus (apa yang seharusnya dilakukan orang sebagai masalah hukum). Jika pertanyaan penelitian seseorang bukanlah apa yang dikatakan hukum, tetapi apa yang seharusnya dikatakannya, materi empiris dapat digunakan untuk menguji apakah suatu ide atau argumen telah digunakan di tempat lain dan bagaimana ide atau argumen tersebut diterima di yurisdiksi lain tersebut. Menurut pandangan saya, metode penelitian yang paling penting untuk mengevaluasi argumen adalah metode komparatif. Yurisdiksi lain dalam hal ini harus dilihat sebagai 'laboratorium eksperimen'.

Ia menambahkan bahwa 'tujuan studi hukum bukanlah untuk mengakhiri ketidakpastian normatif tetapi untuk menjadikan ketidakpastian ini sebagai titik awal. Hal ini mengarah pada karakterisasi studi hukum sebagai disiplin argumen yang saling bertentangan'. Pertanyaan penting yang diajukan Smits (2009b) adalah:

bagaimana kita harus menetapkan argumen yang lebih baik? Untuk sebagian, jawabannya harus ditemukan dalam praanggapan normatif yang mendasari

penerimaan suatu argumen. Saya setuju bahwa setiap argumen hanya dapat dinilai dalam kerangka normatif tertentu. Namun, dalam melakukannya, kita tidak boleh lupa bahwa di banyak yurisdiksi, kerangka semacam itu sudah tersedia dalam bentuk sistem doktrinal. Setiap yurisdiksi memiliki 'moralitas internal' sendiri sebagai refleksi dari pandangan normatif yang berlaku dalam yurisdiksi tersebut. Pandangan metodologi hukum ini menyiratkan bahwa setiap latihan ilmiah normatif terdiri dari dua langkah.

- Yang pertama adalah mengidentifikasi argumen yang relevan yang mendukung dan menentang solusi tertentu. Beberapa metode dapat digunakan untuk melakukan ini, termasuk pendekatan empiris, tetapi pada akhirnya metode komparatif adalah yang paling menjanjikan.
- Langkah kedua adalah melihat apakah argumen ini sesuai dengan pengaturan normatif yang sudah ada. Lalu, apa kriteria untuk membandingkan dan menimbang pernyataan normatif seperti nilai? Smits tidak menjawab pertanyaan itu, tetapi Ball (1995) dan Lint (2014) menjawabnya. Yang pertama adalah kelengkapan. Sejauh mana argumen tersebut membahas semua aspek utama yang dipertaruhkan dan sejauh mana aspek-aspek penting diabaikan? Ini mengharuskan seseorang menyadari semua nilai penting, misalnya dengan mempelajari sejarah kebijakan atau peraturan dan dengan memeriksa opini publik. Kriteria kedua adalah relevansi.

Pertanyaannya adalah, sejauh mana nilai-nilai yang terkandung sesuai dan dapat diperiksa dengan cara yang sama seperti untuk kelengkapan? Dalam kata-kata Ball, apakah 'alasan yang ditawarkan untuk mendukung tujuan nilai argumen kebijakan berkaitan dengan tujuan tersebut'? Kriteria ketiga adalah masalah keselarasan: 'Sejauh mana nilai-nilai yang diklaim saling bertentangan?' Idenya adalah bahwa sementara keselarasan lengkap sulit dicapai, ketidakkonsistenan dalam rangkaian nilai akan melemahkan kekuatan argumen. Wawasan dari dunia sistem pendukung keputusan dapat membantu mengatasi masalah pembobotan ini. Pada prinsipnya pengambilan keputusan multiatribut (MADM), analisis multikriteria multiaktor (MAMCA) dan peta keputusan dapat membuat proses ini transparan, terutama sekarang karena perangkat digital tersedia untuk melibatkan para profesional dalam proses tersebut secara bersamaan.

Mengurai dan membongkar argumen dan tindak tutur. Pendekatan ini terkait dengan teori intervensi dan cara menemukannya, seperti yang dibahas dalam Bab 3. Dimulai dengan mengurai argumen yang dikatakan normatif (atau ideologis) menjadi bagian-bagian yang dapat diuji secara empiris dan bagian-bagian yang tidak dapat diuji (karena argumen tersebut bersifat normatif sui generis). Mari kita ambil contoh pemungutan suara oleh kelompok etnis minoritas di negara industri Barat. Misalkan tingkat pemungutan suara kelompok etnis minoritas di negara ini dianggap 'terlalu rendah' dibandingkan dengan tingkat pemungutan suara penduduk lainnya.

Dianggap sebagai hal yang diinginkan ('baik') untuk meningkatkan tingkat tersebut setidaknya sebesar 30%. Misalkan juga bahwa suatu undang-undang diterapkan untuk

membantu mewujudkan tujuan ini. Undang-undang tersebut menetapkan dua tindakan. Salah satunya adalah menerjemahkan semua dokumen tentang pemungutan suara/program partai politik ke dalam setiap bahasa yang digunakan oleh kelompok etnis minoritas di negara tersebut. Yang kedua adalah memiliki tiga kali lipat atau lebih jumlah kotak suara yang beroperasi di wilayah geografis yang dihuni oleh persentase tertentu dari kelompok etnis minoritas.

Masalah penelitiannya adalah untuk menyelidiki apakah undang-undang ini (dan dua intervensinya) menyebabkan peningkatan setidaknya 30% dalam pemungutan suara oleh kelompok etnis minoritas. Pertanyaan pertama adalah: dapatkah undang-undang ini diuji secara empiris? Itu tampaknya meragukan, karena salah satu asumsi utama yang mendasari undang-undang tersebut (adalah baik, diinginkan atau terpuji untuk merangsang pemungutan suara oleh kelompok etnis minoritas dengan setidaknya 30%) bersifat normatif. Apa yang baik bagi orang beriman dapat menjadi 'buruk' bagi orang yang tidak beriman. Dibingkai dengan cara ini, dapat disimpulkan bahwa evaluasi empiris terhadap undang-undang tersebut tidak mungkin dilakukan, mengingat karakter normatifnya.

Namun, dengan menggunakan teori Searle tentang tindak tutur, kesimpulan yang berbeda dapat dicapai. Searle membedakan beberapa jenis tindak tutur. Yang pertama adalah asertif: tindak tutur ini mengikat pembicara (yaitu pembuat kebijakan atau pengacara) pada suatu hal yang sedang terjadi: misalnya, pernyataan bahwa kurang dari X% dari kelompok etnis minoritas yang memenuhi syarat di negara A memberikan suara. Tindak tutur asertif memiliki arah kata-ke-dunia yang sesuai; tindak tutur ini berhasil jika benar. Itu berarti tindak tutur ini dapat diuji secara empiris, yang berlaku untuk kasus kita.

Direktif, kategori kedua tindak tutur, adalah upaya seseorang untuk membuat orang lain melakukan sesuatu. Ini adalah pernyataan bahwa 'Saya, sebagai pembuat kebijakan atau legislator, akan melakukan sesuatu tentang kurangnya representasi dalam pemungutan suara kelompok minoritas'. Direktif (perintah, permintaan, permohonan) memiliki arah kata-ke-dunia yang sesuai, dan berhasil jika efektif (yaitu pembuat kebijakan memang melakukan sesuatu tentang situasi ini). Sekali lagi, keberhasilan hukum dapat diukur dalam pengertian empiris. Komisif (kategori ketiga) mengikat seseorang pada beberapa tindakan di masa mendatang. Menurut Searle, mereka juga memiliki arah yang sesuai dari dunia ke kata.

Misalnya, kalimat 'Saya berjanji untuk menyadari bahwa saya akan membantu kaum minoritas dalam mempermudah pemungutan suara, sehingga kurangnya representasi akan hilang' merupakan pernyataan yang sangat komisif dari seorang pembuat kebijakan. Dan sekali lagi, jenis pernyataan ini dapat diteliti secara empiris karena tetap berada dalam ranah fakta dan bukan ranah keharusan. Evaluasi juga dapat melihat dua intervensi praktis dan konsekuensinya. Pertama, dengan merekonstruksi (dan menguji) teori intervensi yang mendasarinya: mengapa diyakini bahwa menambahkan kotak suara dan menerjemahkan dokumen pemungutan suara akan berkontribusi pada tingkat pemungutan suara yang lebih tinggi oleh kaum minoritas etnis (hingga 30%)?

Ini dapat dilakukan dengan mencari bukti empiris tentang pendekatan ini dan pendekatan serupa dalam repositori penelitian (di bidang hukum dan politik misalnya) dan

dengan mengumpulkan data baru melalui desain eksperimental atau desain lain yang mengukur dampak intervensi. Bertentangan dengan jawaban awal ('hukum ini tidak dapat dievaluasi karena sifatnya yang normatif'), kini muncul situasi lain: dengan mengurai asumsi dan tindak tutur, tampak bahwa hampir setiap butir hukum 'normatif' ini dapat diuji secara empiris. Satu-satunya masalah yang tidak dapat ditangani dengan cara ini adalah kata sifat normatif bahwa 'baik' untuk merangsang pemungutan suara, karena jumlah minoritas pemilih diyakini 'terlalu rendah'. Itu termasuk inti dari bagian normatif (sui generis) hukum tersebut. Oleh karena itu, para pengambil keputusan masih harus mempertimbangkan temuan empiris dan pernyataan normatif ini. Masalah Bewertungs ini belum terpecahkan, tetapi dipangkas habis-habisan.

Etika yang berdasarkan pengalaman

Dalam 25 tahun terakhir, para ahli etika telah menggabungkan penelitian empiris (biasanya ilmu sosial) dengan analisis dan refleksi normatif-etika. Christian dan Alfano (2014) membedakan tiga cara. Yang pertama adalah dengan mendeskripsikan secara empiris kerangka masalah normatif: apa saja konsep dan variabel yang terkait dengan – misalnya – diskusi apakah secara hukum dan normatif dapat diterima untuk melakukan penelitian tentang sel punca dan apa saja wacana masyarakat tentang pertanyaan ini? Menemukan data empiris sebagai indikator kelayakan pemikiran etika adalah aspek potensial kedua. Salah satu contoh Christian dan Alfano adalah ini:

Data yang muncul dari pasien dengan lesi fokal di korteks prefrontal yang memainkan peran penting dalam argumen tentang pentingnya emosi sebagai 'fondasi' intuisi moral dan untuk pengambilan keputusan praktis sangat tidak tepat sehubungan dengan jenis emosi yang terpengaruh. Temuan semacam itu juga sangat rentan terhadap salah tafsir yang didorong oleh prasangka tentang apa yang seharusnya ditunjukkan oleh data.

Terkait dengan pendekatan ini adalah mempelajari bagaimana pengacara (dan lainnya) dalam praktik menangani isu etika dan normatif dengan menanyakannya dan belajar dari hasil empiris. Studi Perry et al (2009) tentang 'Pengacara Kesehatan yang Beretika' adalah contohnya. Pertanyaan penelitian utama adalah bagaimana pengacara kesehatan merespons ketika mereka menghadapi dilema etika atau moral dalam praktik mereka yang hukumnya gagal menawarkan solusi yang jelas. Penulis mengembangkan:

instrumen survei yang ditujukan untuk menangkap data empiris tentang bagaimana pengacara kesehatan berunding dan bertindak ketika mereka menghadapi dilema etika atau moral dalam praktik mereka. Kami menyusun skenario dan pertanyaan hipotetis yang dirancang untuk menyoroiti ketegangan antara apa yang mungkin diizinkan oleh hukum dan aturan perilaku profesional dan apa yang secara lebih luas dipahami sebagai tindakan yang benar atau adil. Sebagian besar pertanyaan (dalam skenario ini) menggunakan istilah 'dilema

etika' dan beberapa skala pengukuran yang digunakan oleh para peneliti menerapkan pilihan 'Pasti etis' atau 'Pasti tidak etis'.

Cara ketiga untuk menghubungkan penelitian empiris dengan topik etika dan normatif adalah bahwa data dapat dilihat sebagai dasar teori normatif, khususnya saat melakukan eksperimen pemikiran. Eksperimen disiapkan sedemikian rupa untuk memperoleh persetujuan atau bahkan kepastian dalam penilaian (normatif) tertentu. Ahli saraf terlibat dalam pekerjaan ini karena mereka tertarik pada apa yang terjadi di dalam otak, ketika individu yang memiliki bukti empiris relevan yang tersedia dihadapkan pada dilema moral.

Masalah Troli adalah contoh dari pendekatan semacam itu. Pendekatan ini berawal dari artikel Foot tahun 1967, 'Masalah Aborsi dan Doktrin Efek Ganda'. Pendekatan ini terdiri dari dua skenario. Di sini kami fokus pada yang pertama (kasus Switch). Sebuah kereta dorong yang lepas kendali akan menewaskan lima pekerja di rel. Seorang pengamat menyadari bahwa ia dapat memutar sakelar, sehingga mengubah kereta dorong tersebut menjadi jalur yang hanya akan dilintasi satu pekerja (bukti empiris).

Apa yang harus dilakukan? (masalah normatif/etika). Ilmuwan saraf dan kognitif telah merancang eksperimen yang meneliti cara kerja 'tata bahasa moral' yang digunakan orang untuk memandu opini dan perilaku normatif mereka. Idenya adalah bahwa menghadapi konflik semacam itu membangkitkan respons emosional yang kuat serta respons kognitif yang beralasan yang cenderung saling bertentangan. Dalam studi neurosains, Greene et al (2001) meminta subjek penelitian untuk merenungkan kasus Switch dan kasus lainnya (yaitu kasus Footbridge, di mana 'Anda dan seorang pria berdiri di jembatan penyeberangan di atas rel. Tubuhnya cukup besar untuk menghentikan troli jika Anda mendorongnya ke rel. Dia akan mati tetapi lima orang lainnya akan selamat. Banyak orang percaya bahwa secara moral salah bagi Anda untuk mendorong pria besar itu ke rel').

Inti dari pendekatan ini adalah untuk mengatasi kesenjangan fakta-nilai dengan mempelajari apa yang terjadi di dalam otak, ketika orang harus berurusan dengan masalah normatif/etika, sementara bukti tentang konsekuensi pilihan tersedia. Alih-alih menghasilkan pernyataan normatif tentang apa yang harus dilakukan orang untuk melompat dari empiris ke nilai-nilai (ketika dihadapkan dengan troli atau masalah serupa), ahli kognitif dan ahli saraf membuka kotak hitam mekanisme pengambilan keputusan yang memandu perspektif dan perilaku seseorang. Mengetahui mekanisme mana yang 'dipertaruhkan' dan bagaimana mekanisme tersebut bekerja saat menghubungkan 'IST' dan 'SOLL' dapat membantu menemukan jalur yang diikuti oleh hakim, jaksa, regulator, dan akademisi hukum saat mereka dihadapkan dengan pilihan untuk menyeberangi jembatan antara fakta, nilai (dan emosi).

Ketiga pendekatan ini tidak memecahkan masalah nilai fakta, begitu pula Giesen (2015). Bisa jadi tidak ada solusi untuk masalah ini. Tujuan penyajian beberapa pendekatan ini terutama untuk memberdayakan baik kaum empiris maupun normatif dengan beberapa 'alat' (argumentatif) untuk menangani masalah kesenjangan dengan cara yang transparan.

Kesimpulan

- Memahami mekanisme sosial dan perilaku apa yang dapat menghambat proses transfer dan penyebaran adalah penting, seperti halnya cara-cara yang membantu memahami proses ini dan mengurangi pembatasan ini.
- Atas dasar efisiensi, efektivitas, ekonomi, dan etika, sangat terpuji bahwa bukti yang dihasilkan oleh penelitian hukum empiris ditransfer (dengan cara yang cerdas) ke profesi hukum, termasuk penelitian hukum doktrinal.
- Mengetahui bahwa ada masalah kesenjangan antara fakta dan nilai, masing-masing antara ELR dan studi dan praktik hukum-normatif sangat penting, seperti halnya mengetahui dari mana masalah ini berasal. Salah satu asal-usulnya adalah peneliti hukum empiris yang menghasilkan bukti yang bertentangan dengan pengaturan, praktik, posisi, atau harapan hukum tertentu. ELR pada dasarnya berfungsi sebagai 'pemeriksaan realitas' (meskipun tidak selalu menjadi tamu yang disambut baik). Asal-usul kedua adalah bahwa, karena pengalaman yang terbatas dengan data (pengumpulan dan analisis), interpretasi bukti oleh sarjana hukum dapat secara metodologis tidak tepat. Kemungkinan ketiga adalah bahwa buktinya (terlalu) kompleks, sehingga sulit bagi pengacara dan legislator untuk memahami apa yang telah ditemukan, yang dapat mengakibatkan mengesampingkan fakta dan angka (tertentu).
- Beberapa pendekatan telah disorot untuk membantu memahami proses ini:
- Mengenali pentingnya pendekatan proses hukum tetapi juga keterbatasannya;
- Memperhatikan penerjemahan konsep hukum dalam konsep empiris dan sebaliknya;
- Bekerja dengan kriteria eksplisit untuk membandingkan dan menimbang pernyataan normatif seperti nilai;
- Mengurai dan membongkar argumen dan tindak tutur untuk mencegah semua argumen disatukan;
- Bekerja dengan dan belajar dari wawasan dari etika yang diinformasikan secara empiris.

BAB 9

PENELITIAN HUKUM EMPIRIS

9.1 REVOLUSI EMPIRIS DALAM HUKUM?

'Beasiswa hukum tradisional sedang mengalami tekanan. Perdebatan sedang berlangsung mengenai tujuan dan metode studi hukum akademis'. Berikut ini adalah beberapa kata pengantar oleh Smits (2012) dalam bukunya tentang keadaan ilmu hukum. Perdebatan membahas berbagai topik, mulai dari metodologi penelitian hukum, kurikulum, dan masa depan profesi hingga pengaruh 'disruptif' yang mungkin dimiliki oleh digitalisasi, pembelajaran mesin, dan Big Data. Pada saat yang sama, pesan dapat didengar bahwa ada revolusi (empiris) yang sedang berlangsung dalam ilmu hukum. Ho dan Kramer (2013) mendukung tesis ini. Mereka menghitung proporsi artikel Stanford Law Review yang menyebutkan kata 'empiris' selama hampir 60 tahun, yang membuat mereka menyebut perkembangan tersebut sebagai revolusi.

Jumlah kata merupakan indikator tipis dari 'keterlibatan empiris' peneliti hukum, karena penggunaan kata ini tidak selalu menyiratkan bahwa penelitian empiris telah dilakukan. Diamond dan Mueller (2010) mencari lebih dalam dan menganalisis konten 60 volume tinjauan hukum yang diterbitkan antara tahun 1998 dan 2008: 'Analisis konten kami mengungkapkan bahwa pada tahun 2008 hampir setengah dari artikel tinjauan hukum menyertakan beberapa konten empiris. Produksi penelitian asli kurang umum'. Mereka juga melaporkan bahwa 'mengevaluasi tempat beasiswa empiris dalam tinjauan hukum, telah menarik banyak perhatian dan berbagai pendekatan'. Klick (2011) mempelajari konten delapan jurnal yang menerbitkan di bidang hukum dan ekonomi (seperti *Review of Law and Economics* dan *Journal of Law, Economics and Organization*) dan menganalisis pangsa pasar empiris jurnal-jurnal ini.

Data dikumpulkan dari edisi pertama jurnal tersebut. Dia menemukan bahwa pangsa artikel empiris menurun hanya untuk satu jurnal sementara untuk yang lain meningkat, meskipun tidak secara dramatis atau revolusioner. Engel (2012) mempelajari liputan hukum perilaku dan ekonomi dalam satu jurnal (*Journal of Empirical Legal Studies*) yang ditujukan untuk kontribusi empiris. Dia menemukan 77 artikel sejak jurnal itu didirikan (tahun 2004) yang berfokus pada topik ini, 32 membahas makalah perilaku tentang hukum privat, 27 membahas masalah dari hukum pidana dan lima membahas hukum publik.

Di bidang hukum internasional, Chilton dan Tingley (2013) menafsirkan perkembangan tersebut sebagai 'perubahan empiris dalam studi hukum internasional' yang terjadi pada dekade pertama abad kedua puluh satu. Simmons dan Breidenbach (2011) juga menyebutkan 'perubahan empiris dalam beasiswa hukum [yang] secara umum telah terdokumentasi dengan cukup baik. Bahkan, ada peringkat sekolah hukum berdasarkan kekuatan kelembagaan dalam studi hukum empiris. Dalam bidang hukum ekonomi internasional, tren ini kurang diperhatikan, tetapi sedang meningkat.

Meskipun mungkin timbul kesan bahwa perubahan empiris dalam studi hukum adalah

sesuatu yang terjadi dalam dua dekade terakhir, kenyataannya berbeda, seperti yang telah kami jelaskan dalam Bab 1. Meskipun agak berlebihan untuk menyebut perkembangan terkini sebagai revolusi, penelitian hukum empiris memang sedang berkembang, atau, seperti yang dikemukakan Van Dijck (2011), sedang berkembang pesat. Apa penyebab mendasar dari fenomena ini? Kami sebutkan enam di antaranya:

- **Alasan 1:** Transparansi dan akuntabilitas telah menyentuh dunia hukum, regulasi, dan pengaturan hukum lainnya. Mencari tahu seberapa transparan, akuntabel, dan efektifnya dunia hukum dan lembaganya tidak dapat dilakukan tanpa penelitian empiris.

Semakin pentingnya bagi pemerintah, parlemen, dan masyarakat untuk mengetahui dan memahami apa yang dicapai (dan biaya) oleh berbagai pengaturan, perangkat, dan lembaga hukum yang beragam hampir ada di mana-mana (di dunia Barat). Dorongan itu terkait langsung dengan perdebatan transparansi dan akuntabilitas, yang telah berlangsung selama beberapa dekade (di organisasi publik, semi-publik, dan swasta). Pada akhir tahun 1990-an, Power (1999) meluncurkan konsep 'ledakan audit' dan 'masyarakat audit', yang menggambarkan pertumbuhan dan meluasnya aktivitas audit yang berfokus pada transparansi, legalitas, dan akuntabilitas organisasi serta kebijakan dan programnya. Beberapa saat kemudian, pengaturan ini sendiri tidak lagi dianggap 'sudah pasti' dalam hal relevansi dan efektivitasnya. 'Pengaturan-dalam-buku' dapat berbeda dari 'pengaturan-dalam-tindakan', seperti yang kita ketahui, dan hal yang sama berlaku untuk perangkat hukum.

- **Alasan 2:** Pertumbuhan jumlah undang-undang dan peraturan memberikan tekanan pada kebutuhan untuk mengetahui tentang transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas. Jumlah peraturan meningkat pesat di banyak negara (Barat) setelah Perang Dunia II. Di Belanda, pertumbuhannya serius, meskipun pemerintah terus-menerus meminta deregulasi sejak awal 1980-an. Pada 1 Januari 2007, ada 1.785 undang-undang, 2.489 peraturan kabinet dan Keputusan Kerajaan, serta 6.402 peraturan menteri. Jumlah total undang-undang telah meningkat sejak 1980 sekitar 700.

Di Belgia, Parmentier dan van Houtte (2003) menunjukkan bahwa:

Dalam beberapa dekade terakhir, jumlah undang-undang di Belgia telah meningkat secara spektakuler. Sudah pada 1980-an, beberapa komentator berbicara dengan bahasa yang rumit tentang 'inflasi undang-undang' dan 'hiperleksis', tentang 'pencemaran hukum' dan 'elephantiasis hukum'. Pada 1990-an, keadaannya tidak lebih baik. Pada tahun 1999 Buletin Undang-Undang dan Keputusan Belgia (Moniteur Belge) memuat lebih dari 50.000 halaman, 50.560. . . . Pembuatan undang-undang tidak terbatas pada pekerjaan legislatif Parlemen, sebaliknya ada pergeseran yang nyata dalam pembuatan peraturan menuju kekuasaan eksekutif. Jika kita bandingkan untuk periode 1985–1995 hanya jumlah

undang-undang dan Keputusan Kerajaan, rasionya adalah 8,5% berbanding 91,5%. 'Perundang-undangan semu' ini mengarah, bersama dengan 'perundang-undangan normal', pada kepadatan aturan yang signifikan dalam masyarakat modern.

Menurut EUABC.com pada tahun 2015 'sekarang ada lebih dari 40.000 peraturan perundang-undangan di UE. Ada juga 15.000 putusan Pengadilan dan 62.000 standar internasional, yang semuanya harus dihormati dan dipatuhi oleh warga negara dan perusahaan di UE'. Beberapa tindakan mengikat secara hukum, seperti peraturan, arahan, keputusan, dan perjanjian internasional. Beberapa tidak, seperti white paper, green paper, dan komunikasi.

Di Amerika Serikat, Dawson (2007) mengukur jumlah peraturan federal dengan menghitung jumlah halaman dalam Code of Federal Regulations (CFR) dari tahun 1949 hingga 1999. CFR adalah publikasi Pemerintah yang memuat semua peraturan federal yang berlaku selama tahun tertentu:

Peraturan tumbuh hampir sepanjang waktu, tetapi tingkat pertumbuhannya sangat bervariasi. Periode pertumbuhan negatif jarang terjadi, dan, jika negatif, besarnya tingkat pertumbuhan selalu kecil. Tingkat pertumbuhan yang tinggi terjadi pada tahun 1970-an, meskipun periode tersebut mengalami deregulasi penting dalam transportasi, telekomunikasi, dan energi.

Mengingat demografi aturan dan regulasi ini, jelas bahwa masyarakat ingin mengetahui fakta dan angka tentang fungsinya, termasuk dampak dan efek samping, misalnya pada produktivitas ekonomi.

- **Alasan 3:** Pertumbuhan jumlah dan aktivitas organisasi yang menegakkan hukum dan regulasi (inspektorat, otoritas pengawasan, jaksa penuntut umum, hakim) juga menjadi pendorong di balik kebutuhan untuk mengetahui apa yang terjadi dalam kenyataan melalui ELR.

Kurang lebih seiring dengan peningkatan jumlah regulasi, terjadi pula peningkatan jumlah lembaga (hukum) yang menegakkan aturan dan regulasi: inspektorat, organisasi dan otoritas pengawasan, jaksa penuntut umum, organisasi yang mempelajari dan memerangi penipuan dan korupsi, dan masih banyak lagi. Studi Jordana dan Levi-Faur (2004) tentang lembaga regulasi di 49 negara merupakan sumber pertama.

Studi tersebut meneliti tahun-tahun antara 1920 dan 2002 dan 'menemukan bahwa jumlah lembaga regulasi meningkat tajam pada 1990-an. Bahkan, tingkat pembentukannya meningkat drastis: dari kurang dari lima lembaga otonom baru per tahun dari 1960-an hingga 1980-an, menjadi lebih dari 20 per tahun dari 1990-an hingga 2002'. Untuk Belanda, data tersedia mengenai inspektorat selama hampir 25 tahun (sejak 1989 dan seterusnya) dalam hal jumlah karyawan (setara penuh waktu (ftes)) dan pengeluaran.

Pada tahun 1989, inspektorat menghabiskan kurang dari Rp. 3 Triliun per tahun, sementara biayanya meningkat lebih dari tiga kali lipat pada tahun 2007 (Rp. 11 Triliun). Namun, antara tahun 2007 dan 2013, jumlah setara penuh waktu dalam organisasi ini berkurang sebesar 8% (yang menyiratkan pengurangan biaya personel) tetapi biaya operasinya 13% lebih tinggi. Untuk Inggris Raya, Hood dkk. (1998) memiliki data tentang jumlah staf di organisasi regulator selama dua dekade:

Kami mengidentifikasi tidak kurang dari 134 badan terpisah yang mengatur sektor publik Inggris di tingkat pemerintah nasional pada tahun 1995. Badan-badan tersebut secara langsung mempekerjakan hampir 14.000 staf, dan menghabiskan biaya operasional sebesar Rp. 7.66 Miliar – lebih dari 30 pence untuk setiap Rp. 1 Triliun yang dibelanjakan oleh pemerintah Inggris (jika kita mengeluarkan pembayaran transfer terbesar dalam bentuk bunga utang dan jaminan sosial siklus).

Perkiraan Hood dkk. tentang 'peningkatan staf secara keseluruhan di badan-badan regulator di dalam pemerintah Inggris adalah 90% antara tahun 1976 dan 1995, dan itu adalah angka yang konservatif. Pertumbuhan staf yang dramatis ini sangat kontras dengan apa yang terjadi pada staf di sektor publik secara keseluruhan, dengan penurunan lebih dari 30% pada total pegawai negeri dan lebih dari 20% pada staf otoritas local. Akhirnya, data tentang perkembangan jumlah jaksa penuntut umum per 100.000 penduduk di lebih dari 30 negara Eropa dapat disajikan. Data menunjukkan bahwa peningkatan jumlah yang stabil terjadi antara tahun 1995 dan 2011. Rata-rata pertumbuhan tahunan untuk tahun 1995–2000 adalah 2,15%, untuk tahun 2003–2007 adalah 2,48% dan untuk tahun-tahun terakhir (2007–2011) 1,56%. Kisaran jumlahnya menarik; sementara Bulgaria pada tahun 2007 memiliki 24 jaksa penuntut umum per 100.000 penduduk, Belanda memiliki 4,19, Jerman 6,18 dan Belgia 8,5.

- **Alasan 4:** Yuridifikasi masyarakat juga memicu minat yang lebih besar pada ELR. Yuridifikasi berkaitan dengan peran hukum, regulasi, dan hakim dalam suatu masyarakat. Hirschl (2008) menggunakan konsep yudisialisasi untuk menggambarkan ketergantungan pada pengadilan dan sarana peradilan untuk menangani prediktabilitas moral inti, pertanyaan kebijakan publik, dan kontroversi politik. Dalam istilah deskriptif, beberapa orang melihat perkembangan ini sebagai 'proliferasi hukum' atau sebagai 'kecenderungan terhadap peningkatan hukum formal (atau positif, tertulis)'; yang lain melihatnya sebagai 'monopoli bidang hukum oleh para profesional hukum', 'konstruksi kekuasaan kehakiman' atau 'perluasan kekuasaan kehakiman'. Di sini kami merujuk pada dua interpretasi pertama (proliferasi dan kecenderungan terhadap peningkatan hukum formal). 'Aktor' yang terlibat, secara umum, adalah pemerintah, legislatif, administrasi, yudikatif, pakar hukum, dan (lainnya) aktor non-negara termasuk individu serta aktor institusional dan korporat.

Salah satu faktor di balik yuridifikasi adalah pengembangan dan implementasi negara kesejahteraan. Maus (1986) menyatakannya sebagai berikut: 'paradigma kesejahteraan (hukum) menggunakan bentuk hukum tertentu; substantif, bertujuan, berorientasi pada

tujuan, dan diimplementasikan melalui regulasi, standar, dan aturan. Hukum yang terwujud ini bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu dalam situasi konkret'. Teubner (1987) mengemukakan bahwa yuridifikasi 'tidak hanya berarti penyebaran hukum', tetapi 'menandakan suatu proses di mana negara sosial intervensionis menghasilkan jenis hukum baru, hukum regulasi . . . yang dicirikan oleh rasionalitas material sebagai lawan dari rasionalitas formal'. Hukum memang diterapkan di area 'baru': keluarga, tenaga kerja, lingkungan, keintiman, dan sebagainya. Penyebaran hukum dan perundang-undangan dengan cara ini berarti bahwa 'hubungan yang sebelumnya diatur oleh nilai-nilai dan harapan-harapan lain menjadi tunduk pada nilai-nilai dan aturan-aturan hukum'. Tugendhat dan Croft (2013) menggunakan ungkapan 'penyebaran misi hukum' untuk menggambarkan fenomena ini. Perkembangan-perkembangan ini merangsang kebutuhan akan pengetahuan empiris, yang tidak hanya menunjukkan apa yang 'terjadi' dalam kenyataan, tetapi juga dengan konsekuensi-konsekuensi apa (yang diharapkan dan tidak diharapkan).

- **Alasan 5:** Kontraktualisasi masyarakat juga merangsang minat pada ELR. Pengaturan kontraktual antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta antara pemerintah dan LSM serta organisasi lain telah menjadi penting sejak Manajemen Publik Baru diperkenalkan pada tahun 1980-an di banyak negara (Barat). O'Flynn (2007) merujuk pada 'munculnya kontraktualisme baru, sementara bagi yang lain kontrak dan persaingan menjadi dasar untuk mengubah sifat dasar sektor publik; kontrak telah ditetapkan sebagai bentuk standar pengiriman kebijakan – bahkan sebagai instrumen dengan sedikit batasan, lebih disukai dalam sebagian besar keadaan daripada birokrasi publik tradisional' (2001). Pengembangan Kemitraan Publik-Swasta dapat dikaitkan dengan meningkatnya kepentingan yang melekat pada kontrak. Namun, ada juga perkembangan ketiga. Chassagnard-Pinet dan Delalieux (2010) menggambarkannya sebagai berikut:

Penurunan negara kesejahteraan di negara-negara maju, seiring dengan globalisasi perdagangan dengan negara-negara berkembang, telah mendorong perubahan besar dalam peran pemerintah sebagai produsen norma dan sebagai hasilnya, maraknya norma yang dikeluarkan oleh badan-badan swasta. Negara-negara berdaulat, yang tindakan hukumnya sebagian besar terbatas dalam batas-batas nasional mereka, berjuang dalam upaya mereka untuk mengatur kegiatan ekonomi transnasional. Melemahnya negara mendukung munculnya berbagai pemangku kepentingan, yang meskipun demikian mengambil bagian dalam pengembangan norma tetapi juga menerapkannya (lembaga regulasi, badan-badan swasta, LSM).

Untuk mengatur hubungan ini, kontrak dan hukum lunak digunakan, misalnya di bidang tanggung jawab sosial perusahaan. Smits (2010) menghubungkan perkembangan ini dengan

produksi norma global swasta. Dengan istilah ini, ia merujuk pada kode etik untuk tanggung jawab sosial atau lingkungan perusahaan, aturan standarisasi (seperti 'codex alimentarius') dan jenis pengaturan diri lainnya termasuk, dalam hukum kontrak, 'kondisi umum standar' yang sudah lama ada.

- **Alasan 6:** Perkembangan teknologi, termasuk inovasi juga telah mendorong pertumbuhan ELR.

Poin terakhir kami untuk membantu menjelaskan mengapa ELR berkembang pesat sejalan dengan argumen yang diajukan oleh Miles dan Sunstein (2008) bahwa Realis Hukum Baru melakukan apa yang hanya dibayangkan oleh Realis Hukum seperti Llewellyn dan rekan-rekannya: 'studi kuantitatif skala besar tentang fakta dan hasil' (termasuk penjelasan). Teknologi yang membuat pengumpulan data dan analisis data lebih cepat, lebih murah, dan lebih mendalam merupakan faktor yang sangat penting di sini. McGinnis (2014) menarik perhatian pada dampak masa depan teknologi informasi pada profesi hukum:

Munculnya inovator komputasional [di bidang hukum] dapat mendorong politik yang lebih didorong oleh data. Politik modern yang berorientasi pada hukum sering kali terlalu retorik; cita-cita yang saling bersaing dengan cepat menjadi abstraksi. Misalnya, kita memperdebatkan pernikahan sesama jenis di tingkat federal dalam hal klaim tentang kesetaraan, dan pendanaan sekolah di tingkat negara bagian dalam hal hak atas pendidikan. Sebaliknya, kemajuan komputasi yang tiada henti memungkinkan fokus pada dampak aktual kebijakan sosial dan mendorong eksperimen untuk menguji dampak tersebut.

Dalam beberapa bab buku ini, kami telah membahas Big Data, termasuk teknologi disruptif yang disebutkan oleh Susskind (2013). Bagi ELR, perkembangan ini membuka cakrawala baru (seperti prediksi hukum, evaluasi dengan Big Data, dan contoh lain yang dibahas dalam Bab 7 dan 8), sementara pada saat yang sama metodologi, teori, dan statistik akan mencegah peneliti empiris hukum berakhir di dunia dengan Mitos dan Kesombongan Big Data.

Keenam hal ini (dan beberapa perkembangan lainnya, seperti medikalisasi hukum pidana, termasuk hukum saraf dan insentif yang ditawarkan penerbit dan jurnal kepada penulis yang melakukan ELR10) telah menjadi penting dalam pengembangan ELR dan membuat perkembangan cabang ini dapat dipahami.

Hal ini membawa kita ke topik terakhir: apakah ELR berkontribusi pada pertumbuhan pengetahuan tentang fungsi pengaturan hukum, perangkat, lembaga, organisasi, intervensi, dan kebijakan hukum dalam masyarakat?

9.2 PERTUMBUHAN PENGETAHUAN DALAM ELR

Pertumbuhan pengetahuan dapat dicapai melalui beberapa lintasan. Salah satunya adalah meningkatkan kualitas (validitas, reliabilitas, ketepatan, cakupan, replikasi) instrumen pengukuran; ilmu kedokteran dan biosains menyajikan banyak contoh (seperti penemuan

pemindaian hewan peliharaan dan teknik pencitraan otak). Pertumbuhan pengetahuan juga dapat diwujudkan dengan mengembangkan dan menggunakan desain penelitian dan teknik statistik yang lebih canggih. Akumulasi pengetahuan juga dapat dicapai ketika berbagai metode penelitian yang sebelumnya tidak digabungkan digabungkan. Dan pertumbuhan pengetahuan dapat terjadi di arena penjelasan: beberapa teori mampu menjelaskan lebih banyak faktor (termasuk anomali) daripada yang lain (sebelumnya).

Dalam sebuah makalah tentang indikator pertumbuhan sains, Nigel (1978) membedakan antara mengukur pertumbuhan tenaga kerja ilmiah dan pertumbuhan pengetahuan ilmiah. Dia mencantumkan beberapa indikator konsep terakhir: produksi makalah ilmiah, statistik paten, statistik kutipan, dan kriteria seperti 'peningkatan tahunan dalam jumlah variabel baru yang ditemukan dalam literatur penelitian di bidang tertentu'. Pro dan (banyak) kontra mereka dibahas, sementara juga indikator yang lebih substantif seperti kriteria pemalsuan Popper dan 'gagasan tentang pergeseran masalah progresif dan degeneratif' dari Lakatos (1970) disebutkan.

Di sini kita mengikuti saran yang dirumuskan oleh Lakatos, untuk mengetahui apakah ada contoh pertumbuhan pengetahuan di bidang ELR. Pendekatan Lakatos adalah bahwa pertumbuhan (atau akumulasi) pengetahuan dalam suatu disiplin atau bidang penelitian (seperti ELR) terjadi ketika ada pergeseran masalah progresif yang bersifat teoritis dan/atau empiris. Pergeseran masalah progresif secara teoritis adalah perpindahan ke teori-teori baru yang memungkinkan kita untuk menjelaskan dan memprediksi lebih dari yang diizinkan oleh teori pendahulu.

Pergeseran masalah bersifat progresif secara empiris jika selain memprediksi bukti baru yang dapat diamati, pengamatan aktual benar-benar mengonfirmasi prediksi baru ini. Program penelitian dapat dilihat sebagai serangkaian aktivitas penelitian seputar masalah tertentu di mana para peneliti (secara global dan sering kali secara virtual) saling bertukar dan mengonfrontasi teori dan bukti, sementara hasil dari proses ini disintesis dalam hal validitas ('klaim kebenaran') dan relevansinya terhadap praktik:

Agar program penelitian bersifat progresif, setiap pergeseran masalah harus setidaknya progresif secara teoritis, dan setidaknya kadang-kadang progresif secara empiris. Dengan kata lain, dalam program progresif, setiap perpindahan dari teori lama ke teori baru harus memungkinkan kita untuk memprediksi lebih banyak, dan setidaknya kadang-kadang prediksi ini harus dikonfirmasi. Jika sebuah program gagal menampilkan karakteristik ini, program tersebut tidak lagi progresif tetapi telah mengalami degenerasi.

Menurut Lakatos, sebuah program penelitian tidak membahas hipotesis yang terisolasi atau temuan empiris yang terisolasi tetapi terkait dengan (atau bagian dari) serangkaian aktivitas teoritis dan empiris, yang biasanya meliputi:

inti yang kuat (= pusat penjelasan) dan 'heuristik positif', yang mendefinisikan

masalah, menguraikan konstruksi sabuk hipotesis tambahan, meramalkan anomali dan mengubahnya dengan penuh kemenangan menjadi contoh. Heuristik positif ini berfungsi untuk memperkuat program penelitian dengan menemukan fakta-fakta baru yang dapat dijelaskan oleh inti yang kuat. Fakta-fakta baru ini dapat berupa penemuan baru atau anomali dalam program penelitian yang lebih lama.

Ada juga heuristik negatif yang melindungi inti yang kuat dari program tersebut dengan mengalihkan kritik darinya ke hipotesis tambahan (ad hoc) yang dinyatakan sebagai subjek pemeriksaan dan pengujian atau dengan menyangkal signifikansi anomali dengan ketentuan yang setia bahwa pada akhirnya para ilmuwan akan menjelaskannya.

Program Penelitian tentang Pengendalian Kekerasan dalam Rumah Tangga: Apa yang Berhasil dan Mengapa?

Ini adalah kasus dari program penelitian terkenal tentang kekerasan dalam rumah tangga yang dimulai dengan eksperimen oleh Sherman dan Berk (1984). Tujuan dari eksperimen adalah untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana polisi menanggapi pelanggaran ringan, kasus kekerasan dalam rumah tangga, dan apa yang paling berhasil untuk mengurangi kekerasan dalam rumah tangga ini. Awal dari program ini adalah untuk menguji hipotesis, yang disimpulkan dari teori pencegahan: hukuman akan mengurangi residivisme, atau kecenderungan untuk melakukan kejahatan lebih lanjut. Dari teori ini, Sherman dan Berk menyimpulkan hipotesis berikut: 'Penangkapan karena kekerasan terhadap pasangan mengurangi risiko pelanggaran berulang'.

Dalam hipotesis ini, penangkapan adalah variabel independen, dan variasi risiko pelanggaran berulang adalah variabel dependen (dihipotesiskan bergantung pada penangkapan). Para penulis menguji hipotesis tersebut melalui sebuah eksperimen di mana polisi menanggapi pengaduan tentang kekerasan terhadap pasangan dengan salah satu dari tiga cara, salah satunya adalah dengan menangkap pelaku. Dua cara lainnya adalah dengan 'berusaha menasihati kedua belah pihak' dan 'mengusir pelaku dari rumah selama beberapa jam'.

Ketika mereka memeriksa data (catatan polisi untuk orang-orang dalam eksperimen mereka), mereka menemukan bahwa dari mereka yang ditangkap karena menyerang pasangannya, hanya 13% yang mengulangi pelanggaran, dibandingkan dengan tingkat residivisme sebesar 26% bagi mereka yang dipisahkan dari pasangannya oleh polisi tanpa penangkapan apa pun. Pola ini konsisten dengan hipotesis yang disimpulkan dari teori pencegahan. Dengan demikian, teori tersebut mendapat dukungan dari eksperimen tersebut.

Namun, Sherman dan Berk mengantisipasi kemungkinan masalah: seberapa valid hubungan yang mereka coba buat antara teori dan data? Menentukan apakah pasangan diserang setelah intervensi polisi awal merupakan perhatian pengukuran utama. Catatan resmi tentang serangan berikutnya oleh tersangka akan memberikan satu ukuran. Namun, sebagian besar penyerangan terhadap pasangan tidak dilaporkan ke polisi, sehingga asisten peneliti mereka juga mendatangi korban untuk diwawancarai setiap dua minggu selama periode tindak

lanjut enam bulan. Meskipun kurang dari setengah korban menyelesaikan semua wawancara tindak lanjut, ketersediaan ukuran laporan diri memungkinkan para peneliti untuk menjelaskan sedikit tentang validitas data resmi. Secara umum, kedua ukuran tersebut menghasilkan hasil yang sebanding.

KOTAK 9.1 APLIKASI METODOLOGI PROGRAM PENELITIAN ILMIAH (MSRP) LAKATOS UNTUK MENDIAGNOSIS PERTUMBUHAN PENGETAHUAN DI BIDANG ILMIAH

Studi organisasi dan strategi

Lecocq (2010) mengambil 'safari' studi dan pendekatan strategi karya Mintzberg dkk. (2005) sebagai tinjauan umum bidang penelitian strategi, mempelajari 'sepuluh (+1) aliran ini di [dunia ini], yang masing-masing merupakan program penelitian tersendiri. Setiap aliran memiliki ide inti, membuat asumsi mendasar, berfokus pada beberapa masalah empiris, dan memperoleh beberapa hasil yang terkait dengan strategi. Beberapa aliran mungkin mengalami kemunduran sementara atau permanen, seperti "aliran perencanaan". Program yang menggantikan yang lain dapat menghasilkan revolusi ilmiah di bidang tersebut. Selain itu, dalam setiap aliran, beberapa teori berkembang dan saling melengkapi, atau beberapa mungkin menghilang. Misalnya, meskipun aliran pembelajaran berakar pada tahun 60-an, aliran tersebut disegarkan pada tahun 1995 oleh penerbitan *The Knowledge Creating Company* karya Nonaka and Takeuchi.

Ekonomi

Caldwell (1991) menganalisis analisis Blaug tentang program ekonomi Keynesian pada paruh pertama abad kedua puluh dalam hal indikator MSRP ('Metodologi Program Penelitian Ilmiah').

Ilmu politik

Lustick (1997) menganalisis konsosiasionalisme dan karya Lijphart dari perspektif ini.

Sosiologi

Ultee (1977) meninjau lima program sosiologi ('aliran'): fungsionalisme, tradisi utilitarian-individualistis (juga dikenal sebagai sosiologi perilaku), sosiologi interpretatif, tradisi penelitian empiris, dan sosiologi Marxis, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana kemajuan pengetahuan dapat didiagnosis dengan berfokus pada kekuatan penjelasan teori dan tingkat penguatannya.

Selanjutnya, masalah validitas eksternal ('generalisasi temuan' di luar Minneapolis) mengganggu para peneliti. Minneapolis bukanlah kota AS yang 'khas' dibandingkan kota lainnya, dan mereka tidak dapat berasumsi bahwa kebijakan polisi yang efektif di Minneapolis akan sama efektifnya di kota-kota dengan sejarah politik, lembaga peradilan pidana, dan karakteristik populasi yang sangat berbeda.

Sherman dan Berk (1984) memperingatkan para pembacanya bahwa validitas eksternal harus menunggu replikasi investigasi mereka. Pada tahap berikutnya dari program penelitian ini, Sherman, Berk, dan yang lainnya memulai replikasi eksperimen di lima kota AS lainnya. Replikasi ini menggunakan pendekatan penelitian dasar yang sama, meskipun dengan beberapa perbaikan (kami tidak membahasnya di sini kecuali satu: data dikumpulkan tentang kekerasan berulang terhadap korban lain serta terhadap pengadu asli).

Pada saat hasil dilaporkan dari lima dari enam kota, sebuah masalah tampak jelas: di tiga kota (Omaha, Charlotte, dan Milwaukee), peningkatan jangka panjang dalam insiden kekerasan dalam rumah tangga di antara para tahanan ditemukan. Di dua lokasi lainnya (Colorado Springs dan Dade County), efek jera yang diprediksi tampaknya terjadi. Temuan baru ini, alih-alih mengarah pada kepercayaan yang lebih besar pada teori jera, justru mempertanyakannya. Teori jera sekarang tampaknya tidak memadai sampai batas tertentu: bagaimana dapat dijelaskan bahwa jera berjalan seiring dengan peningkatan perilaku residivisme?

Jadi para peneliti mulai menganalisis ulang data tindak lanjut dari kota-kota untuk mencoba menjelaskan hasil yang berbeda. Beberapa masalah penelitian baru dirumuskan: dapatkah perbedaan sistematis dalam sampel atau dalam penerapan kebijakan penangkapan menjelaskan hasil yang berbeda atau apakah masalahnya adalah ketidakcukupan dalam dasar teoritis penelitian? Apakah teori pencegahan benar-benar cara terbaik untuk menjelaskan pola dalam data yang mereka kumpulkan? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, Sherman dan rekan-rekannya beralih ke teori kontrol.

Teori kontrol memperkirakan bahwa memiliki 'kepentingan dalam kesesuaian' (yang dihasilkan dari inklusi dalam jaringan sosial di tempat kerja atau di masyarakat) mengurangi kemungkinan seseorang melakukan kejahatan. Implikasinya adalah bahwa orang yang bekerja dan menikah lebih mungkin terhalang oleh ancaman penangkapan daripada mereka yang tidak memiliki kepentingan dalam kesesuaian tersebut. Dan inilah yang terungkap dari pemeriksaan ulang data: Individu yang menikah dan bekerja lebih mungkin dicegah dari pelanggaran berulang dengan penangkapan, tetapi individu yang tidak menikah dan menganggur sebenarnya lebih mungkin melakukan pelanggaran berulang jika mereka ditangkap.

Masalah masyarakat (kekerasan dalam rumah tangga) diterjemahkan ke dalam pertanyaan penelitian (apa cara yang efektif untuk mengurangi masalah ini?) dan dipelajari dengan menyimpulkan hipotesis dari teori kriminologi yang dihormati. Hipotesis ini diuji melalui eksperimen. Hasilnya mendukung hipotesis dan, melalui itu, teori kriminologi umum, setidaknya pada awalnya.

Meskipun desain penelitian menyiratkan pengujian yang ketat (menjamin validitas internal, lihat Bab 5), namun ada kekhawatiran tentang generalisasi (= validitas eksternal) dari temuan tersebut. Hal ini membuat para peneliti melakukan eksperimen lanjutan di beberapa kota. Hasilnya memang bertentangan dengan teori pencegahan; hanya di dua dari lima kota ditemukan konfirmasi dari teori ini, sementara di tiga kota lainnya ditemukan kebalikannya.

Dengan demikian, para peneliti dihadapkan pada kontradiksi dari teori yang terkenal. Karena desain yang memadai digunakan, temuan (yang bertentangan) tidak dapat diabaikan; tim harus memikirkan semuanya dan menghasilkan teori alternatif (yang berfungsi sebagai heuristik positif). Hal ini menantang kelompok Sherman untuk menyimpulkan hipotesis baru dari teori kontrol sosial yang tampaknya mampu menjelaskan apa yang sedang terjadi. Teori kontrol sosial menyatakan bahwa orang-orang dengan (lebih banyak) kepentingan dalam konformitas dan rasa memiliki lebih mungkin dicegah oleh penangkapan daripada mereka yang tidak memiliki kepentingan dalam konformitas tersebut. Dan inilah yang ditemukan.

Program Penelitian tentang Siapa yang Menang dan Kalah dalam Litigasi, dan Mengapa?

Siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam litigasi, dan mengapa? Dan apakah mereka yang 'kaya' lebih baik di pengadilan daripada mereka yang 'tidak punya'? Sekitar 40 tahun yang lalu, Galanter (1974) mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dalam sebuah makalah yang menetapkan agenda bagi para peneliti yang tertarik pada efek distributif hukum dan prosedur hukum. Program ini telah menjadi program yang terkenal dalam penelitian hukum empiris (meskipun artikel aslinya 'ditolak oleh semua tinjauan hukum terkemuka dan beberapa jurnal ilmu politik juga'. Karena Niemeijer (2014) baru-baru ini mempelajari kemajuan yang dibuat dalam program penelitian ini selama 40 tahun terakhir, berikut ini sebagian besar didasarkan pada karyanya.

Temuan dan teori Galanter

Esai Galanter didasarkan pada data tentang hubungan antara karakteristik partai dan kemenangan dalam litigasi. Ia membedakan antara 'pelaku tunggal (OS)', yang menggunakan sistem hukum hanya sesekali dan sering kali tanpa sengaja, dan 'pelaku berulang' (RP), yang menggunakan sistem hukum lebih sering dan strategis. Ia juga membedakan antara 'orang kaya' yang kaya sumber daya dan memiliki posisi yang baik, yang sering kali menjadi pelaku berulang, dan 'orang miskin' yang miskin sumber daya dan lebih rentan, yang biasanya berperan sebagai OS. RP unggul dalam litigasi dibandingkan dengan OS. Namun, seperti diketahui, artikel tersebut juga cukup spekulatif, karena, untuk beberapa isu, tidak ada data yang tersedia.

Galanter menawarkan beberapa penjelasan (= teori) untuk keberhasilan 'orang kaya' di pengadilan. Empat di antaranya pada dasarnya membahas konsekuensi dari perbedaan antara RP dan OS, sementara teori 5 melihat sebaliknya dan dimulai dengan beberapa karakteristik pengadilan. Teori 6 berfokus pada peran pemerintah.

Keadaan penelitian 40 tahun lebih kemudian

Bagaimana keadaan bukti 40 tahun lebih setelah makalah Galanter diterbitkan? Pertama-tama, program penelitian telah menghasilkan 'banyak penelitian' di dalam dan luar AS yang meneliti argumen dan mekanisme dasar yang diuraikan sebelumnya. Berikut ini beberapa contohnya:

- Wheeler dkk. (1987) memberikan bukti bahwa dalam kasus-kasus Mahkamah Agung antara tahun 1870 dan 1970 (secara finansial dan organisasi), pihak yang lebih kuat menang atas pihak yang lebih lemah. Kesimpulan ini berlaku untuk berbagai jenis kasus, periode waktu, dan jenis perwakilan hukum.

- Farole (1999) menemukan hasil serupa untuk periode 1975 hingga 1999 dengan peningkatan keberhasilan bagi pemerintah sebagai RP.
- Dunworth dan Rogers (1996) menyimpulkan bahwa dalam litigasi pengadilan federal, perusahaan terbesar mengungguli semua pihak lain, baik sebagai penggugat maupun tergugat. Dalam perbandingan kasus keberagaman, mereka menemukan bahwa bisnis lebih berhasil daripada pihak nonbisnis.
- Hamzehzadeh (2010) menunjukkan bagaimana perkembangan satu pihak yang sama dari OS ke RP disejajarkan dengan peningkatan keberhasilan dalam kasus hukum ketenagakerjaan di berbagai jenis pengadilan.
- Dukungan untuk hipotesis Galanter juga ditemukan di luar AS. Dotan (1999) melaporkan bahwa organisasi dan pemerintah memiliki keuntungan (terbatas) dalam hasil litigasi dari Mahkamah Agung Israel, sementara yang lain menemukan dukungan untuk hipotesis RP untuk kasus Mahkamah Agung Kanada dan Pengadilan Banding Provinsi dan untuk Inggris.

Apakah kesimpulan bahwa teori RP/OS Galanter telah didukung oleh bukti baru dan dapat dilihat sebagai 'terkonfirmasi'? Jawabannya tidak sesederhana itu. Ada bukti bahwa RP tampaknya lebih unggul dalam litigasi dan secara umum hal ini tampaknya berlaku secara internasional, cukup konstan dari waktu ke waktu, berlaku untuk sebagian besar jenis pengadilan, di hampir setiap tahap untuk penggugat dan tergugat. Namun, program penelitian tersebut juga telah menyajikan bukti yang mengkritik inti dari program penelitian ini. Niemeijer (2014) mengemukakan masalah bahwa perbedaan antara apa yang diperoleh kedua kategori (RP/OS) dari sistem hukum terkadang cukup kecil atau tidak terlalu konsisten. Ia mengutip beberapa penelitian untuk menggambarkan hal ini.

KOTAK 9.2 TEORI (KECIL 'T') MENGENAI MEKANISME YANG MENJELASKAN SIAPA YANG MENANG DAN KALAH DALAM LITIGASI, BERDASARKAN GALANTER (1974) DAN NIEMIJER (2014)

Teori pertama adalah bahwa sistem hukum menguntungkan 'orang kaya' yang secara teratur menggunakan pengadilan. RP terlibat dalam banyak litigasi serupa dari waktu ke waktu. 'Orang miskin' biasanya adalah OS individu. Mereka hanya menggunakan pengadilan sesekali, misalnya dalam kasus kecelakaan lalu lintas, masalah sewa atau perceraian.

Penjelasan *kedua* adalah bahwa RP memiliki pengetahuan dan pengalaman yang lebih baik, mampu mengembangkan keahlian dan dapat menyusun transaksi berikutnya. RP memiliki akses ke berbagai macam sumber daya. Mereka memiliki sumber daya material yang lebih unggul dan mampu membayar biaya representasi dan hukum terbaik ('akses yang lebih baik ke pengacara yang lebih baik'). OS memiliki sedikit sumber daya dan, secara umum, cenderung melakukan litigasi untuk hasil yang segera.

Teori 3 membahas jenis pembelajaran sebagai mekanisme penjelasan: RP dapat

mengembangkan strategi litigasi yang komprehensif. Bagi RP, setiap kasus tidaklah terlalu penting.

Ketika mereka memperkirakan peluang mereka kecil dan taruhannya kecil, mereka mungkin memilih untuk menyelesaikannya secara informal; ketika mereka merasa kemungkinan besar akan berhasil, mereka mungkin mengajukan kasus ke pengadilan. Dan ketika RP kalah dalam suatu kasus, mereka dapat membentuk transaksi dengan mempertimbangkan hasil dari kasus sebelumnya.

Teori 4 pada dasarnya mengatakan bahwa RP dapat bermain sesuai aturan. Mereka dapat melobi dan mengajukan litigasi untuk aturan yang menguntungkan. Lebih jauh, RP menyadari aturan mana yang penting bagi mereka dan mencoba membentuk preseden hukum yang menguntungkan mereka. RP mengetahui aturan mana yang mungkin 'menembus' menjadi hukum dalam tindakan.

Teori 5 membahas dua karakteristik penting pengadilan sebagai mekanisme tambahan mengapa RP mendapatkan lebih banyak manfaat dari sistem hukum daripada OS. Yang pertama adalah sifat pengadilan yang pasif. RP lebih siap untuk menavigasi persyaratan prosedural yang ketat, untuk mengartikulasikan argumen mereka dan untuk mengakses dan menyajikan informasi dan bukti yang relevan. Yang kedua adalah beban kerja pengadilan. Hal ini menguntungkan para pihak dengan kemampuan dan sumber daya untuk menanggung beban penundaan. Hal ini sering kali menciptakan tekanan pada OS untuk memilih penyelesaian yang lebih rendah daripada keputusan pengadilan.

Bagian dari program penelitian didedikasikan untuk peran yang dimainkan pemerintah. *Teori 6* pada dasarnya mengatakan bahwa pemerintah adalah RP yang paling sukses dan paling cakap; mereka memiliki sumber daya terbanyak dan mungkin telah mengembangkan keahlian yang lebih besar dalam menangani litigasi dalam beberapa dekade terakhir dan sangat sering muncul di pengadilan sehingga hakim mengenal para aktor dan menganggap mereka sebagai pemain yang dihormati dalam permainan tersebut.

Kesulitan kedua adalah apakah 'orang kaya' dapat diidentifikasi dengan RP. Jelas tidak, menurut Niemeijer. Pengedar narkoba atau pelacur adalah RP, tetapi hampir selalu kalah. Apa yang membuat 'orang kaya' menang: apakah sumber daya atau pengulangan?

Kesulitan ketiga menyangkut relevansi (dan operasionalisasi) dari apa yang dimaksud dengan 'menang di pengadilan'. Van Koppen dan Malsch (1991) mengemukakan bahwa penggugat mungkin menang di pengadilan, tetapi tergugat dan OS mungkin menang juga, karena rendahnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Penelitian mereka menunjukkan bahwa penggugat mengalami kesulitan besar dalam melaksanakan putusan pengadilan. Menurut beberapa peneliti, sudah saatnya untuk mempertimbangkan tahap pelaksanaan

secara sistematis. Meskipun temuan tersebut berkaitan dengan bidang yang berbeda (sanksi peradilan dan program modifikasi perilaku Kementerian Kehakiman Belanda dan Badan Penjara), evaluasi menemukan masalah pelaksanaan yang besar.

Yang akhirnya harus diperhitungkan adalah bahwa semua contoh pada umumnya berkaitan dengan pengadilan tradisional ('berbasis kertas'). Apa yang akan terjadi pada RP dan OS ketika pengadilan elektronik, peradilan elektronik, dan penyelesaian sengketa di dunia digital menjadi cara alami dalam melakukan sesuatu? Dapat dikatakan bahwa karena pengurangan biaya (transaksi) dan penurunan hambatan (budaya dan hukum) untuk memasuki sistem hukum, saat bekerja daring, berbagai hal dapat berubah.

Setelah meninjau 40 tahun kerja dalam program penelitian tersebut, Niemeijer berpendapat bahwa 'tidak ada satu pun penelitian empiris yang benar-benar membuktikan hipotesis Galanter, [sementara] banyak di antaranya mengidentifikasi berbagai jenis komplikasi. Penelitian tersebut telah memperjelas bahwa pernyataan terkenal Galanter terlalu sederhana'.

Merangkum

'Siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam litigasi, bagaimana dan mengapa' telah menjadi pertanyaan inti dari program penelitian berusia 42 tahun yang dikembangkan dalam batasan ELR. Dimulai dengan artikel Galanter pada tahun 1974. Pertanyaan penelitian utama telah dipelajari dari berbagai perspektif, dalam rezim hukum yang berbeda, dengan cakrawala waktu yang berbeda dan dengan menggunakan berbagai desain dan metode. Beberapa teori 't' kecil beredar, meskipun beberapa teori baru dikembangkan dan tidak ada yang sepenuhnya dibuang.

Program penelitian tersebut juga dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan baru. Salah satunya adalah apa yang terjadi setelah putusan pengadilan disampaikan. Pertanyaan lainnya adalah bagaimana implementasi berlangsung selama eksekusi. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengarah pada bukti yang menantang dasar-dasar topik penelitian utama. Kemajuan dalam hal penjelasan baru tidak terjadi, tetapi itu dapat berubah ketika dunia digital terus bergerak maju ke litigasi dan penyelesaian sengketa. Jika tidak, ada bahaya program penelitian yang mandek.

Program Penelitian tentang Kontrak, Perilaku, dan Biaya Transaksi

Lebih dari 50 tahun yang lalu Macaulay (1963) bertanya 'apa gunanya hukum kontrak?' Penelitiannya menunjukkan bahwa hal itu jauh kurang penting dari yang diharapkan. Hasil datang dari studi sosiologis terhadap lebih dari 40 bisnis di Wisconsin (AS) yang menunjukkan bahwa perusahaan sering gagal merencanakan transaksi dengan hati-hati dengan menyediakan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang, dan jarang menggunakan sanksi hukum untuk mengatasi masalah selama pertukaran.

Kontrak tertulis sering kali merupakan dokumen yang sangat standar ('boiler plate contract') yang sebagian besar terbatas pada pembuatnya setelah dirancang oleh departemen hukum dan kemudian jarang dikonsultasikan untuk menyelesaikan sengketa. 'Pengusaha sering kali lebih suka mengandalkan "kata-kata seseorang" dalam surat singkat, jabat tangan, atau "kejujuran dan kesopanan umum", bahkan ketika transaksi melibatkan risiko serius'.

Studi MaCaulay kemudian disebut sebagai 'karya perintis', yang berkontribusi pada perdebatan serius antara aliran pemikiran dalam hukum untuk menjelaskan cara yang tepat untuk mengadakan sengketa kontrak di pengadilan ('kontekstualisme versus formalisme'). Eigen (2012) menyatakan bahwa 'karyanya yang penting' memacu minat dalam eksplorasi sistematis dan empiris tentang kontrak swasta. Karya ini 'menimbulkan pertanyaan penting bagi para sarjana kontrak. Bagaimana hukum kontrak harus menanggapi demonstrasi MaCaulay bahwa hukum kontrak tampaknya tidak terlalu sering digunakan dalam perdagangan?'

Bagaimana MaCaulay menjelaskan temuannya?

MaCaulay menjelaskan tidak digunakannya hukum kontrak dengan menunjukkan bahwa reputasi adalah jaminan terpenting untuk pelaksanaan kontrak dan bahwa rasa takut kehilangan reputasi yang baik, biasanya, jauh lebih unggul daripada upaya hukum yang mahal dan memakan waktu. Ia menunjuk pada tekanan kelembagaan untuk melaksanakan dan kebanggaan mereka yang terlibat dalam bisnis sebagai kekuatan kuat yang beroperasi untuk memastikan pelaksanaan tersebut.

Ia juga mencatat bahwa perusahaan yang diselidikinya sering menggunakan kontrak sebagai perangkat birokrasi untuk mengendalikan cara kerja internal organisasi yang kompleks daripada terutama sebagai alat yang dirancang untuk memastikan pelaksanaan. MaCaulay menekankan tidak hanya bahwa hukum kontrak jarang digunakan; ia juga menyoroti dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh penggunaannya terhadap transaksi bisnis dan hubungan bisnis.

Penjelasan ini memicu banjir karya empiris dan teoritis tentang penggunaan dan tidak digunakannya hukum kontrak (di pasar). Apakah program penelitian telah dikembangkan dan pertumbuhan pengetahuan terwujud dalam 'banjir karya empiris dan teoritis' ini? Tanpa mengklaim kelengkapan, program semacam itu ada dan mencakup kegiatan-kegiatan berikut:

- Memeriksa apakah dalam situasi lain selain situasi Wisconsin tahun 1963 (negara/jenis perusahaan/periode waktu dan rezim hukum) 'fenomena macaulay' ada (dan masih ada);
- Mengembangkan dan menguji penjelasan (yaitu teori tentang bagaimana temuan (baru) dapat dijelaskan).

9.3 PEMERIKSAAN ULANG BUKTI

Sejumlah penelitian telah dipublikasikan selama 50 tahun terakhir yang membahas masalah ini. Di sini kami hanya merujuk pada beberapa saja. Braucher dkk (2013) meninjau kembali kajian kontrak MaCaulay, dan juga menghadirkan materi empiris baru. Penelitian lain dilakukan oleh Blegvad (1990) yang melakukan studi percontohan di Denmark yang mengonfrontasi MaCaulay dengan materi dari Denmark. Bozovic dan Hadfield (2012) mempelajari 'masalah kontrak' dan menyelidiki pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan

inovasi. 'Mengikuti jejak MaCaulay, kami melakukan wawancara semi-terstruktur dengan 30 bisnis di California dan meminta mereka untuk membahas bagaimana mereka mengelola hubungan eksternal yang penting.

Apakah mereka menyusun kontrak formal? Peran apa yang dimainkan oleh perjanjian formal dalam menanggapi isu-isu yang muncul dalam hubungan dari waktu ke waktu?' Rooks et al (2000) mengakui pentingnya karya MaCaulay, tetapi juga memperhatikan bahwa 'relatif sedikit penelitian empiris kuantitatif yang muncul yang secara sistematis membahas penjelasan intuitifnya'. Weber dan Mayer (2011) menyarankan perspektif yang lebih bernuansa tentang dampak aktual kontrak:

Pekerjaan yang membedah kontrak menunjukkan bahwa beberapa klausul memainkan peran koordinasi, yang tidak menimbulkan ketidakpercayaan antara para pihak, sementara klausul lain mengurangi oportuniste dan mungkin menimbulkan hambatan untuk pengembangan kepercayaan . . . Selain itu, penelitian lain telah menunjukkan bahwa beberapa perusahaan menambahkan lebih banyak deskripsi tugas dan detail proses ke dalam kontrak mereka tanpa berdampak negatif pada hubungan mereka, karena kedua belah pihak belajar untuk menulis kontrak yang lebih efektif satu sama lain.

Terakhir, Lumineau (2014), yang setuju dengan pendapat MaCaulay bahwa 'memperkenalkan kontrak dapat menandakan niat buruk, sehingga mengganggu apa yang seharusnya menjadi siklus kepercayaan dan timbal balik yang mengarah pada pengembangan kepercayaan bersama, mengembangkan beberapa proposisi tentang bagaimana pengendalian dan koordinasi dimensi kontrak formal memengaruhi kepercayaan dan ketidakpercayaan dengan cara yang berbeda dengan mendorong mekanisme pemrosesan informasi dan pengambilan keputusan tertentu'.

Mengembangkan dan menguji penjelasan tentang peran kontrak

Penulis pertama yang dirujuk adalah Williamson (2009). Meskipun karya MaCaulay bukan satu-satunya sumber yang ia gunakan dalam karyanya tentang bagaimana orang dan organisasi mengelola dan menegakkan kolaborasi dan koordinasi yang efektif tanpa hanya bergantung pada hukum, pengadilan, dan kontrak eksternal, sementara pada saat yang sama harus menghadapi oportuniste dan bahaya lainnya, Williamson mengutip karya MaCaulay sebagai 'kontribusi signifikan' yang membantu mengatur latar belakang. Teori komitmen kredibel Williamson (juga dikenal sebagai model sandera) dipandang sebagai langkah maju yang besar terhadap makalah tahun 1963 oleh MaCaulay.

Mekanisme utamanya adalah sebagai berikut. Dalam banyak kasus, para aktor mengalami kesulitan mencapai solusi kooperatif dalam hubungan timbal balik mereka karena mereka tidak mampu berkomitmen secara kredibel sebelumnya untuk bertindak dengan cara yang disepakati atau ditentukan. Ada beberapa alasan mengapa janji seorang aktor untuk berperilaku kooperatif mungkin tidak dipercaya oleh orang lain. Misalnya, adanya komitmen sinis – janji dapat dibuat oleh para aktor tanpa niat untuk memenuhinya.

Masalah lain muncul dari preferensi yang tidak konsisten dari waktu ke waktu (seorang aktor mungkin ingin berjanji untuk berperilaku kooperatif di masa sekarang, tetapi di masa mendatang mungkin rasional untuk mengubah niat perilaku). Apa saja pilihan bagi para aktor yang ingin menikmati keuntungan bersama dari tindakan tertentu? Teori komitmen kredibel menekankan perlunya meningkatkan biaya pembelotan *ex post* dan dengan demikian mengurangi 'bahaya pembatalan'. 'Komitmen yang kredibel terkadang muncul secara spontan, seperti ketika riwayat pengalaman baik dengan seorang pedagang menghasilkan efek reputasi yang positif.

Namun, sering kali, komitmen yang kredibel terbentuk ketika pelaku ekonomi secara sadar menyetujui mekanisme yang memberikan jaminan tambahan. Mekanisme ini dapat berupa mekanisme pengungkapan informasi dan audit, pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa khusus, di mana para pihak lebih mengandalkan perintah pribadi daripada perintah pengadilan dan terkadang melibatkan penyanderaan untuk mendukung pertukaran'. Contoh penyanderaan adalah kepemilikan sebagian dalam organisasi yang bekerja sama atau pembagian pendapatan.

Model Williamson telah diuji secara empiris di berbagai bidang dan sangat berpengaruh dalam memandu analisis dan interpretasi empiris dari pengaturan kontrak 'nonstandar'. Model ini merupakan bagian dari pendekatan teoritis menyeluruh, yang dikenal sebagai ekonomi biaya transaksi (TCE), yang juga telah diterapkan di dunia nonhukum, seperti yang ditunjukkan oleh program penelitian sosiologi (mini) (mantan) 'manajemen pertandingan'.

TCE bukan satu-satunya pendekatan baru yang terkait dengan dan menangani masalah MacCaulay. MacCaulay dan MacNeil mengembangkan teori lain yang membantu menjelaskan hasil empiris: teori kontrak relasional. Teori ini dicirikan oleh pandangan kontrak sebagai hubungan daripada sebagai transaksi terpisah.

Kontrak relasional adalah kontrak yang efeknya didasarkan pada hubungan kepercayaan antara para pihak. Ketentuan eksplisit kontrak merupakan garis besar karena ada ketentuan dan pemahaman implisit yang menentukan perilaku para pihak. MacNeil (1980) merujuk pada 'kontrak berdasarkan hukum' (yaitu, kontrak yang dapat diberlakukan oleh sistem hukum) sebagai bagian yang sangat kecil dari keseluruhan jaringan kontrak di dunia modern, termasuk pernikahan, birokrasi, dan negara.

MacCaulay (1963) menemukan bahwa (Amerika) 'para pengusaha sering kali lebih suka mengandalkan "kata-kata seseorang" dalam surat singkat, jabat tangan, atau "kejujuran dan kesopanan umum" bahkan ketika transaksi melibatkan paparan risiko serius'. Ini adalah awal dari program penelitian yang mencari tahu apakah situasi di luar Wisconsin kurang lebih sama, bagaimana situasi berkembang dari waktu ke waktu, dan apa yang menyebabkannya, bahkan tanpa kontrak, hubungan (bisnis) yang rumit dapat berjalan dengan sukses.

Teori 1 (MacCaulay) menunjuk pada kepercayaan, reputasi, dan biaya kontrak yang tinggi. **Teori 2** (komitmen kredibel Williamson/penyanderaan) dikembangkan lebih lanjut untuk memperluas teori 1 (menciptakan konten informatif yang berlebihan), sementara untuk sejumlah besar bidang, teori 2 diuji dan – sering kali – dikonfirmasi. Meskipun kami tidak

membahas poin ini, elemen lain dari pertumbuhan pengetahuan yang dihasilkan dalam program penelitian ini adalah bahwa saran untuk model tata kelola dan pengaturan kontraktual ('pengisian celah') telah dikembangkan.

Program Penelitian 'Menjelaskan Terorisme (Radikal Islam)'

Program penelitian (mini) yang baru-baru ini dikembangkan membahas pertanyaan tentang bagaimana menjelaskan perilaku teroris (radikal Islam). Program ini berawal dari 'kearifan umum' bahwa:

teroris cenderung memiliki latar belakang sosial yang 'normal' dan tidak mengalami gangguan mental. [Hal ini] telah diterima secara luas di kalangan peneliti terorisme. Studi tentang teroris Italia, Jerman, dan Irlandia gagal memberikan bukti adanya psikopatologi atau kepribadian teroris yang utama; khususnya, banyak teroris memiliki latar belakang kelas menengah yang biasa-biasa saja. Setelah 9/11, studi tentang terorisme jihad tampaknya mengonfirmasi gambaran normalitas teroris ini. Menolak teori Neo-Freudian yang menyatakan teroris menderita narsisme patologis, paranoia, atau gangguan kepribadian otoriter, Sageman (2004) menyimpulkan, 'teroris ternyata normal dalam hal kesehatan mental'. Silke (2008) dalam tinjauan studi tentang psikologi jihadis (khususnya yang dilakukan Sageman (2004) dan Bakker (2006)) sampai pada kesimpulan yang sama.

Weenink menantang 'kearifan umum' ini. 'Bakker (2006), misalnya, menemukan bahwa penyakit mental terlalu banyak ditemukan dalam sampel jihadis Eropa. Venhaus (2010), dalam sampel besar pejuang asing, tidak menemukan 'tanda-tanda psikosis klinis', tetapi mencatat bahwa 'perilaku antisosial jelas ada pada semuanya'. Merari (2010) juga menemukan bahwa 'meskipun tidak ada calon bunuh diri yang didiagnosis sebagai psikotik, sebagian besar dari mereka memiliki ciri-ciri kepribadian yang membuat mereka lebih mudah direkrut untuk misi bunuh diri'. Di Belanda, berdasarkan berkas dari investigasi kriminal terhadap jaringan jihadis Belanda, De Poot dan Sonnenschein (2011) menemukan bahwa banyak subjek memiliki catatan kriminal, pernah menjadi pecandu narkoba, dan telah mencapai prestasi pendidikan yang lebih rendah.

Di Jerman, berdasarkan wawancara dengan 39 ekstremis dan teroris terpidana dari latar belakang ideologis yang berbeda (dua puluh empat ekstremis sayap kanan, sembilan sayap kiri, dan enam ekstremis berorientasi Islam) Lützinger (2012) menemukan bahwa mereka 'tidak menunjukkan ciri-ciri patologis apa pun'; Namun, ia juga mencatat bahwa 'semua individu dalam kelompok kami mengalami perkembangan tidak teratur yang sama dan menunjukkan perilaku menyimpang yang sama selama sosialisasi pertama dan kedua (keluarga dan sekolah) seperti pelaku lainnya yang tidak serta merta menjadi ekstremis atau teroris'. Bouzar et al (2014) menemukan bahwa 40% jihadis dalam sampel Prancis menderita depresi.

Studi-studi ini berbeda dalam desain dan hasil, tetapi secara keseluruhan,

menunjukkan bahwa latar belakang sosial dan psikologis teroris cenderung menyimpang dari rata-rata. Kaum radikal Islam berasal dari strata sosial yang kurang beruntung, dan meskipun sebagian besar dari mereka tidak sakit mental, banyak yang memiliki riwayat perilaku bermasalah dan latar belakang yang bermasalah. Simi et al (2015) yang melakukan 'wawancara riwayat hidup' intensif dengan 44 mantan anggota kelompok supremasi kulit putih yang kejam yang tinggal di 15 negara bagian berbeda di seluruh AS, menemukan hal ini:

Meskipun ekstremisme kekerasan baru-baru ini mulai menerima pengawasan yang lebih ketat, lebih sedikit perhatian telah diberikan untuk memahami bagaimana faktor-faktor non-ideologis memengaruhi proses bergabung dengan kelompok ekstremis dan permulaan melakukan kejahatan kekerasan. Hampir 62% dari subjek wawancara melaporkan telah mencoba bunuh diri dan/atau secara serius mempertimbangkan bunuh diri; 57% dari sampel melaporkan mengalami masalah kesehatan mental sebelum atau selama keterlibatan mereka dengan ekstremis dan 59% melaporkan riwayat keluarga dengan masalah kesehatan mental.

Hipotesis kenormalan terorisme (ekstremis) (radikal Islam), yang dapat ditemukan dalam buku pegangan dan buku teks (dan dalam laporan pemerintah) tampaknya jauh lebih tidak jelas daripada yang diyakini saat ini. Hipotesis ini mengatakan bahwa teroris ekstremis (radikal Islam) tidak mengalami gangguan mental dan bahkan cukup normal. Masalah kesehatan mental, aspek psikopatologi, dan masalah perilaku sebelumnya diyakini tidak relevan dalam memahami (dan memprediksi) perilaku teroris ekstremis. Weenink (2015) dan Simi (2015) telah mulai membantah keyakinan ini dan menghubungkan perilaku ini dengan biokriminologi perilaku kekerasan:

Singkatnya, kriminologi biososial memiliki banyak potensi tidak hanya untuk meningkatkan pemahaman tentang kekerasan dan terorisme, tetapi juga untuk pencegahan keduanya. Penelitian lebih lanjut di bidang ini dapat meningkatkan, serta menginspirasi, solusi antiterorisme. Sejauh faktor-faktor seperti ketidakadilan, keluhan, ketidakadilan, ketidakadilan, iri hati, dan dendam terkait dengan penyebab terorisme, setidaknya ada bukti moderat bahwa penyebab ini memiliki hubungan biologis dengan apa yang sering keliru dianggap sebagai pengaruh lingkungan semata. Tidak ada kasus yang mungkin sepenuhnya didorong oleh faktor biologis, tetapi beberapa masalah terorisme mungkin didorong oleh kombinasi faktor biologis dan sosiologis.

Subjek lain yang menjadi minat bersama adalah peran pelecehan dan penelantaran anak, yang tampaknya menjadi korban banyak radikal Islam, dan yang diketahui memengaruhi perkembangan neurologis. Ini bukan berarti kita mengharapkan ilmu saraf untuk mengidentifikasi faktor risiko biologis yang berkontribusi langsung terhadap radikalisasi atau

perilaku teroris, tetapi kita berpikir faktor-faktor tersebut harus dianggap sebagai bagian penting dari teka-teki.

Berbagai faktor risiko biologis, psikologis, dan sosial dapat berinteraksi dalam membentuk kekerasan atau kepahlawanan yang mengorbankan diri. Kekerasan dan terorisme bukan sekadar gairah fisiologis yang rendah, namun ini tentu saja merupakan salah satu unsur aktif yang, jika dikombinasikan dengan pengaruh lain, dapat menggerakkan kita menuju pemahaman yang lebih lengkap tentang para pembunuh.

Meskipun bukti empiris masih bersifat eksploratif dan terbatas, studi kasus 4 ini menunjukkan kemungkinan adanya pergeseran masalah teoritis yang progresif. Untuk menjelaskan mengapa beberapa orang melakukan serangan radikal dan kekerasan ekstrem sementara yang lain tidak, tidak dapat dijelaskan secara memadai ketika wawasan biososial diabaikan dan satu-satunya jalur teoritis yang diikuti adalah mencari faktor sosiologis, ekonomi, dan/atau agama. Program penelitian ini membuka cakrawala baru untuk menyelidiki ilmu saraf sosial dan biopsikiatri, khususnya yang berkaitan dengan pemahaman psikopatologi teroris dan sifat tidak berperasaan-tidak emosional (CU). Ciri-ciri ini sering dianggap sebagai fitur utama untuk konstruksi psikopati yang lebih luas.

Kesimpulan

Penelitian hukum empiris sedang berkembang, jika tidak sedang berkembang pesat. Sketsa kami tentang empat program penelitian (tentang kontrak dan penggunaannya, litigasi dan konsekuensinya, kekerasan dalam rumah tangga, dan cara menjelaskan terorisme ekstremis (radikal Islam)) menunjukkan bahwa ini adalah indikator pertumbuhan pengetahuan. Kami pikir banyak program penelitian lain dapat ditemukan di ELR, seperti penelitian tentang residivisme, mengevaluasi dampak sanksi pidana, kriminologi eksperimental, tata kelola transnasional dan konsekuensinya, ilmu sipil eksperimental, ilmu saraf dan hukum saraf, dan hipotesis (LLSV) (yang menyiratkan bahwa negara-negara hukum umum menawarkan perlindungan investasi yang lebih baik daripada negara-negara hukum perdata) untuk menyebutkan beberapa. Meskipun ini mungkin tampak seperti cerita yang menyenangkan, tidak banyak yang dapat dikatakan tentang generalisasi dari empat kasus kemajuan pengetahuan.

Mengingat luasnya dan lebarnya ELR, hanya penyelidikan sistematis yang mampu melakukan hal itu, yang harus mencakup relevansi, penerapan, dan penggunaan untuk praktik hukum dan dunia kebijakan. Dan studi sistematis semacam itu harus didasarkan pada tinjauan sistematis dan sintesis studi yang ada, seperti yang telah kita bahas di Bab 5. Untungnya, peneliti ELR tidak sendirian dalam melakukan pekerjaan itu: basis data dan ruang data, perangkat lunak untuk analisis konten dan jenis analisis data lainnya, repositori pengetahuan, dan profesi khusus baru seperti pustakawan hukum penelitian empiris (juga dikenal sebagai empiris perpustakaan hukum) dapat membantu. [ELR] sangat menjanjikan di beberapa bidang. [ELR] dapat memberikan pengetahuan sistematis tentang aspek penting masyarakat – sistem hukum – yang serupa dengan pengetahuan yang tersedia tentang fitur-fitur utama masyarakat lainnya, seperti ekonomi, kejahatan, dan perawatan kesehatan. Fitur-fitur lainnya ini memiliki

sistem pengumpulan data yang sangat maju yang mengerdilkan informasi yang tersedia tentang sistem hukum. ELR dapat menyediakan lingkungan intelektual umum tempat para akademisi dari berbagai disiplin ilmu berkomunikasi dan berkolaborasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkin, M. C., & Taut, S. (2013). *Evaluation essentials: From A to Z*. Guilford Press.
- Babbie, E. (2010). *The practice of social research* (12th ed.). Cengage Learning.
- Babbie, E. (2016). *The practice of social research* (14th ed.). Cengage Learning.
- Babbie, E. (2017). *The basics of social research* (7th ed.). Cengage Learning.
- Bassey, M. (1999). *Case study research in educational settings*. Open University Press.
- Birkland, T. A. (2016). *An introduction to the policy process: Theories, concepts, and models of public policy making* (4th ed.). Routledge.
- Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (2016). *Qualitative research for education: An introduction to theories and methods* (6th ed.). Pearson.
- Bowers, A. A., & Henn, M. (2018). *Research methods in criminal justice and criminology*. Pearson.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- De Vaus, D. A. (2013). *Research design in social research*. SAGE Publications.
- Denscombe, M. (2017). *The good research guide: For small-scale social research projects* (6th ed.). Open University Press.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). *The SAGE handbook of qualitative research* (5th ed.). SAGE Publications.
- Flick, U. (2014). *An introduction to qualitative research* (5th ed.). SAGE Publications.
- Flick, U. (2018). *An introduction to qualitative research* (6th ed.). SAGE Publications.
- Gerring, J. (2012). *Social science methodology: A unified framework*. Cambridge University Press.
- Gerring, J. (2017). *Case study research: Principles and practices*. Cambridge University Press.
- Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1994). *Competing paradigms in qualitative research*. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), *Handbook of qualitative research* (pp. 105-117). SAGE Publications.
- Hagan, F. E. (2017). *Research methods in criminal justice and criminology* (10th ed.). Pearson.
- Hammersley, M., & Atkinson, P. (2007). *Ethnography: Principles in practice* (3rd ed.). Routledge.
- Hart, H. L. A. (1994). *The concept of law* (2nd ed.). Oxford University Press.

- Henn, M., Weinstein, M., & Foard, N. (2009). *A short introduction to social research*. SAGE Publications.
- Hennink, M., Hutter, I., & Bailey, A. (2011). *Qualitative research methods*. SAGE Publications.
- Jupp, V. (2006). *The SAGE dictionary of social research methods*. SAGE Publications.
- Kothari, C. R. (2004). *Research methodology: Methods and techniques* (2nd ed.). New Age International.
- Kvale, S., & Brinkmann, S. (2015). *InterViews: Learning the craft of qualitative research interviewing* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Lofland, J., Snow, D. A., Anderson, L. L., & Lofland, L. H. (2006). *Analyzing social settings: A guide to qualitative observation and analysis* (4th ed.). Wadsworth.
- Lune, H., & Berg, B. L. (2017). *Qualitative research methods for the social sciences* (6th ed.). Pearson.
- Marshall, C., & Rossman, G. B. (2016). *Designing qualitative research* (6th ed.). SAGE Publications.
- May, T. (2011). *Social research: Issues, methods and process* (4th ed.). Open University Press.
- Mertens, D. M. (2014). *Research and evaluation in education and psychology: Integrating diversity with quantitative, qualitative, and mixed methods* (4th ed.). SAGE Publications.
- Neuman, W. L. (2011). *Social research methods: Qualitative and quantitative approaches* (7th ed.). Pearson.
- Neuman, W. L. (2014). *Social research methods: Qualitative and quantitative approaches* (7th ed.). Pearson.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods* (4th ed.). SAGE Publications.
- Punch, K. F. (2014). *Introduction to social research: Quantitative and qualitative approaches* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Ritchie, J., & Lewis, J. (2003). *Qualitative research practice: A guide for social science students and researchers*. SAGE Publications.
- Ritchie, J., Lewis, J., Nicholls, C. M., & Ormston, R. (2013). *Qualitative research practice: A guide for social science students and researchers*. SAGE Publications.
- Robson, C. (2011). *Real world research* (3rd ed.). Wiley.
- Robson, C., & McCartan, K. (2016). *Real world research* (4th ed.). Wiley.
- Silverman, D. (2013). *Doing qualitative research* (4th ed.). SAGE Publications.
- Silverman, D. (2016). *Qualitative research* (4th ed.). SAGE Publications.
- Sutherland, E. H. (1947). *Principles of criminology* (4th ed.). J.B. Lippincott Company.
- Sutherland, E. H., & Cressey, D. R. (1978). *Principles of criminology* (3rd ed.). Lippincott.
- Tashakkori, A., & Teddlie, C. (2010). *SAGE handbook of mixed methods in social & behavioral research*.

SAGE Publications.

Teddlie, C., & Tashakkori, A. (2009). *Foundations of mixed methods research: Integrating quantitative and qualitative approaches in the social and behavioral sciences*. SAGE Publications.

Thomas, G. (2017). *How to do your research project: A guide for students* (2nd ed.). SAGE Publications.

Trochim, W. M. K. (2006). *The research methods knowledge base* (2nd ed.). Atomic Dog Publishing.

Van Maanen, J. (2011). *Tales of the field: On writing ethnography* (2nd ed.). University of Chicago Press.

Wengraf, T. (2001). *Qualitative research interviewing: Biographic narrative and semi-structured methods*. SAGE Publications.

Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). S

DAFTAR PUSTAKA

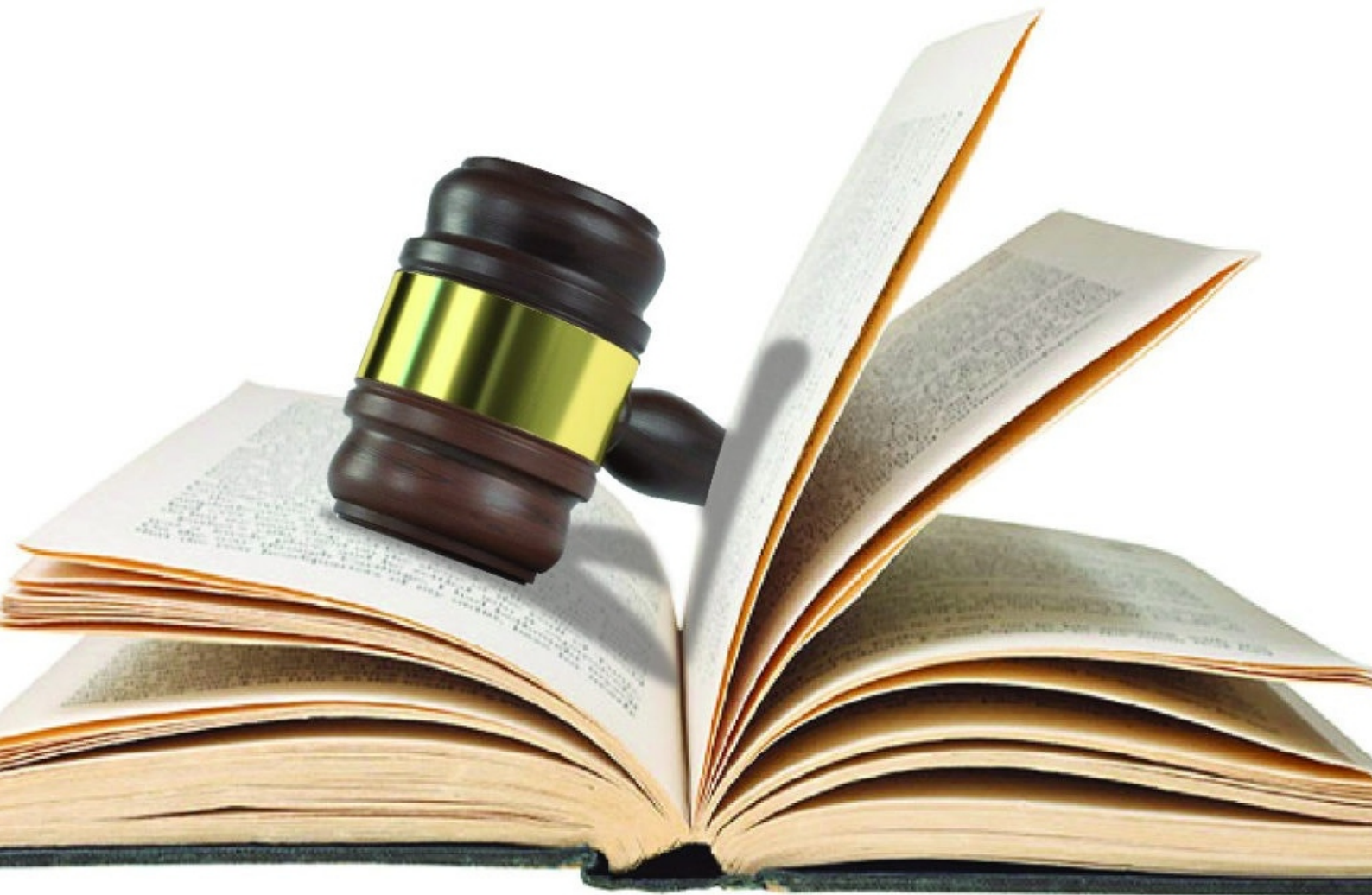
- Alkin, M. C., & Taut, S. (2013). *Evaluation essentials: From A to Z*. Guilford Press.
- Babbie, E. (2010). *The practice of social research* (12th ed.). Cengage Learning.
- Babbie, E. (2016). *The practice of social research* (14th ed.). Cengage Learning.
- Babbie, E. (2017). *The basics of social research* (7th ed.). Cengage Learning.
- Bassey, M. (1999). *Case study research in educational settings*. Open University Press.
- Birkland, T. A. (2016). *An introduction to the policy process: Theories, concepts, and models of public policy making* (4th ed.). Routledge.
- Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (2016). *Qualitative research for education: An introduction to theories and methods* (6th ed.). Pearson.
- Bowers, A. A., & Henn, M. (2018). *Research methods in criminal justice and criminology*. Pearson.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- De Vaus, D. A. (2013). *Research design in social research*. SAGE Publications.
- Denscombe, M. (2017). *The good research guide: For small-scale social research projects* (6th ed.). Open University Press.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). *The SAGE handbook of qualitative research* (5th ed.). SAGE Publications.
- Flick, U. (2014). *An introduction to qualitative research* (5th ed.). SAGE Publications.
- Flick, U. (2018). *An introduction to qualitative research* (6th ed.). SAGE Publications.
- Gerring, J. (2012). *Social science methodology: A unified framework*. Cambridge University Press.
- Gerring, J. (2017). *Case study research: Principles and practices*. Cambridge University Press.
- Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1994). *Competing paradigms in qualitative research*. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), *Handbook of qualitative research* (pp. 105-117). SAGE Publications.
- Hagan, F. E. (2017). *Research methods in criminal justice and criminology* (10th ed.). Pearson.
- Hammersley, M., & Atkinson, P. (2007). *Ethnography: Principles in practice* (3rd ed.). Routledge.

- Hart, H. L. A. (1994). *The concept of law* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Henn, M., Weinstein, M., & Foard, N. (2009). *A short introduction to social research*. SAGE Publications.
- Hennink, M., Hutter, I., & Bailey, A. (2011). *Qualitative research methods*. SAGE Publications.
- Jupp, V. (2006). *The SAGE dictionary of social research methods*. SAGE Publications.
- Kothari, C. R. (2004). *Research methodology: Methods and techniques* (2nd ed.). New Age International.
- Kvale, S., & Brinkmann, S. (2015). *InterViews: Learning the craft of qualitative research interviewing* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Lofland, J., Snow, D. A., Anderson, L. L., & Lofland, L. H. (2006). *Analyzing social settings: A guide to qualitative observation and analysis* (4th ed.). Wadsworth.
- Lune, H., & Berg, B. L. (2017). *Qualitative research methods for the social sciences* (6th ed.). Pearson.
- Marshall, C., & Rossman, G. B. (2016). *Designing qualitative research* (6th ed.). SAGE Publications.
- May, T. (2011). *Social research: Issues, methods and process* (4th ed.). Open University Press.
- Mertens, D. M. (2014). *Research and evaluation in education and psychology: Integrating diversity with quantitative, qualitative, and mixed methods* (4th ed.). SAGE Publications.
- Neuman, W. L. (2011). *Social research methods: Qualitative and quantitative approaches* (7th ed.). Pearson.
- Neuman, W. L. (2014). *Social research methods: Qualitative and quantitative approaches* (7th ed.). Pearson.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods* (4th ed.). SAGE Publications.
- Punch, K. F. (2014). *Introduction to social research: Quantitative and qualitative approaches* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Ritchie, J., & Lewis, J. (2003). *Qualitative research practice: A guide for social science students and researchers*. SAGE Publications.
- Ritchie, J., Lewis, J., Nicholls, C. M., & Ormston, R. (2013). *Qualitative research practice: A guide for social science students and researchers*. SAGE Publications.
- Robson, C. (2011). *Real world research* (3rd ed.). Wiley.
- Robson, C., & McCartan, K. (2016). *Real world research* (4th ed.). Wiley.
- Silverman, D. (2013). *Doing qualitative research* (4th ed.). SAGE Publications.
- Silverman, D. (2016). *Qualitative research* (4th ed.). SAGE Publications.
- Sutherland, E. H. (1947). *Principles of criminology* (4th ed.). J.B. Lippincott Company.

- Sutherland, E. H., & Cressey, D. R. (1978). *Principles of criminology* (3rd ed.). Lippincott.
- Tashakkori, A., & Teddlie, C. (2010). *SAGE handbook of mixed methods in social & behavioral research*. SAGE Publications.
- Teddlie, C., & Tashakkori, A. (2009). *Foundations of mixed methods research: Integrating quantitative and qualitative approaches in the social and behavioral sciences*. SAGE Publications.
- Thomas, G. (2017). *How to do your research project: A guide for students* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Trochim, W. M. K. (2006). *The research methods knowledge base* (2nd ed.). Atomic Dog Publishing.
- Van Maanen, J. (2011). *Tales of the field: On writing ethnography* (2nd ed.). University of Chicago Press.
- Wengraf, T. (2001). *Qualitative research interviewing: Biographic narrative and semi-structured methods*. SAGE Publications.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). S

Dr. Agus Wibowo, M.Kom, M.Si, MM.

PENELITIAN dalam **ILMU HUKUM**



YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK

PENERBIT :

YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK
Jl. Majapahit No. 605 Semarang
Telp. (024) 6723456. Fax. 024-6710144
Email : penerbit_ypat@stekom.ac.id